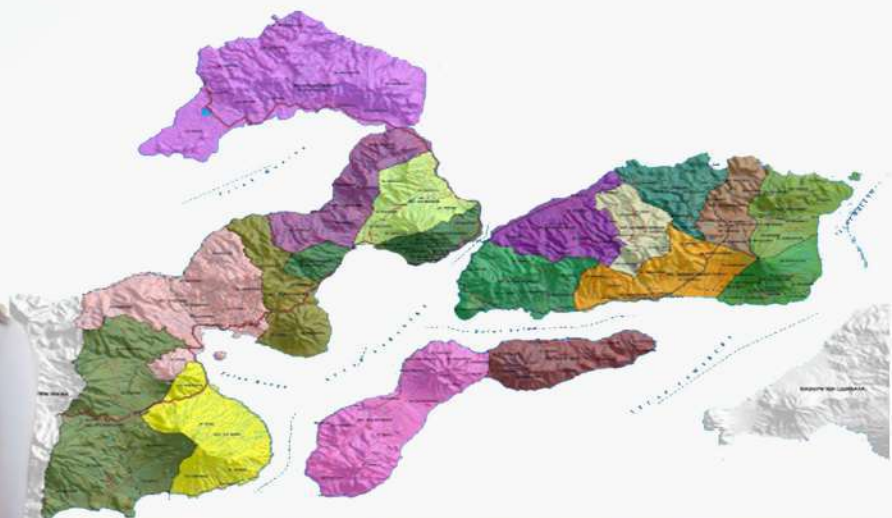




PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025 - 2029



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Salam Pembangunan, Salam Lompatan Jauh Flores Timur . . .

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah. Dalam periode perencanaan pembangunan jangka panjang Tahun 2025-2045, RPJMD Tahun 2025-2029 memiliki peran strategis sebagai periode pertama dengan fokus "Perkuatan Fondasi Transformasi" menuju Indonesia Emas. Sebagai upaya mewujudkan cita-cita jangka panjang daerah, visi pembangunan jangka menengah daerah Flores Timur yang ingin dicapai dalam RPJMD Tahun 2025-2029 adalah *"Flores Timur Produktif dan Inovatif menuju Lewotana Flores Timur yang Maju, Berdaya dan Berkelanjutan"*, melalui misi "Lompatan Produktivitas semua sektor kehidupan dengan mengandalkan ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru, kecerdasan inovatif, tata kelola transformatif dan kearifan Lamaholot paling jernih".

Kebijakan pembangunan Flores Timur dalam RPJMD Tahun 2025-2029 dengan spirit Lompatan Jauh Flores Timur harus menjadi spirit dan komitmen bersama seluruh masyarakat dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan Lewotana Flores Timur. Kebijakan *big push* (dorongan besar) pada potensi daerah, berlandaskan pada sumber daya alam yang dimiliki, budaya Lamaholot dan spirit *gemohing* (gotong royong), partisipasi dan kolaborasi menjadi langkah strategis lompatan jauh menuju kesejahteraan Flores Timur.

Sebagai upaya sistematis untuk mencapai visi daerah tersebut, RPJMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2025-2029 disusun dengan kajian komprehensif, melibatkan seluruh elemen masyarakat, dan memperhatikan jadwal, mekanisme, dan tahapan berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Proses penyusunan dokumen RPJMD ini kurang lebih dilaksanakan selama 6 (enam) bulan pasca pelantikan Bupati dan Wakil Bupati periode Tahun 2025-2030 pada tanggal 20 Februari 2025. Banyak pihak telah mencurahkan waktu, tenaga dan pikiran dalam penyusunan sampai penetapan dokumen RPJMD melalui Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029. Oleh karena itu sudah sepantasnya kita panjatkan Puji dan Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, serta apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang dengan caranya masing-masing telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen RPJMD ini.

Akhir kata, kiranya RPJMD Tahun 2025-2029 dengan spirit "Lompatan Jauh Flores Timur" dapat menjadi pedoman bagi seluruh pelaku pembangunan dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang inklusif untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan Lewotana Flores Timur.

Sekian dan Terima Kasih.

Larantuka, Agustus 2025

Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Flores Timur,



Apolonia Corebima, SE., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690718 199703 2 002



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
PERATURAN DAERAH	
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I-4
1.3 Hubungan Antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya	I-8
1.3.1 Hubungan Dengan RPJMN 2025-2029	I-9
1.3.2 Hubungan Dengan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029	I-10
1.3.3 Hubungan Dengan RPJPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2025-2045	I-10
1.3.4 Hubungan Dengan Dokumen RTRW Kabupaten Flores Timur Tahun 2007-2027	I-11
1.3.5 RPJMD Kabupaten Flores Timur Dengan Perencanaan Lainnya.....	I-12
1.4 Maksud dan Tujuan	I-13
1.4.1 Maksud	I-13
1.4.2 Tujuan.....	I-13
1.5 Sistematika Penulisan	I-13
BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH	II-1
2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah	II-1
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II-50
2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah.....	II-76
2.1.4 Aspek Pelayanan Umum	II-86
2.2 Gambaran Keuangan Daerah	II-108
2.2.1 Kinerja Pelaksanaan APBD	II-108
2.2.2 Proyeksi Keuangan Daerah Lima Tahun ke Depan.....	II-115
2.3 Permasalahan dan Isu Strategis	II-120
2.3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah.....	II-120
2.3.2 Isu Strategis.....	II-126

BAB III	VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	III-1
3.1	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	III-1
3.1.1	Visi dan Misi	III-1
3.1.2	Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.....	III-9
3.2	Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	III-31
3.2.1	Strategi dan Arah Kebijakan	III-31
3.2.2	Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	III-47
BAB IV	PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	IV-1
4.1	Program Perangkat Daerah.....	IV-1
4.2	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	V-39
BAB V	PENUTUP	V-1
5.1	Kaidah Pelaksanaan.....	V-1
5.2	Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan.....	V-2
5.3	Pedoman Transisi.....	V-3
5.4	Perubahan RPJMD.....	V-4

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1	Jumlah Desa/Kelurahan dan Luas Wilayah Kecamatan Kabupaten Flores Timur Tahun 2024..... II-1
Tabel 2.2	Tutupan Lahan Eksisting Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 II-3
Tabel 2.3	Luas Wilayah Berdasarkan Kemiringan/Kelerengan Lahan Per Kecamatan Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 II-4
Tabel 2.4	Luas Wilayah Berdasarkan Ketinggian Per Kecamatan Kabupaten Flores Timur Tahun 2024..... II-5
Tabel 2.5	Kondisi Klimatologi Kabupaten Flores Timur, 2020-2024..... II-7
Tabel 2.6	Potensi Air Baku Yang Dimanfaatkan Perumda Air Minum Ina Gelekat Kabupaten Flores Timur..... II-7
Tabel 2.7	Daerah Aliran Sungai Kabupaten Flores Timur II-8
Tabel 2.8	Data Cekungan Air Menurut Kecamatan Tahun 2020 di Kabupaten Flores Timur II-9
Tabel 2.9	Persebaran Kondisi Geologi Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 II-10
Tabel 2.10	Jenis Tanah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 II-12
Tabel 2.11	Bentang Alam Karst Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 II-12
Tabel 2.12	Luas Kawasan Hutan di Kabupaten Flores Timur..... II-13
Tabel 2.13	Produksi Tanaman Pangan (Ton) di Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2024 II-14
Tabel 2.14	Produksi Tanaman Holtikultura (Ton) di Kabupaten Flores Timur Tahun 2022-2024 II-15
Tabel 2.15	Luas Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) di Kabupaten Flores Timur..... II-16
Tabel 2.16	Produksi Hasil Perkebunan (Ton) di Kabupaten Flores Timur, Tahun 2023-2024 II-16
Tabel 2.17	Produksi Ternak (Ekor) di Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 II-17
Tabel 2.18	Produksi Perikanan Tangkap Kabupaten Flores Timur Tahun 2020-2024 II-18
Tabel 2.19	Budidaya Rumput Laut di Kabupaten Flores Timur Tahun 2022-2024 II-18
Tabel 2.20	Data Kunjungan Wisatawan di Obyek Wisata di Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2024 II-19

Tabel 2.21	Jumlah Peziarah Semana Santa Paroki Katedral Reinha Rosari Larantuka, Tahun 2023-2024	II-20
Tabel 2.22	Nilai Produksi Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur Tahun 2023.....	II-20
Tabel 2.23	Luas Panen Tanaman Pangan Per Kapita Kabupaten Flores Timur, Tahun 2023-2029	II-22
Tabel 2.24	Daya Dukung Lahan Pertanian Kabupaten Flores Timur, Tahun 2023-2029	II-22
Tabel 2.25	Rasio Kemampuan Daya Dukung (CCR) Kabupaten Flores Timur, Tahun 2022	II-23
Tabel 2.26	Luas Distribusi Daya Dukung Air Berdasarkan Sistem Grid Menurut Kecamatan di Kabupaten Flores Timur	II-23
Tabel 2.27	Daya Dukung Fungsi Lindung Kabupaten Flores Timur.....	II-24
Tabel 2.28	Luas Lahan Layak Untuk Permukiman Berdasarkan Total Luas Yang Dikurangi Dengan Kawasan Lindung serta Luas Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Flores Timur	II-25
Tabel 2.29	Perhitungan Daya Dukung Permukiman Tahun 2023 dan Proyeksi Daya Dukung Lahan Permukiman Tahun 2029 serta Proyeksi Jumlah Penduduk Optimal (JPO) Tahun 2029 dan Proyeksi Lahan Optimal Tahun 2029 di Kabupaten Flores Timur	II-25
Tabel 2.30	Building Coverage di Kabupaten Flores Timur	II-26
Tabel 2.31	Hasil Perhitungan Konsep Ambang Batas di Kabupaten Flores Timur	II-27
Tabel 2.32	Area Bernilai Konservasi Tinggi di Kabupaten Flores Timur	II-27
Tabel 2.33	Daya Tampung Penduduk Kabupaten Flores Timur Tahun 2024-2029	II-28
Tabel 2.34	Luas Kawasan Rawan Bencana Banjir Bandang Kabupaten Flores Timur.....	II-29
Tabel 2.35	Luas Kawasan Rawan Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi Kabupaten Flores Timur	II-30
Tabel 2.36	Luas Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Kabupaten Flores Timur	II-30
Tabel 2.37	Luas Kawasan Rawan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Flores Timur	II-31
Tabel 2.38	Luas Kawasan Rawan Bencana Kekeringan Kabupaten Flores Timur	II-32
Tabel 2.39	Gunung Api di Kabupaten Flores Timur	II-32
Tabel 2.40	Kawasan Rawan Bencana Letusan Gunung Api Kabupaten Flores Timur.....	II-33
Tabel 2.41	Kawasan Rawan Tanah Longsor Kabupaten Flores Timur	II-33
Tabel 2.42	Kawasan Rawan Bencana Tsunami Kabupaten Flores Timur	II-34

Tabel 2.43	Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Flores Timur Tahun 2022-2024	II-36
Tabel 2.44	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Kabupaten Flores Timur, Tahun 2020-2024	II-36
Tabel 2.45	Konsumsi Listrik Per Kapita Kabupaten Flores Timur, Tahun 2020-2024	II-37
Tabel 2.46	Akses Rumah Tangga Terhadap Konsumsi Air Minum Kabupaten Flores Timur, Tahun 2020-2024	II-37
Tabel 2.47	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur, Tahun 2022-2024	II-38
Tabel 2.48	Akses Rumah Tangga Dengan Sanitasi Aman Kabupaten Flores Timur, Tahun 2022-2024	II-38
Tabel 2.49	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah Kabupaten Flores Timur, Tahun 2020-2024	II-39
Tabel 2.50	Produksi Sampah dan Penanganan Sampah Kabupaten Flores Timur, Tahun 2020-2024	II-40
Tabel 2.51	Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Flores Timur, Tahun 2020-2024	II-43
Tabel 2.52	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin, Sex Ratio dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2024	II-44
Tabel 2.53	Komposisi Penduduk Kabupaten Flores Timur Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2024	II-45
Tabel 2.54	Komposisi Penduduk Kabupaten Flores Timur Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2024	II-46
Tabel 2.55	Proyeksi Distribusi Penduduk Kabupaten Flores Timur Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025-2030	II-48
Tabel 2.56	Proyeksi Komposisi Penduduk Kabupaten Flores Timur Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2025-2030	II-49
Tabel 2.57	Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Flores Timur Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, (Juta Rupiah) Tahun 2019-2024	II-51
Tabel 2.58	Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Flores Timur Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), 2020-2024	II-51
Tabel 2.59	Profil Kemiskinan Kabupaten Flores Timur, Tahun 2019-2024	II-53
Tabel 2.60	Perkembangan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Flores Timur, Tahun 2019-2024	II-53
Tabel 2.61	Tingkat Pengangguran Terbuka dan Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Flores Timur, Tahun 2019-2024	II-54
Tabel 2.62	Nilai Tukar Petani Kabupaten Flores Timur Tahun 2016-2024	II-56

Table 2.63 Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tahun 2019-2024 II-56

Tabel 2.64 Perkembangan Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Flores Timur, Tahun 2020-2024 II-58

Tabel 2.65 Capaian Indikator Komposisi Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Flores Timur, Tahun 2022-2023 II-59

Tabel 2.66 Prevalensi *Stunting* Kabupaten Flores Timur, Tahun 2022-2024 II-60

Tabel 2.67 Capaian Indikator Komposit Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Flores Timur dan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tahun 2022-2024 II-64

Tabel 2.68 Capaian Indikator Komposit Indeks Literasi Digital Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Nasional, Tahun 2020-2022 II-65

Tabel 2.69 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kabupaten Flores Timur, Tahun 2021-2024 II-68

Tabel 2.70 Capaian Indikator Komposit Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Nasional, Tahun 2022-2023 II-70

Table 2.71 Capaian Indikator Komposit Indeks Pembangunan Pemuda Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tahun 2018-2023 II-76

Tabel 2.72 Angka Ketergantungan (*Dependency Ratio*) Kabupaten Flores Timur, Tahun 2020-2024 II-77

Tabel 2.73 Perkembangan Rasio Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Industri Pengolahan Kabupaten Flores Timur, Tahun 2020-2024 II-77

Tabel 2.74 Perkembangan Rasio Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Akomodasi Makan dan Minum Kabupaten Flores Timur, Tahun 2020-2024 II-77

Table 2.75 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Pengangguran Terbuka Kabupaten Flores Timur Tahun 2019-2024 II-78

Tabel 2.76 Perkembangan capaian Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Nasional, Tahun 2020-2023 II-81

Tabel 2.77 Perkembangan Kondisi Infrastruktur Dasar Kabupaten Flores Timur, Tahun 2019-2024 II-82

Tabel 2.78 Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak Kabupaten Flores Timur, Tahun 2020-2024 II-83

Tabel 2.79 Perkembangan Status Desa Kabupaten Flores Timur, Tahun 2020-2024 II-84

Tabel 2.80 Rasio Pajak Daerah Kabupaten Flores Timur, Tahun 2022-2024 II-85

Tabel 2.81	Perkembangan Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Flores Timur, Tahun 2020-2024	II-89
Tabel 2.82	Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015-2023.....	II-90
Tabel 2.83	Perkembangan Capaian 12 Pilar Indikator Komposit Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Flores Timur, Tahun 2022-2024	II-94
Tabel 2.84	Capaian Indikator SPM pada Bidang Urusan Pendidikan, Tahun 2024	II-96
Tabel 2.85	Capaian Indikator SPM Bidang Urusan Kesehatan, Tahun 2024	II-96
Tabel 2.86	Capaian Kinerja SPM Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Tahun 2024.....	II-97
Tabel 2.87	Capaian Kinerja SPM Bidang Urusan Sosial, Tahun 2024.....	II-97
Tabel 2.88	Capaian Kinerja SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum, Tahun 2024	II-98
Tabel 2.89	Indikator Kinerja Daerah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2024	II-98
Tabel 2.90	Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur, Tahun 2020-2024	II-109
Tabel 2.91	Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur, Tahun 2020-2024	II-112
Tabel 2.92	Realisasi Pembiayaan Kabupaten Flores Timur, Tahun 2020-2024	II-113
Tabel 2.93	Neraca Daerah Kabupaten Flores Timur, Tahun 2020-2024.....	II-114
Tabel 2.94	Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur, Tahun 2026-2030	II-115
Tabel 2.95	Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur, Tahun 2026-2030	II-117
Tabel 2.96	Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Flores Timur, Tahun 2026-2030	II-119
Tabel 2.97	Keterkaitan Masalah Daerah dengan SDGs, Isu Strategis Nasional, Isu Provinsi NTT, Isu Strategis KLHS dan Isu Strategis Kabupaten Flores Timur	II-130
Tabel 3.1	Sasaran Utama Visi RPJMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2025-2029	III-4
Tabel 3.2	Keselaran Misi RPJMD Kab. Flores Timur Tahun 2025-2029 Dengan Misi RPJMD Prov. Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029 dan Misi RPJMN Tahun 2025-2029	III-7
Tabel 3.3	Keselaran Misi RPJMD Kab. Flores Timur Tahun 2025-2029 dengan SDGs Tahun 2015-2029	III-9

Tabel 3.4 Keselarasan Misi dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD Kab. Flores Timur Tahun 2025-2029 III-20

Tabel 3.5 Tujuan dan Sasaran RPJMD Kab. Flores Timur Tahun 2025-2029 III-23

Tabel 3.6 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan RPJMD Kab. Flores Timur Tahun 2025-2029 III-30

Tabel 3.7 Program Prioritas Pembangunan Daerah RPJMD Tahun 2025-2029 III-53

Tabel 3.8 Implementasi Program Unggulan Daerah Tahun 2025-2029 ke dalam Program Perangkat Daerah III-76

Tabel 4.1 Jumlah Program dan Pagu Indikatif Per-Urusan/Bidang Urusan Kab. Flores Timur Tahun 2026-2030 IV-1

Tabel 4.2 Program Perangkat Daerah dan Pagu Indikatif Tahun 2026-2030 IV-4

Tabel 4.3 IKU Kab Flores Timur Tahun 2025-2030 IV-43

Tabel 4.4 IKD Kab Flores Timur Tahun 2025-2030 IV-44

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Tahapan Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029	I-2
Gambar 1.2 Keterkaitan RPJMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2025-2029 dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektoral Lainnya	I-9
Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Flores Timur Tahun 2024	II-2
Gambar 2.2 Diagram Persentase Kelerengan Kabupaten Flores Timur	II-4
Gambar 2.3 Diagram Persentase Ketinggian Kabupaten Flores Timur	II-5
Gambar 2.4 Peta Isu Pengembangan secara Geografis Kabupaten Flores Timur Tahun 2024	II-35
Gambar 2.5 Capaian Indeks Risiko Bencana Kabupaten Flores Timur, Tahun 2020-2024	II-41
Gambar 2.6 Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2022-2024	II-42
Gambar 2.7 Grafik Perkembangan Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Flores Timur, Tahun 2020-2024	II-43
Gambar 2.8 Piramida Penduduk Kabupaten Flores Timur Tahun 2024	II-46
Gambar 2.9 Proyeksi Perkembangan Penduduk Kab. Flores Timur, Tahun 2025-2030	II-47
Gambar 2.10 Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Flores Timur Tahun 2019-2024	II-50
Gambar 2.11 Indeks Gini Kabupaten Flores Timur, Tahun 2020-2023.....	II-55
Gambar 2.12 Grafik Capaian Indikator Komposit Indeks Pembangunan Manusia (Usia Harapan Hidup, Rata-Rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah dan Pengeluaran Per Kapita) Kabupaten Flores Timur Tahun 2020-2024.....	II-57
Gambar 2.13 Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Flores Timur Tahun 2020-2024	II-61
Gambar 2.14 Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Flores Timur Tahun 2020-2024	II-62
Gambar 2.15 Capaian Literasi dan Numerasi Kabupaten Flores Timur Tahun 2022-2024	II-63
Gambar 2.16 Capaian Indeks Literasi Digital Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Nasional, Tahun 2020-2022	II-66

Gambar 2.17	Perkembangan Capaian Indeks Masyarakat Digital Indonesia Kabupaten Flores Timur dan Provinsi NTT, Tahun 2022-2024	II-67
Gambar 2.18	Grafik Capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Nasional, Tahun 2018-2023	II-69
Gambar 2.19	Grafik Capaian Klaster Indeks Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur, Provinsi NTT dan Nasional, Tahun 2023	II-72
Gambar 2.20	Grafik Perkembangan Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga Kabupaten Flores Timur dan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tahun 2021-2024.....	II-73
Gambar 2.21	Grafik Capaian Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Flores Timur dan Provinsi NTT, Tahun 2019-2024	II-74
Gambar 2.22	Grafik Capaian Indeks Pembangunan Pemuda Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Nasional, Tahun 2018-2023	II-75
Gambar 2.23	Capaian Indeks Infrastruktur Kabupaten Flores Timur, Tahun 2019-2024	II-82
Gambar 2.24	Grafik Perbandingan Perkembangan Laju Inflasi Kab. Flores Timur dengan Provinsi NTT dan Nasional Tahun 2019-2024	II-86
Gambar 2.25	Capaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Flores Timur Tahun 2019-2024.....	II-87
Gambar 2.26	Perbandingan Capaian 12 Indikator Komposit IDSD Kab. Flores Timur dengan Prov. Nusa Tenggara Timur dan Nasional Tahun 2024	II-94
Gambar 2.27	Grafik Perbandingan Kontribusi PAD, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapat Daerah Yang Sah Tahun 2020-2024	II-110
Gambar 2.28	Grafik Perkembangan Realisasi Belanja Tahun 2020-2024	II-111
Gambar 2.29	Grafik Perbandingan Kontribusi Per Jenis Belanja Tahun 2020-2024	II-112
Gambar 2.30	Rumusan Permasalahan Pembangunan Daerah Kab. Flores Timur	II-126
Gambar 3.1	Keselarasan Visi dan Misi RPJMD Kab. Flores Timur Tahun 2025-2029 dengan Visi dan Misi RPJPD Kab. Flores Timur Tahun 2025-2045	III-7
Gambar 3.2	Keselarasan Tujuan RPJMD Kab. Flores Timur Tahun 2025-2029 dengan Sasaran Pokok RPJPD Kab. Flores Timur Tahun 2025-2045	III-22
Gambar 3.3	Pentahapan Pembangunan RPJMD.....	III-47
Gambar 3.4	Program Unggulan Daerah Tahun 2025-2029	III-75



BUPATI FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FLORES TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029; a
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
dan
BUPATI FLORES TIMUR

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah periode 5 (lima) tahunan.
4. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah periode 1 (satu) tahunan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
7. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
8. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
9. Sasaran Daerah adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan pembangunan daerah atas pencapaian hasil program perangkat daerah.
10. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
11. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk penyelesaian masalah pembangunan daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai pelaksanaan dari strategi.
12. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran pembangunan.
13. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
14. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program dan kegiatan.
15. Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah adalah proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja untuk kepastian capaian target secara ekonomis, efisien dan efektif.
16. Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapat manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
17. Daerah adalah Kabupaten Flores Timur.
18. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
19. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
20. Bupati adalah Bupati Flores Timur.

21. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur.
22. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur.

Pasal 2

- (1) Maksud penyusunan RPJMD ini adalah tersedianya dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah.
- (2) Tujuan RPJMD, terdiri dari:
 - a. menetapkan Visi dan Misi pembangunan jangka menengah Daerah tahun 2025-2029;
 - b. menetapkan Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas pembangunan jangka menengah Daerah tahun 2025-2029;
 - c. menetapkan Tujuan dan Sasaran pembangunan jangka menengah Daerah serta target capaian sebagai dasar pengukuran perwujudan Visi pembangunan jangka menengah Daerah tahun 2025-2029;
 - d. sebagai landasan operasional bagi Pemerintah Daerah untuk menetapkan prioritas dan sasaran serta target capaian setiap tahun; dan
 - e. sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan untuk melaksanakan pembangunan di Daerah selama kurun waktu lima tahun ke depan.

BAB II SISTEMATIKA DAN ISI RPJMD

Pasal 3

- (1) Sistematika RPJMD terdiri dari:
 - a. Bab I Pendahuluan;
 - b. Bab II Gambaran Umum Daerah;
 - c. Bab III Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah;
 - d. Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - e. Bab V Penutup.
- (2) Ketentuan mengenai isi dan uraian sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Pengendalian pelaksanaan RPJMD mencakup program pembangunan daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.
- (2) Pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan RPJMD.
- (3) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program pembangunan dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan, pembangunan jangka menengah daerah telah dilaksanakan melalui RKPD.

Pasal 5

- (1) Evaluasi terhadap hasil RPJMD mencakup indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran, dalam upaya mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah.

Pasal 6

Ketentuan mengenai pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Program dan kegiatan pada RKPD Tahun 2025 yang telah ditetapkan dinyatakan tetap berlaku sampai dilakukannya perubahan sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 25 Agustus 2025
BUPATI FLORES TIMUR,

ttd

ANTONIUS DONI DIHEN

Diundangkan di Larantuka
pada tanggal 25 Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR,

ttd

PETRUS PEDO MARAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


YORDANUS HOGA DATON
PEMBINA TK.I
NIP. 19780426 200212 1 007

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 4

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR: NOREG 04/2025

PENJELASAN ...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Pembangunan daerah merupakan upaya pemerintah daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang ada di suatu wilayah secara efisien, efektif dan berkelanjutan. Gambaran upaya pemerintah daerah tersebut sebagai tindak lanjut atas kebijakan otonomi daerah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat serta penguatan daya saing daerah.

Pelaksanaan pembangunan di daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi sub-sistem dari Sistem Pembangunan Nasional sehingga pelaksanaan pembangunan daerah harus mendukung pencapaian target pembangunan nasional dengan memperhatikan karakteristik yang dimiliki masing-masing daerah. Selain sebagai upaya transformasi ekonomi, sosial, budaya dan politik, pelaksanaan pembangunan daerah juga sebagai perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Dengan demikian, daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, perluasan kesempatan kerja dan lapangan berusaha, peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik serta daya saing daerah. Untuk mewujudkan konsep pembangunan daerah dimaksud membutuhkan perencanaan yang baik sebagai landasan sistematis, terarah, efisien dan efektif sehingga berdampak pada keberhasilan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Hadirnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi instrumen penting dalam penyusunan perencanaan daerah dan nasional yang menyeluruh, terpadu, bertahap dan berkelanjutan. Sinkron dan sinergitas perencanaan antara daerah dan nasional merupakan hal penting dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Dalam kerangka mewujudkan cita-cita tersebut, Pemerintah Kabupaten Flores Timur sesuai kewenangannya menyusun RPJMD Tahun 2025-2029 sebagai penjabaran Visi, Misi dan Program Kepala Daerah pasca dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur Periode 2025-2030 yaitu: Ir. Antonius Doni Dihen dan Ignasius Boli, S.Fil pada tanggal 20 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Jakarta sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.1.3-1719 Tahun 2025 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030. Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 antara lain pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif,

pendekatan politis, pendekatan atas bawah dan bawah atas, pendekatan holistik-tematik, pendekatan integratif, dan pendekatan spasial. Selain itu juga, kaidah, tahapan dan mekanisme dalam menyusun perencanaan daerah yang tertuang dalam Peraturan Perundang-undangan menjadi perhatian dan acuan Pemerintah Kabupaten Flores Timur dalam menyusun RPJMD Tahun 2025-2029. Berbagai pendekatan perencanaan tersebut kemudian diintegrasikan dengan berbagai sumber daya daerah, partisipasi seluruh elemen masyarakat (pemerintah, swasta dan masyarakat) ke dalam seluruh tahapan penyusunan RPJMD.

RPJMD dimaksud menjadi perencanaan strategik daerah untuk 5 (lima) tahun ke depan yang menguraikan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dijanjikan kepada masyarakat ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan dan keuangan daerah, program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Selain menjadi media mengimplementasikan janji Bupati dan Wakil Bupati terpilih, RPJMD tersebut juga memiliki nilai strategis dan politik yakni sebagai pedoman pembangunan selama 5 (lima) tahun dan penyusunan rencana tahunan (RKPD), memberikan ruang politis bagi kepala daerah dan DPRD, menjadi instrumen pengendalian bagi Satuan Pengawas Internal (SPI), pedoman penilaian kinerja/keberhasilan Pemerintah Daerah sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, dan instrumen mengukur tingkat pencapaian kinerja kepala Perangkat Daerah.

Dalam rangka mewujudkan cita-cita pembangunan jangka panjang daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Flores Timur Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, yang selanjutnya berkontribusi untuk terwujudnya Indonesia Emas 2045, RPJMD ini sebagai periode lima tahunan pertama (tahun 2025-2029) yang menjadi titik awal *Perkuatan Fondasi Transformasi* menuju cita-cita RPJPD Tahun 2025-2045. Selain itu, dalam konteks kesinambungan pembangunan jangka menengah, RPJMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2025-2029 menjadi dokumen perencanaan yang melanjutkan target tujuan dan sasaran pembangunan yang termuat dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 dengan melakukan penyesuaian berdasarkan kajian dan analisa hasil pembangunan daerah dan isu strategis/faktual.

Sebagai periode pertama penjabaran dari RPJPD, RPJMD Tahun 2025-2029 dirancang untuk menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat dan daerah. Dari berbagai analisa dan kajian terhadap permasalahan daerah serta tantangan dan peluang baik secara internal maupun eksternal, untuk mewujudkan kemajuan Flores Timur lima tahun ke depan dibutuhkan komitmen perubahan dengan skala lumpatan pada semua sektor kehidupan. Pelaksanaan pembangunan Flores Timur perlu dilakukan dengan perubahan-perubahan mendasar, cara berpikir, sistem, penerapan teknologi dan pengembangan inovasi untuk mendukung percepatan kemajuan daerah dengan meningkatkan ketahanan ekonomi, pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan, mengembangkan kualitas SDM dan terproteksi dalam jaminan sosial, membangun infrastruktur, mengembangkan kemandirian desa berbasis potensi lokal, pembangunan berkelanjutan serta mengembangkan profesionalisasi, modernisasi organisasi, dan tata kerja birokrasi.

Proses penting dalam penyusunan RPJMD adalah perlunya mempertimbangkan kondisi Global, Nasional, dan Nusa Tenggara Timur, baik yang mencakup tantangan maupun peluang bagi pembangunan di Kabupaten Flores Timur. Tantangan utama yang dihadapi Kabupaten Flores Timur dan juga nasional ke depan adalah bagaimana upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi menuju pertumbuhan ekonomi

yang berkelanjutan dan inklusif, dan juga masih memiliki pekerjaan rumah yang besar dalam pengentasan kemiskinan dan juga stunting, daya saing bidang pendidikan dan kesehatan, lapangan kerja sebagai dampak bonus demografi, biaya infrastruktur yang tinggi akibat wilayah kepulauan, pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, di sisi lain kualitas layanan publik dan kinerja pemerintah daerah masih harus mendapat perhatian serius, dan tantangan lainnya adalah jaminan keamanan dan ketertiban di masyarakat.

Namun demikian, kondisi ini menyediakan peluang yang dapat dimanfaatkan. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah menuju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif maka peluang ke depan sebagai daerah yang mengandalkan sektor pertanian di darat dan laut, maka peningkatan produktivitas sektor pertanian melalui penerapan teknologi dan inovasi untuk menopang program nasional Makan Bergizi Gratis. Di sisi lain pengembangan ekonomi desa juga menjadi poin penting untuk dikembangkan, dengan memanfaatkan peluang Dana Desa Ketahanan Pangan dan juga program nasional Koperasi Merah Putih. Flores Timur juga memiliki peluang untuk menjadi tujuan wisata religi sepanjang tahun. Pembangunan ekonomi juga sangat dipengaruhi oleh kondisi infrastruktur, maka peluang ke depan dalam bidang infrastruktur yang menjadi salah satu prioritas nasional dalam RPJMN adalah pembangunan infrastruktur, memberikan harapan akan perhatian pemerintah pusat dalam alokasi dana transfer ke daerah. Selain itu keterbukaan berbagai daerah dalam kerjasama khususnya di bidang ekonomi, atau memperkuat kerjasama yang sudah berjalan menjadi hal penting untuk dikembangkan. Dari aspek penguatan daya saing bidang pendidikan dan kesehatan, maka menangkap peluang program nasional Sekolah Rakyat, Pendidikan Gratis dan Cek Kesehatan Gratis. Dalam menghadapi bonus demografi, dimana lapangan kerja di daerah yang terbatas maka peluang pengiriman tenaga kerja keluar negeri dapat ditangkap menjadi peluang yang baik melalui penyiapan calon tenaga kerja secara baik. Untuk menghadapi tantangan tujuan pembangunan berkelanjutan maka peluang daerah adalah dukungan dan kerjasama lintas sektor baik pemerintah pusat, provinsi, NGO maupun swasta yang memiliki kepedulian terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan. Selain itu kesadaran masyarakat yang semakin meningkat menjadi modal utama tujuan pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian aspek penguatan tata kelola pemerintahan dan SDM Flores Timur perlu dijadikan titik tekan utama, dimana selaras dengan prioritas pembangunan nasional yang makin difokuskan pada aspek SDM dalam perumusan kebijakan pembangunan Kabupaten Flores Timur.

Memperhatikan berbagai tantangan dan peluang daerah, pembangunan Flores Timur untuk 5 (lima) tahun ke depan difokuskan pada meningkatkan produktivitas ekonomi daerah, meningkatkan daya saing pendidikan, meningkatkan daya saing kesehatan, pengembangan infrastruktur, meningkatkan perlindungan sosial terhadap masyarakat miskin dan rentan, meningkatkan daya dukung ekologis dan ketahanan terhadap bencana. Dan untuk mendukung tujuan pembangunan tersebut maka diperlukan dukungan tata kelola pemerintahan yang berkualitas serta, terjaminnya keamanan, ketertiban dan kebebasan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR NOMOR 0203



LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025 - 2029

RPJMD TAHUN 2025 - 2029



BAB I

PENDAHULUAN





PENDAHULUAN

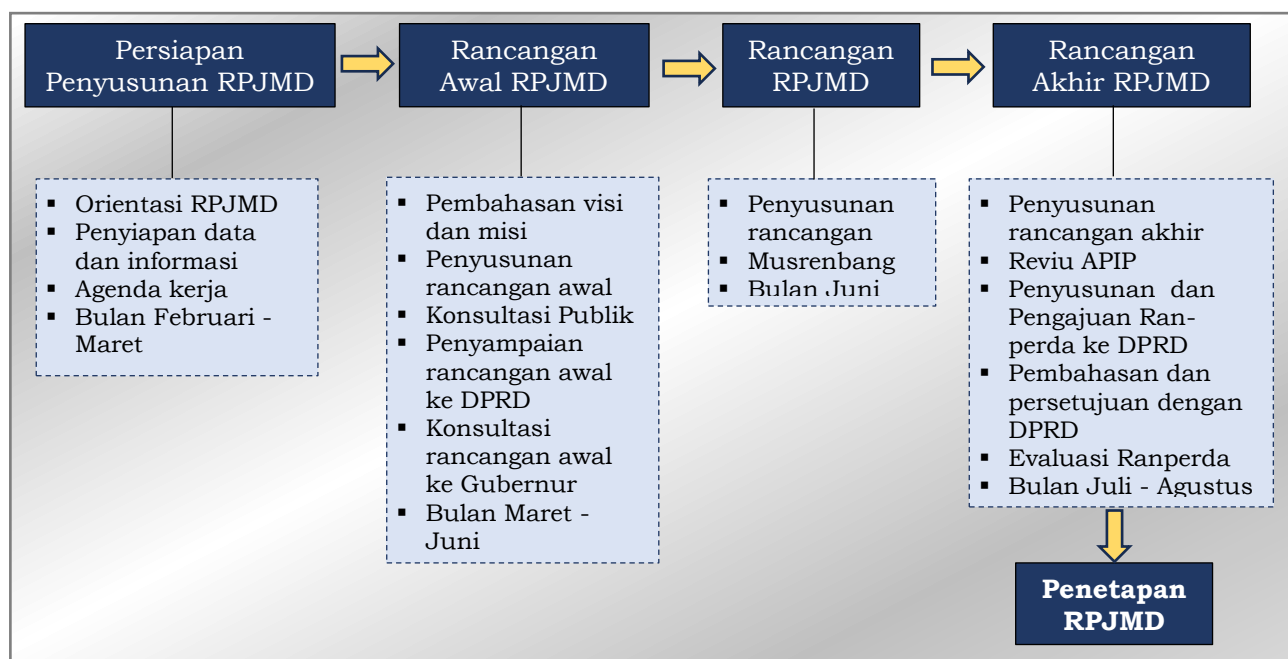
1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan upaya pemerintah daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang ada di suatu wilayah secara efisien, efektif dan berkelanjutan. Gambaran upaya pemerintah daerah tersebut sebagai tindak lanjut atas kebijakan otonomi daerah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat serta penguatan daya saing daerah.

Pelaksanaan pembangunan di daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi sub-sistem dari Sistem Pembangunan Nasional sehingga pelaksanaan pembangunan daerah harus mendukung pencapaian target pembangunan nasional dengan memperhatikan karakteristik yang dimiliki masing-masing daerah. Selain sebagai upaya transformasi ekonomi, sosial, budaya dan politik, pelaksanaan pembangunan daerah juga sebagai perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Dengan demikian, daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, perluasan kesempatan kerja dan lapangan berusaha, peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik serta daya saing daerah. Untuk mewujudkan konsep pembangunan daerah dimaksud membutuhkan perencanaan yang baik sebagai landasan sistematis, terarah, efisien dan efektif sehingga berdampak pada keberhasilan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Hadirnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi instrumen penting dalam penyusunan perencanaan daerah dan nasional yang menyeluruh, terpadu, bertahap dan berkelanjutan. Sinkron dan sinergitas perencanaan antara daerah dan nasional merupakan hal penting dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Dalam kerangka mewujudkan cita-cita tersebut, Pemerintah Kabupaten Flores Timur sesuai kewenangannya menyusun RPJMD Tahun 2025-2029 sebagai penjabaran Visi, Misi dan Program Kepala Daerah pasca dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur Periode 2025-2030 yaitu: **Ir. ANTONIUS DONI DIHEN** dan **IGNASIUS BOLI, S.Pd** pada tanggal 20 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Jakarta sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.1.3-1719 Tahun 2025 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada

Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030. Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 antara lain pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif, pendekatan politis, pendekatan atas bawah dan bawah atas, pendekatan holistik-tematik, pendekatan integratif, dan pendekatan spasial. Selain itu juga, kaidah, tahapan dan mekanisme dalam menyusun perencanaan daerah yang tertuang dalam Peraturan Perundang-undangan menjadi perhatian dan acuan Pemerintah Kabupaten Flores Timur dalam menyusun RPJMD Tahun 2025-2029. Berbagai pendekatan perencanaan tersebut kemudian diintegrasikan dengan berbagai sumber daya daerah, partisipasi seluruh elemen masyarakat (pemerintah, swasta dan masyarakat) ke dalam seluruh tahapan penyusunan RPJMD sebagaimana terlihat pada Gambar 1.1 berikut



Gambar 1.1 Tahapan Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029

RPJMD dimaksud menjadi perencanaan strategik daerah untuk 5 (lima) tahun ke depan yang menguraikan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dijanjikan kepada masyarakat ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan dan keuangan daerah, program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Selain menjadi menjadi media mengimplementasikan janji Bupati dan Wakil Bupati terpilih, RPJMD tersebut juga memiliki nilai strategis dan politik yakni sebagai pedoman pembangunan selama 5 (lima) tahun dan penyusunan rencana tahunan (RKPD), memberikan ruang politis bagi kepala daerah dan DPRD, menjadi instrumen pengendalian bagi Satuan Pengawas Internal (SPI), pedoman penilaian kinerja/keberhasilan Pemerintah Daerah sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah, dan instrumen mengukur tingkat pencapaian kinerja kepala Perangkat Daerah.

Dalam rangka mewujudkan cita-cita pembangunan jangka panjang daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Flores Timur Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, yang selanjutnya berkontribusi untuk terwujudnya Indonesia Emas 2045, RPJMD ini sebagai periode lima tahunan pertama (tahun 2025-2029) yang menjadi titik star *Perkuatan Fondasi Transformasi* menuju cita-cita RPJPD Tahun 2025-2045. Selain itu, dalam konteks kesinambungan pembangunan jangka menengah, RPJMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2025-2029 menjadi dokumen perencanaan yang melanjutkan target tujuan dan sasaran pembangunan yang termuat dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 dengan melakukan penyesuaian berdasarkan kajian dan analisa hasil pembangunan daerah, kondisi faktual dan isu strategis.

Sebagai periode pertama penjabaran dari RPJPD, RPJMD Tahun 2025-2029 dirancang untuk menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat dan daerah. Dari berbagai analisa dan kajian terhadap permasalahan daerah serta tantangan dan peluang baik secara internal maupun eksternal, untuk mewujudkan kemajuan Flores Timur lima tahun ke depan dibutuhkan komitmen perubahan dengan skala lompatan pada semua sektor kehidupan. Pelaksanaan pembangunan Flores Timur perlu dilakukan dengan perubahan-perubahan mendasar, cara berpikir, sistem, penerapan teknologi dan pengembangan inovasi untuk mendukung percepatan kemajuan daerah dengan meningkatkan ketahanan ekonomi, pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan, mengembangkan kualitas SDM dan terproteksi dalam jaminan sosial, membangun infrastruktur, mengembangkan kemandirian desa berbasis potensi lokal, pembangunan berkelanjutan serta mengembangkan profesionalisasi, modernisasi organisasi, dan tata kerja birokrasi.

Proses penting dalam penyusunan RPJMD adalah perlunya mempertimbangkan kondisi Global, Nasional, dan Regional (Provinsi Nusa Tenggara Timur), baik yang mencakup tantangan maupun peluang bagi pembangunan di Kabupaten Flores Timur. Tantangan utama yang dihadapi Kabupaten Flores Timur dan juga nasional ke depan adalah bagaimana upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi menuju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, dan juga masih memiliki pekerjaan rumah yang besar dalam pengentasan kemiskinan dan juga *stunting*, daya saing bidang pendidikan dan kesehatan, lapangan kerja sebagai dampak bonus demografi, biaya infrastruktur yang tinggi akibat wilayah kepulauan, pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, kualitas layanan publik dan kinerja pemerintah daerah masih harus mendapat perhatian serius, dan tantangan lainnya adalah jaminan keamanan dan ketertiban di masyarakat.

Namun demikian, kondisi ini menyediakan peluang yang dapat dimanfaatkan. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah menuju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif maka peluang ke depan sebagai daerah yang

mengandalkan sektor pertanian di darat dan laut, maka peningkatan produktivitas sektor pertanian melalui penerapan teknologi dan inovasi untuk menopang program nasional Makan Bergizi Gratis. Di sisi lain pengembangan ekonomi desa juga menjadi poin penting untuk dikembangkan, dengan memanfaatkan peluang Dana Desa Ketahanan Pangan dan juga program nasional Koperasi Merah Putih. Kabupaten Flores Timur juga memiliki peluang untuk menjadi tujuan wisata religi sepanjang tahun. Pembangunan ekonomi juga sangat dipengaruhi oleh kondisi infrastruktur, maka peluang ke depan dalam bidang infrastruktur yang menjadi salah satu prioritas nasional dalam RPJMN adalah pembangunan infrastruktur, memberikan harapan akan perhatian pemerintah pusat dalam alokasi dana transfer ke daerah. Selain itu keterbukaan berbagai daerah dalam kerjasama khususnya di bidang ekonomi, atau memperkuat kerjasama yang sudah berjalan menjadi hal penting untuk dikembangkan. Dari aspek penguatan daya saing bidang pendidikan dan kesehatan, maka menangkap peluang program nasional Sekolah Rakyat, Pendidikan Gratis dan Cek Kesehatan Gratis. Dalam menghadapi bonus demografi, dimana lapangan kerja di daerah yang terbatas maka peluang pengiriman tenaga kerja keluar negeri dapat ditangkap menjadi peluang yang baik melalui penyiapan calon tenaga kerja secara baik. Untuk menghadapi tantangan tujuan pembangunan berkelanjutan maka peluang daerah adalah dukungan dan kerjasama lintas sektor baik pemerintah pusat, provinsi, NGO/LSM maupun swasta yang memiliki kepedulian terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan. Selain itu kesadaran masyarakat yang semakin meningkat menjadi modal utama tujuan pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian aspek penguatan tata kelola pemerintahan dan SDM Flores Timur perlu dijadikan titik tekan utama, dimana selaras dengan prioritas pembangunan nasional yang makin difokuskan pada aspek SDM dalam perumusan kebijakan pembangunan Kabupaten Flores Timur.

Memperhatikan berbagai tantangan dan peluang daerah, pembangunan Kabupaten Flores Timur untuk 5 (lima) tahun ke depan difokuskan pada meningkatkan produktivitas ekonomi daerah, meningkatkan daya saing pendidikan, meningkatkan daya saing kesehatan, pengembangan infrastruktur, meningkatkan perlindungan sosial terhadap masyarakat miskin dan rentan, meningkatkan daya dukung ekologis dan ketahanan terhadap bencana. Untuk mendukung tujuan pembangunan tersebut maka diperlukan dukungan tata kelola pemerintahan yang berkualitas serta, terjaminnya keamanan, ketertiban dan kebebasan masyarakat.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum penyusunan RPJMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- 3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 8) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

- 9) Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
- 14) Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
- 15) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- 16) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
- 17) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 157);
- 19) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 89);
- 20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

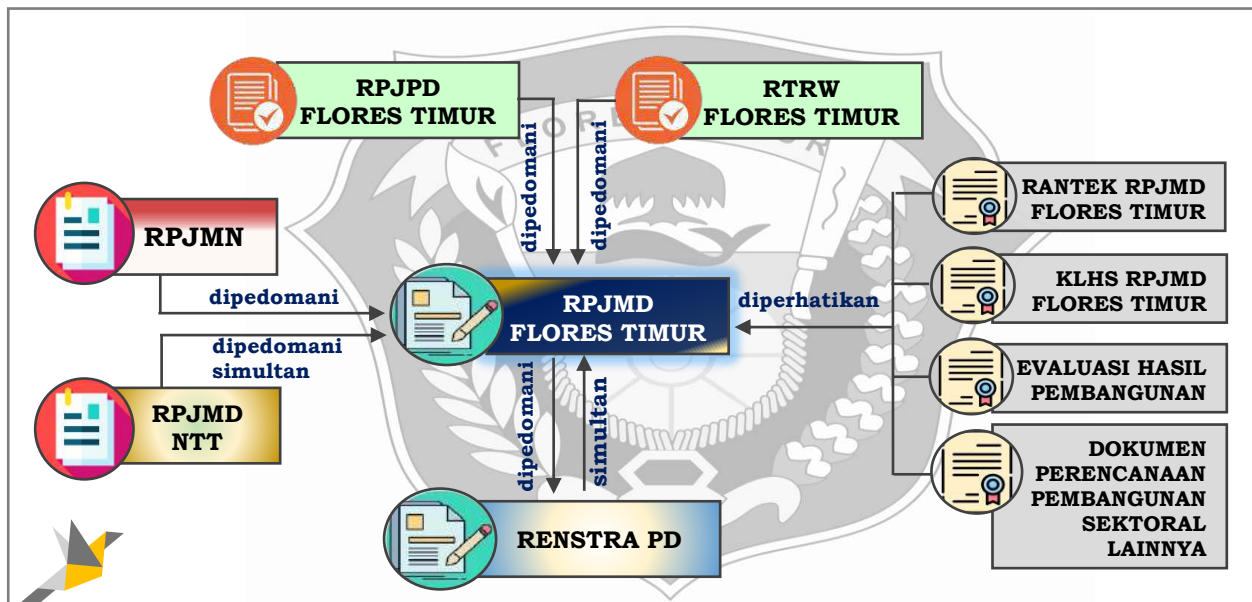
- 21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 459);
- 22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 23) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) dan pemutakhirannya dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- 24) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 25) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- 26) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0132);
- 27) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 005, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0133);
- 28) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 Nomor 006, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0138);

- 29) Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0033);
- 30) Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 085);
- 31) Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0140), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0197);
- 32) Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0199).

1.3 Hubungan Antara Dokumen RPJMD Dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya

Dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang utuh dengan sistem perencanaan pembangunan nasional dan Provinsi Nusa Tenggara Timur, oleh karena itu RPJMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2025–2029 disusun dengan memperhatikan RPJMN Tahun 2025-2029, RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025- 2029, disamping berpedoman pada RPJPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2025-2045 dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Flores Timur Tahun 2007-2027, serta hasil evaluasi pelaksanaan RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023–2026.

Selain dokumen-dokumen perencanaan di atas juga perlu memperhatikan dokumen rencana pembangunan yang relevan, antara lain: agenda pembangunan *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Penyusunan RPJMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2025–2029. Selanjutnya RPJMD ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah. Keterkaitan RPJMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2025-2029 dengan dokumen perencanaan lainnya digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.2 Keterkaitan RPJMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2025-2029 dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektor lainnya

Gambar di atas dapat dijelaskan sebagai berikut;

1.3.1 Hubungan Dengan RPJMN 2025-2029

Kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2025-2029, diarahkan pada upaya pencapaian Visi Nasional Tahun 2025-2029 yakni “Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”. Adapun 8 prioritas nasional yang merupakan implementasi langsung dari Asta Cita dalam mendukung visi dan misi pembangunan nasional yaitu:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan

8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.

RPJMN Tahun 2025-2029 menekankan secara khusus pada strategi menurunkan tingkat kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mencapai pertumbuhan tinggi yang berkelanjutan. Penekanan pada ketiga strategi tersebut merupakan kunci keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah dan fondasi bagi pembangunan jangka panjang nasional. Arah strategi dan kebijakan dimaksud juga menjadi perhatian serius dalam kebijakan pembangunan RPJMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2025-2029.

1.3.2 Hubungan Dengan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029

RPJMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2025-2029 disusun dengan berpedoman pada RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029. Hal ini dimaksudkan untuk membangun sinergitas dalam mewujudkan Visi Pembangunan Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029 yakni “NTT Maju, Sehat, Cerdas, Sejahtera dan Berkelanjutan”. Untuk mewujudkan visi tersebut, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menetapkan 5 (lima) misi pembangunan, sebagai berikut:

1. Memastikan Infrastruktur berkelanjutan demi terwujudnya ekonomi berbasis potensi daerah yang berdaya saing;
2. Memperluas pelayanan kesehatan dan jaminan sosial yang lebih inklusif, terjangkau, dan mudah diakses;
3. Menghadirkan pendidikan berkualitas yang merata, partisipatif dan tepat sasaran;
4. Mewujudkan kesejahteraan sosial, kesetaraan akses, serta kualitas hidup yang berkeadilan dan madani bagi seluruh lapisan masyarakat; dan
5. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pengelolaan sumber daya alam dan manusia yang bijak serta pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) untuk menciptakan masa depan yang inklusif.

Visi dan misi serta arahan pengembangan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029 akan menjadi perhatian dalam perumusan RPJMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2025-2029.

1.3.3 Hubungan Dengan RPJPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2025-2045

Selain memperhatikan RPJMN dan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur, penyusunan RPJMD Kabupaten Flores Timur juga berpedoman pada RPJPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2025-2045 terutama periode ke-1 (tahapan pertama) RPJPD. Adapun visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Flores Timur Tahun 2025-2045 yaitu: “Lewotana Flores Timur yang Maju, Berdaya, dan Berkelanjutan”. Untuk mewujudkan visi tersebut, ditempuh melalui 8 (delapan) misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan transformasi sosial;
2. Mewujudkan transformasi ekonomi daerah yang maju dan berdaya saing;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan inovatif;
4. Mewujudkan ketentraman dan keamanan, demokrasi dan stabilitas ekonomi daerah;
5. Mewujudkan kondisi sosial budaya yang kondusif dan lingkungan hidup yang berkelanjutan
6. Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan;
7. Mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan; dan
8. Mewujudkan kesinambungan pembangunan.

1.3.4 Hubungan Dengan Dokumen RTRW Kabupaten Flores Timur

Salah satu pedoman dalam pembangunan daerah secara spasial adalah rencana tata ruang. Rencana tata ruang ini secara umum berisi struktur ruang yang merupakan pedoman hierarki perkotaan serta penyediaan jaringan prasarana wilayah serta pola ruang yang merupakan perwujudan dari tata guna lahan yang direncanakan ke depan. Penyusunan RTRW Kabupaten Flores Timur ini didasarkan atas asas: Pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, tepat guna, berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan; dan Keterbukaan, persamaan, keadilan, dan perlindungan hukum. Tujuan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur adalah untuk “Mewujudkan Kabupaten Flores Timur sebagai kabupaten yang maju dan berdaya saing berbasis pertanian dan pariwisata secara berkelanjutan.”

Karakteristik wilayah Kabupaten Flores Timur terbagi menjadi dua yaitu kawasan pesisir dan kawasan perbukitan/dataran tinggi, diarahkan untuk pengembangan kawasan budidaya untuk mendukung perekonomian wilayah berbasis pertanian dan pariwisata. Kebijakan dan strategi pengembangan wilayah Kabupaten Flores Timur disesuaikan dengan karakteristik wilayah masing-masing. Untuk mempercepat terwujudnya tujuan pengembangan wilayah, ditetapkan kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Flores Timur yakni sebagai berikut: (1) Pemantapan interaksi antara simpul-simpul pertumbuhan perkotaan baru dan penguatan kawasan pendukung atau wilayah perdesaan; (2) Pembangunan sistem jaringan prasarana wilayah dalam mendukung pengembangan setra produksi pertanian secara terpadu dan berkelanjutan; (3) Pemantapan fungsi lindung dalam meningkatkan keberlanjutan dan daya dukung lingkungan; (4) Pengembangan kawasan budidaya untuk mendukung perekonomian wilayah berbasis pertanian dan pariwisata secara berkelanjutan; dan (5) Pengembangan kawasan strategis sesuai dengan fungsi masing-masing kawasan.

1.3.5 RPJMD Kabupaten Flores Timur Dengan Perencanaan Lainnya

Berdasarkan gambaran berbagai dokumen perencanaan tersebut, baik di tingkat Kabupaten, Provinsi, maupun Nasional, maka hubungan antara dokumen perencanaan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Upaya untuk mewujudkan prioritas pembangunan daerah pada RPJPD Kabupaten Flores Timur Tahap I (Pertama), “Peningkatan transformasi sosial melalui pemenuhan layanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial sesuai standar”, sejalan dengan program prioritas RPJMN Tahun 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029 terkait Pelayanan Kesehatan untuk Semua; Penguatan Pendidikan, Sains, dan Teknologi; Pemberantasan Kemiskinan; Kesetaraan Gender dan Perlindungan Kelompok Rentan;
2. Upaya untuk mewujudkan prioritas pembangunan daerah pada RPJPD Kabupaten Flores Timur Tahap I (Pertama), “Peningkatan transformasi ekonomi daerah yang maju dan berdaya saing melalui pembangunan sistem hilirisasi SDA serta penguatan riset IPTEK dan inovasi”, sejalan dengan program prioritas RPJMN Tahun 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029 yakni: Swasembada Pangan, Energi, dan Air; Ketersediaan Pupuk dan Benih bagi Petani; Pemerataan Ekonomi dan Penguatan UMKM; Hilirisasi dan Industrialisasi Berbasis SDA dan Maritim;
3. Upaya untuk mewujudkan prioritas pembangunan daerah pada RPJPD Kabupaten Flores Timur Tahap I (Pertama), “Peningkatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan inovatif dengan menata regulasi dan membangun kelembagaan yang tepat fungsi serta meningkatkan kualitas SDM ASN”, sejalan dengan program prioritas RPJMN Tahun 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029 yakni Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi; dan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
4. Upaya untuk mewujudkan prioritas pembangunan daerah pada RPJPD Kabupaten Flores Timur Tahap I (Pertama), “Mewujudkan ketentraman dan keamanan, demokrasi dan stabilitas ekonomi daerah melalui pengembangan budaya taat hukum dan meningkatkan stabilitas daerah sebagai landasan pembangunan”, sejalan dengan program prioritas RPJMN Tahun 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029 yakni: Kerukunan Antarumat Beragama dan Kebebasan Beribadah;
5. Upaya untuk mewujudkan prioritas pembangunan daerah pada RPJPD Kabupaten Flores Timur Tahap I (Pertama), “Mewujudkan kondisi sosial budaya yang kondusif dan lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui peningkatan kondisi sosial budaya yang kondusif, lingkungan hidup yang berkualitas dan ketahanan bencana”, sejalan dengan program prioritas RPJMN Tahun 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun

2025-2029 yakni: Pelestarian Seni Budaya dan Peningkatan Ekonomi Kreatif; dan Pelestarian Lingkungan Hidup;

6. Upaya untuk mewujudkan prioritas pembangunan daerah pada RPJPD Kabupaten Flores Timur Tahap I (Pertama), “Mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan melalui pemenuhan infrastruktur dasar berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru” sejalan dengan prioritas pemerintah pusat sebagaimana RPJMN Tahun 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029 yakni Rumah Murah dan Sanitasi bagi Masyarakat; dan Pemerataan Infrastruktur Berkelanjutan.

1.4 Maksud dan Tujuan

1.4.1 Maksud

Maksud penyusunan RPJMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2025-2029 adalah tersedianya dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Flores Timur.

1.4.2 Tujuan

RPJMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2025-2029 disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. menetapkan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2025-2029;
2. menetapkan Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2025-2029;
3. menetapkan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah serta target capaian sebagai dasar pengukuran perwujudan Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2025-2029;
4. sebagai landasan operasional bagi Pemerintah Kabupaten Flores Timur untuk menetapkan prioritas dan sasaran serta target capaian setiap tahun; dan
5. sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan untuk melaksanakan pembangunan di Kabupaten Flores Timur selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

1.5 Sistematika Penulisan

Dokumen RPJMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029, dasar hukum penyusunan, hubungan antara dokumen perencanaan, maksud dan tujuan penyusunan, serta sistematika penulisan RPJMD Tahun 2025-2029.

BAB II *Gambaran Umum Daerah*

Bab ini memuat gambaran umum kondisi daerah yang diuraikan berdasarkan aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, dan aspek pelayanan umum. Selain itu juga memuat gambaran keuangan daerah yang meliputi realisasi APBD Tahun 2020-2024 dan proyeksi keuangan daerah Tahun 2026-2030, serta gambaran permasalahan dan isu strategis.

BAB III *Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah*

Bab ini berisi rumusan visi, misi tujuan, sasaran dan target capaian RPJMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2025-2029 beserta strategi, arah kebijakan dan program prioritas sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

BAB IV *Pogram Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*

Bab ini memuat rencana program perangkat daerah beserta kerangka pendanaan dalam mencapai kinerja pembangunan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah selama Tahun 2026-2030 yang diukur melalui indikator kinerja utama dan indikator kinerja daerah.

BAB V *Penutup*

Bab ini memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH





GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

A. Posisi dan Peran Strategis Daerah

1. Letak, Batas Wilayah Administrasi dan Fungsi Wilayah

Kabupaten Flores Timur merupakan kabupaten kepulauan yang berada pada wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, memiliki luas wilayah 5.983,38 Km², dengan luas daratan 1.748,92 Km² (29,23% dari luas wilayah) yang tersebar pada 3 pulau besar dan 27 pulau kecil, serta luas lautan 4.234,46 Km² (70,77% dari luas wilayah). Kabupaten Flores Timur berbatasan dengan laut dan kabupaten lain di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Laut Flores
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Laut Sawu
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Selat Boleng
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Sikka

Secara administrasi Kabupaten Flores Timur dengan Ibukota di Larantuka, terdiri dari 19 Kecamatan yang terbagi dalam 21 Kelurahan dan 229 Desa. Kecamatan yang memiliki luas wilayah terbesar adalah Kecamatan Tanjung Bunga (24.826,75 Ha atau 14,20%) dan yang terkecil adalah Kecamatan Solor Selatan (3.118,04 Ha atau 1,78%). Data wilayah administratif menurut kecamatan di Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.1 dan Gambar 2.1. sebagai berikut.

Tabel 2.1 Jumlah Desa/Kelurahan dan Luas Wilayah Kecamatan Kabupaten Flores Timur Tahun 2024

Kecamatan/ Pulau	Jumlah		Luas Wilayah (Ha)	Persentase Luas
	Desa	Kelurahan		
1. Wulanggitang	11	-	22.188,50	12,69
2. Titehena	14	-	15.266,74	8,73
3. Tanjung Bunga	16	-	24.826,75	14,20
4. Ile Mandiri	8	-	6.701,00	3,83
5. Larantuka	2	18	5.878,82	3,36
6. Demon Pagong	7	-	7.758,18	4,44
7. Ile Bura	7	-	10.865,35	6,21
8. Lewolema	7	-	8.588,76	4,91
Pulau Flores Bagian Timur	72	18	102.074,10	58,36
9. Solor Barat	14	1	12.129,35	6,94
10. Solor Timur	17	-	6.586,31	3,77
11. Solor Selatan	7	-	3.118,04	1,78
Pulau Solor	38	1	21.833,70	12,49
12. Adonara Barat	18	-	8.220,23	4,70
13. Wotan Ulumado	12	-	8.370,61	4,79
14. Adonara Timur	19	2	8.443,66	4,83
15. Ile Boleng	21	-	4.759,95	2,72

PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

**PETA ADMINISTRASI
KABUPATEN FLORES TIMUR**

SKALA 1 : 100.000

System Grid: UTM
Proyeksi: Transverse Mercator
Datum: WGS - 84

INDEKS LOKASI

KETERANGAN :

BATAS ADMINISTRASI
 - - - - - Batas Kabupaten
 - - - - - Batas Kecamatan
 - - - - - Batas Desa

JARINGAN JALAN
 - - - - - Jalan Arteri
 - - - - - Jalan Kolektor
 - - - - - Jalan Lokal
 - - - - - Jalan Lain

PERAIRAN
 - - - - - Garis Pantai
 - - - - - Sungai

KECAMATAN
 - - - - - Kec. Adonara
 - - - - - Kec. Adonara Barat
 - - - - - Kec. Adonara Tengah
 - - - - - Kec. Adonara Timur
 - - - - - Kec. Demon Pagong
 - - - - - Kec. Ite Bolong
 - - - - - Kec. Ite Bung
 - - - - - Kec. Ite Mandi
 - - - - - Kec. Kelubagolit
 - - - - - Kec. Larantuka
 - - - - - Kec. Lawelema
 - - - - - Kec. Solor Barat
 - - - - - Kec. Solor Selatan
 - - - - - Kec. Solor Timur
 - - - - - Kec. Tanjung Bunga
 - - - - - Kec. Taibana
 - - - - - Kec. Vithana
 - - - - - Kec. Widen Uluanda
 - - - - - Kec. Wulangkilang

NO. PETA

SUMBER DATA
 Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1 : 25.000 Tahun 2002, 843

Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Flores Timur Tahun 2024

Secara astronomis, Kabupaten Flores Timur terbentang pada garis koordinat $08^{\circ} 04' - 08^{\circ} 40'$ Lintang Selatan dan $122^{\circ} 38' - 123^{\circ} 57'$ Bujur Timur, yang dibatasi oleh Laut Sawu di sebelah Selatan Pulau Solor dan Laut Flores di sebelah Utara. Letak geografis Kabupaten Flores Timur memiliki nilai strategis dalam mendukung aktivitas perekonomian dan konektivitas bagi wilayah sekitar terutama kabupaten se-daratan Flores, Kabupaten Lembata dan Kabupaten Alor. Sebagai kabupaten yang terletak paling timur dari Pulau Flores, maka Kabupaten Flores Timur terutama di wilayah Kecamatan Larantuka menjadi pusat transit mobilisasi orang dan barang dari Pulau Flores menuju Kabupaten Lembata dan Kabupaten Alor. Selain itu karena letaknya berhadapan dengan Laut Sawu, maka menjadi daerah pelayaran ASDP dan Pelayaran PT Pelni dari Larantuka ke Kupang dan pulau lain di Nusa Tenggara Timur

dan Nusantara, yang membawa dampak positif bagi kabupaten-kabupaten yang berdekatan dengan Kabupaten Flores Timur.

2. Karakteristik Wilayah

2.a. Tutupan Lahan Eksisting

Tutupan lahan di suatu wilayah merupakan gambaran dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup. Penggunaan lahan di Kabupaten Flores Timur terdiri dari tutupan lahan kawasan non terbangun dengan luas 169.922,48 Ha atau sebesar 97,16 % dan kawasan terbangun dengan luas 4.939,09 Ha atau sebesar 2,84 %. Tutupan lahan kawasan non terbangun terdiri atas danau/situ, hutan bakau/mangrove, hutan rimba, kebun, padang rumput, pasir pantai, rawa, sawah irigasi, sawah tadah hujan, semak belukar, sungai, tegalan/ladang, dan diidominasi oleh jenis tutupan lahan yaitu kebun dengan luas 73.996,73 Ha atau sebesar 42,31% dari luas wilayah. Sedangkan kawasan terbangun terdiri dari kolam, permukiman dan landasan pacu pesawat. Luas kawasan non terbangun memiliki luas paling besar dari pada luas kawasan terbangun. Gambaran luasan penggunaan lahan di Kabupaten Flores Timur dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.2 Tutupan Lahan Eksisting Kabupaten Flores Timur Tahun 2024

No	Jenis Tutupan Lahan	Luas	Persentase
A	Kawasan Tak Terbangun		
1	Danau/Situ	89,39	0,05
2	Hutan Bakau/Mangrove	1.037,99	0,58
3	Hutan Rimba	65.065,73	37,20
4	Kebun	73.996,73	42,31
5	Padang Rumput	8.793,93	5,03
6	Pasir Pantai	264,41	0,15
7	Rawa	58,09	0,03
8	Sawah Irigasi	183,79	0,11
9	Sawah Tadah Hujan	300,52	0,17
10	Semak Belukar	19.692,59	11,26
11	Sungai	10,59	0,01
12	Tegalan/Ladang	428,42	0,24
Total		169.922,48	97,16
B	Kawasan Terbangun		
1	Kolam	7,67	0,00
2	Landasan Pacu Pesawat	22,29	0,01
3	Permukiman	4.939,09	2,82
Total		4.939,09	2,84
Total A+B		174.891,53	100

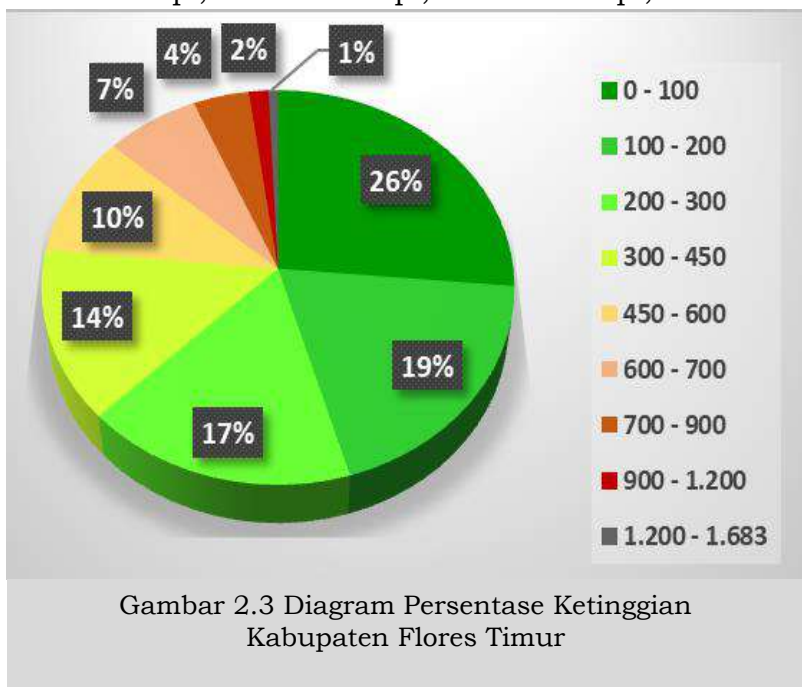
Sumber : Rancangan Akhir RTRW Kabupaten Flores Timur Tahun 2025-2045

Tutupan Lahan Kabupaten Flores Timur yang didominasi oleh kawasan non terbangun dengan luas 169.922,48 Ha atau sebesar 97,16%, dimana pada kawasan ini terdapat potensi kebun dengan luas 73.996,73 Ha atau sebesar 42,31% dari luas wilayah. Potensi ini bisa dikembangkan pola pertanian lahan basah, pertanian lahan kering dan perkebunan.

37% sampai kelerengan >45% (sangat curam) dari luas wilayah kabupaten. Kondisi ini menjadi daya tarik tersendiri dalam usaha pengembangan Pariwisata, namun menjadi daerah potensi rawan bencana longsor jika tidak memperhatikan kualitas lingkungan.

b.2. Ketinggian

Ketinggian di Kabupaten Flores Timur memiliki variasi yaitu 0-100 mdpl, 100-200 mdpl, 200-300 mdpl, 300-450 mdpl, 450-600 mdpl, 600-700 mdpl, 700-900 mdpl, 900-1.200 mdpl, dan 1.200-1.683 mdpl. Ketinggian di Kabupaten Flores Timur didominasi oleh klasifikasi ketinggian 0-100 mdpl dengan luas 46.099,76 Ha atau sebesar 26%. Untuk lebih jelasnya mengenai persebaran dan kondisi ketinggian per kecamatan di wilayah Kabupaten Flores Timur dapat dilihat pada Tabel 2.4 di bawah ini.



Tabel 2.4 Luas Wilayah Berdasarkan Ketinggian Per Kecamatan Kabupaten Flores Timur Tahun 2024

No	Kecamatan	Ketinggian mdpl				
		0 - 100	100 - 200	200 - 300	300 - 450	450 - 600
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Adonara	2.416,11	1.360,92	836,94	506,08	398,48
2	Adonara Barat	2.303,45	1.865,90	953,90	838,15	807,29
3	Adonara Tengah	13,24	266,89	538,50	652,67	993,14
4	Adonara Timur	1.965,87	1.312,83	1.118,93	1.379,78	1.209,04
5	Demon Pagong	1.294,19	1.311,05	1.270,10	1.055,10	1.007,21
6	Ile Boleng	1.826,86	874,84	575,27	364,97	285,34
7	Ile Mandiri	1.410,32	1.606,96	1.350,69	1.024,83	756,77
8	Ile Bura	2.112,73	1.865,88	1.554,83	1.399,73	1.129,10
9	Kelubagolit	675,51	713,88	1.535,66	1.200,32	380,89
10	Larantuka	1.648,06	1.012,50	662,25	561,35	598,25
11	Lewolema	2.053,17	1.780,79	1.566,77	1.127,72	901,24
12	Solor Barat	5.214,79	2.745,22	1.773,29	1.107,71	799,78
13	Solor Selatan	1.230,51	695,04	464,74	320,46	246,48
14	Solor Timur	2.427,54	1.771,73	1.234,70	596,36	341,93
15	Tanjung Bunga	8.764,80	4.966,91	4.306,59	4.372,50	1.939,92
16	Titehena	4.227,39	2.982,08	2.336,61	1.879,09	1.500,65
17	Witihama	2.623,85	1.581,22	1.177,26	702,10	501,29
18	Wotan Ulumado	1.710,43	1.632,25	1.620,99	1.309,68	1.079,53
19	Wulanggitang	2.440,66	3.023,68	4.891,25	3.947,37	2.777,94
Total		46.359,48	33.370,56	29.769,29	24.345,95	17.654,27

Lanjutan Tabel 2.4 (Kolom 8 -12)

No	Kecamatan	Ketinggian mdpl				Jumlah
		600 - 700	700 - 900	900 - 1.200	1.200 - 1.683	
(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Adonara	139,20	0	0	0	5.657,72
2	Adonara Barat	854,16	524,18	73,19	0	8.220,23
3	Adonara Tengah	1.091,38	252,66	2,60	0	3.811,08
4	Adonara Timur	996,05	347,73	82,82	30,60	8.443,66
5	Demon Pagong	705,48	997,01	118,05	0	7758,18
6	Ile Boleng	238,33	205,56	193,26	195,52	4.759,95
7	Ile Mandiri	239,49	153,14	108,59	50,21	6.701,00
8	Ile Bura	902,88	690,46	595,47	614,28	10.865,35
9	Kelubagolit	134,04	44,70	24,53	11,99	4.721,51
10	Larantuka	586,21	594,64	168,25	47,32	5.878,82
11	Lewolema	741,34	383,20	34,53	0	8.588,76
12	Solor Barat	416,37	71,99	0	0	12.129,35
13	Solor Selatan	131,69	29,12	0	0	3.118,04
14	Solor Timur	189,94	24,11	0	0	6.586,31
15	Tanjung Bunga	439,71	36,31	0	0	24.826,75
16	Titehena	1.115,04	981,43	244,46	0	15.266,74
17	Witihama	130,08	119,53	103,41	60,23	6.998,97
18	Wotan Ulumado	723,61	286,96	7,17	0	8.370,61
19	Wulanggintang	2.499,84	1.571,70	814,26	221,79	22.188,50
Total		12.275,05	7.314,42	2.570,60	1.231,92	174.891,53

Sumber : Rancangan Akhir RTRW Kabupaten Flores Timur Tahun 2025-2045

Ketinggian di Kabupaten Flores Timur didominasi oleh klasifikasi ketinggian 0-100 mdpl dengan luas 46.099,76 Ha atau sebesar 26%, sedangkan luasan wilayah dengan ketinggian diatas 100-1683 mdpl sebesar 74%. Dengan demikian Pemerintah diharuskan untuk lebih kreatifitas dalam merencanakan pengembangan pertanian dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

2.c. Klimatologi

Kabupaten Flores Timur memiliki 2 (dua) musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Periode bulan Juni sampai dengan September merupakan musim kemarau karena arus angin berasal dari Australia dan tidak banyak mengandung uap air. Sebaliknya, pada bulan Desember sampai Maret arus angin banyak mengandung uap air yang berasal dari Asia dan Samudera Pasifik, sehingga terjadi musim hujan. Kondisi ini berganti setiap setengah tahun setelah masa peralihan pada bulan April sampai Mei dan Oktober sampai November. Walaupun demikian, mengingat Kabupaten Flores Timur merupakan bagian dari Provinsi NTT yang letaknya berdekatan dengan Australia, sehingga arus angin yang banyak mengandung uap air dari Asia dan Samudera Pasifik sampai di wilayah Folres Timur kandungan uap airnya sudah berkurang yang mengakibatkan hari hujan di Flores Timur lebih sedikit dibandingkan dengan wilayah yang lebih dekat dengan Asia. Hal ini menjadikan Flores Timur sebagai wilayah yang tergolong relatif basah pada 4 bulan (Januari, Februari, Maret dan Desember) dan 8 bulan sisanya relatif kering. Intensitas Curah Hujan Masuk Kategori Sangat Rendah dibawah 2000 mm/tahun, dengan total rata-rata pertahunnya 1.212 mm/tahun. Informasi stasiun hujan didapat dari stasiun meteorologi Gewayantana dengan koordinat X 122,9986, koordinat Y -8,275 dan nomor stasiun 97310. Untuk lebih jelasnya intensitas curah hujan pertahun dapat dilihat pada Tabel 2.5 berikut.

Tabel 2.5 Kondisi Klimatologi Kabupaten Flores Timur, 2020-2024

Tahun	Jumlah Curah Hujan (mm)	Jumlah Hari Hujan	Penyinaran Matahari	Suhu °C		
				Minimum	Rata-Rata	Maksimum
2020	1.168,00	91,00	77,00	24,40	28,50	32,90
2021	2.354,00	123,00	71,30	24,40	28,30	32,70
2022	1.686,00	105,00	72,70	24,10	28,10	32,60
2023	1.686,00	105,00	72,70	24,10	28,10	32,60
2024	1.686,00	105,00	72,70	24,10	28,10	32,60

Sumber : Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, Stasiun Klimatologi Gewayantana

Gambaran kondisi di atas berpotensi kekeringan dan bencana terutama angin kencang dan badai, sebagai akibat dari masa musim kemarau lebih lama dibanding musim hujan, serta potensi bencana terutama angin kencang dan badai yang terjadi sebagai dampak pertemuan angin dari benua Asia dan Australia yang biasa terjadi pada bulan Desember sampai April. Gambaran kondisi ini menuntut Pemerintah membuat perencanaan pembangunan baik infrastruktur, pengembangan pertanian dan mitigasi bencana yang baik sesuai dengan karakteristik daerah sehingga masyarakat mampu bertahan dalam situasi yang timbul akibat perubahan iklim dan mampu beradaptasi dalam kondisi bencana.

2.d. Hidrologi

d.1. Mata Air

Berdasarkan data potensi sumber air yang dimanfaatkan, Kabupaten Flores Timur memiliki 9 (sembilan) mata air yang sudah dimanfaatkan. Untuk SPAM Waiwerang adalah Galeri Wai Knawe dan Mata Air Wai Burak yang telah dimanfaatkan sebesar 48,23%. Sedangkan untuk sumber air yang digunakan di Kota Larantuka adalah Mata Air Leto Matan, Mata Air Wai Bao, Galeri Bama, Mata Air Suban Poar, Mata Air Wai Okin, Mata Air Gere, dan Mata Air Waidoko yang seluruhnya telah dimanfaatkan sebesar 76,17%. Data potensi diperoleh dari RISPAM Kabupaten Flores Timur Tahun 2019, sedangkan data pemanfaatan diperoleh dari Perumda Air Minum Ina Gelekat Kabupaten Flores Timur. Potensi sumber air baku di wilayah Kabupaten Flores Timur untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dapat dilihat pada Tabel 2.6 berikut;

Tabel 2.6 Potensi Air Baku Yang Dimanfaatkan Perumda Air Minum Ina Gelekat Kabupaten Flores Timur

No.	Nama Air Baku	Jenis Air Baku	Pemanfaatan (l/detik)	Pemanfaatan (%)
1.	MA. Leto Matan	15,66	58,05	76,17
2.	MA. Wai Bao	3,83		
3.	Galeri Bama	1,59		
4.	MA. Suban Poar	6,60		
5.	MA. Wai Okin	2,68		
6.	MA. Gere	8,35		
7.	MA. Waidoko	37,5		
8.	Galeri Wai Knawe	8,13	4,36	48,23
9.	MA. Wai Burak	0,91		

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2025-2029

d.2. Daerah Aliran Sungai (DAS)

Berdasarkan Lampiran Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai, Kabupaten Flores Timur dilewati oleh sungai lintas kabupaten yaitu WS Flores. Sementara dalam dokumen Kebijakan Satu Peta yang dirilis oleh Kementerian Koordinator Perekonomian, terdapat 23 jenis DAS yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Flores Timur sebagaimana terlihat pada Tabel 2.7 berikut;

Tabel 2.7 Daerah Aliran Sungai Kabupaten Flores Timur

No	Kecamatan	Nama DAS	Luas (Ha)	Total
1	Adonara	Waigowa	2.300,73	2.314,46
		Waiwuring	13,73	
2	Adonara Barat	Waigowa	405,77	1.550,19
		Mea	800,12	
		Werang	344,31	
3	Adonara Tengah	Waigowa	1.853,75	2.716,12
		Werang	862,37	
4	Adonara Timur	Waigowa	300,64	670,70
		Waiwuring	1,03	
		Werang	369,03	
5	Demon Pagong	Belang	881,18	944,20
		Lamika	63,02	
6	Ile Boleng	Anaburaka	1.435,32	1.435,32
7	Ile Mandiri	Balung	142,26	851,04
		Mudakaputuk	708,77	
8	Ile Bura	Konga	78,35	846,70
		Lejurang	553,39	
		Ulah	214,96	
9	Kelubagolit	Waiwuring	2.432,36	2.432,36
10	Larantuka	Balung	2.061,21	2.350,59
		Bama	289,37	
11	Lewolema	Mudakaputuk	874,29	874,29
12	Solor Barat	Ritaebang	2.197,29	2.947,08
		Samantayi	749,80	
13	Solor Selatan	Lamawai	11,35	11,35
14	Solor Timur	Lamawai	491,76	1.713,96
		Menanga	1.222,21	
15	Tanjung Bunga	Karawatung	909,69	4.364,15
		Moga Ina	2.192,13	
		Muda	1.262,34	
16	Titehena	Belang	0,16	7.716,83
		Burak	81,39	
		Konga	2.716,10	
		Lamika	4.919,18	
		Nebe	0,00	
17	Witihama	Waiwuring	2.608,16	2.608,16
18	Wotan Ulumado	Mea	2.402,43	2.402,44
		Werang	0,02	
19	Wulanggitang	Konga	5.894,17	16.709,47
		Nebe	115,34	
		Pruda	233,30	
		Ulah	10.466,66	
Total				55.459,44

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2025-2029

d.3. Cekungan Air Tanah

Berdasarkan lampiran Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah, di Kabupaten Flores Timur terdapat 9 (sembilan)

cekungan air yaitu Waiwadan, Waiwerang, Larantuka, Kutabura-Lamaayang, Liberapan, Balauwak, Mananga, Lewobunga dan Maumere. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.8 berikut.

Tabel 2.8 Data Cekungan Air Menurut Kecamatan Tahun 2020
di Kabupaten Flores Timur

No	Cekungan Air Tanah	Kecamatan	Luas
1	Cat Waiwadan	Adonara	5.645,47
2	Cat Waiwadan	Adonara Barat	7.931,04
	Cat Waiwerang		262,22
3	Cat Waiwadan	Adonara Tengah	2.755,23
	Cat Waiwerang		1.052,83
4	Cat Waiwadan	Adonara Timur	488,01
	Cat Waiwerang		7.950,34
5	Cat Larantuka	Demon Pagong	5.231,04
	Cat Kutabura - Lamaayang		2.502,83
6	Cat Waiwadan	Ile Boleng	2.221,70
	Cat Waiwerang		2.532,27
7	Cat Larantuka	Ile Mandiri	6.247,48
	Cat Kutabura - Lamaayang		441,94
8	Cat Larantuka	Ile Bura	10.834,11
9	Cat Waiwadan	Kelubagolit	4.381,69
	Cat Waiwerang		332,49
10	Cat Larantuka	Larantuka	4.925,31
	Cat Kutabura - Lamaayang		951,27
11	Cat Larantuka	Lewolema	948,00
	Cat Kutabura - Lamaayang		7.611,72
12	Cat Liberapan	Solor Barat	7.933,31
	Cat Balauwak		1.261,81
	Cat Larantuka		7,16
	Cat Mananga		2.898,92
13	Cat Balauwak	Solor Selatan	2.531,32
	Cat Mananga		583,83
14	Cat Balauwak	Solor Timur	1.921,50
	Cat Mananga		4.638,72
15	Cat Kutabura - Lamaayang	Tanjung Bunga	9.840,31
	Cat Lewobunga		14.924,98
16	Cat Larantuka	Titehena	6.541,59
	Cat Kutabura - Lamaayang		8.678,23
17	Cat Waiwadan	Witihama	6.984,45
18	Cat Waiwadan	Wotan Ulumando	4.261,51
	Cat Waiwerang		4.101,95
19	Cat Maumere	Wulanggitang	1.431,41
	Cat Larantuka		19.640,29
	Cat Kutabura - Lamaayang		1.101,67
Total			174.529,94

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2025-2029

2.e. Geologi

Kabupaten Flores Timur didominasi oleh batuan sedimen yang terendapkan dalam lingkungan laut, yaitu Formasi Kiro (Tmk) dengan umur Neogen dan Hasil Gunung Api Tua (QTV) dengan umur kuartar. Formasi Kiro terdiri atas breksi, lava dan tufa dengan sisipan batu pasir tufaan. Breksi dengan fragmen batuan andesit dan basal, semen tufa pasiran, terkarsikkan dan termineralisasikan yang membentuk magnetit dan mangan. Tufa pasiran dan batu pasir tufaan berupa sisipan, berwarna kecoklatan, terkarsikkan sedangkan untuk Hasil Gunung Api Tua (QTV) terdiri atas lava, breksi, aglomerat bersusunan andesit – basal. Struktur kekar melembar, Tufa pasiran dan pasir gunung api mudah lepas, berasal dari kegiatan gunung api strato muda yaitu; Gunung Wai Sano (terletak di Kabupaten Manggarai

Barat), Gunung Ine Rie (terletak di Kabupaten Ngada), Gunung Ambulombo (terletak di Kabupaten Nagekeo) dan Poco Ranaka (terletak di Kabupaten Manggarai). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.9 di bawah ini.

Tabel 2.9 Persebaran Kondisi Geologi Kabupaten Flores Timur Tahun 2023

No	Kecamatan	Jenis Geologi				
		Aluvial (Qa)	Batuan Gunungapi Muda (Qhv)	Batuan Terobosan (Gr4)	Batugamping Korai (Ql)	Formasi Kiro (Tmk)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Adonara	183,92	0	0	1.004,47	4.469,33
2	Adonara Barat	1.004,52	0	0	3,80	7.211,85
3	Adonara Tengah	0	0	0	0	3.811,08
4	Adonara Timur	1.061,43	1.763,80	0	681,74	4.932,30
5	Demon Pagong	0	3.027,38	0	0	0
6	Ile Boleng	0	3.839,89	0	917,20	0
7	Ile Mandiri	1.775,47	0	0	0	0
8	Ile Bura	0	0	0	0	0
9	Kelubagolit	0,79	1.562,65	0	0	3.158,06
10	Larantuka	1.111,28	326,92	0	0	0
11	Lewolema	496,73	2.060,37	0	433,07	0
12	Solor Barat	0	2.727,88	0	2.13,49	0
13	Solor Selatan	0	2.093,30	0	1.023,92	0
14	Solor Timur	0	2.161,17	0	0	4.424,57
15	Tanjung Bunga	0	0	1,01	7.142,55	0
16	Titehena	705,81	0	0	3.163,25	0
17	Witihama	783,59	2.623,86	0	0	3.590,09
18	Wotan Ulumado	56,15	370,62	0	856,19	7.0086,15
19	Wulanggitang	3.418,96	0	0	791,43	0
Total		10.598,65	22.557,86	1,01	18.151,11	38.683,42

Lanjutan Tabel 2.9 (Kolom 8-11)

No	Kecamatan	Jenis Geologi			
		Formasi Lekopiko (Qvl)	Formasi Viquegue (QTv)	Formasi Waihekang (Tmptw1)	Hasil Gunung api Tua (QTv)
(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Adonara	0	0	0	0
2	Adonara Barat	0,07	0	0	0
3	Adonara Tengah	0	0	0	0
4	Adonara Timur	4,39	0	0	0
5	Demon Pagong	1,70	0	0	4.729,10
6	Ile Boleng	2,85	0	0	0
7	Ile Mandiri	0,29	0	0	4.925,23
8	Ile Bura	9.631,25	0	1.234,10	0
9	Kelubagolit	0	0	0	0
10	Larantuka	6,03	0	0	4.434,60
11	Lewolema	0,59	0	0	5.598,00
12	Solor Barat	6,21	0	0	7.261,78
13	Solor Selatan	0,82	0	0	0
14	Solor Timur	0,57	0	0	0
15	Tanjung Bunga	7,30	0	0	17.675,89
16	Titehena	2,52	4,05	1.131,43	10.259,68
17	Witihama	1,43	0	0	0
18	Wotan Ulumado	1,51	0	0	0
19	Wulanggitang	4.770,91	8.145,86	1.834,75	3.224,59
Total		14.438,45	8.149,90	4.200,28	58.110,85

Sumber : Rancangan Akhir RTRW Kabupaten Flores Timur Tahun 2025-2045

Gambaran kondisi di atas menjelaskan bahwa Kabupaten Flores Timur memiliki potensi batuan yang sangat banyak. Hal ini memberikan nilai positif dimana struktur tanah berbatuan mampu menahan longsor dengan tingkat

kelerengan yang curam dan menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat dalam mengeksploitasi batuan untuk pembangunan. Selain itu struktur tanah berbatuan dengan kandungan tanah yang kurang memberikan nilai negatif bagi pertanian masyarakat serta daerah yang berada di bawah lereng gunung berapi berpotensi terjadi longsor disertai banjir bandang karena struktur tanah berada di atas permukaan aliran larva.

2.f. Jenis Tanah

Jenis tanah yang tersebar di wilayah Kabupaten Flores Timur terdiri dari aluvium, batu gamping, sedimen, dan vulkanik. Tanah aluvium adalah sejenis tanah liat, halus dan dapat menampung air hujan yang tergenang. Dengan demikian, padi sawah sangat cocok ditanam di tanah jenis aluvium. Tanah aluvium biasanya terdapat di tebingan sungai, delta sungai dan dataran yang tergenang banjir. Banjir yang melimpah akan menimbulkan endapan tanah aluvium di tepi sungai. Tanah aluvium seluas 253,68 Ha yang terdapat di Kecamatan Witihamo.

Batu gamping merupakan batuan sedimen yang sebagian besar terdiri dari kalsium karbonat terutama dalam bentuk kalsit dan magnesium karbonat. Pembentukan tanah dari batu gamping dipengaruhi oleh kondisi iklim dengan curah hujan yang termasuk kedalam tipe B atau bulan basah. Proses pelapukan batu gamping membentuk mineral sekunder dan pelapukan lebih lanjut menyebabkan terbentuknya mineral kaolinit. Jenis tanah batu gamping memiliki luas sebesar 94.055,14 Ha yang berada di Kecamatan Adonara, Adonara Barat, Adonara Tengah, Adonara Timur, Demon Pagong, Ile Mandiri, Ile Bura, Kelubagolit, Larantuka, Lewolema, Solor Barat, Solor Selatan, Solor Timur, Tanjung Bunga, Titehena, Witihamo, Wotan Ulumado dan Wulanggitang.

Tanah sedimen adalah tanah yang terbentuk dari hasil lapukan batuan yang kemudian diendapkan di lokasi lain oleh proses alam, misalnya oleh air, angin dan lain-lain. Biasanya tanah sedimen bersifat lebih homogen, terdiri atas lapisan yang berganti-ganti, contohnya adalah tanah lempung pantai yang biasanya diselingi oleh lapisan pasir. Tanah sedimen seluas 2.327,59 Ha yang tersebar di Kecamatan Solor Barat, Solor Selatan dan Wulanggitang.

Tanah vulkanik adalah jenis tanah yang berasal dari pelapukan material padat maupun material cair yang dikeluarkan oleh gunung berapi saat terjadi erupsi. Tanah ini merupakan jenis tanah yang subur karena banyaknya unsur hara yang terkandung di dalamnya. Tanah vulkanik seluas 78.117,04 Ha yang tersebar di Kecamatan Adonara Timur, Demon Pagong, Ile Boleng, Ile Mandiri, Ile Bura, Kelubagolit, Larantuka, Lewolema, Solor Barat, Solor Selatan, Tanjung Bunga, Titehena, Witihamo dan Wulanggitang.

Jenis tanah di Kabupaten Flores Timur didominasi oleh batu gamping seluas 94.055,14 Ha atau 54% dari luas wilayah. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.10 berikut.

Tabel 2.10 Jenis Tanah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023

No	Kecamatan	Luas Jenis Tanah (Ha)			
		Aluvium	Batu Gamping	Sedimen	Volkanik
1	Adonara	-	5.653,25	-	-
2	Adonara Barat	-	8.213,68	-	-
3	Adonara Tengah	-	3.808,06	-	-
4	Adonara Timur	-	5.624,46	-	2.812,53
5	Demon Pagong	-	4.905,83	-	2.846,20
6	Ile Boleng	-	-	-	4.756,25
7	Ile Mandiri	-	2.322,91	-	4.372,73
8	Ile Bura	-	2.157,29	-	8.699,51
9	Kelubagolit	-	3.121,28	-	1.596,53
10	Larantuka	-	3.333,90	-	2.540,23
11	Lewolema	-	5.309,91	-	3.272,00
12	Solor Barat	-	8.741,93	1.351,40	2.026,34
13	Solor Selatan	-	661,75	754,21	1.699,58
14	Solor Timur	-	6.581,07	-	-
15	Tanjung Bunga	-	6.324,95	-	18.482,11
16	Titehena	-	6.443,31	-	8.811,46
17	Witihama	253,68	2.921,59	-	3.818,28
18	Wotan Ulumado	-	8.363,92	-	-
19	Wulanggitang	-	9.566,04	221,98	12.383,29
Total		253,68	94.055,14	2.327,59	78.117,04

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2025-2029

Gambaran kondisi di atas dapat dijelaskan bahwa Kabupaten Flores Timur dengan karakteristik tanah yang didominasi oleh jenis tanah batu gamping dan tanah vulkanik yang cocok untuk industri pertanian dimana sesuai dengan kondisi iklim pola pengembangan pertanian di Kabupaten Flores Timur lebih didominasi pada pola pertanian lahan kering pada hampir semua wilayah serta pola pertanian lahan basah yang terdapat pada wilayah Kecamatan Adonara, Adonara Barat, Adonara Timur, Tanjung Bunga, Titehena dan Wulanggitang.

2.g. Bentang Alam Karst

Berdasarkan Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 1456/20/MEM/2000 tentang Pengelolaan Kawasan Karst, Kabupaten Flores Timur termasuk dalam kategori level 1 (satu), dengan bentang alam karst seluas 17.315,74 Ha atau 9,89% dari luas wilayah berupa sebaran batu gamping, sebagaimana terlihat pada Tabel 2.11 berikut.

Tabel 2.11 Bentang Alam Karst Kabupaten Flores Timur Tahun 2023

No	Kecamatan	Luas (Ha)
1	Adonara	403,17
2	Adonara Barat	2.738,65
3	Adonara Timur	356,19
4	Demon Pagong	229,88
5	Ile Bura	77,91
6	Lewolema	315,29
7	Solor Barat	1.675,23
8	Solor Selatan	1.313,51
9	Solor Timur	1.114,49
10	Tanjung Bunga	6.071,06
11	Titehena	2.129,27
12	Witihama	67,11

No	Kecamatan	Luas (Ha)
13	Wotan Ulumado	525,92
14	Wulanggitang	298,06
Total		17.315,74

Sumber : Rancangan RTRW Kabupaten Flores Timur Tahun 2025-2045

Tabel di atas menggambarkan kemampuan lanskap karst yang berupa hutan dimana tempat tumbuh ekosistem, termasuk yang memiliki habitat di atas dan di bawah permukaan baik arus alam dan kualitas air dari sistem hidrologi yang berfungsi sebagai kawasan penyimpan air secara tetap dalam bentuk akuifer, sungai bawah tanah, telaga, atau danau bawah tanah, gua-gua dan sungai-sungai bawah tanah yang aktif yang membentuk jaringan baik secara horisontal ataupun vertikal, gua-gua dengan speleothem (ornamen-ornamen gua) yang aktif atau peninggalan sejarah sehingga berpotensi dikembangkan sebagai objek wisata dan kawasan yang memiliki flora dan fauna khas yang memenuhi arti dan fungsi sosial, ekonomi, budaya serta pengembangan ilmu pengetahuan.

B. Potensi Sumber Daya Alam

Potensi sumber daya alam merupakan keunggulan komperatif daerah yang dapat dioptimalkan menjadi potensi ekonomi demi kemajuan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Potensi-potensi sumber daya alam Kabupaten Flores Timur dapat dijelaskan sebagai berikut;

1. Kehutanan

Klasifikasi kawasan hutan di Kabupaten Flores Timur mengacu pada SK MenLHK No. SK 6615/Menlhk PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Kawasan Hutan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terdiri dari 3 jenis hutan, yaitu : 1) Hutan Lindung (HL), luas Hutan Lindung di Kabupaten Flores Timur seluas 36.253,08 Ha atau 69% dari luas wilayah; 2) Hutan Produksi Tetap (HP), luas Hutan Produksi Tetap di Kabupaten Flores Timur sebesar 13.565,49 Ha atau sebesar 26% dari luas wilayah. Luas Hutan Produksi yang dapat dikonversi di Kabupaten Flores Timur adalah 428,34 Ha atau sekitar 1% dari total luas wilayah; 3) Hutan Produksi Terbatas, luas Hutan Produksi Terbatas di Kabupaten Flores Timur adalah sebesar 2.061,63 Ha atau sekitar 4% dari total luas wilayah. Selengkapnya distribusi kawasan hutan di Kabupaten Flores Timur dapat dilihat pada Tabel 2.12 berikut.

Tabel 2.12 Luas Kawasan Hutan di Kabupaten Flores Timur

No	Kecamatan	Kawasan Hutan (Ha)				Total Luas (Ha)
		Hutan Lindung	Hutan Produksi dapat dikonversi	Hutan Produksi Tetap	Hutan Produksi terbatas	
1	Adonara	91,85	-	-	-	91,85
2	Adonara Barat	453,76	301,09	-	-	754,85
3	Adonara Tengah	6,63	22,15	-	-	28,77
4	Adonara Timur	210,94	105,10	-	-	316,04
5	Demon Pagong	1.278,83	-	4.151,72	-	5.430,55
6	Ile Boleng	455,20	-	-	-	455,20
7	Ile Mandiri	1.574,17	-	1.094,10	-	2.668,27
8	Ile Bura	4.419,31	-	-	-	4.419,31
9	Kelubagolit	92,64	-	-	-	92,64
10	Larantuka	3.522,37	-	-	-	3.522,37

No	Kecamatan	Kawasan Hutan (Ha)				Total Luas (Ha)
		Hutan Lindung	Hutan Produksi dapat dikonversi	Hutan Produksi Tetap	Hutan Produksi terbatas	
11	Lewolema	1.553,32	-	3.078,96	-	4.632,28
12	Solor Barat	3.414,64	-	1.187,71	-	4.602,35
13	Solor Selatan	304,25	-	817,43	-	1.121,68
14	Solor Timur	1.847,66	-	-	-	1.847,66
15	Tanjung Bunga	6.579,31	-	-	2.061,63	8.640,94
16	Titehena	2.461,06	-	3.142,87	-	5.603,93
17	Witihama	368,30	-	-	-	368,30
18	Wotan Ulumado	845,25	-	92,70	-	937,94
19	Wulanggitang	6.773,60	-	-	-	6.773,60
Total		36.253,08	428,34	13.565,49	2.061,63	52.308,53

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2025-2029

2. Pertanian

Hasil dari sektor pertanian produksi tanaman pangan di Kabupaten Flores Timur menurut jenis komoditi meliputi padi sawah, padi gogo, jagung, sorgum, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, dan kacang hijau. Hasil produksi tanaman pangan di Kabupaten Flores Timur ditampilkan pada Tabel 2.13 berikut.

Tabel 2.13 Produksi Tanaman Pangan (Ton) di Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2024

No	Kecamatan	Produksi Tanaman Pangan Tahun 2023-2024							
		Padi Sawah		Padi Gogo		Jagung		Sorgum	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
1	Wulanggitang	1,400.00	641.90	5,533.35	5,186.70	3,733.73	3,494.82	1.82	-
2	Titehena	1,815.00	619.20	2,049.60	1,740.00	3,701.16	2,231.46	26.32	-
3	Ile Bura	-	-	1,666.86	-	1,946.00	-	45.00	20.40
4	Tanjung Bunga	98.37	131.60	2,078.44	2,953.23	2,686.64	2,825.57	12.67	66.30
5	Lewolema	-	-	1,829.64	1,482.99	707.17	748.38	-	-
6	Larantuka	-	-	145.95	123.71	257.42	233.81	-	-
7	Ile Mandiri	-	-	1,990.00	1,563.05	1,712.64	1,583.36	19.00	-
8	Demon Pagong	17.00	10.20	1,104.00	636.30	384.65	577.72	138.00	77.70
9	Solor Barat	-	-	1,384.60	329.40	3,225.20	1,299.90	293.36	44.39
10	Solor Selatan	-	-	503.80	91.80	1,942.00	1,046.90	15.52	-
11	Solor Timur	-	-	342.26	34.50	1,198.40	236.64	-	-
12	Adonara Barat	378.00	391.50	1,825.28	1,012.10	1,636.98	2,393.60	20.00	16.00
13	Wotan Ulumado	-	-	569.23	147.20	689.72	56.00	21.00	22.10
14	Adonara Tengah	33.60	7.60	267.04	297.32	334.80	495.00	-	-
15	Adonara Timur	65.60	64.00	90.00	45.00	757.48	692.30	10.50	-
16	Ile Boleng	-	-	6.00	-	2,793.44	486.20	-	-
17	Witihama	-	-	215.76	116.00	5,851.44	6,027.00	-	-
18	Kelubagolit	4.00	12.00	44.50	42.16	212.10	218.50	5.85	-
19	Adonara	109.20	86.10	738.34	231.20	812.00	582.50	33.00	-
Kab. Flores Timur		3,920.77	1,964.10	22,384.65	16,032.66	34,582.96	25,229.67	642.04	246.89

Lanjutan Tabel 2.13 ...

No	Kecamatan	Produksi Tanaman Pangan Tahun 2023-2024							
		Ubi Kayu		Ubi Jalar		Kacang Tanah		Kacang Hijau	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
1	Wulanggitang	3,662.40	36,548.40	94.68	-	54.45	54.45	3.60	3.60
2	Titehena	2,416.40	23,056.04	62.40	123.20	12.40	12.40	10.16	10.16
3	Ile Bura	1,596.00	15,540.00	-	-	9.60	9.60	-	-
4	Tanjung Bunga	1,246.00	10,947.00	38.90	39.00	50.40	50.40	-	-
5	Lewolema	1,697.36	26,740.04	6.82	-	2.38	2.38	-	-
6	Larantuka	697.60	7,640.28	-	-	18.45	18.45	-	-

perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/ atau Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Luas kawasan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Flores Timur dapat dilihat pada Tabel 2.15 berikut.

Tabel 2. 15 Luas Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) Kabupaten Flores Timur

No	Kecamatan	KP2B 2023 (Ha)
1	Adonara	33,81
2	Adonara Barat	10,27
3	Adonara Tengah	3,56
4	Ile Boleng	0,08
5	Kelubagolit	173,95
6	Solor Barat	719,95
7	Solor Selatan	213,48
8	Solor Timur	181,52
9	Tanjung Bunga	24,37
10	Titehena	122,52
11	Witihama	2.009,34
12	Wulanggitang	171,70
Grand Total		3.664,55

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2025-2029

Kabupaten Flores Timur yang ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dengan total luas sebesar 3.664,55 Ha tersebar di seluruh kecamatan. Wilayah yang ditetapkan sebagai KP2B dengan luasan terbesar berada di Kecamatan Witihama dengan luas 2.009,34 Ha.

3. Perkebunan

Terdapat 5 (lima) komoditi tanaman perkebunan yang ada di Kabupaten Flores Timur, diantaranya adalah kelapa, kopi, kakao, tembakau dan mete. Tanaman Kelapa mendominasi di seluruh Kecamatan dengan total produksi sebesar 10.672,21 ton di tahun 2023-2024. Jumlah produksi komoditi Perkebunan di Kabupaten Flores Timur dapat dilihat pada Tabel 2.16 berikut.

Tabel 2.16 Produksi Hasil Perkebunan (Ton) di Kabupaten Flores Timur, Tahun 2023-2024

No	Kecamatan	Produksi (Ton)									
		Kelapa		Kopi		Kakao		Tembakau		Mete	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
1	Wulanggitang	887,00	488,00	653,00	620,00	447,00	452,25	-	9,30	936,02	922,82
2	Titehena	195,00	195,00	62,00	65,00	398,00	145,59	-	-	896,60	849,40
3	Ile Bura	438,69	436,44	71,00	70,60	71,00	74,00	-	-	1.025,00	1.022,60
4	Tanjung Bunga	712,00	710,25	35,00	35,00	52,98	75,14	-	-	2.820,00	2.821,80
5	Lewolema	166,47	184,20	7,00	7,00	26,20	30,00	-	-	1.425,00	1.352,30
6	Larantuka	181,00	148,95	6,25	5,85	32,00	32,00	-	-	773,00	770,00
7	Ile Mandiri	594,00	595,10	3,00	3,00	22,93	24,61	-	-	1.049,00	1047,00
8	Demon Pagong	377,00	388,20	-	-	60,00	65,30	-	-	1.029,00	886,00
9	Solor Barat	16,50	17,10	1,58	2,48	1,58	6,13	-	-	92,00	95,10
10	Solor Selatan	104,00	109,20	5,00	5,00	4,00	4,00	-	-	101,00	99,90
11	Solor Timur	23,30	25,30	-	-	1,00	1,00	-	-	67,75	70,90
12	Adonara Barat	970,00	1017,66	176,00	178,00	158,00	162,80	3,00	32,60	298,70	301,50

No	Kecamatan	Produksi (Ton)									
		Kelapa		Kopi		Kakao		Tembakau		Mete	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
13	Wotan Ulumado	605,00	634,00	20,10	20,10	60,19	56,00	-	-	596,00	596,40
14	Adonara Tengah	698,00	767,68	187,00	188,70	534,00	546,60	-	-	144,00	147,00
15	Adonara Timur	875,00	910,00	166,00	167,25	612,00	599,45	-	-	361,42	360,52
16	Ile Boleng	721,25	718,75	1,00	1,00	12,00	14,40	170,00	38,40	270,00	267,20
17	Witihama	1.075,00	1065,90	7,00	7,00	4,75	4,75	3,00	0,30	545,00	534,60
18	Kelubagolit	992,00	979,70	24,00	24,00	98,00	100,90	-	0.00	310,56	283,56
19	Adonara	1.041,00	1093,80	2,00	2,00	35,00	45,20	37,00	3,90	277,00	264,50
Kab. Flores Timur		10.672,21	10.485,23	1.426,93	1.401,98	2.630,63	2.440,12	213,00	84,50	13.017,05	12.693,10

Sumber : Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Flores Timur, Tahun 2025

4. Peternakan

Populasi ternak di Kabupaten Flores Timur terdiri dari sapi, kuda, kambing, domba, babi, ayam buras, ayam ras, dan bebek. Populasi ternak pada tahun 2024 di Kabupaten Flores Timur didominasi oleh ayam ras sebanyak 360.000 ekor. Jumlah populasi ternak di Kabupaten Flores Timur pada Tahun 2024 sebagaimana terlihat pada Tabel 2.17 berikut.

Tabel 2.17 Populasi Ternak (Ekor) di Kabupaten Flores Timur Tahun 2024

No	Kecamatan	Populasi Ternak (Ekor) Tahun 2024							
		Sapi	Kuda	Kambing	Domba	Babi	Ayam Buras	Ayam Ras	Bebek
1	Wulanggitang	441.00	6.00	1,475.00	-	1,492.00	5,533.00	-	936
2	Titehena	452.00	-	2,800.00	2.00	1,770.00	10,401.00	360.000	162
3	Ile Bura	43.00	-	1,684.00	1.00	462.00	3,856.00	-	-
4	Tanjung Bunga	157.00	-	2,434.00	12.00	1,167.00	10,254.00	-	108
5	Lewolema	43.00	-	384.00	-	952.00	2,721.00	-	-
6	Larantuka	40.00	-	681.00	3.00	1,724.00	9,411.00	-	1.62
7	Ile Mandiri	20.00	-	375.00	-	899.00	3,958.00	-	-
8	Demon Pagong	26.00	-	685.00	-	392.00	1,790.00	-	-
9	Solor Barat	145.00	1.00	2,402.00	-	1,107.00	5,294.00	-	-
10	Solor Selatan	-	-	526.00	-	209.00	1,398.00	-	-
11	Solor Timur	61.00	-	5,347.00	130.00	466.00	12,607.00	-	-
12	Adonara Barat	84.00	9.00	1,757.00	26.00	2,072.00	6,201.00	-	-
13	Wotan Ulumado	101.00	26.00	2,196.00	2.00	1,359.00	6,559.00	-	-
14	Adonara Tengah	1.00	40.00	1,234.00	3.00	2,229.00	8,113.00	-	-
15	Adonara Timur	87.00	1.00	3,105.00	209.00	2,531.00	9,905.00	-	-
16	Ile Boleng	3.00	-	3,691.00	90.00	3,012.00	3,701.00	-	-
17	Witihama	9.00	1.00	7,402.00	58.00	1,623.00	6,255.00	-	-
18	Kelubagolit	39.00	-	1,034.00	7.00	1,751.00	3,138.00	-	-
19	Adonara	91.00	18.00	2,926.00	12.00	390.00	6,649.00	-	489
Kab. Flores Timur		1,843.00	102.00	42,138.00	555.00	25,607.00	117,744.00	360.000	3.315

Sumber : Dinas Perkenunan dan Peternakan Kab. Flores Timur, Tahun 2025

5. Periklanan

Kabupaten Flores Timur memiliki luas wilayah 5.983,38 Km², dengan luas daratan 1.748,92 Km² (29,23% luas wilayah) dan luas lautan 4.234,46 Km² (70,77% luas wilayah). Dengan memiliki wilayah laut yang luas, menggambarkan Flores Timur kaya akan ikan dan potensi laut lainnya seperti rumput laut yang dapat berkontribusi dalam peningkatan ekonomi Masyarakat. Perkembangan Produksi Perikanan Kabupaten Flores Timur dapat dilihat pada Tabel 2.18 dan 2.19 berikut.

Tabel 2.18 Produksi Perikanan Tangkap
Kabupaten Flores Timur Tahun 2020-2024

No	Jenis Ikan	Produksi Ikan (Ton)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Kakap/ <i>Lutjanus</i>	184.00	173.00	155.00	-	167.00
2	Kuwe/ <i>Caranx sp</i>	397.00	374.00	210.00	90.00	142.00
3	Kerapu/ <i>Epinephelus sp</i>	250.00	259.00	235.00	481.00	246.00
4	Pari/ <i>Trygon sp</i>	77.00	51.00	6.00	-	8.00
5	Ekor Kuning/ <i>Caesio Erythrogaster</i>	147.00	165.00	351.00	360.00	456.00
6	Selar/ <i>Selaroides lepis</i>	1,354.00	1,574.00	1,579.00	2,519.00	1,596.00
7	Tembang/ <i>Sardinella sp</i>	3,491.00	3,455.00	2,753.00	2,355.00	2,704.00
8	Julung-Julung/ <i>Hemirhamphus far</i>	149.00	235.00	467.00	464.00	475.00
9	Teri/ <i>Stolephorus commersonii</i>	341.00	502.00	316.00	184.00	412.00
10	Kembung/ <i>Restreliger sp</i>	332.00	312.00	309.00	118.00	312.00
11	Biji Nangka/ <i>Upeneus sp</i>	97.00	94.00	273.00	262.00	270.00
12	Tenggiri/ <i>Scomberomorus sp</i>	342.00	350.00	310.00	73.00	300.00
13	Tuna/ <i>Thunnus sp</i>	980.00	1,006.00	430.00	145.00	429.00
14	Cakalang/ <i>Catsuwonus pelamis</i>	1,955.00	936.00	1,276.00	1,355.00	345.00
15	Tongkol/ <i>Auxis thazard</i>	1,249.00	1,357.00	1,676.00	2,386.00	1,607.00
16	Sunglir/ <i>Elagatis bipnnulatus</i>	98.00	94.00	97.00	19.00	99.00
17	Layang/ <i>Decapterus sp</i>	1,485.00	1,611.00	1,615.00	1,605.00	1,705.00
18	Baronang/ <i>Siganus sp</i>	49.00	40.00	51.00	49.00	50.00
19	Layur/ <i>Trhiurus savala</i>	83.00	275.00	97.00	80.00	99.00
20	Terbang/ <i>Cypsilurus poecilopterus</i>	88.00	93.00	514.00	510.00	534.00
21	Lemadang/ <i>Coryphaena hippurus</i>	69.00	63.00	57.00	42.00	50.00
22	Kakatua/ <i>Cheilinus undulates</i>	294.00	287.00	411.00	430.00	400.00
23	Kurisi/ <i>Nemipterus nematophorus</i>	432.00	613.00	327.00	159.00	320.00
24	Swaggi/ <i>Pricanthus tayenus</i>	99.00	102.00	106.00	174.00	100.00
25	Lencam/ <i>Lutjanus sp</i>	1,055.00	1,202.00	979.00	994.00	918.00
26	Cumi-Cumi/ <i>Loligo</i>	297.00	414.00	339.00	202.00	459.00
27	Cendro/ <i>Tylosurus crocodiles</i>	287.00	290.00	847.00	846.00	797.00
Kab. Flores Timur		15,681.00	15,927.00	15,786.00	15,902.00	15,000.00

Sumber: Dinas Perikanan Kab. Flores Timur, Tahun 2025

Tabel 2.19 Budidaya Rumput Laut di Kabupaten Flores Timur Tahun 2022-2024

[illegible]

No	Kecamatan	Potensi Luas Lahan (Ha)	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
			Luas Lahan Budidaya (Ha)	Produksi Ton Kering (Ton)	Jumlah RTP Budidaya	Luas Lahan Budidaya (Ha)	Produk si Ton Kering (Ton)	Jumlah RTP Budidaya	Luas Lahan Budidaya (Ha)	Produk si Ton Kering (Ton)	Jumlah RTP Budidaya
15	Ile Boleng	500.00	1.00	2.50	70.00	5.00	16.87	70.00	5.00	10.83	70.00
16	Witihama	400.00	2.00	5.12	30.00	2.00	3.92	20.00	2.00	6.82	20.00
17	Adonara	150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		3,000.00	27.50	248.94	220.00	31.00	269.14	220.00	31.00	44.04	220.00

Sumber: Dinas Perikanan Kab. Flores Timur, Tahun 2025

6. Pariwisata

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang memiliki peran penting dalam pembangunan daerah. Kabupaten Flores Timur berbatasan langsung dengan laut Sawu dan laut Flores, kondisi ini dapat menggambarkan potensi wisata laut dan pantai yang dapat dikembangkan. Selain potensi wisata alam, Kabupaten Flores Timur memiliki tradisi tahunan yang dikenal sebagai Semana Santa. Kegiatan ini dihadiri oleh masyarakat setempat dan menarik perhatian wisatawan domestik dan juga mancanegara. Perkembangan jumlah wisatawan baik domestik maupun mancanegara yang mengunjungi beberapa Obyek Wisata di Kabupaten Flores Timur selama 2 (dua) tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 2.20 berikut.

Tabel 2.20 Data Kunjungan Wisatawan di Obyek Wisata di Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2024

No	Objek Wisata	Jumlah Wisatawan Tahun 2023 (Orang)		Jumlah Wisatawan Tahun 2024 (Orang)	
		Domestik	Mancanegara	Domestik	Mancanegara
1	Waiplatin	9.964	-	4.300	17
2	Asam Satu Beach	3.728	-	600	-
3	Pantai Deri	2.874	-	914	-
4	Pantai Riangsunge	891	4	1.333	-
5	Desa Lewokluok	4.779	25	356	-
6	Pantai Rako	3.429	27	-	-
7	Pantai Oa	1.898	-	-	-
8	Pulau Mekko	3.058	3	7.198	-
9	Pantai Neren Watotena	21.936	-	-	-
10	Pantai Ina Burak	27.733	-	31.076	-
Sub Total		80.290	59	45.777	17
Total		80.349		45.794	

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Flores Timur, Tahun 2025

Terdapat 10 (sepuluh) obyek wisata yang ada di Kabupaten Flores Timur, dengan total jumlah wisatawan pada tahun 2023 sebanyak 80.349 wisatawan terdiri dari 80.290 wisatawan domestik dan 59 wisatawan mancanegara. Sementara pada tahun 2024 jumlah wisatawan mengalami penurunan. Kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa event pariwisata yang dilaksanakan di beberapa objek wisata pada tahun 2023 tidak dilaksanakan pada tahun 2024. Obyek wisata Pantai Ina Burak memiliki jumlah kunjungan tertinggi yakni sebanyak 27.733 wisatawan dan meningkat di tahun 2024 dengan jumlah kunjungan 31.076 Wisatawan. Tahun 2023 Objek Wisata Desa Lewokluok dan Pantai Rako memiliki jumlah kunjungan wisatawan mancanegara tertinggi yakni sebanyak 25 wisatawan dan 27 wisatawan.

Tradisi Semana Santa merupakan acara tahunan yang dilaksanakan pada perayaan Paskah. Saat terjadi Pandemi Covid-19 melanda Indonesia pada awal tahun 2020, mengharuskan kegiatan Semana Santa untuk sementara ditiadakan karena adanya pembatasan sosial (*social distancing*). Untuk menghindari penyebaran virus Covid-19, dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun yakni pada tahun 2020-2022 tidak dilaksanakan, dan dilaksanakan kembali pada tahun 2023. Tradisi Semana Santa disambut dengan antusiasme yang tinggi, kondisi ini terlihat dari jumlah peziarah yang datang sebanyak 23.753 peziarah yang terdiri dari 15.620 peziarah dari luar Keuskupan Larantuka, sebanyak 8.115 peziarah dari Keuskupan Larantuka, dan terdapat 18 peziarah dari mancanegara sebagaimana terlihat pada Tabel 2.21 berikut.

Tabel 2.21 Jumlah Peziarah Semana Santa
Paroki Katedral Reinha Rosari Larantuka, Tahun 2023-2024

No	Uraian	Tahun	
		2023 (Orang)	2024 (Orang)
1	Peziarah dari luar Keuskupan Larantuka	15.620	7.753
2	Peziarah Keuskupan Larantuka	8.115	15.460
3	Peziarah Mancanegara	18	128
Total		23.753	23.341

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Flores Timur, Tahun 2025

C. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

1. Daya Dukung Lahan

Kondisi daya dukung lahan Kabupaten Flores Timur pada tahun 2023 berdasarkan hasil perhitungan dinyatakan defisit, dengan total nilai produksi pertanian sebesar Rp 515.260.623.000, produksi perkebunan sebesar Rp 234.050.640.000, dan produksi peternakan sebesar Rp 537.581.700.000 untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 2.22 berikut;

Tabel 2.22 Nilai Produksi Pertanian, Perkebunan dan Peternakan
Kabupaten Flores Timur Tahun 2023

No	Kecamatan	Total Nilai Produksi (Juta Rupiah)			total Σ (Pi x Hi)	Harga satuan beras (Rp/kg) Hb	Produktivitas beras (kg/ha) Ptvb
		Pertanian	Perkebunan	Peternakan			
1	Wulanggitang	85.421,5	40.976,0	138.517,8	264.915	11.100	2.400
2	Titehena	59.248,1	14.954,0	76.297,2	150.499	11.100	2.400
3	Ile Bura	29.250,5	8.504,9	11.975,9	49.731	11.100	2.400
4	Tanjung Bunga	45.760,3	9.653,4	17.042,9	72.457	11.100	2.400
5	Lewolema	24.989,5	2.608,3	10.819,4	38.417	11.100	2.400
6	Larantuka	4.249,4	2.893,5	17.618,5	24.761	11.100	2.400
7	Ile Mandiri	35.205,1	6.672,0	8.113,1	49.990	11.100	2.400
8	Demon Pagong	15.518,5	5.450,0	9.284,1	30.253	11.100	2.400
9	Solor Barat	28.306,0	256,6	17.917,3	46.480	11.100	2.400
10	Solor Selatan	14.144,4	1.302,0	6.189,7	21.636	11.100	2.400
11	Solor Timur	9.431,3	261,0	15.839,0	25.531	11.100	2.400
12	Adonara Barat	30.137,3	19.557,0	33.307,5	83.002	11.100	2.400
13	Wotan Ulumado	12.954,5	8.338,3	27.283,7	48.576	11.100	2.400
14	Adonara Tengah	5.676,7	27.542,0	23.121,5	56.340	11.100	2.400
15	Adonara Timur	12.635,5	30.866,0	19.820,6	63.322	11.100	2.400
16	Ile Boleng	25.425,0	16.248,5	24.155,3	65.829	11.100	2.400
17	Witihama	61.969,8	11.246,0	30.815,9	104.032	11.100	2.400

No	Kecamatan	Total Nilai Produksi (Juta Rupiah)			total $\Sigma (Pi \times Hi)$	Harga satuan beras (Rp/kg) Hb	Produktivitas beras (kg/ha) Ptvb
		Pertanian	Perkebunan	Peternakan			
18	Kelubagolit	1.366,4	13.384,0	21.437,3	36.188	11.100	2.400
19	Adonara	13.570,8	13.337,0	28.025,6	54.933	11.100	2.400
Kab. Flores Timur		515.260,6	234.050,6	537.581,7	1.286.893	11.100	2.400

Lanjutan Tabel 2.22

No	Kecamatan	Ketersediaan Lahan SL	Jumlah Penduduk 2023 (jiwa)	Luas lahan yang dibutuhkan untuk kebutuhan hidup layak per penduduk KHLL	Total kebutuhan lahan setara beras (ha) DL	Status daya dukung lahan	Keterangan
1	Wulanggintang	9.944	15.129	0,17	2.572	SL>DL	Belum Terlampaui
2	Titehena	5.649	13.414	0,17	2.280	SL>DL	Belum Terlampaui
3	Ile Bura	1.867	7.877	0,17	1.339	SL>DL	Belum Terlampaui
4	Tanjung Bunga	2.720	14.773	0,17	2.511	SL>DL	Belum Terlampaui
5	Lewolema	1.442	10.158	0,17	1.727	SL>DL	Terlampaui
6	Larantuka	929	41.445	0,17	7.046	SL<DL	Terlampaui
7	Ile Mandiri	1.877	12.168	0,17	2.069	SL>DL	Terlampaui
8	Demon Pagong	1.136	5.062	0,17	861	SL>DL	Belum Terlampaui
9	Solor Barat	1.745	11.660	0,17	1.982	SL>DL	Terlampaui
10	Solor Selatan	812	7.529	0,17	1.280	SL>DL	Terlampaui
11	Solor Timur	958	16.824	0,17	2.860	SL<DL	Terlampaui
12	Adonara Barat	3.116	13.946	0,17	2.371	SL>DL	Belum Terlampaui
13	Wotan Ulumado	1.823	10.561	0,17	1.795	SL>DL	Belum Terlampaui
14	Adonara Tengah	2.115	14.037	0,17	2.386	SL>DL	Terlampaui
15	Adonara Timur	2.377	31.280	0,17	5.318	SL>DL	Terlampaui
16	Ile Boleng	2.471	18.377	0,17	3.124	SL>DL	Terlampaui
17	Witihama	3.905	18.364	0,17	3.122	SL>DL	Belum Terlampaui
18	Kelubagolit	1.358	13.318	0,17	2.264	SL>DL	Terlampaui
19	Adonara	2.062	12.388	0,17	2.106	SL>DL	Terlampaui
Kab. Flores Timur		48.307	288.310	0,17	49.013	SL>DL	Terlampaui

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2025-2029

Berdasarkan hasil analisa, daya dukung lahan Kabupaten Flores Timur pada tahun 2024-2029 menunjukkan status defisit atau terlampaui, karena SL (ketersediaan lahan) <DL (kebutuhan lahan). Hasil proyeksi DDL, terdapat 11 kecamatan memiliki status daya dukung lahan terlampaui.

2. Daya Dukung Lahan Pertanian

Daya dukung lahan pertanian merupakan ukuran kemampuan produksi tanaman pangan/padi dan atau tanaman pangan lain dalam memenuhi kebutuhan pangan penduduk di suatu wilayah. Tingkat daya dukung lahan pertanian suatu wilayah ditentukan berdasarkan luas panen tanaman pangan per kapita dan luas lahan untuk swasembada pangan. Daya dukung lahan pertanian Kabupaten Flores Timur sebagaimana diperlihatkan dalam Tabel 2.23 dan 2.24 berikut.

Tabel 2.23 Luas Panen Tanaman Pangan per Kapita
Kabupaten Flores Timur, Tahun 2023-2029

No	Kecamatan	Luas Panen Tanaman Pangan Per Kapita X							Luas lahan untuk Swasembada Pangan
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	Wulangitang	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.0032
2	Titehena	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.0030
3	Ile Bura	0.21	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.19	0.0059
4	Tanjung Bunga	0.15	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.0032
5	Lewolema	0.13	0.13	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12	0.0046
6	Larantuka	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.0059
7	Ile Mandiri	0.15	0.15	0.15	0.15	0.14	0.14	0.14	0.0058
8	Demon Pagong	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.0049
9	Solor Barat	0.20	0.20	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.0067
10	Solor Selatan	0.18	0.17	0.17	0.16	0.16	0.16	0.15	0.0065
11	Solor Timur	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.0067
12	Adonara Barat	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.0043
13	Wotan Ulumado	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.0063
14	Adonara Tengah	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.0059
15	Adonara Timur	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.0033
16	Ile Boleng	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.0067
17	Witihama	0.19	0.19	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.0056
18	Kelubagolit	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.0082
19	Adonara	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.0047
Kab. Flores Timur		0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.0032

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2025-2029

Tabel 2.24 Daya Dukung Lahan Pertanian
Kabupaten Flores Timur, Tahun 2023-2029

No	Kecamatan	Daya Dukung Lahan Pertanian Tahun							Keterangan
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	Wulangitang	67.40	67.23	67.07	66.90	66.73	66.56	66.40	Mampu Swasembada
2	Titehena	57.92	57.58	57.24	56.91	56.58	56.25	55.92	Mampu Swasembada
3	Ile Bura	34.94	34.58	34.23	33.87	33.53	33.18	32.84	Mampu Swasembada
4	Tanjung Bunga	45.33	44.96	44.59	44.22	43.85	43.49	43.13	Mampu Swasembada
5	Lewolema	27.90	27.62	27.33	27.05	26.77	26.50	26.23	Mampu Swasembada
6	Larantuka	1.23	1.23	1.23	1.23	1.23	1.24	1.24	Mampu Swasembada
7	Ile Mandiri	26.03	25.69	25.35	25.01	24.68	24.35	24.02	Mampu Swasembada
8	Demon Pagong	28.83	28.71	28.71	28.71	28.71	28.71	28.71	Mampu Swasembada
9	Solor Barat	29.53	29.28	29.02	28.77	28.52	28.27	28.02	Mampu Swasembada
10	Solor Selatan	27.21	26.54	25.88	25.24	24.61	24.00	23.41	Mampu Swasembada
11	Solor Timur	7.43	7.34	7.26	7.17	7.08	7.00	6.92	Mampu Swasembada
12	Adonara Barat	20.08	19.98	19.89	19.79	19.69	19.60	19.50	Mampu Swasembada
13	Wotan Ulumado	10.48	10.34	10.19	10.05	9.91	9.77	9.64	Mampu Swasembada
14	Adonara Tengah	4.64	4.58	4.52	4.47	4.41	4.36	4.31	Mampu Swasembada
15	Adonara Timur	8.07	8.02	7.98	7.94	7.90	7.85	7.81	Mampu Swasembada
16	Ile Boleng	14.49	14.31	14.13	13.95	13.78	13.60	13.43	Mampu Swasembada
17	Witihama	33.58	33.19	32.81	32.43	32.06	31.69	31.33	Mampu Swasembada
18	Kelubagolit	1.13	1.12	1.10	1.09	1.08	1.06	1.05	Mampu Swasembada
19	Adonara	11.91	11.79	11.67	11.56	11.44	11.33	11.22	Mampu Swasembada
Kab. Flores Timur		29.88	29.64	29.39	29.15	28.91	28.68	28.44	Mampu Swasembada

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2025-2029

Tabel di atas dapat dijelaskan bahwa keseluruhan wilayah di Kabupaten Flores Timur termasuk dalam kategori lahan yang mampu untuk swasembada pangan dan mampu memberikan kehidupan yang layak bagi penduduknya, sedangkan luas daya dukung lahan pertanian mengalami penurunan pada tahun 2023-2029. Kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian serius dalam mengelola

lahan sehingga tidak berdampak pada kerusakan lingkungan dan masyarakat. Kemampuan daya dukung lahan pertanian dapat dilihat pada Tabel 2.25 berikut

Tabel 2.25 Rasio Kemampuan Daya Dukung (CCR)
Kabupaten Flores Timur, Tahun 2022

No	Kecamatan	Tahun 2022						Keterangan
		A	R	H	h	f	CCR	
1	Wulanggitang	3306	3	3812	0,8	1	3,25	Sangat Baik
2	Titehena	2330	3	3368	0,8	1	2,59	Sangat Baik
3	Ile Bura	1621	3	1969	0,8	1	3,09	Sangat Baik
4	Tanjung Bunga	2173	3	3701	0,8	1	2,20	Sangat Baik
5	Lewolema	1307	3	2540	0,8	1	1,93	Baik
6	Larantuka	303	3	10471	0,8	1	0,11	Sangat Rendah
7	Ile Mandiri	1842	3	3033	0,8	1	2,28	Sangat Baik
8	Demon Pagong	717	3	1273	0,8	1	2,11	Sangat Baik
9	Solor Barat	2298	3	2920	0,8	1	2,95	Sangat Baik
10	Solor Selatan	1327	3	1855	0,8	1	2,68	Sangat Baik
11	Solor Timur	833	3	4199	0,8	1	0,74	Rendah
12	Adonara Barat	1194	3	3505	0,8	1	1,28	Cukup
13	Wotan Ulumado	699	3	2631	0,8	1	1,00	Rendah
14	Adonara Tengah	383	3	3502	0,8	1	0,41	Sangat Rendah
15	Adonara Timur	838	3	7859	0,8	1	0,40	Sangat Rendah
16	Ile Boleng	1780	3	4583	0,8	1	1,46	Cukup
17	Witihama	3463	3	4585	0,8	1	2,83	Sangat Baik
18	Kelubagolit	124	3	3324	0,8	1	0,14	Sangat Rendah
19	Adonara	694	3	3098	0,8	1	0,84	Rendah
Kab. Flores Timur		27232	3	72224	0,8	1	1,41	Cukup

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2025-2029

Dari tabel di atas terlihat bahwa rasio kemampuan daya dukung pada tahun 2022 pada kecamatan Larantuka, Adonara Tengah, Adonara Timur dan Klubagolit berada pada kategori Sangat Rendah. Secara keseluruhan Kabupaten Flores Timur tergolong daya dukung Cukup. Kondisi ini diindikasikan karena jumlah penduduk yang terus bertambah, sehingga kebutuhan untuk lahan bermukim juga bertambah. Untuk mendapatkan kategori CCR pada semua kecamatan minimal Cukup perlu memperhatikan Jumlah area yang dapat digunakan untuk kegiatan pertanian, frekuensi panen per hektar per tahun, jumlah KK (rumah tangga), persentase jumlah penduduk yang tinggal (80%) dan ukuran lahan pertanian rata-rata yang dimiliki petani (1 Ha). Hal ini perlu mendapatkan perhatian serius untuk mengoptimalkan lahan yang ada namun dapat menghasilkan produksi pertanian yang dapat mencukupi kebutuhan masyarakat.

3. Daya Dukung Air Berdasarkan Sistem Grid

Hasil perhitungan daya dukung air di Kabupaten Flores Timur dengan menggunakan sistem *grid* ditampilkan pada Tabel 2.26 berikut ini.

Tabel 2.26 Luas Distribusi Daya Dukung Air Berdasarkan Sistem Grid
Menurut Kecamatan di Kabupaten Flores Timur

No	Kecamatan	Luas (Ha)	
		Belum Terlampaui	Terlampaui
1	Adonara	2.650,69	3.002,47
2	Adonara Barat	5.103,07	3.108,59
3	Adonara Tengah	3.047,13	760,93
4	Adonara Timur	5.969,34	2.463,11
5	Demon Pagong	4.859,26	2.889,61

No	Kecamatan	Luas (Ha)	
		Belum Terlampaui	Terlampaui
6	Ile Boleng	2.449,93	2.303,04
7	Ile Mandiri	3.119,08	3.569,64
8	Ile Bura	7.169,20	3.676,82
9	Kelubagolit	3.460,33	1.257,44
10	Larantuka	4.742,71	1.114,39
11	Lewolema	4.911,48	3.668,98
12	Solor Barat	8.939,50	3.123,49
13	Solor Selatan	2.200,13	914,53
14	Solor Timur	5.778,29	802,01
15	Tanjung Bunga	15.780,10	8.971,03
16	Titehena	8.770,68	6.472,99
17	Witihama	2.833,29	4.146,48
18	Wotan Ulumado	6.686,11	1.675,16
19	Wulanggitang	12.000,64	10.159,87
Total		110.470,99	64.080,57

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2025-2029

Daya dukung air berdasarkan sistem *grid* di Kabupaten Flores Timur menunjukkan kondisi belum terlampaui seluas 110.470,99 Ha atau mencapai 63% dari luas wilayah. Wilayah dengan daya dukung belum terlapaui terluas adalah kecamatan Tanjung Bunga. Sedangkan kondisi daya dukung terlampaui seluas 64.080,57 Ha atau sebesar 37% dari luas wilayah.

4. Daya Dukung Fungsi Lindung

Daya dukung fungsi lindung di Kabupaten Flores Timur dapat dilihat pada Tabel 2.27 di bawah ini :

Tabel 2.27 Daya Dukung Fungsi Lindung Kabupaten Flores Timur

No	Kecamatan	Luas (Ha)	DDL	Keterangan
1	Wulanggitang	22.171,313	0,73	Baik
2	Titehena	15.254,770	0,70	Baik
3	Ile Bura	10.856,802	0,56	Sedang
4	Tanjung Bunga	24.807,064	0,71	Baik
5	Lewo Lema	8.581,918	0,74	Baik
6	Larantuka	5.874,133	0,65	Baik
7	Ile Mandiri	6.695,641	0,66	Baik
8	Demon Pagong	7.752,030	0,67	Baik
9	Solor Barat	12.119,667	0,40	Rendah
10	Solor Selatan	3.115,545	0,59	Sedang
11	Solor Timur	6.581,066	0,56	Sedang
12	Adonara Barat	8.213,681	0,61	Baik
13	Wotan Ulumado	8.363,921	0,74	Baik
14	Adonara Tengah	3.808,061	0,49	Sedang
15	Adonara Timur	8.436,984	0,46	Sedang
16	Ile Boleng	4.756,249	0,39	Rendah
17	Witihama	6.993,542	0,36	Rendah
18	Kelubagolit	4.717,810	0,35	Rendah
19	Adonara	5.653,255	0,40	Rendah
Kab. Flores Timur		174.753,450	0,61	Baik

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2025-2029

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, diketahui daya dukung fungsi lindung di Kabupaten Flores Timur berada pada kategori baik. Terdapat 9 (sembilan) kecamatan dengan kategori baik, 5 (lima) kecamatan dengan kategori sedang, dan 5 (lima) kecamatan dengan kategori rendah.

5. Daya Dukung Permukiman

- a. Daya Dukung Permukiman Berdasarkan Rumusan Luas Wilayah yang Dikurangi dengan Total Penjumlahan Luas Kawasan Lindung dan Luas Kawasan Rawan Bencana.

Tabel 2.28 Luas Lahan Layak untuk Permukiman Berdasarkan Total Luas yang dikurangi dengan Kawasan Lindung serta Luas Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Flores Timur

No	Kecamatan	Luas Wilayah (LW) (Ha)	Kawasan Lindung (KL) (Ha)	Luas Rawan Bencana (Ha)	LPm (Ha)	LPm (m2)
1	Adonara	5.653,25	105,78	3.086,18	2.461,29	24.612.917,28
2	Adonara Barat	8.213,68	2.845,04	999,39	4.369,25	43.692.537,63
3	Adonara Tengah	3.808,06	552,05	452,24	2.803,78	28.037.776,80
4	Adonara Timur	8.436,98	1.097,73	694,46	6.644,79	66.447.940,92
5	Demon Pagong	7.752,03	3.721,72	8,69	4.021,62	40.216.195,08
6	Ile Boleng	4.756,25	448,15	6,39	4.301,71	43.017.127,86
7	Ile Mandiri	6.695,64	2.869,99	1.443,22	2.382,42	23.824.215,53
8	Ile Bura	10.856,80	3.713,80	0,73	7.142,27	71.422.749,63
9	Kelubagolit	4.717,81	9,48	561,25	4.147,08	41.470.808,48
10	Larantuka	5.874,13	2.830,26	611,92	2.431,96	24.319.584,47
11	Lewolema	8.581,92	4.842,79	1.650,22	2.088,91	20.889.084,14
12	Solor Barat	12.119,67	1.244,27	120,23	10.755,17	107.551.666,91
13	Solor Selatan	3.115,54	1.073,09	14,08	2.028,38	20.283.752,60
14	Solor Timur	6.581,07	2.427,26	164,93	3.988,88	39.888.783,30
15	Tanjung Bunga	24.807,06	13.275,07	8.949,25	2.582,75	25.827.495,99
16	Titehena	15.254,77	7.886,21	403,28	6.965,29	69.652.875,73
17	Witihama	6.993,54	237,02	1.515,05	5.241,48	52.414.751,99
18	Wotan Ulumado	8.363,92	4.867,11	528,64	2.968,16	29.681.645,09
19	Wulanggitang	22.171,31	12.104,61	39,60	10.027,10	100.271.032,02
Kab. Flores Timur		174.753,45	66.151,41	21.249,74	87.352,29	873.522.941,47

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2025-2029

Ditinjau dari luas areal kawasan lindung dan luas rawan bencana, Kabupaten Flores Timur diketahui memiliki luasan lahan yang layak untuk permukiman (Lpm) seluas 87.352,29 Ha. Kecamatan Solor Barat memiliki LPm tertinggi yakni seluas 10.755,17 Ha. Sedangkan LPm terendah berada pada Kecamatan Solor Selatan yaitu seluas 2.028,38 Ha. Berdasarkan luas lahan yang layak untuk permukiman, selanjutnya dilakukan perhitungan untuk daya dukung permukiman seperti terlihat pada Tabel 2.29 berikut;

Tabel 2.29 Perhitungan Daya Dukung Permukiman Tahun 2023 dan Proyeksi Daya Dukung Lahan Permukiman Tahun 2029 serta Proyeksi Jumlah Penduduk Optimal (JPO) Tahun 2029 dan Proyeksi Lahan Optimal Tahun 2029 di Kabupaten Flores Timur

No	Kecamatan	LPm (m2)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	DDPm	Jumlah Penduduk (Jiwa)	DDPm	JPO	Lpmo
			2023	2023	2029	2029		
1	Adonara	24.612.917,28	12.388	76,42	15.358	61,64	946.651	399.313
2	Adonara Barat	43.692.537,63	13.946	120,50	13.892	120,97	1.680.482	361.183
3	Adonara Tengah	28.037.776,80	14.037	76,82	8.381	128,66	1.078.376	217.919
4	Adonara Timur	66.447.940,92	31.280	81,70	15.525	164,61	2.555.690	403.660
5	Demon Pagong	40.216.195,08	5.062	305,57	10.807	143,13	1.546.777	280.969
6	Ile Boleng	43.017.127,86	18.377	90,03	41.378	39,98	1.654.505	1.075.832
7	Ile Mandiri	23.824.215,53	12.168	75,31	13.186	69,49	916.316	342.831
8	Ile Bura	71.422.749,63	7.877	348,74	5.085	540,25	2.747.029	132.204

Pada tahun 2023 menunjukkan kondisi Kabupaten Flores Timur masih mampu menampung penduduk untuk bermukim. Hasil proyeksi DDP Kabupaten Flores Timur pada tahun 2029 menunjukkan nilai $DDP > 1$, artinya Kabupaten Flores Timur dalam 5 tahun kedepan masih mampu menampung penduduk untuk bermukim. Selanjutnya hasil proyeksi daya dukung digunakan untuk perhitungan jumlah penduduk optimal dengan hasil perhitungan proyeksi jumlah penduduk optimal Kabupaten Flores Timur pada tahun 2029 adalah 33.579.036 jiwa. Berdasarkan hasil perhitungan proyeksi lahan optimal, luas lahan yang optimal untuk menampung permukiman di Kabupaten Flores Timur adalah seluas 7.874.593 m² atau 787,45 Ha. Kondisi ini menunjukkan bahwa lahan di Kabupaten Flores Timur masih mampu menampung penduduk bermukim.

Hasil Perhitungan *bulding coverage* di Kabupaten Flores Timur dapat dilihat pada Tabel 2.30 berikut.

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	RT	LB	%	Keterangan
1	Adonara	5.653,25	5.363,11	0,05	5,41	LB di bawah 30%
2	Adonara Barat	8.213,68	5.072,14	0,62	61,94	LB di atas 30%
3	Adonara Tengah	3.808,06	3.058,11	0,25	24,52	LB di bawah 30%
4	Adonara Timur	8.436,98	6.884,23	0,23	22,56	LB di bawah 30%
5	Demon Pagong	7.752,03	3.925,37	0,97	97,49	LB di atas 30%
6	Ile Boleng	4.756,25	3.978,81	0,20	19,54	LB di bawah 30%
7	Ile Mandiri	6.695,64	3.577,39	0,87	87,17	LB di atas 30%
8	Ilebura	10.856,80	6.962,57	0,56	55,93	LB di atas 30%
9	Kelubagolit	4.717,81	4.514,87	0,04	4,49	LB di bawah 30%
10	Larantuka	5.874,13	2.312,26	1,54	154,04	LB di atas 30%
11	Lewolema	8.581,92	3.537,32	1,43	142,61	LB di atas 30%
12	Solor Barat	12.119,67	10.592,83	0,14	14,41	LB di bawah 30%
13	Solor Selatan	3.115,54	1.922,54	0,62	62,05	LB di atas 30%
14	Solor Timur	6.581,07	3.854,59	0,71	70,73	LB di atas 30%
15	Tanjung Bunga	24.807,06	11.169,39	1,22	122,10	LB di atas 30%
16	Titehena	15.254,77	7.056,37	1,16	116,18	LB di atas 30%

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	RT	LB	%	Keterangan
17	Witihama	6.993,54	6.529,34	0,07	7,11	LB di bawah 30%
18	Wotan Ulumado	8.363,92	3.252,18	1,57	157,18	LB di atas 30%
19	Wulanggitang	22.171,31	9.751,24	1,27	127,37	LB di atas 30%
Kab. Flores Timur		174.753,45	103.314,67	0,69	69,15	LB di atas 30%

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2025-2029

Secara umum, kondisi liputan bangunan di Kabupaten Flores Timur adalah di atas 30%, hal ini menunjukkan pemanfaatan lahan di Kabupaten Flores Timur masih memperhatikan kualitas lingkungan.

c. Konsep Ambang Batas

Konsep Ambang Batas di Kabupaten Flores Timur dapat dilihat pada Tabel 2.31 berikut.

Tabel 2.31 Hasil Perhitungan Konsep Ambang Batas di Kabupaten Flores Timur

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	La	Lb	Li	Lm	Wb
1	Adonara	5.653,25	105,78	843,22	1.130,65	2.079,65	3.573,60
2	Adonara Barat	8.213,68	2.845,04	48,39	1.642,74	4.536,16	3.677,52
3	Adonara Tengah	3.808,06	552,05	5,94	761,61	1.319,59	2.488,47
4	Adonara Timur	8.436,98	1.097,73	1.052,94	1.687,40	3.838,07	4.598,91
5	Demon Pagong	7.752,03	3.721,72	1.203,76	1.550,41	6.475,89	1.276,14
6	Ile Boleng	4.756,25	448,15	2.302,20	951,25	3.701,60	1.054,65
7	Ile Mandiri	6.695,64	2.869,99	18,35	1.339,13	4.227,48	2.468,17
8	Ile Bura	10.856,80	3.713,80	4.233,52	2.171,36	10.118,68	738,12
9	Kelubagolit	4.717,81	9,48	2.134,80	943,56	3.087,84	1.629,97
10	Larantuka	5.874,13	2.830,26	653,04	1.174,83	4.658,12	1.216,01
11	Lewolema	8.581,92	4.842,79	22,22	1.716,38	6.581,39	2.000,53
12	Solor Barat	12.119,67	1.244,27	6.283,90	2.423,93	9.952,11	2.167,56
13	Solor Selatan	3.115,54	1.073,09	404,46	623,11	2.100,66	1.014,89
14	Solor Timur	6.581,07	2.427,26	2.822,99	1.316,21	6.566,46	14,61
15	Tanjung Bunga	24.807,06	13.275,07	1.751,15	4.961,41	19.987,63	4.819,44
16	Titehena	15.254,77	7.886,21	1.002,64	3.050,95	11.939,80	3.314,97
17	Witihama	6.993,54	237,02	2.793,47	1.398,71	4.429,20	2.564,34
18	Wotan Ulumado	8.363,92	4.867,11	523,53	1.672,78	7.063,43	1.300,49
19	Wulanggitang	22.171,31	12.104,61	849,66	4.434,26	17.388,53	4.782,79
Kab. Flores Timur		174.753,45	66.151,41	28.950,17	34.950,69	130.052,28	44.701,17

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2025-2029

Tabel 2.32 Area Bernilai Konservasi Tinggi di Kabupaten Flores Timur

No	Kecamatan	Luas ABKT Menurut Fungsi Kawasan (Ha)			
		Area Penggunaan Lahan	Hutan Lindung	Tubuh Air	Total
1	Adonara	47,38	91,85	0,00	139,23
2	Adonara Barat	-	453,76	-	453,76
3	Adonara Tengah	-	6,63	-	6,63
4	Adonara Timur	-	210,94	-	210,94
5	Demon Pagong	3,46	1.278,83	0,00	1.282,29
6	Ile Boleng	-	455,20	-	455,20
7	Ile Mandiri	11,50	1.574,17	0,01	1.585,68
8	Ile Bura	-	4.419,31	-	4.419,31
9	Kelubagolit	-	92,64	-	92,64
10	Larantuka	-	3.522,37	-	3.522,37
11	Lewolema	67,73	1.553,32	0,01	1.621,07
12	Solor Barat	0,03	3.414,55	0,05	3.414,64
13	Solor Selatan	-	304,25	-	304,25
14	Solor Timur	-	1.847,66	-	1.847,66

No	Kecamatan	Luas ABKT Menurut Fungsi Kawasan (Ha)			
		Area Penggunaan Lahan	Hutan Lindung	Tubuh Air	Total
15	Tanjung Bunga	176,00	6.579,30	0,05	6.755,34
16	Titehena	180,68	2.461,07	0,01	2.641,76
17	Witihama	223,57	368,30	1,40	593,27
18	Wotan Ulumado	-	845,25	-	845,25
19	Wulanggitang	-	6.773,60	-	6.773,60
Jumlah		710,36	36.252,99	1,53	36.964,87

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2025-2029

6. Daya Tampung Penduduk

Berdasarkan hasil perhitungan daya tampung penduduk Kabupaten Flores Timur tahun 2029 menunjukkan masih dapat terpenuhi. Diproyeksikan jumlah penduduk pada tahun 2029 adalah sebesar 302.869 jiwa dan daya tampung penduduk sebesar 2.426.216 jiwa. Hasil perhitungan daya tampung penduduk di Kabupaten Flores Timur selama periode Tahun 2024-2029 sebagaimana terlihat pada Tabel 2.33 berikut.

Tabel 2.33 Daya Tampung Penduduk Kabupaten Flores Timur Tahun 2024-2029

No	Kecamatan	Daya Tampung Rumah (unit)	Daya Tampung Penduduk (jiwa)	Jumlah penduduk 2023 (Jiwa)	Jumlah penduduk 2024 (Jiwa)	Jumlah penduduk 2029 (Jiwa)	Keterangan
		K = H+I+J	L = Kx 4 jiwa				
1	Wulanggitang	37.990	151.960	15.129	15.167	15.358	Memenuhi
2	Titehena	38.241	152.964	13.414	13.492	13.892	Memenuhi
3	Ile Bura	23.090	92.361	7.877	7.959	8.381	Memenuhi
4	Tanjung Bunga	34.437	137.746	14.773	14.896	15.525	Memenuhi
5	Lewolema	26.643	106.572	10.158	10.263	10.807	Memenuhi
6	Larantuka	26.643	106.572	41.445	41.434	41.378	Memenuhi
7	Ile Mandiri	30.301	121.204	12.168	12.332	13.186	Memenuhi
8	Demon Pagong	13.337	53.349	5.062	5.085	5.085	Memenuhi
9	Solor Barat	34.966	139.865	11.660	11.763	12.289	Memenuhi
10	Solor Selatan	14.901	59.602	7.529	7.720	8.751	Memenuhi
11	Solor Timur	36.337	145.348	16.824	17.027	18.079	Memenuhi
12	Adonara Barat	40.070	160.282	13.946	14.014	14.358	Memenuhi
13	Wotan Ulumado	33.442	133.766	10.561	10.710	11.486	Memenuhi
14	Adonara Tengah	27.257	109.029	14.037	14.213	15.124	Memenuhi
15	Adonara Timur	61.870	247.480	31.280	31.448	32.302	Memenuhi
16	Ile Boleng	44.931	179.725	18.377	18.611	19.825	Memenuhi
17	Witihama	31.290	125.161	18.364	18.578	19.683	Memenuhi
18	Kelubagolit	26.301	105.206	13.318	13.477	14.301	Memenuhi
19	Adonara	24.506	98.025	12.388	12.512	13.151	Memenuhi
Kab. Flores Timur		606.554	2.426.216	288.310	290.687	302.869	Memenuhi

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2025-2029

7. Dampak Risiko Lingkungan Hidup

a. Banjir Bandang

Menurut data dalam dokumen Kebijakan Rencana dan/atau Program (KRP) Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2027, banjir bandang pernah terjadi sebanyak 2 kali, yaitu: pada tanggal 27 Februari 1979 dan 2 April 2003 di Kota Larantuka dan

sekitarnya. Pada tahun 1979 sekitar 128 korban jiwa meninggal dunia dan 350 jiwa mengalami luka-luka, belum terhitung kerusakan fisik lainnya. Sedangkan pada tahun 2003, dampak banjir mengakibatkan korban sebanyak 10 jiwa meninggal dunia, 35 jiwa luka berat dan 66 jiwa luka ringan. Selain banjir bandang yang terjadi di Kota Larantuka di atas, wilayah lain juga mengalami banjir, seperti di Konga pada tahun 1982, lumpur dan batu menggenangi lahan-lahan pertanian masyarakat sehingga menyebabkan gagal panen. Luas kawasan Kabupaten Flores Timur yang rawan terhadap bencana banjir bandang dapat dilihat pada Tabel 2.34 berikut.

Tabel 2.34 Luas Kawasan Rawan Bencana Banjir Bandang
Kabupaten Flores Timur

No	Kecamatan	Luas Rawan Banjir Bandang (Ha)			
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total
1	Adonara	9,07	35,82	53,00	97,89
2	Adonara Barat	50,15	219,16	188,09	457,40
3	Adonara Tengah	15,52	56,23	8,66	80,41
4	Adonara Timur	7,34	2,30	-	9,63
5	Demon Pagong	-	5,35	-	5,35
6	Ile Boleng	-	-	-	-
7	Ile Mandiri	-	-	-	-
8	Ile Bura	-	-	11,55	11,55
9	Kelubagolit	-	-	-	-
10	Larantuka	-	-	-	-
11	Lewolema	-	-	-	-
12	Solor Barat	-	-	-	-
13	Solor Selatan	-	-	-	-
14	Solor Timur	-	-	-	-
15	Tanjung Bunga	-	-	-	-
16	Titehena	68,89	92,58	31,06	192,53
17	Witihama	-	-	-	-
18	Wotan Ulumado	14,81	33,06	0,40	48,27
19	Wulanggitang	98,21	231,78	246,23	576,22
Total		263,98	676,28	538,99	1.479,24

Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2025-2045

b. Gelombang Ekstrem dan Abrasi

Gelombang dapat menjadi ekstrem ketika dibangkitkan oleh angin badai yang terjadi di perairan laut. Kabupaten Flores Timur secara umum masuk dalam wilayah yang memiliki potensi tinggi adanya gelombang ekstrem. Sebagian besar pantai-pantai di Kabupaten Flores Timur masih terpapar dengan vegetasi-vegetasi endemik atau mangrove, namun di beberapa wilayah pantai terbuka dan langsung menuju dataran tinggi. Tinggi gelombang umumnya dipengaruhi oleh kecepatan angin.

Berdasarkan hasil pengamatan, gelombang yang terjadi di wilayah pesisir Kabupaten Flores Timur berasal dari angin barat dan barat daya perairan bagian selatan dan utara Pulau Flores. Perbedaan tinggi gelombang dipengaruhi oleh jarak rambat gelombang dan penghalang datangnya gelombang. Kecepatan arus dipengaruhi oleh perpindahan masa air yang disebabkan oleh pengaruh pasang surut dan kecepatan angin.

Tabel 2.35 Luas Kawasan Rawan Bencana Gelombang Ekstrem dan Abrasi Kabupaten Flores Timur

No	Kecamatan	Luas Rawan Bencana Gelombang Ekstrem dan Abrasi (Ha)			
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total
1	Adonara	-	372,92	-	-
2	Adonara Barat	-	269,60	-	-
3	Adonara Tengah	-	-	-	-
4	Adonara Timur	-	228,23	-	-
5	Demon Pagong	-	435,50	-	-
6	Ile Boleng	-	0,69	-	-
7	Ile Mandiri	-	226,35	-	-
8	Ile Bura	-	342,50	-	-
9	Kelubagolit	-	141,00	-	-
10	Larantuka	-	495,80	-	-
11	Lewolema	-	525,84	-	-
12	Solor Barat	-	1.045,79	-	-
13	Solor Selatan	-	255,83	-	-
14	Solor Timur	-	744,32	-	-
15	Tanjung Bunga	-	1.810,72	-	-
16	Titehena	-	735,34	-	-
17	Witihama	-	419,90	-	-
18	Wotan Ulumado	-	551,21	-	-
19	Wulanggitang	-	299,06	-	-
Total		-	8.900,59	-	-

Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2025-2045

c. Gempa Bumi

Gempa bumi biasa disebabkan oleh pergerakan kerak bumi atau lempeng bumi. Selain itu gempa bumi juga bisa disebabkan oleh letusan gunung api. Gambaran kawasan rawan bencana gempa bumi di Kabupaten Flores Timur sebagaimana terlihat pada Tabel 2.36 berikut.

Tabel 2.36 Luas Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Kabupaten Flores Timur

No	Kecamatan	Luas Rawan Gempa Bumi (Ha)			
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total
1	Adonara	625,07	1.032,38	3.086,18	4.743,63
2	Adonara Barat	3.797,01	2.686,11	999,39	7.482,51
3	Adonara Tengah	1.832,09	1.443,33	452,24	3.727,66
4	Adonara Timur	2.329,70	1.147,88	694,46	4.172,04
5	Demon Pagong	2.672,09	351,06	8,69	3.031,84
6	Ile Boleng	7,55	14,94	6,39	28,88
7	Ile Mandiri	2.831,36	2.193,53	1.443,22	6.468,11
8	Ile Bura	697,02	189,28	0,73	887,02
9	Kelubagolit	839,76	385,68	561,25	1.786,69
10	Larantuka	2.477,69	1.181,93	611,92	4.271,54
11	Lewolema	3.649,68	2.155,44	1.650,22	7.455,34
12	Solor Barat	7.260,96	3.675,90	120,23	11.057,08
13	Solor Selatan	1.767,78	1.074,18	14,08	2.856,05
14	Solor Timur	4.338,42	1.323,80	164,93	5.827,15
15	Tanjung Bunga	13.086,94	909,32	8.949,25	22.945,51
16	Titehena	7.495,09	1.093,89	403,28	8.992,26
17	Witihama	498,98	484,17	1.515,05	2.498,20
18	Wotan Ulumado	5.153,71	2.064,61	528,64	7.746,97
19	Wulanggitang	12.871,39	2.944,82	39,60	15.855,81
Total		74.232,30	26.352,26	21.249,74	121.834,30

Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2025-2045

d. Kebakaran Hutan dan Lahan

Kabupaten Flores Timur memiliki bahaya kebakaran hutan dan lahan mengingat wilayah ini adalah wilayah yang memiliki hutan dan iklim kering, namun kebakaran hutan dan lahan yang sering terjadi adalah akibat tebas bakar untuk pembukaan lahan-lahan pertanian. Kabupaten Flores Timur bukan wilayah yang memiliki lahan gambut. Kebakaran hutan dan lahan sangat banyak dipengaruhi oleh faktor manusia dan iklim. Faktor aktivitas manusia salah satunya adalah pembakaran hutan ilegal karena ingin membuka lahan baru. Kebakaran yang terjadi akibat alam misalnya karena petir, kemarau panjang sehingga matahari akan membakar tanaman yang kering melalui hal sederhana seperti adanya percikan api karena pembiasan cahaya dari kaca/kaleng yang mengkilap.

Tabel 2.37 Luas Kawasan Rawan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Flores Timur

No	Kecamatan	Luas Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan (Ha)			
		Rendah	Sedang	Tinggi	Grand Total
1	Adonara	37,93	3.194,20	2.372,59	5.604,72
2	Adonara Barat	-	4.058,12	4.119,55	8.177,67
3	Adonara Tengah	-	533,12	3.274,94	3.808,06
4	Adonara Timur	-	2.818,45	5.568,56	8.387,01
5	Demon Pagong	45,17	2.276,05	5.349,81	7.671,03
6	Ile Boleng	-	565,70	4.151,72	4.717,43
7	Ile Mandiri	239,60	594,02	5.825,88	6.659,51
8	Ile Bura	956,90	4.816,00	4.960,70	10.733,60
9	Kelubagolit	-	787,19	3.912,26	4.699,45
10	Larantuka	205,57	1.240,22	4.338,50	5.784,29
11	Lewolema	-	268,95	8.227,15	8.496,10
12	Solor Barat	-	2.615,10	9.347,05	11.962,15
13	Solor Selatan	-	1.427,23	1.652,29	3.079,52
14	Solor Timur	-	1.695,00	4.770,23	6.465,23
15	Tanjung Bunga	130,78	10.207,86	14.182,06	24.520,70
16	Titehena	525,54	4.963,06	9.653,20	15.141,80
17	Witihama	27,62	134,46	6.723,18	6.885,26
18	Wotan Ulumado	-	1.659,34	6.615,44	8.274,78
19	Wulanggitang	1.404,25	8.825,17	11.893,03	22.122,45
Kab. Flores Timur		3.573,36	52.679,25	116.938,15	173.190,77

Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2025-2045

e. Kekeringan

Berdasarkan dokumen KRP Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2027, kekeringan di Kabupaten Flores Timur diakibatkan oleh kondisi cuaca iklim. Dari 5 Stasiun yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dimana salah satunya adalah Stasiun Meteorologi Gewayantana yang berada di Kabupaten Flores Timur merupakan stasiun satu-satunya yang memiliki nilai durasi kekeringan sekitar 4-5 bulan untuk *return* periode 5 tahun. Pada *return* periode 25 tahun Stasiun Meteorologi Gewayantana di Kabupaten Flores Timur menunjukkan durasi kekeringan lebih dari 7 bulan. Kawasan rawan bencana kekeringan di Kabupaten Flores Timur dapat dilihat pada Tabel 2.38 berikut.

Tabel 2.38 Luas Kawasan Rawan Bencana Kekeringan
Kabupaten Flores Timur

No	Kecamatan	Luas Rawan Kekeringan (Ha)		
		Sedang	Tinggi	Grand Total
1	Adonara	1.201,38	4.403,34	5.604,72
2	Adonara Barat	4.359,89	3.817,79	8.177,67
3	Adonara Tengah	3.382,44	425,62	3.808,06
4	Adonara Timur	5.642,02	2.744,99	8.387,01
5	Demon Pagong	4.615,19	3.055,83	7.671,03
6	Ile Boleng	1.941,96	2.775,46	4.717,43
7	Ile Mandiri	2.826,86	3.832,65	6.659,51
8	Ile Bura	5.019,55	5.714,05	10.733,60
9	Kelubagolit	2.408,00	2.291,45	4.699,45
10	Larantuka	3.444,89	2.339,39	5.784,29
11	Lewolema	4.051,56	4.444,55	8.496,11
12	Solor Barat	2.503,58	9.458,58	11.962,15
13	Solor Selatan	885,81	2.193,71	3.079,52
14	Solor Timur	1.006,27	5.458,96	6.465,23
15	Tanjung Bunga	12.014,35	12.506,35	24.520,70
16	Titehena	8.249,28	6.892,51	15.141,80
17	Witihama	1.309,77	5.575,49	6.885,26
18	Wotan Ulumado	5.368,16	2.906,62	8.274,78
19	Wulanggitang	12.799,77	9.322,68	22.122,45
Kab. Flores Timur		83.030,73	90.160,03	173.190,77

Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2025-2045

f. Letusan Gunung Api

Kabupaten Flores Timur memiliki 4 (empat) gunung berapi aktif (vulkanik) dengan ketinggian antara 800-2.200 meter di atas permukaan laut/mdpl, sebagaimana terlihat pada Tabel 2.39 berikut.

Tabel 2.39 Gunung Api di Kabupaten Flores Timur

No	Nama Gunung Api	Ketinggian (mdpl)	Daerah Berbahaya (Ha)	Daerah Waspada (Ha)
1	Lewotobi Laki-Laki	1.584	69,20	150,60
2	Lewotobi Perempuan	1.703	68,00	136,10
3	Leraboleng	1.117	32,70	45,70
4	Ile Boleng	1.659	87,80	71,10

Sumber: Buku Data & Informai Spasial SDA Kabupaten Flores Timur, 2020

Gunung Lewotobi laki-laki dengan tinggi 1.584 mdpl dan gunung Lewotobi perempuan dengan tinggi 1.703 mdpl berada di Kecamatan Wulanggitang. Gunung Leraboleng dengan tinggi 1.117 mdpl berada di Kecamatan Titehena, dan gunung Ile Boleng dengan tinggi 1.659 mdpl berada di Kecamatan Ile Boleng. Pada satu sisi gunung-gunung tersebut banyak memberikan kontribusi terhadap tingkat kesuburan tanah, namun pada sisi yang lain menjadi sumber bencana yang setiap saat dapat mengancam yaitu gempa bumi dan letusan gunung berapi. Luas kawasan rawan bencana letusan gunung api di Kabupaten Flores Timur dapat dilihat pada Tabel 2.40 berikut.

Tabel 2.40 Kawasan Rawan Bencana Letusan Gunung Api
Kabupaten Flores Timur

No	Kecamatan	Luas Rawan Letusan Gunung Api (Ha)			
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total
1	Adonara	426,38	-	-	426,38
2	Adonara Barat	-	-	-	-
3	Adonara Tengah	-	-	-	-
4	Adonara Timur	2.671,02	500,28	854,80	4.026,10
5	Demon Pagong	2.886,36	645,28	745,55	4.277,19
6	Ile Boleng	2.409,09	1.881,59	431,29	4.721,97
7	Ile Mandiri	-	-	-	-
8	Ile Bura	7.435,97	-	1.459,34	8.895,31
9	Kelubagolit	1.754,74	734,73	295,46	2.784,93
10	Larantuka	1.068,03	38,67	-	1.106,70
11	Lewolema	587,94	-	-	587,94
12	Solor Barat	-	-	-	-
13	Solor Selatan	-	-	-	-
14	Solor Timur	-	-	-	-
15	Tanjung Bunga	-	-	-	-
16	Titehena	3.919,77	658,85	731,23	5.309,86
17	Witihama	2.359,70	540,04	1.161,90	4.061,64
18	Wotan Ulumado	-	-	-	-
19	Wulanggitang	4.538,87	292,92	587,22	5.419,02
Total		30.057,86	5.292,38	6.266,79	41.617,02

Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2025-2045

g. Tanah Longsor

Luas wilayah Flores Timur yang rawan terhadap tanah longsor dapat dilihat pada Tabel 2.41 berikut.

Tabel 2.41 Kawasan Rawan Tanah Longsor Kabupaten Flores Timur

No	Kecamatan	Luas Rawan Longsor (Ha)			
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total
1	Adonara	-	-	-	-
2	Adonara Barat	-	-	-	-
3	Adonara Tengah	-	-	-	-
4	Adonara Timur	-	-	-	-
5	Demon Pagong	-	1,79	-	1,79
6	Ile Boleng	-	-	-	-
7	Ile Mandiri	-	-	-	-
8	Ile Bura	-	0,75	-	0,75
9	Kelubagolit	-	-	-	-
10	Larantuka	-	0,01	-	0,01
11	Lewolema	-	-	-	-
12	Solor Barat	-	0,88	-	0,88
13	Solor Selatan	0,93	2,59	-	3,52
14	Solor Timur	0,00	4,51	0,11	4,62
15	Tanjung Bunga	0,94	1,39	0,00	2,33
16	Titehena	-	1,86	7,70	9,57
17	Witihama	-	-	-	-
18	Wotan Ulumado	1,87	3,81	-	5,68
19	Wulanggitang	1,93	2,23	16,28	20,45
Total		5,68	19,82	24,10	49,60

Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2025-2045

h. Tsunami

Dari hasil pantauan hampir sebagian besar kecamatan di wilayah Kabupaten Flores Timur berpotensi rawan bencana tsunami dengan level rendah. Luas kawasan

Flores Timur yang berpotensi bencana tsunami dapat dilihat pada Tabel 2.42 berikut.

Tabel 2.42 Kawasan Rawan Bencana Tsunami Kabupaten Flores Timur

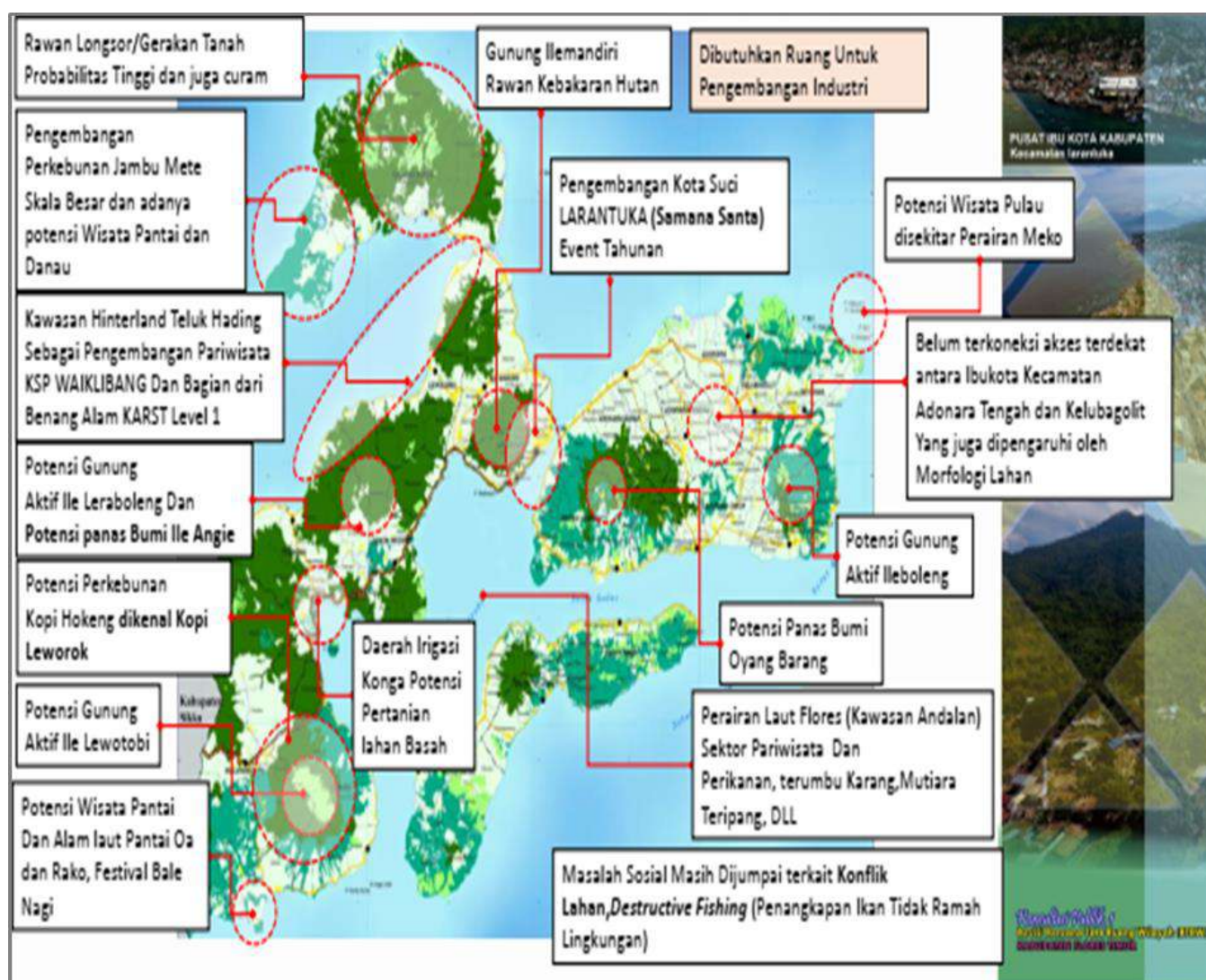
No	Kecamatan	Luas Rawan Gelombang Tsunami (Ha)			
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total
1	Adonara	12,43	-	-	-
2	Adonara Barat	4,17	-	-	-
3	Adonara Tengah	-	-	-	-
4	Adonara Timur	0,99	-	-	-
5	Demon Pagong	5,71	-	-	-
6	Ile Boleng	4,71	-	-	-
7	Ile Mandiri	1,18	-	-	-
8	Ile Bura	6,45	-	-	-
9	Kelubagolit	5,20	-	-	-
10	Larantuka	0,08	-	-	-
11	Lewolema	12,80	-	-	-
12	Solor Barat	15,91	-	-	-
13	Solor Selatan	0,15	-	-	-
14	Solor Timur	4,98	-	-	-
15	Tanjung Bunga	48,50	-	-	-
16	Titehena	15,23	-	-	-
17	Witihama	13,80	-	-	-
18	Wotan Ulumado	11,80	-	-	-
19	Wulanggitang	0,75	-	-	-
Total		164,82	-	-	-

Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2025-245

Berdasarkan kondisi geografis Kabupaten Flores Timur di atas dengan berbagai permasalahan dan potensi yang akan muncul, maka dapat disimpulkan beberapa isu pengembangan (Gambar 2.4) sebagai berikut:

- ☑ Wilayah kepulauan yang berpotensi pada lambatnya mobilisasi orang dan barang serta proses pembangunan;
- ☑ Belum tekoneksi akses terdekat antara ibukota Kecamatan Adonara Tengah dan Kelubagolit yang dipengaruhi oleh morfologi lahan.
- ☑ Permasalahan iklim yang didominasi oleh musim kemarau dan perubahan iklim;
- ☑ Permasalahan rawan longsor/gerak tanah probilitas tinggi dan juga curam di Kecamatan Tanjung Bunga;
- ☑ Permasalahan rawan kebakaran hutan di Gunung Ile Mandiri;
- ☑ Permasalahan sosial masih dijumpai terkait konflik lahan, *destructive fishing* (penangkapan ikan tidak ramah lingkungan);
- ☑ Potensi wisata kepulauan di sekitar Perairan Meko;
- ☑ Potensi gunung aktif Ile Boleng, Ile Lewotobi, dan Ile Leraboleng;
- ☑ Potensi panas bumi Oyang Barang dan Ile Angie;
- ☑ Daerah Irigasi Konga berpotensi sebagai lahan pertanian basah;
- ☑ Potensi wisata pantai alam laut di Pantai Oa, Rako dan Festival Bale Nagi;
- ☑ Potensi perkebunan kopi Hokeng yang memproduksi kopi robusta Hokeng;
- ☑ Pengembangan Kota Suci Larantuka (Samana Santa) sebagai event tahunan;
- ☑ Pengembangan perairan Laut Flores sebagai kawasan andalan di sektor pariwisata dan perikanan;

- ☑ Kawasan *hinterland* Teluk Hading sebagai pengembangan pariwisata dan Kawasan Strategis Provinsi/KSP Waiklibang dan bagian dari bentang alam Karst level I;
- ☑ Pengembangan perkebunan jambu mente skala besar dan adanya potensi wisata pantai dan danau di Kecamatan Tanjung Bunga; dan
- ☑ Wilayah Kabupaten Flores Timur merupakan wilayah kepulauan dan berselat sempit yang berpotensi menghasilkan pusaran arus laut sebagai tempat bermain ikan dan menjadi sumber potensi energi lainnya.



Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2025-2029

Gambar 2.4 Peta Isu Pengembangan secara Geografis Kabupaten Flores Timur Tahun 2024

D. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

1. Indeks Ketahanan Pangan

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Hasil analisis IKP berdasarkan metode *Cut-Off Point* Kabupaten Flores Timur tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.43 berikut;

Tabel 2.43 Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Flores Timur
Tahun 2020-2024

No.	Urain	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Indeks Ketahanan Pangan	69,56	72,36	73,00	73,54	68,61
	Ketersediaan	71,96	75,82	78,39	76,34	70,43
	Keterjangkauan	73,23	77,02	77,98	80,93	71,05
	Pemanfaatan	65,00	66,26	65,21	65,90	64,35
2.	Kelompok IKP	5	5	5	5	5

Sumber: Indeks Ketahanan Pangan, Tahun 2025

Dari tabel di atas dapat dijelaskan IKP Kabupaten Flores Timur pada tahun 2020-2024 berfluktuatif, dimana nilai IKP pada tahun 2020 sebesar 69,56 mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi 72,36 atau sebesar 2,8 poin, pada tahun 2022 meningkat menjadi 73,00 atau 0,64 poin dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 73,54 atau 0,54 poin, sedangkan pada tahun 2024 menurun menjadi 68,61 atau sebesar 4,93 poin. Gambaran Kondisi ini dapat dijelaskan bahwa secara kelompok IKP Kabupaten Flores Timur pada tahun 2020-2024 berada pada level 5 atau kerentangan Rendah, namun capaian IKP Kabupaten Flores Timur belum menunjukkan perubahan yang signifikan terutama pada tahun 2023-2024 capaian IKP secara kabupaten mengalami penurunan yang cukup besar yaitu 4,93 poin. Oleh karena itu perlu perhatian serius pada semua aspek IKP baik Ketersediaan, Keterjangkauan dan Pemanfaatan.

2. Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan

Prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan atau *Prevalence of Undernourishment* (PoU) adalah penduduk di suatu wilayah yang mengonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan Kabupaten Flores Timur selama tahun 2020-2024 sebagaimana terlihat pada Tabel 2.44 berikut;

Tabel 2.44 Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan
Kabupaten Flores Timur, Tahun 2020-2024

No.	Urain	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan (%)	15,83	16,21	15,71	19,53	13,45
2.	Penduduk yang Mengalami Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (<i>jiwa</i>)	43.833	45.385	44.636	56.307	39.195
3.	Jumlah Penduduk (<i>jiwa</i>)	276.896	279.982	284.122	288.310	291.410

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Flores Timur, Tahun 2025

Tabel di atas dapat dijelaskan bahwa prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan atau *Prevalence of Undernourishment* (PoU) Kabupaten Flores Timur pada tahun 2020-2024 berfluktuatif, dimana nilai PoU pada tahun 2020 sebesar 15,83% atau sebanyak 43.833 penduduk mengalami ketidacukupan konsumsi pangan. Pada tahun 2021 nilai PoU meningkat menjadi 16,21% atau sebanyak 45.385 penduduk mengalami ketidacukupan konsumsi pangan. Pada tahun 2021 nilai PoU menurun menjadi 15,71% atau sebanyak 44.636 penduduk mengalami ketidacukupan konsumsi pangan. Pada tahun 2022 nilai PoU meningkat menjadi 19,53% atau sebanyak 56.307 penduduk mengalami ketidacukupan konsumsi

jarak yang dapat dijangkau oleh layanan pengumpulan sampah (radius minimal 200 meter). Penanganan sampah di Kabupaten Flores Timur tidak dilakukan dengan layanan penuh pengumpulan, namun masih terbatas pada pengumpulan sampah rumah tangga pada Tempat Pembuangan Sementara (TPS) tanpa melakukan pemilahan terhadap jenis sampah yang dihasilkan, yang selanjutnya diangkut dan dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Layanan persampahan ini masih terbatas pada kota Larantuka. Gambaran layanan penanganan sampah pada TPS sampai diangkut menuju TPA dapat dilihat pada Tabel 2.50 berikut.

Tabel 2.50 Produksi Sampah dan Penanganan Sampah
Kabupaten Flores Timur, Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah TPS	52	51	46	29	17
2.	Jumlah Daya Tampung TPS (m³)	289	250	243	157	88
3.	Produksi Sampah (m³)	37.837,00	38.025,30	60.712,00	57.162,00	32.721,00
4.	Penanganan Sampah (m³)	29.528,46	30.775,00	45.848,00	52.669,00	29.792,00
5.	Persentase Penanganan Sampah (%)	78,04	80,93	75,52	92,14	91,05

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Flores Timur Tahun 2024

Tabel di atas terlihat bahwa produksi sampah dan penanganan sampah Kabupaten Flores Timur pada tahun 2020-2024 berfluktuatif, dimana pada tahun 2020 persentase penanganan sampah sebesar 78,04% pada 52 TPS, dan mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi 80,93% pada 51 TPS. Pada tahun 2022 capaian penanganan mengalami penurunan menjadi 75,52% pada 46 TPS, dan mengalami peningkatan pada tahun 2023 menjadi 92,14% pada 29 TPS. Pada tahun 2024 penanganan mengalami penurunan menjadi 91,05% pada 88 TPS. Kondisi ini menjadi perhatian serius karena sampah yang tertampung pada TPS belum sepenuhnya tertangani secara baik. Adapun kendala yang sering dihadapi oleh pengelola antara lain: 1) kesadaran masyarakat tentang pengolahan dan penanganan sampah masih rendah; 2) sumber daya pengelola sampah masih sangat terbatas; 3) sarana prasarana pengelolaan sampah masih sangat terbatas; dan 4) manajemen pengolahan sampah terutama produksi dari rumah tangga perlu diperbaiki dan sedapat mungkin dilakukan pemilahan terhadap jenis sampah yang dihasilkan.

F. Resilensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

1. Indeks Resiko Bencana

Indeks Resiko Bencana (IRB) merupakan suatu pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul dari suatu potensi bencana yang ada di suatu wilayah. Potensi tersebut dihitung dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: a). *Hazard* (bahaya) dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan (*magnitude*) dari suatu fenomena alam seperti gempa bumi, banjir, letusan gunung api, dan lainnya; b). *Vulnerability* (kerentanan) dihitung berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi,

fisik dan lingkungan; dan c). *Capacity* (Kapasitas) dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah, melalui 7 (tujuh) prioritas yaitu: (1) Perkuatan kebijakan dan kelembagaan; (2) Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; (3) Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; (4) Penanganan tematik kawasan rawan bencana; (5) Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; (6) Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan (7) Pengembangan sistem pemulihan bencana. Dengan melihat kajian di atas dapat disimpulkan potensi risiko bencana suatu wilayah serta dapat memperhitungkan potensi jiwa terpapar, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan. Gambaran perkembangan capaian IRB Kabupaten Flores Timur pada tahun 2018-2022 dapat dilihat pada Gambar 2.5 berikut.



Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Flores Timur, Tahun 2024

Gambar 2.5 Capaian Indeks Resiko Bencana
Kabupaten Flores Timur, Tahun 2020-2024

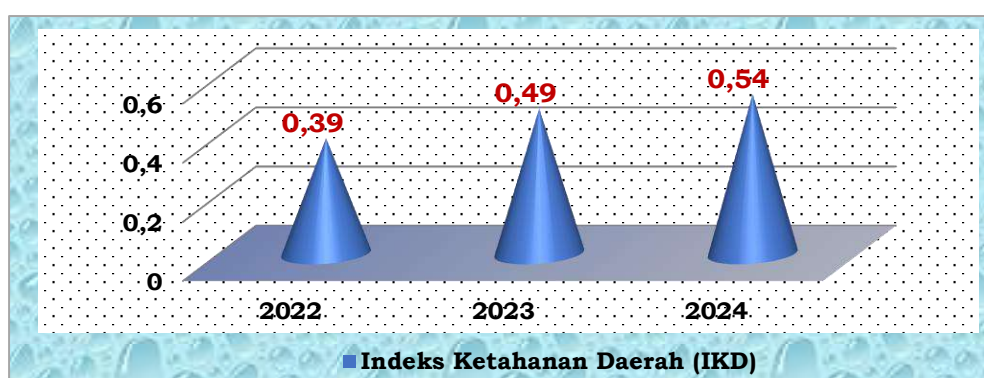
Gambar di atas dapat dijelaskan bahwa Indeks Resiko Bencana (IRB) Kabupaten Flores Timur pada tahun 2020-2023 sebesar 152,8 (kategori kelas resiko tinggi). Pada tahun 2024 capaian IRB menurun menjadi 137,76 dengan kategori kelas risiko sedang. Indeks resiko bencana ini merupakan akumulasi nilai dari 9 jenis ancaman bencana yakni Cuaca Ekstrem, Kekeringan, Gelombang Ekstrem dan Abrasi, Tanah longsor, Kebakaran Hutan, Letusan Gunung Api, Tsunami, Gempa Bumi dan banjir. Gambaran indeks dengan 9 jenis ancaman bencana menunjukkan bahwa wilayah Kabupaten Flores Timur rentan terhadap ancaman bencana. Kondisi ini terjadi karena secara topografi bentangan alam Kabupaten Flores Timur merupakan wilayah yang berbukit dan bergunung dengan tingkat kemiringan pada sebagian besar wilayah berada diatas 12%, daerah perbukitan dengan ketinggian rata-rata diatas 100 meter dan memiliki tekstur tanah antara kasar dan sedang. Kondisi wilayah geografis seperti ini mengakibatkan wilayah Kabupaten Flores Timur rawan terhadap ancaman bencana longsor dan banjir. Secara klimatologi di Kabupaten Flores Timur hanya mengalami 2 (dua) musim, sebagaimana daerah-daerah lain di Indonesia, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Pada bulan Juni-September angin bertiup dari Australia dan tidak banyak mengandung uap air

sehingga mengakibatkan musim kemarau. Sebaliknya, pada bulan Desember-Maret angin banyak mengandung uap air yang berasal dari Asia dan Samudera Pasifik sehingga terjadi musim hujan. Keadaan ini berganti setiap enam bulan setelah masa peralihan pada bulan April-Mei dan Oktober-November. Konsekuensinya Kabupaten Flores Timur menjadi wilayah yang tergolong kering dan selalu terancam bencana kekeringan setiap tahun, karena hanya 4 (empat) bulan (Januari, Februari, Maret dan Desember) yang keadaannya relatif basah, sedangkan 8 (delapan) bulan sisanya relatif kering.

Pada aspek geomorfologi di wilayah Flores Timur terdapat empat gunung api yang masih aktif, yaitu Gunung Lewotobi Laki-laki dengan tinggi 1.584 mdpl, Gunung Lewotobi Perempuan dengan tinggi 1.703 mdpl, Gunung Leraboleng dengan tinggi 1.117 mdpl dan Gunung Ile Boleng dengan tinggi 1.659 mdpl yang masing-masing tersebar di Pulau Flores (bagian timur) dan pulau Adonara. Kondisi daerah tersebut banyak memberikan kontribusi terhadap tingkat kesuburan tanah, dan pada sisi yang lain menjadi sumber bencana khususnya gempa bumi dan letusan gunung berapi. Melihat gambaran kondisi wilayah seperti ini maka perlu dilakukan upaya dan langkah mitigasi dalam rencana pembangunan daerah yang berkelanjutan.

2. Indeks Ketahanan Daerah

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) mengukur kapasitas daerah dalam menghadapi dan merespon bencana. IKD merupakan komponen kapasitas dalam menghasilkan IRB dan juga digunakan untuk pemantauan dan evaluasi pembangunan resiliensi daerah. IKD dinilai melalui 7 (tujuh) prioritas yaitu: (1) Perkuatan kebijakan dan kelembagaan; (2) Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; (3) Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; (4) Penanganan tematik kawasan rawan bencana; (5) Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; (6) Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan (7) Pengembangan sistem pemulihan bencana, yang dijabarkan dalam 71 indikator dengan nilai indeks yang dianjurkan harus mendekati atau sama dengan 1 (satu) yang menunjukkan ketahanan daerah yang tinggi dan siap menghadapi berbagai bencana. Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Flores Timur tahun 2022-2024 dapat dilihat pada Gambar 2.6 berikut.



Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Flores Timur Tahun 2024

Gambar 2.6 Indeks Ketahanan Daerah (IKD)
Kabupaten Flores Timur Tahun 2022-2024

Gambar di atas terlihat bahwa Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Flores Timur pada periode Tahun 2022-2024 menunjukkan perkembangan yang positif yakni IKD meningkat setiap tahunnya. Capaian IKD pada tahun 2022 sebesar 0,39, mengalami peningkatan pada tahun 2023 menjadi 0,49, dan pada tahun 2024 kembali meningkat menjadi 0,54. Kondisi ini perlu menjadi perhatian serius karena capaian IKD masih jauh dari kondisi siap dalam menghadapi bencana.

G. Demografi

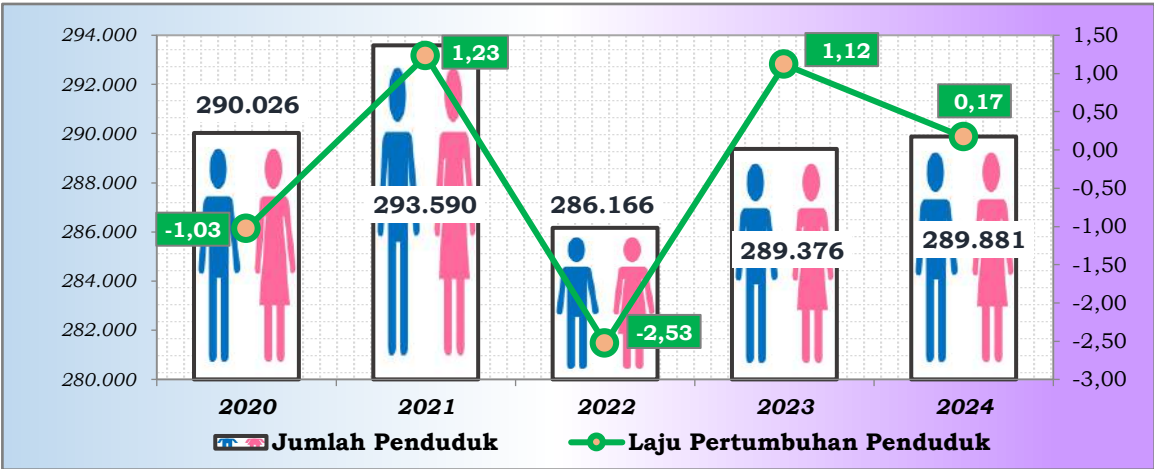
1. Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Perkembangan jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Flores Timur selama periode tahun 2020-2024 secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.51 dan Gambar 2.7 berikut;

Tabel 2.51 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk
Kabupaten Flores Timur, Tahun 2020-2024

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)					Laju Pertumbuhan Penduduk (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Wulangitang	15.502	15.567	15.273	15.375	15.480	0,25	0,42	-1,89	0,67	0,68
2	Titehena	13.749	14.000	13.671	13.783	13.703	0,66	1,83	-2,35	0,82	-0,58
3	Larantuka	41.589	41.690	41.354	41.642	41.664	-1,32	0,24	-0,81	0,70	0,05
4	Ile Mandiri	11.961	12.174	11.922	12.069	12.124	-1,08	1,78	-2,07	1,23	0,46
5	Tanjung Bunga	15.077	15.527	15.289	15.464	15.600	2,06	2,98	-1,53	1,14	0,88
6	Solor Barat	11.783	11.839	11.451	11.583	11.714	-1,39	0,48	-3,28	1,15	1,13
7	Solor Timur	16.942	17.283	16.807	17.066	16.938	-1,07	2,01	-2,75	1,54	-0,75
8	Adonara Barat	14.280	14.609	14.360	14.454	14.654	1,34	2,3	-1,7	0,65	1,38
9	Wotan Ulumado	10.436	10.728	10.449	10.629	10.554	-1,13	2,8	-2,6	1,72	-0,71
10	Adonara Timur	31.531	32.158	31.014	31.427	31.576	-1,29	1,99	-3,56	1,33	0,47
11	Klubagolit	13.386	13.351	13.030	13.199	13.122	-1,98	-0,26	-2,4	1,30	-0,58
12	Witihama	18.384	18.516	17.847	18.208	18.344	-2,32	0,72	-3,61	2,02	0,75
13	Ile Boleng	18.552	18.592	17.907	18.186	18.136	-0,7	0,22	-3,68	1,56	-0,27
14	Demon Paggong	5.242	5.208	5.041	5.049	5.099	-0,93	-0,65	-3,21	0,16	0,99
15	Lewolema	10.113	10.219	9.869	10.015	9.948	-1,81	1,05	-3,42	1,48	-0,67
16	Ile Bura	7.876	7.905	7.783	7.791	7.816	-0,25	0,37	-1,54	0,10	0,32
17	Adonara	12.423	12.541	11.990	11.984	12.007	-1,88	0,95	-4,39	-0,05	0,19
18	Adonara Tengah	14.007	14.447	14.004	14.172	14.006	-2,29	3,14	-3,07	1,20	-1,17
19	Solor Selatan	7.193	7.236	7.105	7.280	7.396	-3,5	0,6	-1,81	2,46	1,59
Flores Timur		290.026	293.590	286.166	289.376	289.881	-1,03	1,23	-2,53	1,12	0,17

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Flores Timur, Tahun 2025 (data olahan)



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Flores Timur, Tahun 2025

Gambar 2.7 Grafik Perkembangan Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Flores Timur, Tahun 2020-2024

Tabel dan gambar di atas dapat dijelaskan bahwa perkembangan penduduk Kabupaten Flores Timur selama tahun 2020-2024 berfluktuatif, dimana pada tahun 2020 jumlah penduduk sebesar 290.026 jiwa dengan laju pertumbuhan sebesar (-1,03%) dari tahun 2019. Kondisi dengan pertumbuhan negatif terjadi juga pada tahun 2022. Sementara jumlah penduduk pada dua tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan positif yakni pada tahun 2023 jumlah penduduk sebesar 289.376 jiwa dengan laju pertumbuhan sebesar 1,12% dari tahun 2022, tahun 2024 jumlah penduduk sebesar 289.881 jiwa laju pertumbuhan 0,17% dari tahun 2023. Gambaran perkembangan penduduk ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: (1). Mobilisasi penduduk Kabupaten Flores Timur yang keluar mencari pekerjaan baik dalam negeri maupun luar negeri yang cukup tinggi dan kembali masuk pada waktu tertentu serta menetap untuk beberapa waktu; (2). Kelahiran dan kematian; dan (3). Program-program untuk menekan laju pertumbuhan penduduk.

2. Persebaran, Sex Ratio dan Kepadatan Penduduk

Perkembangan jumlah Penduduk Kabupaten Flores Timur pada akhir Tahun 2024 sebanyak **289.881** jiwa, yang terdiri dari penduduk laki-laki berjumlah **142.457** jiwa dan penduduk perempuan sejumlah **147.424** jiwa, dengan kepadatan penduduk sebesar **159,90** Jiwa/Km². Secara rinci, sebaran penduduk di setiap kecamatan terlihat pada Tabel 2.52 berikut;

Tabel 2.52 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin, Sex Ratio dan Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan Tahun 2024

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km²)	Penduduk					Sex Ratio	Kepadatan Penduduk (Jiwa/ Km²)
			Laki-laki (jiwa)	%	Perempuan (Jiwa)	%	Jumlah (Jiwa)		
1	Wulanggitang	225,85	7.699	5,40	7.781	5,28	15.480	98,95	68,54
2	Titehena	154,84	6.799	4,77	6.904	4,68	13.703	98,48	88,50
3	Larantuka	48,91	20.720	14,54	20.944	14,21	41.664	98,93	851,85
4	Ile Mandiri	72,76	6.071	4,26	6.053	4,11	12.124	100,30	166,63
5	Tanjung Bunga	257,57	7.810	5,48	7.790	5,28	15.600	100,26	60,57
6	Solor Barat	128,2	5.719	4,01	5.995	4,07	11.714	95,40	91,37
7	Solor Timur	66,56	8.329	5,85	8.609	5,84	16.938	96,75	254,48
8	Adonara Barat	79,71	7.357	5,16	7.297	4,95	14.654	100,82	183,84
9	Wotan Ulumado	86,31	5.259	3,69	5.295	3,59	10.554	99,32	122,28
10	Adonara Timur	91,06	15.276	10,72	16.300	11,06	31.576	93,72	346,76
11	Kelubagolit	44,41	6.219	4,37	6.903	4,68	13.122	90,09	295,47
12	Witihama	79,43	8.745	6,14	9.599	6,51	18.344	91,10	230,95
13	Ile Boleng	49,3	8.650	6,07	9.486	6,43	18.136	91,19	367,87
14	Demon Pagong	85,4	2.546	1,79	2.553	1,73	5.099	99,73	59,71
15	Lewolema	92,84	4.964	3,48	4.984	3,38	9.948	99,60	107,15
16	Ile Bura	118,32	3.938	2,76	3.878	2,63	7.816	101,55	66,06
17	Adonara	56,8	5.817	4,08	6.190	4,20	12.007	93,97	211,39
18	Adonara Tengah	42,73	6.905	4,85	7.101	4,82	14.006	97,24	327,78
19	Solor Selatan	31,85	3.634	2,55	3.762	2,55	7.396	96,60	232,21
Jumlah		1.812,85	142.457	100	147.424	100	289.881	96,63	159,90

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Flores Timur, Tahun 2025 (data olahan)

Tabel di atas menggambarkan bahwa Kecamatan Larantuka merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak (41.664 jiwa) dan tingkat kepadatan

menyiapkan SDM Kabupaten Flores Timur yang berkualitas dan memiliki daya saing tinggi.

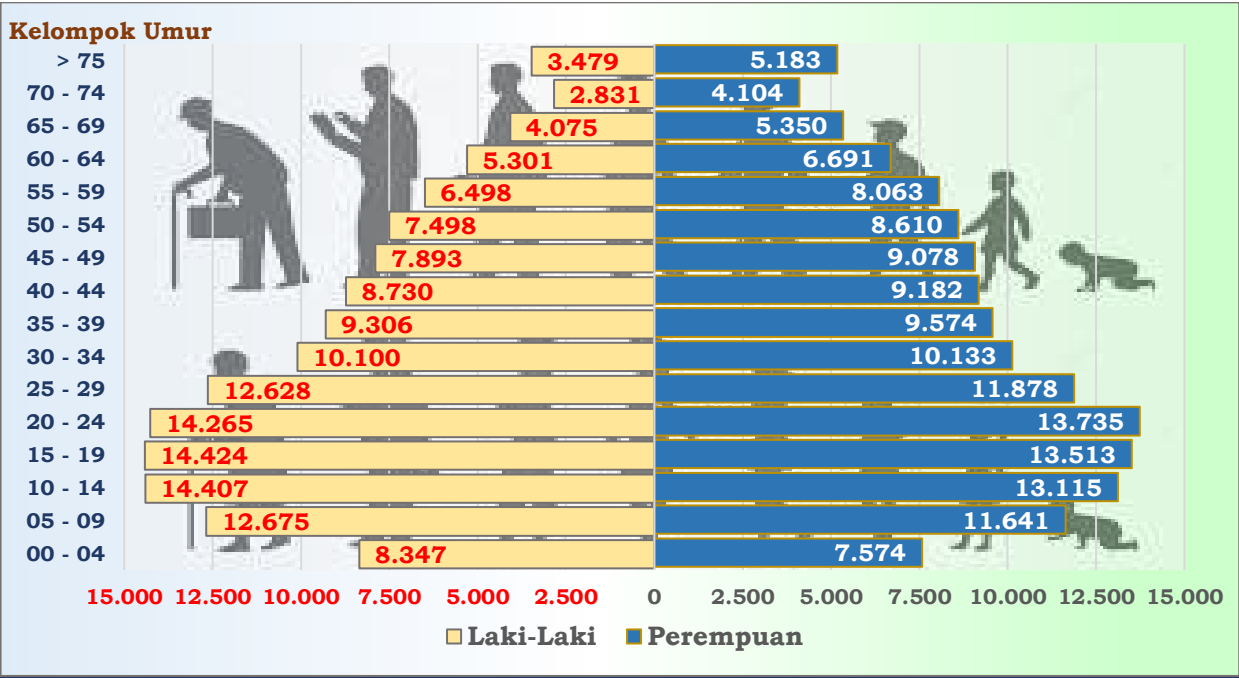
4. Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur

Komposisi penduduk menurut umur dapat memberikan suatu ciri terhadap penduduk, apakah tergolong sebagai penduduk yang produktif atau yang tidak produktif. Komposisi seperti ini dapat menggambarkan pola perilaku sosial ekonomi penduduk. Penduduk yang berumur 0-14 tahun dan yang berumur lebih dari 64 tahun dikategorikan sebagai penduduk yang tidak produktif. Komposisi penduduk tahun 2024 menurut umur di Kabupaten Flores Timur dapat dilihat pada Tabel 2.54 dan Gambar 2.8 berikut;

Tabel 2.54 Kompoisi Penduduk Kabupaten Flores Timur Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2024

No	Kelompok Usia	Pria		Wanita		Jumlah	
		n	%	n	%	n	%
1	00-04	8.347	5,86	7.574	5,14	15.921	5,49
2	05-09	12.675	8,90	11.641	7,90	24.316	8,39
3	10-14	14.407	10,11	13.115	8,90	27.522	9,49
4	15-19	14.424	10,13	13.513	9,17	27.937	9,64
5	20-24	14.265	10,01	13.735	9,32	28.000	9,66
6	25-29	12.628	8,86	11.878	8,06	24.506	8,45
7	30-34	10.100	7,09	10.133	6,87	20.233	6,98
8	35-39	9.306	6,53	9.574	6,49	18.880	6,51
9	40-44	8.730	6,13	9.182	6,23	17.912	6,18
10	45-49	7.893	5,54	9.078	6,16	16.971	5,85
11	50-54	7.498	5,26	8.610	5,84	16.108	5,56
12	55-59	6.498	4,56	8.063	5,47	14.561	5,02
13	60-64	5.301	3,72	6.691	4,54	11.992	4,14
14	65-69	4.075	2,86	5.350	3,63	9.425	3,25
15	70-74	2.831	1,99	4.104	2,78	6.935	2,39
16	> 75	3.479	2,44	5.183	3,52	8.662	2,99
Flores Timur		142.457	100	147.424	100	289.881	100,00

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Flores Timur, Tahun 2025 (data olahan)



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Flores Timur, Tahun 2024 (data olahan)

Gambar 2.8 Piramida Penduduk Kabupaten Flores Timur Tahun 2024

b. Proyeksi Komposisi Penduduk Tahun 2025-2030

Proyeksi komposisi penduduk di Kabupaten Flores Timur pada 5 tahun mendatang dapat dilihat pada Tabel 2.55 berikut :

Tabel 2.55 Proyeksi Distribusi Penduduk Kabupaten Flores Timur Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025-2030

Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk (Tahun 2024)	Proyeksi Penduduk (Jiwa)	
		2025	2030
Laki-laki	142.457	146.120	157.039
Perempuan	147.424	150.640	160.805
Sex Rasio (%)	97,27	97,00	97,66

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Flores Timur (Hasil Analisis)

Komposisi penduduk sebagaimana pada Tabel 2.55 menunjukkan bahwa pada tahun 2024 jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari laki-laki dengan *sex rasio* sebesar 97,27%. Artinya setiap 100 penduduk perempuan akan terdapat 97 penduduk laki-laki. Rasio tersebut diprediksi akan terus berlangsung hingga tahun 2030 dengan *sex rasio* 97,66% yang artinya kecenderungan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan cenderung seimbang. Berdasarkan data tersebut, dibutuhkan kebijakan pembangunan yang responsif gender. Indeks Pembangunan Gender yang menggambarkan kesenjangan pencapaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki di Kabupaten Flores Timur masih cukup tinggi yakni sebesar 91,97 pada tahun 2023. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Flores Timur masih dihadapkan pada tantangan pembangunan untuk mewujudkan kesetaraan gender. Berbagai persoalan yang masih perlu menjadi perhatian ke depan antara lain masih rendahnya Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan belum optimalnya pemenuhan kesehatan perempuan, khususnya ibu yang melahirkan, serta tingginya kesenjangan pendapatan antara perempuan dan laki-laki.

Salah satu langkah strategis yang perlu mendapat perhatian adalah tersedianya data terpilah gender yang berkualitas. Data terpilah menurut jenis kelamin dapat memberikan informasi yang komprehensif tentang adanya kesenjangan gender. Pemilahan menurut jenis kelamin diberbagai bidang dapat menunjukkan status, peran, kondisi dan kebutuhan masyarakat perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang pembangunan, serta permasalahan yang dihadapi dalam upaya mengurangi kesenjangan. Selain itu, perumusan kebijakan pembangunan juga membutuhkan analisis terhadap komposisi penduduk menurut kelompok umur. Informasi tentang distribusi kelompok umur tersebut memberikan gambaran tentang kebutuhan dan sumber daya penduduk dari masing-masing kelompok umur. Hal tersebut akan melahirkan kebijakan pembangunan baik dalam rangka pemenuhan kebutuhan maupun pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh penduduk sesuai kelompok umurnya.

Tabel 2.56 Proyeksi Komposisi Penduduk Kabupaten Flores Timur
Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2025-2030

Kelompok Umur (Tahun)	Jumlah Penduduk (Tahun 2024)	Proyeksi Penduduk (Jiwa)	
		2025	2030
0-14	67.759	80.510	86.232
15-64	197.100	191.500	205.331
>65	25.022	24.740	26.281
Angka Ketergantungan	47,07	54,96	54,80

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Flores Timur (Hasil Analisis)

Tabel 2.56 menunjukkan bahwa komposisi penduduk terbesar terdapat pada penduduk usia produktif yakni usia 15-64 tahun. Pada Tahun 2024, penduduk usia produktif (15-64 tahun) mencapai 67,99% sementara usia tidak produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas) sebesar 32,01%. Kondisi tersebut diprediksi akan relatif sama sampai dengan tahun 2030 dengan komposisi 64,60% penduduk usia produktif dan 35,40% penduduk usia tidak produktif. Berkurangnya komposisi penduduk usia 0-14 tahun dan meningkatnya penduduk usia 15-64 tahun sebagaimana pada Tabel 2.56 di atas menunjukkan semakin berkurangnya bayi yang dilahirkan. Di sisi lain, meningkatnya proporsi penduduk usia 65 tahun ke atas menunjukkan adanya peningkatan usia harapan hidup. Dari sisi kebijakan pembangunan, dibutuhkan langkah-langkah strategis di bidang sosial dan ekonomi untuk untuk memenuhi peningkatan kebutuhan penduduk lanjut usia serta meningkatkan kapasitas penduduk usia produktif agar mampu bersaing di pasar kerja serta memiliki tingkat produktivitas yang tinggi.

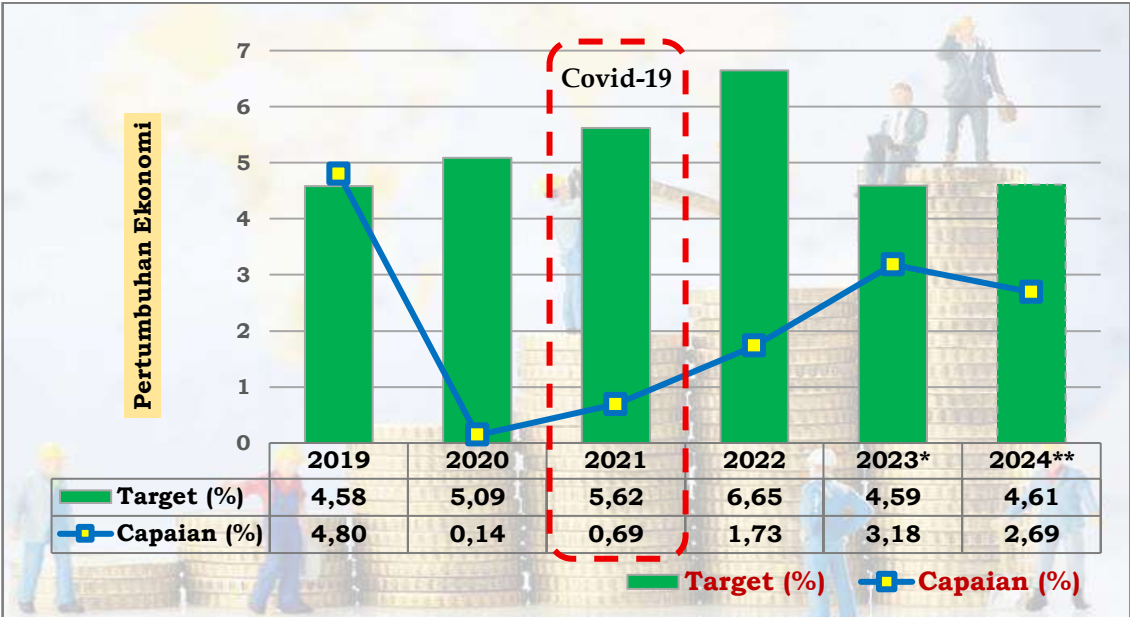
Dampak lain dari kondisi tersebut adalah angka ketergantungan. Angka ketergantungan atau beban ketergantungan (*dependency ratio*) adalah angka yang menunjukkan besarnya penduduk golongan umur produktif yang dapat menghasilkan barang dan jasa ekonomi dibanding penduduk golongan umur tidak produktif. Yang digolongkan dalam kelompok umur produktif adalah penduduk yang berumur 15 tahun ke atas sampai dengan umur 64 tahun. Sedangkan yang berumur 14 tahun ke bawah dan umur 65 tahun ke atas digolongkan dalam usia tidak produktif atau dikategorikan sebagai beban ketergantungan. Semakin tinggi *dependency ratio* menggambarkan semakin berat beban yang ditanggung oleh penduduk usia produktif karena harus mengeluarkan sebagian pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan penduduk usia non produktif. Tabel 2.56 menunjukkan bahwa prediksi angka ketergantungan dari tahun 2025 sampai 2030 fluktuatif namun cenderung menurun. Tahun 2025 sebesar 47,07%, artinya setiap 100 penduduk produktif menanggung 47 penduduk tidak produktif di bawah umur 15 tahun dan 65 tahun ke atas. Rasio ketergantungan dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, sistem perawatan kesehatan, dan sistem pensiun suatu negara. Selain itu, rendahnya angka ketergantungan mengindikasikan pula bahwa Kabupaten Flores Timur telah memasuki periode bonus demografi.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

A. Kesejahteraan Ekonomi

1. Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu indikator penting untuk mengetahui perkembangan perekonomian suatu daerah dalam suatu periode secara makro dapat digambarkan dari data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Besaran PDRB dapat digunakan sebagai indikator dalam menilai kinerja perekonomian suatu wilayah pada suatu periode tertentu, terutama yang dikaitkan dengan kemampuan suatu wilayah dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. Gambaran target dan capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Flores Timur selama periode tahun 2019-2024 seperti terlihat pada Gambar 2.10 berikut;



Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Flores Timur, Tahun 2025 (data olahan)

Gambar 2.10 Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Flores Timur Tahun 2019-2024

Gambar di atas dapat dijelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Flores Timur pada tahun 2019 mengalami pertumbuhan positif dan melampaui target. Pada tahun 2020 mengalami penurunan drastis menjadi 0,14% atau turun 4,66 poin sebagai akibat Pandemi Covid-19. Selama periode tahun 2021-2023 perlahan perekonomian Kabupaten Flores Timur mulai bangkit yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang positif walaupun belum stabil dan lambat serta masih berada di bawah target. Pada tahun 2024 pertumbuhan ekonomi kembali menurun menjadi 2,69% atau sebesar 0,46 poin dari target 4,61%. Gambaran kondisi ini masih jauh dari harapan karena rata-rata capaian pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020-2024 masih dibawah target yang ditetapkan. Untuk itu diperlukan peningkatan pada masing-masing lapangan usaha pembentuk PDRB. Kondisi ekonomi Kabupaten Flores Timur dapat dilihat melalui kontribusi nilai dari masing-masing lapangan usaha pembentuk struktur ekonomi. Gambaran struktur ekonomi Flores Timur selama enam tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 2.57 dan 2.58 berikut.

Tabel 2.57 Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Flores Timur Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), Tahun 2019-2024

Kode	Uraian	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023*	2024**
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,435,917.6	1,446,383.8	1,510,004.9	1,642,518.8	1,793,111.0	1,898,091.7
B.	Pertambangan dan Penggalian	46,791.6	47,229.7	47,606.4	48,014.7	50,264.6	51,526.9
C.	Industri Pengolahan	44,283.4	44,143.5	44,348.7	46,576.4	57,659.5	70,098.5
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	3,930.8	4,420.9	4,519.2	5,079.8	5,793.6	6,644.2
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,400.1	1,447.2	1,552.7	1,679.3	1,722.0	1,742.3
F.	Konstruksi	251,268.1	225,496.9	239,345.3	249,780.6	269,461.3	255,482.4
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	451,378.4	437,457.5	438,694.7	473,326.5	535,794.4	602,357.2
H.	Transportasi dan Pergudangan	282,814.0	274,057.2	277,195.3	299,060.0	325,766.9	375,335.1
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,844.7	4,038.7	4,071.7	4,475.3	5,189.6	6,077.2
J.	Informasi dan Komunikasi	229,303.3	259,784.9	251,811.1	262,474.1	272,539.0	289,054.7
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	198,161.9	217,044.7	233,532.6	254,485.8	264,160.4	277,332.1
L.	Real Estate	162,888.6	159,767.7	157,815.2	170,083.7	179,524.9	192,235.0
M,N	Jasa Perusahaan	8,197.9	5,386.1	4,258.8	4,468.5	4,697.7	4,884.0
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	896,883.3	931,693.4	967,161.0	974,002.9	1,012,205.1	1,022,950.1
P.	Jasa Pendidikan	842,499.2	850,925.4	837,789.7	852,028.6	910,730.8	970,933.2
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	122,773.5	135,074.7	145,521.0	147,203.9	164,794.8	185,508.0
R.S.T	Jasa lainnya	262,732.3	225,178.0	215,041.2	219,626.1	227,891.2	235,268.1
Total		5,246,068.6	5,269,530.2	5,380,269.4	5,654,885.2	6,081,306.9	6,445,520.6

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Flores Timur, Tahun 2025 (data olahan)

Tabel 2.58 Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Flores Timur Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), 2019–2024

Kode	Uraian	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023*	2024**
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	940,188.6	942,941.3	961,844.5	997,741.2	1,043,763.2	1,077,106.8
B.	Pertambangan dan Penggalian	34,711.4	34,726.9	34,981.8	35,057.1	35,543.6	36,330.0
C.	Industri Pengolahan	34,399.6	33,198.4	33,209.3	34,528.8	38,381.6	43,729.1
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	2,515.9	2,820.9	2,836.5	3,036.2	3,376.1	3,869.1
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	999.4	1,029.1	1,089.9	1,149.9	1,173.5	1,185.8
F.	Konstruksi	207,321.3	186,690.1	194,858.2	193,826.7	202,348.7	188,477.9
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	280,845.2	264,796.4	263,945.0	274,862.0	290,819.6	307,363.5
H.	Transportasi dan Pergudangan	192,126.3	186,975.7	187,943.1	194,200.1	199,425.2	220,233.2

Tabel 2.59 Profil Kemiskinan Kabupaten Flores Timur, Tahun 2019-2024

Tahun	Uraian						
	Jumlah penduduk miskin	Persentase penduduk miskin	Persentase penduduk di atas garis kemiskinan	Indeks kedalaman kemiskinan	Indeks keparahan kemiskinan	Garis kemiskinan (Rp/kapita/bln)	Rasio kesenjangan kemiskinan
2019	27.830	10,90	89,10	1,16	0,18	279.268	0,122
2020	27.890	10,84	89,16	1,61	0,40	301.611	0,122
2021	28.900	11,14	88,86	1,32	0,23	329.340	0,125
2022	28.080	10,75	89,25	1,54	0,39	364.117	0,120
2023*	30.930	11,77	88,23	1,74	0,37	405.486	0,133
2024**	29.740	11,25	88,75	1,38	0,25	412.744	0,127

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Flores Timur, Tahun 2025 (Data Olahan)

Keterangan: * Angka Sementara. ** Angka Sangat Sementara

Tabel di atas menggambarkan bahwa persentase penduduk miskin pada tahun 2019 sebesar 10,90%, menurun pada tahun 2019 menjadi 10,84% pada tahun 2020. Pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 11,14% dan kembali menurun pada tahun 2022 menjadi 10,75%. Pada tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 11,77%, kemudian di tahun 2024 menurun menjadi 11,25%. Persentase penduduk Kabupaten Flores Timur yang berada di atas garis kemiskinan pada tahun 2024 sebesar 88,75%, dan rasio kesenjangan kemiskinan pada angka 0,127 poin, menempatkan Kabupaten Flores Timur berada pada urutan kedua terendah setelah Kota Kupang dalam wilayah Provinsi NTT.

Walaupun berada pada urutan kedua terendah dari 22 Kabupaten/Kota, namun perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah agar masyarakat dapat keluar atau minimal berada pada level di atas Garis kemiskinan. Garis kemiskinan diukur dari belanja per kapita per bulan. Belanja ditentukan oleh pendapatan, sehingga perlakuan yang diperlukan haruslah memiliki keterkaitan dengan berbagai sektor yang memberikan dampak langsung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Dengan demikian, sektor ekonomi seperti pertanian, pertambangan, industri, perdagangan, Koperasi dan UKM memainkan peranan yang sangat penting dalam pengentasan kemiskinan.

3. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita

PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah tersebut, maka akan dihasilkan PDRB Per kapita. PDRB Per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. PDRB Perkapita Masyarakat Kabupaten Flores Timur terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan dan berangsur meningkat sampai tahun 2024 sebagaimana terlihat pada Tabel 2.60 berikut;

Tabel 2.60 Perkembangan PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Flores Timur, Tahun 2019-2024

Tahun	PDRB Perkapita (Rp)	% Pertumbuhan
2019	20.496.000	6,15
2020	19.110.000	-6,76
2021	19.216.000	0,55
2022	19.903.000	3,58

Tahun	PDRB Perkapita (Rp)	% Pertumbuhan
2023*	21.093.000	5,98
2024**	22.034.000	4,46

Sumber: BPS Kab. Flores Timur, 2025 (data olahan)

Tabel di atas menggambarkan bahwa, pada tahun 2020 PDRB per kapita Kabupaten Flores Timur sebesar 20.441,57 juta rupiah menurun menjadi 19.146,80 juta rupiah di tahun 2021. Pada tahun 2022 meningkat menjadi 19.713,47 juta rupiah dan mengalami peningkatan sebesar 6,63% pada tahun 2023 atau menjadi 21.026,00 juta rupiah. Pada tahun 2024 meningkat menjadi 22.034,45 juta rupiah. Dalam kurun waktu tahun 2019-2024 laju pertumbuhan PDRB perkapita ADHB rata-rata sebesar 1,25% per tahun. Hal ini mencerminkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Secara rata-rata setiap bulan pada 2024 satu orang penduduk Kabupaten Flores Timur menghasilkan nilai tambah bagi perekonomian sebesar Rp 1.836.204.

4. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja merupakan penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Gambaran Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Flores Timur sebagaimana terlihat pada Tabel 2.61 berikut;

Tabel 2.61 Tingkat Pengangguran Terbuka dan Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Flores Timur, Tahun 2019-2024

Kegiatan Utama	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
I. Angkatan Kerja/Economically Active	66,57	71,79	71,80	74,56	72,50	74,26
1. Bekerja/Working (%)	96,91	96,84	96,19	96,51	96,21	96,42
2. Pengangguran Terbuka/Unemployment	3,09	3,16	3,81	3,49	3,79	3,58
II. Bukan Angkatan Kerja/Not Economically Active	33,43	28,21	28,20	25,44	27,50	25,74
1. Sekolah/Attending School	32,95	27,23	23,41	27,99	30,09	27,41
2. Mengurus Rumah Tangga/Housekeeping	55,55	54,00	56,46	53,57	50,94	52,84
3. Lainnya/Others	11,50	18,77	20,13	18,43	18,97	19,75
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	66,57	71,79	71,80	74,56	72,50	74,26
Tingkat Pengangguran	3,09	3,16	3,81	3,49	3,79	3,58

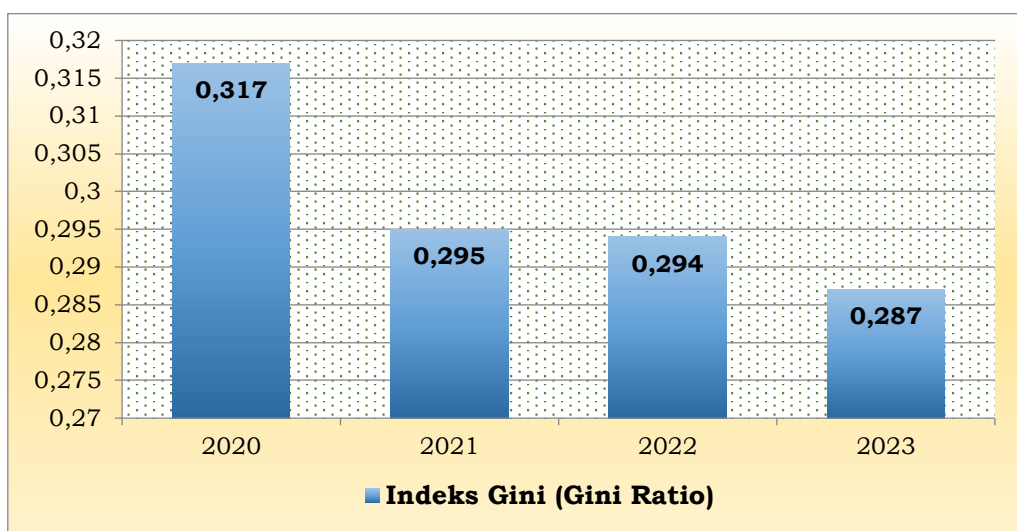
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Flores Timur, Tahun 2025

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa kinerja untuk menurunkan angka pengangguran Kabupaten Flores Timur selama periode tahun 2019-2024 cukup positif walaupun berfluktuasi. Secara umum, angka pengangguran Kabupaten Flores Timur selama 5 (lima) tahun meningkat, yakni pada tahun 2019 sebesar 3,09% meningkat menjadi 3,58% pada tahun 2024 (capaian kinerja negatif). Kondisi ini dipengaruhi oleh jumlah angkatan kerja pada periode tahun 2019-2024 menunjukkan tren peningkatan namun tidak diikuti dengan peningkatan ketersediaan lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, pembangunan daerah ke depan

selain untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat juga harus mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Kualitas generasi Kabupaten Flores Timur ke depan harus dipersiapkan secara baik agar mampu bersaing dalam dunia kerja yang menuntut keahlian sesuai perkembangan teknologi.

5. Indeks Gini

Indeks Gini (*gini ratio*) merupakan tingkat kesenjangan pendapatan relatif antara penduduk satu wilayah, nilai gini ratio antara 0 dan 1, jika skor indeks gini lebih kecil dari 0,3 poin maka ketimpangannya rendah dan jika capaian skor indeks gini lebih besar atau sama dengan 0,3 poin dan lebih kecil atau sama dengan 0,5 poin maka ketimpangannya sedang, sedangkan ketimpangannya tinggi jika capaian skor indeks gini lebih besar dari 0,5 poin. Kondisi capaian skor indeks gini Kabupaten Flores Timur dapat dilihat pada Gambar 2.11 berikut;



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Flores Timur, Tahun 2024 (data olahan)
Gambar 2.11 Indeks Gini Kabupaten Flores Timur, Tahun 2020-2023

Gambaran kondisi di atas dapat dijelaskan Kabupaten Flores Timur pada tahun 2020 berada pada level ketimpangan sedang, sedangkan pada tahun 2021-2023 Gini Rasio berada pada level ketimpangan rendah dimana skor capaian indeks gini pada tahun 2020 sebesar 0,317 poin menurun pada tahun 2021 menjadi 0,295 poin, mengalami penurunan sebesar 0,001 poin pada tahun 2022 menjadi 0,294 poin, dan mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi 0,287 poin. Rata-rata capaian *Gini Ratio* pada periode tahun 2020-2023 sebesar 0,298 poin. Dengan melihat capaian skor di atas maka dapat dijelaskan bahwa kesenjangan pendapatan masyarakat di Kabupaten Flores Timur berada pada level rendah.

7. Nilai Tukar Petani

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan adalah Nilai Tukar Petani (NTP), dimana kemampuan produk (komoditas) yang dihasilkan/dijual petani dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan petani baik untuk proses produksi (usaha) maupun untuk konsumsi rumah tangga petani. Perkembangan Nilai Tukar Petani Kabupaten Flores Timur dapat dilihat pada Tabel 2.62 berikut;

Tabel 2.62 Nilai Tukar Petani Kabupaten Flores Timur Tahun 2016-2024

Uraian	Tahun								
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai Tukar Petani	101,69	104,8	107,49	106,9	95,23	96,14	95,83	98,46	97,43

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Flores Timur, Tahun 2024 (Data Olahan)

Tabel di atas menggambarkan NTP pada tahun 2016-2019 mengalami surplus artinya harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya dengan demikian pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya, sedangkan pada tahun 2020-2024 NTP mengalami defisit artinya kenaikan harga produksi relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya, dengan demikian pendapatan petani turun atau lebih kecil dari pengeluarannya. Gambaran kondisi ini sebagai dampak dari Pandemi Covid-19 yang membatasi pergerakan orang sehingga distribusi hasil produksi masyarakat baik ke pasar lokal maupun pasar domestik menjadi terbatas, serta virus African Swine Fever (ASF) yang melanda ternak babi selama 3 (tiga) tahun terakhir sehingga produksi menjadi berkurang yang berakibat pada penghasilan masyarakat, sedangkan harga konsumsi terus meningkat setiap tahunnya.

8. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indeks komposit dari gabungan 3 (tiga) dimensi yaitu umur panjang dan hidup sehat, dimensi pengetahuan dan dimensi standar hidup yang layak. IPM mengukur secara spesifik pencapaian masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi, untuk mencapai dan mempertahankan standar kehidupan yang layak. Tren capaian IPM Kabupaten Flores Timur selama 6 (enam) tahun terakhir disajikan pada Tabel 2.63 berikut;

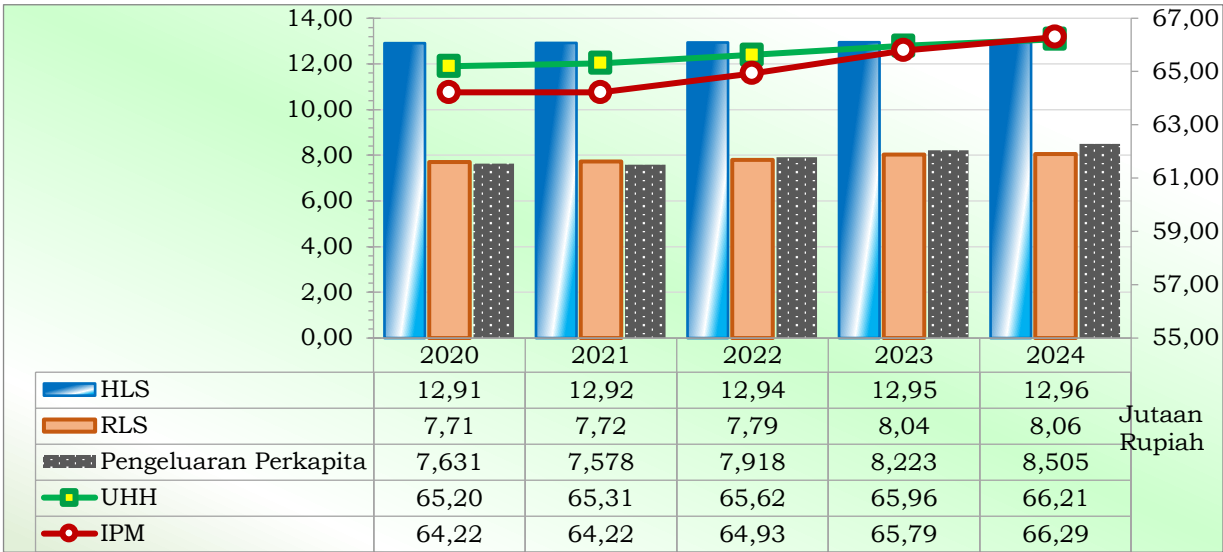
Tabel 2.63 Indeks Pembangunan Manusia menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tahun 2019-2024

Provinsi/ Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Nusa Tenggara Timur	65.23	65.19	65.28	65.90	66.68	69.14
Sumba Barat	63.56	63.53	63.83	64.43	65.22	67.70
Sumba Timur	65.34	65.52	65.74	66.17	67.05	70.28
Kupang	64.43	64.32	64.41	65.04	65.82	68.26
Timor Tengah Selatan	62.23	62.15	62.16	62.73	63.58	66.22
Timor Tengah Utara	63.34	63.53	63.69	64.26	65.16	67.27
Belu	62.54	62.68	62.77	63.22	63.83	68.13
Alor	61.03	61.33	61.37	62.26	62.99	67.70
Lembata	64.91	64.74	64.75	65.47	66.12	68.95
Flores Timur	64.34	64.22	64.22	64.93	65.79	66.29
Sikka	64.75	65.11	65.41	66.06	66.89	69.96
Ende	67.20	67.04	67.30	67.97	68.63	72.24
Ngada	67.76	67.88	67.88	68.26	69.14	72.04
Manggarai	64.15	64.54	65.01	65.83	66.42	69.36
Rote Ndao	62.22	62.39	62.60	63.21	64.00	66.40
Manggarai Barat	63.50	63.89	64.17	64.92	65.81	68.68
Sumba Tengah	61.01	61.53	61.80	62.71	63.48	64.46
Sumba Barat Daya	62.60	62.28	62.29	63.15	63.74	64.27

Provinsi/ Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Nagekeo	65.88	65.81	65.82	66.22	67.07	69.70
Manggarai Timur	60.47	60.85	61.37	62.30	63.24	66.03
Sabu Raijua	56.66	57.02	57.03	57.90	58.89	62.06
Malaka	60.34	60.21	60.42	61.34	62.06	65.15
Kota Kupang	79.55	79.71	79.74	80.20	80.62	83.21

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi NTT, Tahun 2025

Tren perkembangan IPM Kabupaten Flores Timur selama periode tahun 2019-2024 menunjukkan peningkatan sebagaimana terlihat pada Tabel 2.63 di atas. Capain kinerja IPM di atas digambarkan berdasarkan indeks komposit dari gabungan 4 (empat) indikator, yaitu Usia Harapan Hidup (UHH), Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), serta Pengeluaran Per Kapita. Gambaran capaian IPM Kabupaten Flores Timur berdasarkan indikator komposit IPM sebagaimana terlihat pada Gambar 2.12 berikut;



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi NTT, Tahun 2025 (Data Olahan)

Gambar 2.12 Grafik Capaian Indikator Komposit Indeks Pembangunan Manusia (Usia Harapan Hidup, Rata-Rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah dan Pengeluaran Perkapita) Kabupaten Flores Timur Tahun 2020-2024

Gambar di atas menunjukkan selama periode tahun 2020-2024 perkembangan angka IPM Kabupaten Flores Timur rata-rata mengalami peningkatan, dengan capaian IPM berbanding lurus dengan capaian indeks/ indikator kompositnya. Pada tahun 2023 IPM Kabupaten Flores Timur sebesar 65,79 mengalami peningkatan sebesar 0,5 poin menjadi 66,29 pada tahun 2024, dengan capaian indikator komposit masing-masing, yakni: Usia Harapan Hidup sebesar 66,21 tahun, Pengeluaran Kapita sebesar Rp 8.505.000/tahun, angka Harapan Lama Sekolah sebesar 12,96 tahun dan Rata-rata Lama Sekolah sebesar 8,06 tahun. Capaian IPM Kabupaten Flores Timur sebesar 66,29 pada Tahun 2024 jika dibandingkan dengan capaian IPM Kabupaten/Kota lain di Provinsi Nusa Tenggara Timur maka angka IPM Kabupaten Flores Timur berada diperingkat 11 dan di dibawah rata-rata Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 69,14. Gambaran capaian di atas perlu ditingkatkan, untuk itu perlu mendapat perhatian terutama

Gambaran capaian indikator komposit IKS Kabupaten Flores Timur dapat dilihat pada Tabel 2.65 berikut;

Tabel 2.65 Capaian Indikator Komposit Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Flores Timur, Tahun 2022-2023

No.	Indikator Komposit IKS	Tahun	
		2022	2023
1.	Keluarga mengikuti program KB	26,97	29,19
2.	Persalinan Ibu di fasilitas pelayanan kesehatan	95,62	95,95
3.	Bayi mendapatkan imunisasi dasar lengkap	98,01	98,13
4.	Bayi mendapatkan ASI Eksklusif	90,79	91,07
5.	Pertumbuhan Balita dipantau	95,06	95,26
6.	Penderita TB Paru yang berobat sesuai standar	31,10	34,99
7.	Penderita hipertensi yang berobat teratur	27,14	27,94
8.	Penderita gangguan jiwa berat, diobati dan tidak ditelantarkan	12,45	13,73
9.	Anggota keluarga tidak ada yang merokok	43,03	43,02
10.	Keluarga sudah menjadi anggota JKN	38,23	38,69
11.	Keluarga memiliki akses/menggunakan sarana air bersih	97,33	97,71
12.	Keluarga memiliki akses/menggunakan jamban keluarga	95,21	95,29
IKS Kab. Flores Timur		0,134	0,138

Sumber : Dinas Kesehatan dan Dinas PUPR Kab. Flores Timur, Tahun 2024 (Data Olahan)

Tabel di atas dapat dijelaskan capaian Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kabupaten Flores Timur pada tahun 2022 sebesar 0,134 poin dan tahun 2023 naik menjadi 0,138 poin. Kondisi ini menggambarkan bahwa rata-rata keluarga di Kabupaten Flores Timur tidak sehat karena berada pada kategory IKS <0,500. Untuk meningkatkan kinerja IKS perlu peningkatan pada indikator komposit yang membentuk IKS melalui program-program pembatasan dan pengaturan jarak kelahiran, peningkatan mutu kelahiran, peningkatan mutu layanan kesehatan, peningkatan mutu dan akses terhadap air minum serta sanitasi, mengurangi rokok atau merokok pada tempat yang disediakan. Kondisi ini perlu perhatian serius sehingga menghasilkan generasi yang sehat dan mampu berdaya saing serta memiliki usia harapan hidup yang lama.

3. Prevalensi Stunting

Stunting merupakan masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek (kerdil) dari standard usianya. Masalah *stunting* dipengaruhi oleh rendahnya akses terhadap makanan dari segi jumlah dan kualitas gizi, pola asuh yang kurang baik, rendahnya akses pelayanan kesehatan termasuk didalamnya adalah akses sanitasi dan air bersih.

Pencegahan *Stunting* merupakan salah satu agenda pembangunan Nasional dan juga prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan Sumber Daya Manusia Flores Timur yang sehat, cerdas, kreatif dan produktif. Hal tersebut terlihat melalui deklarasi *Gempur Stunting* di tahun 2018 dan

pelaksanaan program inovasi *Gerobak Cinta*. Gerobak Cinta merupakan konsep pemberian makanan tambahan dengan memanfaatkan pangan lokal bergizi (SOLOR: Sorgum dan Kelor) disertai dengan sarana edukasi dan praktek cerdas tentang Pola Hidup Sehat yang dilaksanakan dengan pendekatan pemberdayaan semua elemen/ pelaku pembangunan dalam irama konvergensi dan persaudaraan untuk gotong royong mengatasi *stunting*. Gambaran capaian kinerja dalam mengatasi *stunting* di Kabupaten Flores Timur selama 3 tahun terakhir sebagaimana terlihat pada Tabel 2.66 berikut.

Tabel 2.66 Prevalensi *Stunting* Kabupaten Flores Timur, Tahun 2022-2024

No	Kecamatan	Agustus 2022			Agustus 2023			Agustus 2024			Sumber Data
		Jumlah Balita	Total Baita <i>Stunting</i>	%	Jumlah Balita	Total Baita <i>Stunting</i>	%	Jumlah Balita	Total Baita <i>Stunting</i>	%	
1	Wulanggitang	1.008	206	20,4	949	169	17,8	825	103	22,7	
2	Ile Bura	446	98	22	423	84	19,9	386	69	23,2	
3	Titehena	890	192	21,6	852	196	23	772	190	25,1	
4	Demon Paggong	260	46	17,7	242	42	17,4	217	35	16,3	
5	Larantuka	2.528	354	14	2.536	319	12,5	2.389	257	11,0	
6	Ile Mandiri	711	98	13,8	665	83	12,5	622	109	17,6	
7	Tanjung Bunga	1.268	247	19,5	1.258	271	21,5	1.226	264	23,9	
8	Lewolema	654	89	13,6	645	65	10,1	539	52	9,6	
9	Solor Barat	598	111	18,6	562	115	20,5	512	71	14,0	
10	Solor Timur	1.116	297	26,6	1.081	263	24,3	1.013	222	23,0	
11	Solor Selatan	398	72	18,1	394	76	19,3	342	76	22,4	
12	Adonara Barat	988	227	23	965	234	24,2	938	249	26,8	
13	Adonara Tengah	831	217	26,1	808	186	23	776	173	24,8	
14	Adonara Timur	1.799	264	14,7	1.720	258	15	1.772	249	18,1	
15	Kelubagolit	767	146	19	727	136	18,7	649	128	20,0	
16	Adonara	852	160	18,8	810	136	16,8	743	127	17,2	
17	Ile Boleng	1.143	208	18,2	1.142	209	18,3	1.074	212	19,8	
18	Witihama	1.169	218	18,6	1.089	227	20,9	1.034	214	20,8	
19	Wotan Ulumado	802	162	20,2	724	115	15,9	702	167	25,0	
Kabupaten		18.229	3.412	18,7	17.592	3.184	18,1	16.498	2.967	19,4	EPPGBM
							37,2				SKI

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Flores Timur, Tahun 2025

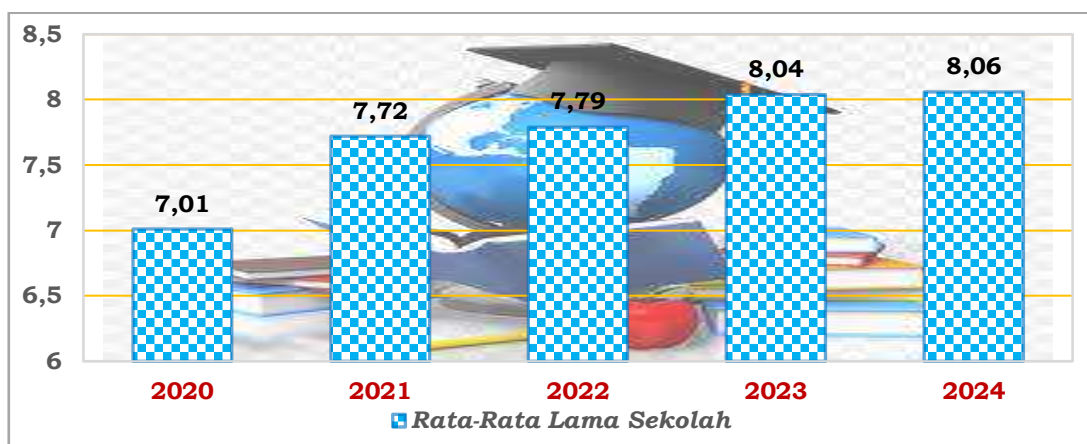
Tabel di atas menunjukkan bahwa capaian data *stunting* di Kabupaten Flores Timur sejak tahun 2022-2024 berfluktuatif (sumber data EPPGBM). Kondisi data *stunting* di Kabupaten Flores Timur pada periode Agustus 2023 tercatat sebesar 18,1% atau sebanyak 3.184 balita *stunting* dari 17.592 balita. Capaian prevalensi pada tahun 2023 ini mengalami penurunan sebesar 0,6% atau sebanyak 228 balita *stunting* bila dibandingkan dengan prevalensi *stunting* tahun sebelumnya. Sedangkan hasil pengukuran berdasarkan data survei kesehatan Indonesia (SKI) prevalensi *stunting* kabupaten tahun 2023 sebesar 37,2%. Hal ini dipengaruhi oleh metode pengukuran serta sampling yang digunakan sifatnya survei pada beberapa balita. Sementara itu pada tahun 2024 (sumber data EPPGBM) berdasarkan hasil pengukuran pada bulan Agustus prevalensi *stunting* tingkat Kabupaten Flores Timur tercatat sebesar 19,4% atau sebanyak 2.967 balita *stunting*. Bila dibandingkan dengan data capaian pada tahun 2023 maka nilai peningkatannya sebesar 1,3%. Kondisi ini jika dilihat dari jumlah hasil pengukuran terhadap balita menunjukkan

peningkatan secara kualitas, karena berkurangnya jumlah balita *stunting* sebesar 217 balita dari balita yang mendapatkan pengukuran pada tahun 2024 sebanyak 16.498 dan pada tahun 2023 sebanyak 17.592.

C. Pendidikan Berkualitas yang Merata

1. Rata-Rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Flores Timur pada kurung waktu tahun 2020-2024 sebagaimana terlihat pada Gambar 2.13 berikut;



Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Flores Timur, Tahun 2025

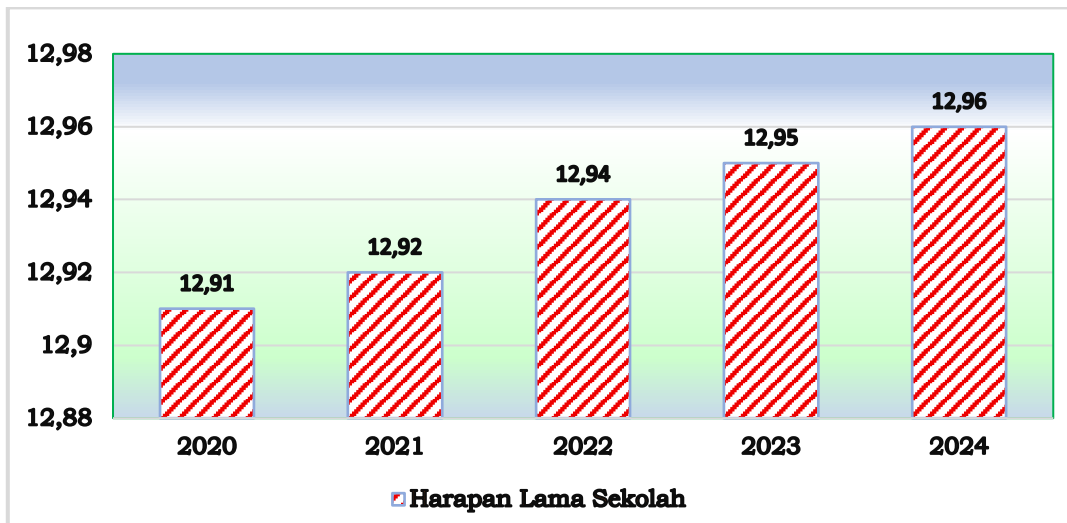
Gambar 2.13 Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Flores Timur Tahun 2020-2024

Gambar di atas menunjukkan bahwa perkembangan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Flores Timur meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2024 rata-rata lama sekolah mencapai 8,06 tahun. Artinya secara rata-rata penduduk di Kabupaten Flores Timur yang berusia 15 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 8,06 tahun atau sudah menamatkan kelas VII (kelas 1 SMP dan memasuki kelas 2 SMP). Jika dibandingkan target pendidikan nasional yaitu pendidikan dasar 9 tahun, maka Pemerintah Kabupaten Flores Timur harus menciptakan metode/model pendidikan yang dapat menghasilkan masyarakat Kabupaten Flores Timur yang berusia 15 tahun keatas minimal menamatkan pendidikan dasar 9 tahun. Dalam rangka Peningkatan rata-rata lama sekolah dan peningkatan mutu pendidikan pemerintah pusat telah mengalokasikan pembiayaan untuk operasional sekolah, pembiayaan untuk peningkatan kompetensi guru dan pemberian bantuan bagi siswa melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) agar dapat mengatasi kebutuhan pendidikan peserta didik.

2. Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun keatas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Untuk menghitung HLS dibutuhkan informasi: (a). Partisipasi sekolah; (b). Jenjang dan jenis pendidikan yang pernah/sedang diduduki; (c). Ijasah tertinggi yang dimiliki; dan (d). Tingkat/kelas tertinggi yang

pernah/sedang diduduki. Cakupan penduduk yang dihitung HLS adalah penduduk usia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. Harapan lama sekolah di Kabupaten Flores Timur pada kurung waktu tahun 2020-2024 sebagaimana terlihat pada gambar 2.14 berikut;



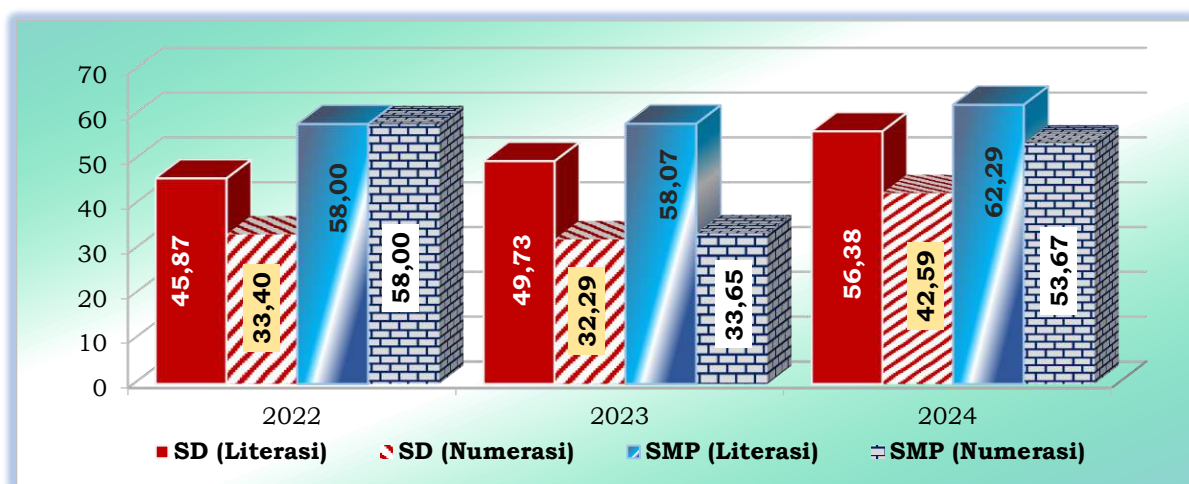
Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Flores Timur Tahun 2025

Gambar 2.14 Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Flores Timur Tahun 2020-2024

Gambar di atas menunjukkan bahwa Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Flores Timur meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2024 HLS mencapai 12,96 tahun. Artinya secara rata-rata penduduk di Kabupaten Flores Timur yang berusia 25 tahun ke atas yang telah menempuh pendidikan formal tertinggi 12,96 tahun atau sudah menamatkan kelas XII (kelas 3 SMA dan memasuki jenjang perguruan tinggi). Meningkatnya harapan lama sekolah bagi penduduk pada umur 25 tahun ke atas menggambarkan kualitas sumber daya manusia. Dalam rangka peningkatan harapan lama sekolah suatu daerah diperlukan kerjasama semua pihak baik pemerintah maupun lembaga swasta dalam memberikan perhatian pada penduduk berusia 15-25 tahun untuk mendapatkan pendidikan minimal sampai perguruan tinggi. Bentuk dukungan pemerintah berupa pemberian beasiswa bagi siswa atau mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi untuk dapat menyelesaikan pendidikan sampai perguruan tinggi.

3. Angka Literasi/Numerasi

Literasi dan numerasi merupakan persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi), serta persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan. Capaian literasi dan numerasi Kabupaten Flores Timur Tahun 2022-2024 dapat dilihat pada Gambar 2.15 berikut;



Sumber : Rapor Pendidikan, Tahun 2024

Gambar 2.15 Capaian Literasi dan Numerasi Kabupaten Flores Timur Tahun 2022-2024

Gambar di atas dapat dijelaskan bahwa capaian literasi Kabupaten Flores Timur pada satuan pendidikan Sekolah Dasar (SD) tahun 2022-2024 mengalami peningkatan setiap tahunnya, dimana pada tahun 2022 capaian literasi sebesar 45,87%, mengalami peningkatan pada tahun 2023 menjadi 49,73%, dan meningkat lagi pada tahun 2024 menjadi 56,38%. Kondisi ini menunjukkan kemampuan peserta didik untuk memahami dan menggunakan tulisan dalam berbagai bentuk. Sampai tahun 2024 masih pada kategori dasar (di bawah kompetensi minimum), dimana persentase peserta didik yang mengikuti penilaian literasi satuan pendidikan yang belum mencapai bobot penilaian 1,5 poin sebanyak 40% atau dengan kata lain peserta didik yang mengikuti penilaian dan mendapatkan skor 1,5 poin harus mencapai 60%, sedangkan capaian numerasi Kabupaten Flores Timur pada satuan pendidikan Sekolah Dasar (SD) tahun 2022-2024 berfluktuatif, dimana pada tahun 2022 capaian numerasi sebesar 33,40%, mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi 32,29%, dan pada tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi 42,59%. Kondisi ini menunjukkan kemampuan peserta didik memahami dan menggunakan angka, simbol, dan konsep matematika dalam konteks kehidupan sehari-hari untuk memecahkan masalah praktis. Sampai tahun 2024 masih pada kategori dasar (di bawah kompetensi minimum), dimana persentase peserta didik yang mengikuti penilaian numerasi satuan pendidikan yang belum mencapai bobot penilaian 1,5 poin sebanyak 40% atau dengan kata lain peserta didik yang mengikuti penilaian dan mendapatkan skor 1,5 poin harus mencapai 60%.

Capaian ini masih dibawah kopentensi minimum, dimana sampai pada tahun 2024 kondisi capaian literasi pada satuan pendidikan SD baru mencapai 56,38%, dan numerasi sebesar 42,59. Kabupaten Flores Timur pada tahun 2024 pada tingkat satuan pendidikan SD berada pada kategori dasar (jauh dibawah kompetensi minimum), dimana persentase penilaian literasi dan numerasi pada satuan pendidikan SD yang belum mencapai bobot penilaian 1,5 poin sebanyak 40% atau dengan kata lain peserta didik yang mengikuti penilaian dan mendapatkan skor 1,5 poin harus mencapai 60%, sedangkan capain literasi tingkat SD yang mengikuti

penilaian baru mencapai 56,38% dan tingkat SMP baru mencapai 62,29% serta capaian numerasi tingkat SD baru mencapai 42,59% dan tingkat SMP baru mencapai 53,67%. Secara umum gambaran capaian pada tahun 2024 menunjukkan angka literasi dan numerasi pada tingkat SD dan SMP mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023. Namun dari capaian tersebut, hanya literasi SMP yang berada pada capaian di atas 60%. Sedangkan capaian literasi SD, numerasi SD dan numerasi SMP belum mencapai 60%. Kondisi ini perlu mendapat perhatian serius pemerintah untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi), serta kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan.

4. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah (tingkat provinsi dan kabupaten/kota) dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat. Dalam mengukur IPLM terdapat 7 unsur pembangunan literasi masyarakat, yaitu: 1). Pemerataan layanan perpustakaan; 2). Ketercukupan koleksi; 3). Ketercukupan tenaga perpustakaan; 4). Tingkat kunjungan masyarakat per hari; 5). Jumlah perpustakaan ber-SNP; 6). Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi/promosi; dan 7). Anggota perpustakaan. Gambaran capaian masing-masing indikator komposit Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Flores Timur pada tahun 2022-2024 sebagaimana terlihat pada Tabel 2.67 berikut;

Tabel 2.67 Capaian Indikator Komposit Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Flores Timur dan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tahun 2022-2024

No.	Indikator Komposit IPLM	Flotim			NTT		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
1.	Pemerataan layanan perpustakaan	0,0043	0,3198	0,317	0,0033	0,4108	0,4189
2.	Ketercukupan koleksi	2,5369	0,0497	0,209	2,1179	0,4232	0,3863
3.	Ketercukupan tenaga perpustakaan	0,0059	0,1048	0,2341	0,0031	0,3297	0,448
4.	Tingkat kunjungan masyarakat per hari	0,4254	0,0449	0,1606	0,3365	0,0733	0,1301
5.	Jumlah perpustakaan ber-SNP	1,0140	1,0000	0,2743	1,5514	1,0000	1,000
6.	Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi/ promosi	0,1876	0,5226	0,1734	0,1444	1,0000	1,000
7.	Anggota perpustakaan	0,6904	1,0000	1,000	0,5696	1,0000	1,000
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat		69,49	43,45	33,83	43,45	60,35	62,62
		Sedang	Rendah	Rendah	Rendah	Sedang	Sedang

Sumber : Laporan Akhir Kajian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat, Tahun 2025

Dengan melihat kondisi di atas capaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Flores Timur tahun 2024 (33,83/rendah) mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 (43,45/rendah). Capaian IPLM diatas masih jauh dari harapan. Hal ini disebabkan oleh masih kurangnya

koleksi, tingkat kunjungan yang masih rendah, masih terbatas perpustakaan ber- Standar Nasional Perpustakaan (SNP) dan masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi/promosi. Kondisi ini perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah melalui peningkatan bahan perpustakaan yang diikuti dengan pengembangan layanan literasi inklusif. Selain itu juga, perlu ditingkatkan kuantitas dan kualitas tenaga perpustakaan yang sesuai standar.

5. Indeks Literasi Digital dan Indeks Masyarakat Digital

Indeks literasi digital yang selanjutnya disingkat ILD merupakan alat untuk mengukur kemampuan masyarakat dalam memproses berbagai informasi dengan kritis, dapat memahami pesan yang disampaikan, dan dapat berkomunikasi dengan efektif sebagai pengkonsumsi media.

Gambaran capaian indikator secara kabupaten sampai saat ini belum dilakukan, namun pelaksanaan program dari kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan representasi capaian yang memberikan kontribusi pada pencapaian indikator yang membentuk Indeks Literasi Digital sebagaimana dilihat pada Tabel 2.68 berikut;

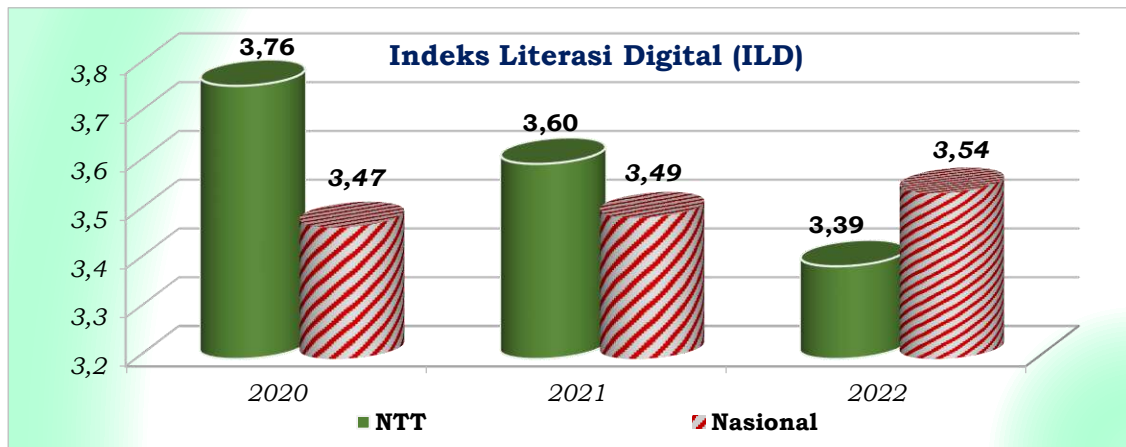
Tabel 2.68 Capaian Indikator Komposit Indeks Literasi Digital Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Nasional, Tahun 2020-2022

No	Indikator Komposit ILD	2020		2021		2022	
		NTT	Nasional	NTT	Nasional	NTT	Nasional
1.	Informasi dan Literasi Data	3,50	3,17	3,69	3,44	3,26	3,52
2.	Komunikasi dan Kolaborasi	3,68	3,38	3,50	3,53	3,64	3,68
3.	Keamanan	3,95	3,66	3,31	3,10	2,85	3,12
4.	Kemampuan Teknologi	3,91	3,66	3,91	3,90	3,80	3,84

Sumber : Status Literasi Digital Indonesia, Tahun 2023

Gambaran pencapaian indikator komposit di atas merupakan hasil analisis yang dilakukan melalui survei pemanfaatan teknologi informatika masyarakat yang dilakukan secara acak di seluruh Indonesia tentang akses dan penggunaan internet, kebiasaan bermedia sosial dan mencerna berita *online*, berbagi informasi dan keamanan data pribadi, serta paparan dan sikap terhadap *hoaks*. Tabel di atas dapat dijelaskan bahwa indikator dari komposit ILD pada tahun 2022 secara survei Provinsi Nusa Tenggara Timur masih berada pada katergori sedang (skor 3-4), namun pada indikator keamanan berada pada kategori buruk (skor 2-3). Hal ini menunjukkan masih banyak masyarakat NTT berada pada kategori buruk dalam hal pengaturan siapa saja yang dapat melihat postingan responden di media sosial, pengetahuan tentang tidak mengunggah data pribadi di media sosial, menonaktifkan opsi untuk menunjukkan posisi geografis/GPS responden, serta kemampuan cara “*report abuse*”/laporan penyalahgunaan di jejaring sosial jika ada postingan yang mengandung konten negatif dan kebiasaan membuat *password* yang aman dengan kombinasi angka, huruf, dan tanda baca, melakukan *back up* atau simpan data di beberapa tempat, menggunakan aplikasi/*software* untuk menemukan dan menghapus virus di *handphone/computer*, serta kemampuan membedakan email

yang berisi spam/virus/*malware* dengan yang tidak. Dengan melihat capaian indikator komposit ILD di atas maka capaian Indeks Literasi Digital Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Tahun 2020-2022 dapat dilihat pada Gambar 2.16 berikut;



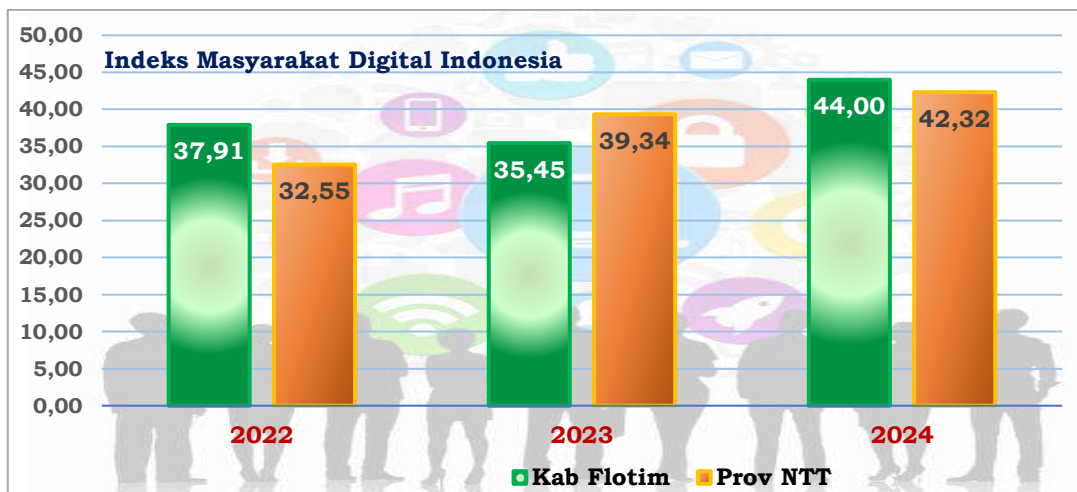
Sumber : Status Literasi Digital Indonesia, Tahun 2023

Gambar 2.16 Capaian Indeks Literasi Digital Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Nasional ,Tahun 2020-2022

Gambar di atas dapat dijelaskan bahwa kemampuan masyarakat dapat memproses berbagai informasi dengan kritis, dapat memahami pesan yang disampaikan dan dapat berkomunikasi dengan efektif sebagai pengkonsumsi media di Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami penurunan setiap tahunnya dengan capaian pada tahun 2022 sebesar 3,39 (atau menurun 0,21 poin dari capaian tahun sebelumnya). Capaian provinsi ini berbanding terbalik dengan capaian nasional, dimana mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan capaian tahun 2022 sebesar 3,54 atau meningkat 0,05 poin dari capaian tahun 2021.

Selain itu sebagai salah satu upaya strategis Kementerian Komunikasi dan Digital memperkenalkan Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) untuk memberikan gambaran menyeluruh terkait kondisi masyarakat digital di Indonesia hingga tingkat kabupaten/kota, sekaligus menjadi acuan utama bagi penyusunan kebijakan dan program pengembangan masyarakat digital. Masyarakat digital adalah masyarakat yang memanfaatkan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi yang berbasis teknologi.

IMDI memiliki peran penting dalam mendukung Visi Indonesia Digital (VID) 2045, yang menjadikan masyarakat digital sebagai pilar utama transformasi menuju Indonesia yang inklusif, inovatif dan berdaya saing global, dengan 4 (empat) pilar utama yakni: (1) Pilar Infrastruktur ekosistem; (2) Pilar Pemberdayaan; (3) Pilar Keterampilan Digital; dan (4) Pilar Pekerjaan. Pengukuran IMDI menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data primer yang diperoleh dari survei ke individu dan industri, serta data sekunde yang diperoleh dari instansi terkait. Gambaran perkembangan capaian nilai IMDI di Kabupaten Flores Timur selama periode tahun 2022-2024 dapat dilihat pada Gambar 2.17 berikut.



Gambar 2.17 Perkembangan Capaian Indeks Masyarakat Digital Indonesia Kabupaten Flores Timur dan Provinsi NTT, Tahun 2022-2024

Gambar di atas menunjukkan secara keseluruhan capaian nilai IMDI Kabupaten Flores Timur selama periode tahun 2022-2024 mengalami peningkatan sebesar 6,09 poin walaupun pada tahun 2023 sempat mengalami penurunan. Capaian nilai IMDI Kabupaten Flores Timur pada tahun 2024 sebesar 44,00 berada pada kategori "cukup" dan lebih tinggi bila dibanding dengan capaian IMD NTT (42,33), dengan capaian Pilar 1 (infrastruktur dan ekosistem) sebesar 50,29; Pilar 2 (keterampilan digital) sebesar 64,88; Pilar 3 (Pemberdayaan) sebesar 22,22; dan Pilar 4 (Pekerjaan) sebesar 41,19.

Capaian pilar pemberdayaan dan pilar pekerjaan menjadi perhatian serius Pemerintah dalam transformasi digital di Kabupaten Flores Timur. Upaya peningkatan akses, pemahaman teknologi, ekosistem pembelajaran dan digitalisasi pemerintah yang terus dilakukan, perlu disertai dengan peningkatan pemberdayaan keterampilan masyarakat agar dapat memanfaatkan perkembangan teknologi digital dalam aktifitas kehidupan sehari-hari. Pengembangan keterampilan digital harus sejalan dengan perkembangan digitalisasi.

D. Perlindungan Sosial yang Adaptif

Pembangunan bidang kesejahteraan sosial pada dasarnya diarahkan untuk mengatasi dan mengurangi permasalahan yang dihadapi oleh Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Perkembangan PMKS di Kabupaten Flores Timur dari tahun 2021-2023 menunjukkan tren menurun. Di tahun 2024 meningkat menjadi 48.369 orang atau bertambah 14.349 orang, yang lebih disebabkan oleh meningkatnya jumlah korban bencana alam yang harus ditangani sebagai dampak dari bencana alam erupsi Gunung Berapi Lewotobi Laki-laki yang terjadi pada awal tahun 2024. Gambaran

perkembangan jumlah PMKS di Kabupaten Flores Timur selama periode tahun 2021-2024 sebagaimana terlihat pada Tabel 2.69 berikut;

Tabel 2.69 Penyandangan Masalah Kesejahteraan Sosial
Kabupaten Flores Timur, tahun 2021-2024

No	Jenis Masalah PMKS	Jumlah (Orang) pada Tahun			
		2021	2022	2023	2024
1	Anak Balita Terlantar	1.059	1.059	1.059	417
2	Anak Terlantar	93	93	3.248	93
3	Anak Yang Berhadapan dengan hukum	55	16	55	55
4	Anak Jalanan	93	93	93	106
5	Anak Dengan Kedisabilitas	536	536	536	59
6	Anak Yang menjadi korban tindak kekerasan/ diperlakukan salah	14	14	14	95
7	Anak yang memerlukan perlindungan khusus	18	18	18	431
8	Lanjut Usia terlantar	3.602	3.602	3.602	1.182
9	Penyandang Disabilitas	1.422	1.422	1.422	1.422
10	Tuna Susila	-	-	-	-
11	Gelandangan	-	-	-	25
12	Pengemis	-	-	-	-
13	Pemulung	-	-	-	-
14	Kelompok Minoritas (eks kusta dan waria)	11	40	11	162
15	Bekas warga binaan Lembaga Pemasyarakatan	168	169	168	117
16	Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA)	4	168	4	266
17	Korban Penyalagunaan Napsa	19	19	19	19
18	Korban Trafiking	-	-	-	24
19	Korban Tindak Kekerasan	9	9	9	59
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	995	995	995	167
21	Korban Bencana Alam	467	23	467	13.320
22	Korban Bencana Sosial	197	56	197	209
23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	5.200	5.200	5.200	5.199
24	Keluarga Fakir Miskin (FM)	16.121	16.121	16.121	24.160
25	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	304	304	304	304
26	Komunitas Adat Terpencil (KAT)	478	478	478	478
Jumlah		30.865	30.435	34.020	48.369

Sumber : Dinas Sosial Kab. Flores Timur, Tahun 2025

E. Beragama dan Berkebudayaan Maju

1. Indeks Kerukunan Umat Beragama

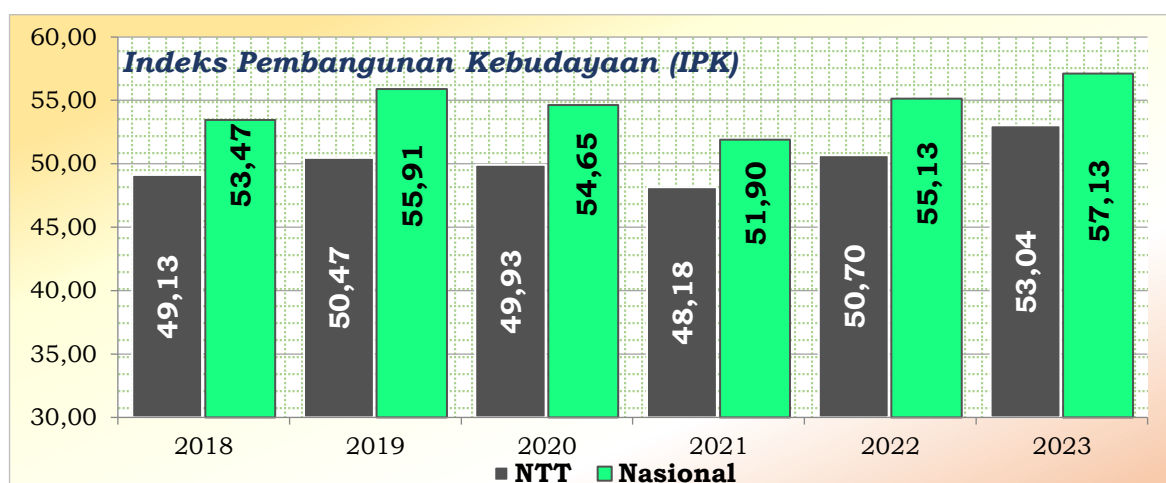
Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) merupakan keadaan hubungan antarumat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian dan saling menghormati dalam pengamalan ajaran agama serta kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat. Data IKUB pada level kabupaten sampai saat ini belum tersedia, yang ada baru sampai pada level Provinsi. Berdasarkan data, secara Provinsi menunjukkan bahwa pada tahun 2021 Provinsi Nusa Tenggara Timur menempati peringkat pertama dari seluruh Provinsi dengan indeks terbaik 81,07.

Capaian ini menunjukkan bahwa dari tiga aspek pembentuk Indeks Kerukunan Umat Beragama yakni: toleransi, kerjasama dan kesetaraan telah berjalan baik. Meskipun indeks kerukunan umat beragama ini pada level provinsi namun dengan asumsi bahwa Kabupaten Flores Timur juga menjadi bagian dari

Provinsi Nusa Tenggara Timur maka capaian yang diperoleh saat ini juga mencerminkan kondisi yang ada di kabupaten. Kesimpulan ini juga diperkuat dengan fakta dan data yang ada di Kabupaten Flores Timur bahwa belum pernah terjadi kasus atau konflik yang mengatasnamakan agama, toleransi dan kerjasama. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) serta Forum Pembauran Kebangsaan berjalan dan berpartisipasi aktif dalam membangun dan menciptakan situasi yang kondusif antar umat beragama. Selain itu juga keberadaan forum pemuda dari masing-masing agama yang selalu berpartisipasi aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban pelaksanaan perayaan hari-hari besar keagamaan agama lain juga menjadi salah satu indikator yang mencerminkan nilai toleransi dan kerjasama. Agar capaian dari indeks kerukunan umat beragama tetap tinggi maka nilai-nilai baik dari aspek toleransi, kerjasama dan kesetaraan harus tetap dipertahankan dan terus ditingkatkan dari waktu ke waktu.

2. Indeks Pembangunan Kebudayaan

Pembangunan Kebudayaan merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) merupakan instrument yang digunakan untuk menggambarkan kemajuan dan pembangunan kebudayaan secara holistik dengan memuat 7 (tujuh) dimensi, yakni: (1) dimensi ekonomi budaya; (2) dimensi pendidikan; (3) dimensi ketahanan sosial budaya; (4) dimensi warisan budaya; (5) dimensi ekspresi budaya; (6) dimensi budaya literasi; dan (7) dimensi kesetaraan gender. Ketujuh dimensi ini diukur melalui 31 indikator. Perhitungan capaian IPK secara kabupaten sampai saat ini belum dilakukan, namun pelaksanaan program dari kabupaten/kota di Nusa Tenggara Timur merupakan representasi capaian yang memberikan kontribusi pada pencapaian indikator IPK Provinsi Nusa Tenggara Timur. Perkembangan capaian nilai IPK Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana terlihat pada Gambar 2.18 berikut;



Sumber : Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI, Tahun 2024 (Data Olahan)

Gambar 2.18 Grafik Capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Nasional, Tahun 2018-2023

Gambar di atas dapat dijelaskan bahwa capaian IPK Provinsi Nusa Tenggara Timur selama periode Tahun 2018-2023 berfluktuasi, namun secara umum mengalami peningkatan dengan rata-rata 0,78 setiap tahunnya. Capaian nilai IPK

Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2023 sebesar 53,04 meningkat 2,34 poin dari tahun sebelumnya, namun capaian ini lebih rendah dibanding capaian Nasional sebesar 57,13. Capaian ini perlu ditingkatkan terutama pada dimensi dan/atau indikator yang capaiannya masih tergolong rendah sebagaimana terlihat pada Tabel 2.70 berikut;

Tabel 2.70 Capaian Indikator Komposit Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Nasional, Tahun 2022-2023

No	Uraian	NTT		Nasional	
		2022	2023	2022	2023
A.	Dimensi Ekonomi Budaya	2,44	3,72	26,88	29,50
1	Persentase penduduk 15 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatannya itu sebagai sumber penghasilan	0,02	0,04	0,21	0,30
B.	Dimensi Pendidikan	59,20	70,21	68,71	73,35
1	Rata-rata Lama Sekolah (MYS) penduduk usia 25 tahun ke atas	7,69	7,82	8,54	8,77
2	Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun ke atas	13,20	13,22	13,08	13,15
3	Angka Kesiapan Sekolah (AKS)	54,02	54,59	74,69	76,54
4	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal bahasa daerah dan/atau ekskul kesenian	22,54	38,68	23,67	32,00
5	Persentase penduduk penyandang disabilitas usia 7-18 tahun yang bersekolahmuatan lokal bahasa daerah dan/atau ekskul kesenian	35,19	63,77	64,81	69,66
6	Persentase penduduk usia 7-18 tahun dengan kategori kelompok pengeluaran 40 persen terbawah yang bersekolah	91,33	91,39	90,54	91,26
C.	Dimensi Ketahanan Sosial Budaya	75,80	80,87	66,83	70,73
1	Persentase rumah tangga yang setuju jika ada sekelompok orang dari agama lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal.	86,33	89,20	56,02	61,17
2	Persentase rumah tangga yang setuju jika ada sekelompok orang dari suku lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal.	86,30	90,70	67,55	71,80
3	Persentase rumah tangga yang setuju jika salah satu anggota rumah tangga berteman dengan orang lain yang beda agama.	97,34	98,34	77,73	81,59
4	Persentase rumah tangga yang setuju jika salah satu anggota rumah tangga berteman dengan orang lain yang berbeda suku.	96,27	96,44	84,53	87,35
5	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar dalam 3 bulan terakhir	77,02	79,06	75,00	76,17
6	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengikuti gotong royong	37,91	39,78	35,03	36,00
7	Persentase rumah tangga yang merasa khawatir dengan keamanan saat berjalan kaki sendirian di malam hari	22,59	14,22	17,54	11,69
8	Persentase rumah tangga yang merasa percaya menitipkan rumah kepada tetangga	70,38	81,92	73,86	75,14
D.	Dimensi Warisan Budaya	39,88	40,95	46,63	51,54
1	Persentase benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total pendaftaran	0,52	1,01	3,90	8,06
2	Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total pencatatan	8,36	7,68	13,70	16,32
3	Persentase penduduk usia 5 tahun ke atas yang menggunakan bahasa daerah di rumah atau dalam pergaulan sehari-hari	63,89	63,50	74,08	73,93
4	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni dalam 3 bulan terakhir.	50,57	55,37	70,57	72,80
5	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah/warisan dunia dalam setahun terakhir	9,00	9,22	6,93	9,15

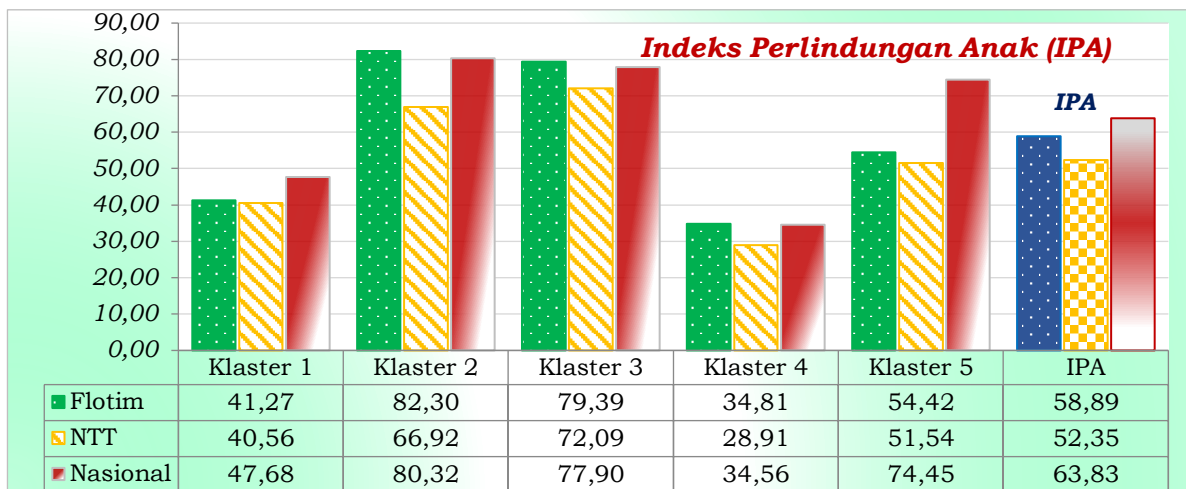
No	Uraian	NTT		Nasional	
		2022	2023	2022	2023
6	Persentase rumah tangga yang menggunakan produk tradisional dalam 3 bulan terakhir	73,19	74,78	73,01	79,08
E. Dimensi Ekspresi Budaya		30,50	35,12	21,13	34,91
1	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang memberikan saran atau pendapat dalam kegiatan rapat selama setahun terakhir	15,91	17,80	10,03	12,77
2	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang aktif mengikuti kegiatan organisasi dalam setahun terakhir	4,45	4,87	4,65	5,99
3	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni dalam 3 bulan terakhir	1,26	1,42	1,20	1,50
4	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan atau menghadiri upacara adat dalam setahun terakhir	12,94	16,42	15,65	20,54
F. Dimensi Budaya Literasi		47,32	53,99	54,29	60,49
1	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang membaca selain kitab suci baik cetak maupun elektronik dalam seminggu terakhir	48,52	54,14	10,03	56,06
2	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengakses internet dalam 3 bulan terakhir	46,16	53,70	4,65	70,78
3	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi perpustakaan/memanfaatkan taman bacaan masyarakat dalam 3 bulan terakhir	4,59	5,36	1,20	4,52
G. Dimensi Gender		63,75	66,12	58,55	58,71
1	Rasio tingkat partisipasi angkatan kerja usia 15 tahun ke atas perempuan terhadap laki-laki	79,17	82,52	64,84	64,70
2	Rasio penduduk usia 25 tahun ke atas perempuan terhadap laki-laki yang memiliki ijazah minimal SMA/Sederajat	87,06	90,85	84,43	88,23
3	Rasio anggota parlemen perempuan terhadap anggota parlemen laki-laki	25,00	25,00	26,37	23,21

Sumber : Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Tahun 2024 (Data Olahan)

F. Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif

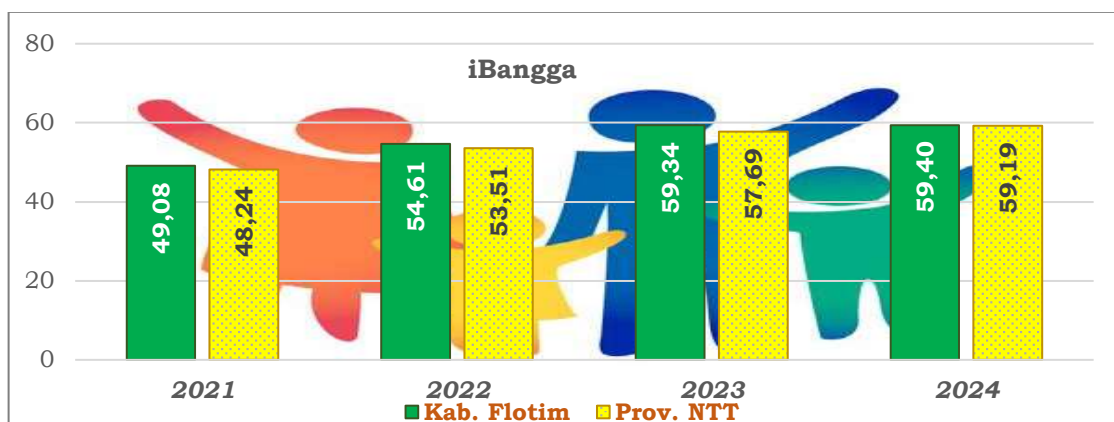
1. Indeks Perlindungan Anak

Indeks Perlindungan Anak (IPA) merupakan indikator yang menggambarkan pencapaian Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak dengan menjamin terpenuhinya hak-hak anak antara lain; hak perlindungan, hak pendidikan, hak identitas, hak kesetaraan, hak pelayanan kesehatan, hak bermain, hak rekreasi, hak memperoleh makanan, hak kewarganegaraan, dan hak berperan dalam pembangunan, sehingga anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas dan berakhlak mulia. IPA terbentuk melalui 5 klaster dan 31 indikator. 5 klaster pembentuk IPA yakni: Klaster 1: Hak Sipil dan Kebebasan; Klaster 2: Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif; Klaster 3: Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan; Klaster 4: Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya; dan Klaster 5: Perlindungan Khusus. Gambaran capaian nilai klaster IPA Kabupaten Flores Timur pada tahun 2023 dapat dilihat pada Gambar 2.19 berikut;



c. iBangga yang baik atau tangguh, nilainya >70 .

Pembangunan kualitas keluarga dalam pelaksanaan pembangunan daerah menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam rangka mewujudkan SDM yang berkualitas dan kesejahteraan masyarakat. Penguatan Program Kampung Keluarga Berkualitas (KBK) yang tersebar di seluruh desa/kelurahan, mengintegrasikan intervensi lintas sektor (pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lingkungan), peningkatan akses terhadap layanan dasar, seperti pelayanan KB, kesehatan ibu dan anak (KIA), gizi keluarga, serta peningkatan partisipasi keluarga dalam program pendidikan dan literasi, pemberdayaan ekonomi keluarga, terutama melalui pemanfaatan Dana Desa, UMKM keluarga, dan pemanfaatan potensi lokal merupakan gambaran upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas keluarga di Kabupaten Flores Timur. Gambaran kinerja pembangunan kualitas tercermin dari perkembangan capaian iBangga selama periode tahun 2021-2024 sebagaimana terlihat pada Gambar 2.20 berikut.



Sumber: Siperindu- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Tahun 2025

Gambar 2.20 Grafik Perkembangan Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga Kabupaten Flores Timur dan Provinsi NTT, Tahun 2021-2024

Gambar di atas menunjukkan capaian iBangga Kabupaten Flores Timur selama periode tahun 2021-2024 mengalami peningkatan dan berada di atas capaian Provinsi Nusa Tenggara Timur. Secara kumulatif, terdapat peningkatan sebesar 10,32 poin dalam kurun waktu empat tahun. Kenaikan paling signifikan terjadi pada tahun 2022 dan 2023. Hal ini menandakan adanya perbaikan struktural dan kebijakan yang konsisten dalam pembangunan keluarga. Namun demikian, pada tahun 2024, peningkatan nilai iBangga hanya sebesar 0,06 poin. Kondisi ini menunjukkan adanya kecenderungan stagnasi yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Capaian tahun 2024 mengindikasikan perlunya evaluasi terhadap efektivitas intervensi, khususnya pada dimensi kebahagiaan dan ketentraman keluarga, serta perlunya peningkatan koordinasi lintas sektor dan pemutakhiran data keluarga secara lebih masif untuk peningkatan kualitas keluarga. Kondisi ini memerlukan analisis lebih mendalam terhadap dimensi dengan skor terendah, disertai upaya untuk memperkuat koordinasi program lintas sektor, memprioritaskan intervensi berbasis data dengan memperkuat pembaruan Data Keluarga Indonesia (DKI), dan memperluas cakupan Kampung KBK ke desa-desa

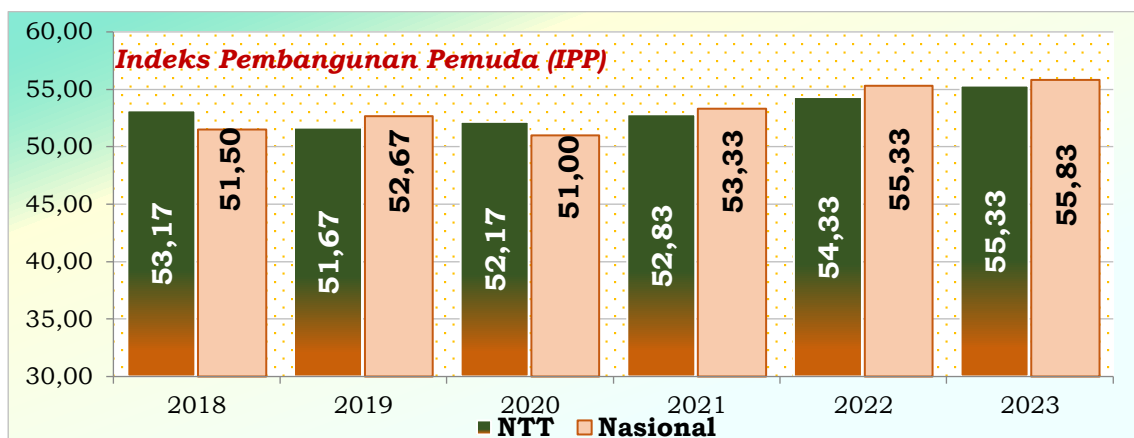
perlu mendapat perhatian terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan kesenjangan seperti Rata-rata Lama Sekolah (RLS) perempuan dan optimalisasi pemenuhan kesehatan perempuan, serta memberikan kesempatan bekerja kepada perempuan untuk meningkatkan pendapatan keluarga.

4. Indeks Pembangunan Pemuda

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) merupakan indeks komposit yang memberikan gambaran mengenai status pembangunan pemuda berdasarkan 3 (tiga) lapisan yaitu: (1) pembangunan individu; (2) pembangunan penghidupan dan kesejahteraan; dan (3) partisipasi dan diskriminasi, sebagaimana dirincikan dalam 5 domain yaitu;

- Pendidikan dengan indikator: rata-rata lama sekolah, Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah dan APK Perguruan Tinggi (APK PT),
- Kesehatan dan kesejahteraan dengan indikator: angka kesakitan pemuda, persentase pemuda korban kejahatan, persentase pemuda yang merokok dan persentase remaja perempuan yang sedang hamil,
- Lapangan dan kesempatan kerja dengan indikator: persentase pemuda wirausaha kerah putih dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT),
- Partisipasi dan kepemimpinan dengan indikator: persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan, persentase pemuda yang aktif dalam organisasi dan persentase pemuda yang menyampaikan saran/pendapat dalam rapat, serta
- Gender dan diskriminasi dengan indikator: angka perkawinan usia anak, persentase pemuda perempuan yang sedang menempuh pendidikan tingkat SMA ke atas, dan persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal.

Perhitungan capaian IPP secara kabupaten sampai saat ini belum dilakukan, namun pelaksanaan program dari kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan representasi capaian yang memberikan kontribusi pada pencapaian indikator IPP Provinsi NTT. Gambaran capaian nilai IPP Provinsi NTT selama tahun 2018-2023 dapat dilihat pada Gambar 2.22 berikut;



Sumber : Kementerian Pemuda dan Olahraga RI, Tahun 2024 (Data Olahan)

Gambar 2.22 Grafik Capaian Indeks Pembangunan Pemuda Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Nasional, Tahun 2018-2023

Gambar di atas dapat dijelaskan bahwa capaian IPP Provinsi Nusa Tenggara Timur pada periode Tahun 2018-2023 rata-rata mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan capaian pada tahun 2023 sebesar 55,33 meningkat 1,00 poin dari tahun sebelumnya, namun capaian ini lebih rendah dari capaian nasional sebesar 55,83. Capaian ini perlu ditingkatkan terutama pada domain dan/atau indikator yang capaiannya masih tergolong rendah sebagaimana terlihat pada Tabel 2.71 berikut;

Tabel 2.71 Capaian Indikator Komposit Indeks Pembangunan Pemuda Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tahun 2018-2023

No	Uraian	Tahun						Target Nasional 2045
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
A.	Domain Pendidikan	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	
1	Rata-rata Lama Sekolah	9,20	9,65	9,76	10,21	10,32	10,41	15
2	APK Sekolah Menengah	83,61	86,38	87,47	88,62	88,13	89,57	100
3	APK Perguruan Tinggi	30,14	30,22	31,28	33,27	89,57	32,65	100
B.	Domain Kesehatan dan Kesejahteraan	52,50	55,00	52,50	52,50	52,50	65,00	
1	Angka Kesakitan Pemuda	11,88	13,89	11,77	8,67	10,89	9,09	0
2	Persentase Pemuda Korban Kejahatan	1,07	0,90	0,71	0,75	0,55	0,36	0
3	Persentase Pemuda Yang Merokok	25,65	25,83	24,67	24,88	24,93	23,87	0
4	Persentase Remaja Perempuan yang Hamil	19,75	12,22	27,77	31,97	31,97	15,96	0
C.	Domain Lapangan dan Kesempatan Kerja	50,00	40,00	45,00	45,00	45,00	45,00	
1	Pemuda Wirausaha Kerah Putih	0,33	0,13	0,25	0,20	0,28	0,19	2
2	Tingkat Pengangguran Terbuka Pemuda	7,45	8,68	8,82	8,92	9,02	7,97	0
D.	Domain Partisipasi dan Kepemimpinan	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
1	Persentase Pemuda yang Mengikuti Kegiatan Sosial Kemasyarakatan	83,18	83,18	83,18	80,20	80,20	83,14	100
2	Persentase Pemuda yang Aktif dalam Organisasi	5,22	5,22	5,22	4,67	4,67	7,16	45
3	Persentase Pemuda yang Memberikan Saran/Usul dalam Rapat	7,55	7,55	7,55	8,76	8,76	8,43	25
E.	Domain Gender dan Diskriminasi	46,67	46,67	46,67	50,00	50,00	50,00	
1	Angka Perkawinan Usia Anak	8,78	8,51	9,22	5,95	5,95	4,97	33
2	Persentase Pemuda Perempuan yang Menempuh Pendidikan Menengah dan Tinggi	40,66	41,15	43,40	45,04	45,04	43,03	100
3	Persentase Pemuda Perempuan yang Bekerja di sektor formal	14,14	15,55	14,37	14,43	15,97	16,44	60

Sumber : Kementerian Pemuda dan Olahraga RI, Tahun 2024 (Data Olahan)

2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah

A. Daya Saing Sumber Daya Manusia

1. Angka Ketergantungan

Angka ketergantungan (*dependency ratio*) adalah rasio yang menunjukkan perbandingan jumlah penduduk usia non-produktif (di bawah 15 tahun dan 65 tahun ke atas) dengan jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun). Semakin tinggi angka ketergantungan, semakin besar beban yang ditanggung oleh penduduk usia produktif. Perkembangan Angka ketergantungan Kabupaten Flores Timur pada tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.72 berikut;

Tabel 2.72 Angka Ketergantungan (*Dependency Ratio*)
Kabupaten Flores Timur, Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
A	Angka ketergantungan (<i>dependency ratio</i>)	53,78	54,41	54,46	54,66	54,86
1	Penduduk usia non-produktif	101.915	99.937	101.858	101.897	103.623
	Usia 0-14	64.614	76.516	77.559	78.416	79.527
	Usia 65 keatas	37.301	23.421	24.299	23.481	24.096
2	Penduduk usia produktif	189.500	183.689	187.039	186.413	188.900
3	Jumlah Penduduk	276.896	283.626	288.897	288.310	292.523

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Flores Timur Tahun 2024 (Data Olahan)

Tabel di atas dapat dijelaskan bahwa selama periode Tahun 2020-2024, angka ketergantungan Kabupaten Flores Timur terus meningkat. Rata-rata angka ketergantungan selama 5 (lima) tahun terakhir sebesar 54,43 artinya setiap 100 penduduk produktif harus mendukung 54 penduduk yang tidak produktif.

B. Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi

1. Rasio PDRB Industri Pengolahan

Rasio Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) industri pengolahan merupakan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB suatu wilayah atau negara. Rasio ini menunjukkan proporsi atau persentase dari total PDRB yang dihasilkan oleh industri pengolahan. Industri pengolahan mencakup berbagai kegiatan produksi yang mengubah bahan mentah atau bahan baku menjadi produk akhir, seperti makanan, minuman, tekstil, kimia. Rasio PDRB industri pengolahan Kabupaten Flores Timur pada tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.73 berikut;

Tabel 2.73 Perkembangan Rasio Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Industri Pengolahan Kabupaten Flores Timur, Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio PDRB Industri Pengolahan	0,84	0,82	0,83	0,94	1,09

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Flores Timur Tahun 2025 (Data Olahan)

2. Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum

Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum merupakan indikator yang mengukur total nilai barang dan jasa yang dihasilkan Sektor seperti hotel, restoran, cafe, dan layanan akomodasi lainnya. Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum Kabupaten Flores Timur pada tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.74 berikut;

Tabel 2.74 Perkmbangan Rasio Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Akomodasi Makan dan Minum Kabupaten Flores Timur, Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	0,08	0,08	0,08	0,08	0,09

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Flores Timur Tahun 2024 (Data Olahan)

3. Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif

Proporsi Produk Domestik Regional Bruto Ekonomi Kreatif merupakan porsi atau persentase PDRB yang dihasilkan oleh sektor ekonomi kreatif dalam total PDRB di suatu wilayah. Menghitung proporsi PDRB Ekonomi Kreatif berarti menghitung besarnya sumbangan ekonomi kreatif terhadap perekonomian daerah secara keseluruhan.

4. Rasio Kewirausahaan Daerah

Rasio kewirausahaan daerah merupakan perbandingan jumlah orang yang berusaha dibantu buruh tetap di masing-masing daerah dengan total angkatan kerja daerah pada tahun yang sama. Berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar adalah berusaha atas resiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh atau pekerja tetap yang dibayar. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.

5. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan perbandingan penduduk yang bekerja dan mencari pekerjaan/pengangguran terbuka terhadap jumlah penduduk yang berusia sepuluh tahun ke atas. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. Gambaran perkembangan TPAK Kabupaten Flores Timur pada periode Tahun 2019-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.75 berikut;

Tabel 2.75 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Pengangguran Terbuka Kabupaten Flores Timur, Tahun 2019-2024

Kegiatan Utama	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
I. Angkatan Kerja/ Economically Active	66,57	71,79	71,80	74,56	72,50	74,26
1. Bekerja/ Working (%)	96,91	96,84	96,19	96,51	96,21	96,42
2. Pengangguran Terbuka/ Unemployment	3,09	3,16	3,81	3,49	3,79	3,58
II. Bukan Angkatan Kerja/ Not Economically Active	33,43	28,21	28,20	25,44	27,50	25,74
1. Sekolah/ Attending School	32,95	27,23	23,41	27,99	30,09	27,41
2. Mengurus Rumah Tangga/ Housekeeping	55,55	54,00	56,46	53,57	50,94	52,84
3. Lainnya/ Others	11,50	18,77	20,13	18,43	18,97	19,75
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	66,57	71,79	71,80	74,56	72,50	74,26
Tingkat Pengangguran	3,09	3,16	3,81	3,49	3,79	3,58

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Flores Timur, Tahun 2024 (Data Olahan)

Tabel di atas menggambarkan bahwa perkembangan TPAK Kabupaten Flores Timur selama periode Tahun 2019-2024 berfluktuasi. Sampai dengan tahun 2022 TPAK terus meningkat menjadi 74,56%, kemudian menurun menjadi 72,50 persen pada tahun 2023. Hal ini dipengaruhi oleh semakin berkurangnya penduduk usia kerja dan ketersediaan lapangan pekerjaan yang terbatas. Hampir sebagian besar penduduk usia kerja di Kabupaten Flores Timur memilih untuk bekerja di sektor Pemerintah. Kondisi ini turut mempengaruhi meningkatnya angka pengangguran di

tahun 2023 yakni 3,79% (naik 0,3 poin dari tahun sebelumnya) dikarenakan kebijakan pemerintah untuk menata kembali status pekerja Pemerintahan yang berstatus tenaga honorer/kontrak daerah. Sedangkan di tahun 2024 TPAK kembali meningkat dan berdampak pada menurunnya angka pengangguran menjadi 3,58% (turun 0,21 poin dari tahun 2023). Hal ini dipengaruhi semakin pulihnya aktivitas perekonomian daerah, ketersediaan lapangan pekerjaan dan kebijakan pemerintah untuk penerimaan Aparatur Sipil Negara.

Dengan demikian, upaya perluasan lapangan pekerjaan pada sektor primer dan sekunder yang diikuti pengembangan keterampilan dan keahlian penduduk usia kerja menjadi langkah strategis dalam mengurangi angka pengangguran dan mempersiapkan generasi yang mampu bersaing dalam dunia kerja yang menuntut keahlian sesuai perkembangan teknologi.

6. Indeks Inovasi Daerah

Indeks inovasi daerah merupakan himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Bentuk kebaruan didasarkan urusan dan kewenangan suatu pemerintahan daerah pada setiap tingkatannya. Dari hasil indeks inovasi daerah, didapatkan peringkat dari inovasi daerah pada suatu pemerintahan daerah.

Pemeringkatan inovasi daerah dapat memberikan informasi mengenai pemetaan inovasi daerah, pemberian penghargaan dan pembinaan bagi pemerintahan daerah. Inovasi daerah dalam bentuk: Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah; Inovasi Pelayanan publik; dan/atau Inovasi Daerah lainnya sesuai bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Rentang nilai untuk indeks inovasi daerah adalah mulai dari 0 – 100, dengan kategori sebagai berikut: angka nol (tidak dapat dinilai), 0,01 s/d 34,99 (Kurang Inovatif), 35 s/60 (Inovatif), dan 60,01 s/d 100 (Sangat Inovatif).

Indeks inovasi daerah Kabupaten Flores Timur pada tahun 2023 sebesar 41,98 (kategori inovatif) dengan peringkat ke-238 dari 415 Kabupaten. Di tahun 2024 capaian meningkat menjadi 42,33 (naik 0,38 poin) dan berada pada peringkat 236 dari 415 Kabupaten. Meski demikian terkait dengan penerapan inovasi baik dalam tata kelola pemerintahan daerah, pelayanan publik maupun inovasi dalam peningkatan produktivitas daerah masih sangat terbatas.

C. Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

1. Indeks Ekonomi Hijau

Indeks Ekonomi Hijau (*Green Economy Index/GEI*), inisiatif yang bertujuan mengukur efektivitas transformasi ekonomi ke arah pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan. Konsep GEI Indonesia terdiri dari 15 indikator yang mencakup tiga pilar, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pilar ekonomi meliputi 6 indikator, seperti intensitas emisi, intensitas energi, dan pendapatan nasional bruto (PNB) per kapita. Pilar sosial terdiri dari 4 indikator yakni tingkat pengangguran,

tingkat kemiskinan, angka harapan hidup, dan rata-rata lama sekolah. Sementara pilar lingkungan mencakup 5 indikator, seperti tutupan lahan, lahan gambut terdegradasi, penurunan emisi, sampah terkelola, dan energi baru terbarukan.

2. Indeks Ekonomi Biru

Indeks Ekonomi Biru merupakan konsep yang menggabungkan pemanfaatan sumber daya laut dengan pendekatan berkelanjutan yang bertujuan mendukung pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, pelestarian ekosistem laut, serta menciptakan lapangan kerja. Ekonomi biru dapat didefinisikan sebagai konsep arus ekonomi masa depan yang bervariasi, seperti *blue* bioteknologi, pariwisata bahari berkelanjutan, digitalisasi untuk pengembangan potensi kekayaan alam kita, dengan memunculkan industri laut baru yang di luar sektor perikanan, misalnya rumput laut, kemudian industri perhiasan berbasis laut, industri makanan berbasis laut, dan juga ekonomi sirkular kelautan bisa kita terapkan, termasuk energi baru terbarukan yang berbasis arus laut maupun berbasis angin (*wind power*) laut yang bisa menjadi pembangkit listrik energi baru terbarukan.

3. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer

Porsi Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam Bauran Energi Primer adalah persentase dari total energi yang digunakan dalam sistem energi yang berasal dari sumber energi terbarukan, seperti energi surya, angin, hidropower, panas bumi, dan biomassa. Ini menunjukkan seberapa besar energi yang dihasilkan dari sumber-sumber yang dapat diperbaharui dalam keseluruhan suplai energi sebuah negara atau wilayah

D. Transformasi Digital

1. Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Indeks Pembangunan teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) adalah ukuran standar yang digunakan untuk menggambarkan tingkat pembangunan TIK di suatu wilayah, kesenjangan digital, dan potensi pengembangan TIK. IP-TIK disusun berdasarkan sebelas indikator yang dikombinasikan menjadi tiga subindeks: akses dan infrastruktur, penggunaan, dan keahlian. Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS) menggunakan IP-TIK sebagai indikator untuk mengukur perkembangan TIK di Indonesia dan membandingkannya dengan wilayah lain. IP-TIK berskala 0-10 dimana semakin tinggi nilai indeks menunjukkan pembangunan TIK yang semakin baik di suatu daerah.

Saat ini gambaran capaian kinerja nilai IP-TIK di tingkat kabupaten/kota belum tersedia. Sementara capaian pembangunan TIK di Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat dilihat pada Tabel 2.76 berikut.

Tabel 2.76 Perkembangan Capaian Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Nasional, Tahun 2020-2023

No	Uraian	Capaian IP-TIK NTT				Capaian IP-TIK Nasional			
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1	Akses dan Infrastruktur TIK	5,67	5,76	5,80	5,81	5,15	5,42	5,45	5,61
2	Penggunaan TIK	5,34	5,66	5,82	5,91	3,19	4,15	4,46	4,75
3	Keahlian TIK	5,92	5,97	6,00	6,04	5,75	5,88	5,86	5,92
IP-TIK		5,59	5,76	5,85	5,90	4,49	5,00	5,13	5,33

Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2024 (data olahan)

Capaian nilai IP-TIK pada tabel di atas menggambarkan adanya perkembangan positif dalam pembangunan TIK di Indonesia, dimana setiap tahun baik di tingkat Nasional maupun Provinsi Nusa Tenggara Timur nilai IP-TIK semakin meningkat, dengan capaian IP-TIK Provinsi Nusa Tenggara Timur setiap tahun berada di atas capaian Nasional. Capaian Provinsi Nusa Tenggara Timur tersebut tentunya juga merupakan dukungan dari capaian pembangunan IP-TIK kabupaten/kota yang berada di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dari ketiga subindeks IP-TIK, capaian subindeks penggunaan TIK Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan capaian terendah, yang disebabkan tingkat penggunaan TIK masih rendah. Penggunaan TIK di bidang pendidikan dan sosial cukup berkembang baik, sementara di bidang lainnya, seperti ekonomi masih rendah. Dengan demikian, upaya meningkatkan akses dan infrastruktur TIK harus sejalan dengan pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan TIK dan peningkatan keahlian.

E. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

1. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal (aset tetap) yang memiliki umur pemakaian lebih dari satu tahun, yang digunakan untuk produksi atau investasi. PMTB mengukur penambahan aset tetap pada perekonomian, yang mencakup investasi baru seperti pembangunan gedung, pabrik, mesin, dan peralatan lainnya.

2. Ekspor Barang dan Jasa

Ekspor adalah kegiatan menjual atau mengirimkan barang dan jasa dari satu negara ke negara lain. Ini merupakan bagian penting dari perdagangan internasional dan dapat meningkatkan perekonomian suatu negara melalui devisa, lapangan kerja, dan peningkatan pasar. Ekspor barang dan jasa memiliki peran penting dalam antara lain:

- Mengembangkan Perekonomian; ekspor memberikan pemasukan devisa, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing produk domestik di pasar global.
- Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi; ekspor berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi karena meningkatkan pendapatan nasional dan menciptakan peluang investasi.

- Membangun Hubungan Internasional; Ekspor juga membantu meningkatkan hubungan diplomatik dan kerjasama antar negara.

F. Perkotaan dan Perdesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

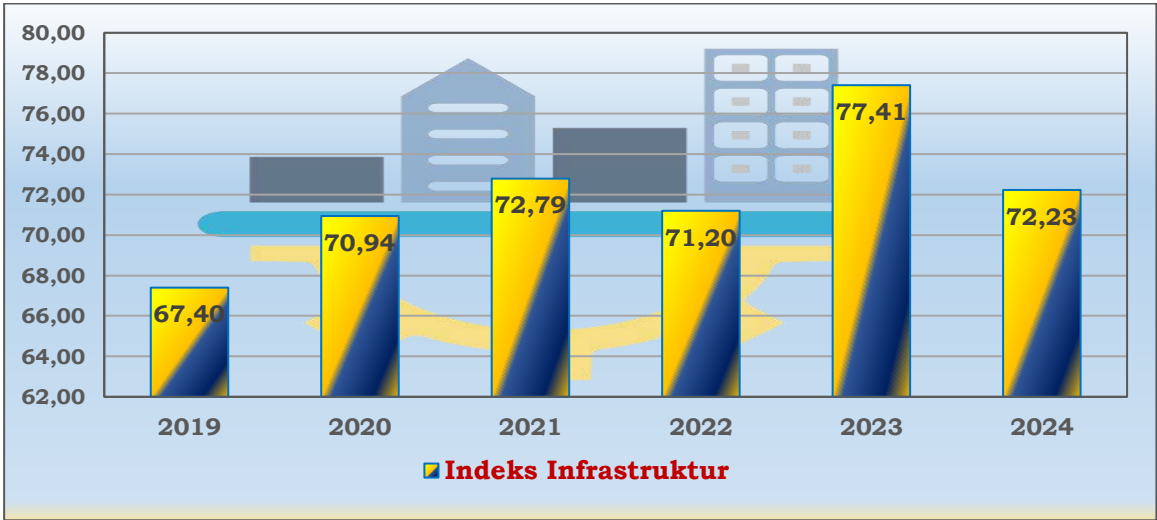
1. Indeks Infrastruktur/Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur

Indeks infrastruktur merupakan salah satu komponen *City Development Index* (CDI) yang menilai kinerja kota berdasarkan persentase rumah tangga yang memiliki akses pada fasilitas-fasilitas mendasar. Infrastruktur atau prasarana adalah seluruh struktur dan juga fasilitas dasar, baik itu fisik maupun sosial seperti bangunan, pasokan listrik, irigasi, jalan, jembatan dan lain sebagainya yang dibutuhkan untuk operasional aktivitas masyarakat maupun perusahaan. Perkembangan kondisi infrastruktur dasar dan indeks infrastruktur Kabupaten Flores Timur dapat dilihat pada Tabel 2.77 dan Gambar 2.23 berikut;

Tabel 2.77 Perkembangan Kondisi Infrastruktur Dasar Kabupaten Flores Timur, Tahun 2019-2024

No	Uraian Infrastruktur Dasar	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Sanitasi	70,29	70,99	72,11	75,05	54,99	56,60
2.	Air	81,68	83,61	73,32	75,58	78,15	90,82
3.	Listrik	96,27	98,95	97,96	98,18	96,55	96,55
4.	Telpon	3,49	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62
5.	Jalan dalam Kondisi Mantap	42,02	44,13	69,65	63,11	77,33	42,32
Indeks Infrastruktur		67,40	70,94	72,79	71,20	77,41	72,23

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Flores Timur, Tahun 2025 (Data Olahan)



Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Flores Timur, Tahun 2025 (Data Olahan)

Gambar 2.23 Capaian Indeks Infrastruktur Kabupaten Flores Timur, Tahun 2019-2024

Gambar di atas menunjukkan bahwa indeks infrastruktur selama periode tahun 2019-2024 berfluktuasi. Tahun 2022 indeks infrastruktur mengalami penurunan setelah mengalami peningkatan selama tahun 2019-2021. Kondisi ini lebih dipengaruhi oleh menurunnya aspek Jalan dalam kondisi mantap (sebesar 6,54 point) sebagai dampak dari badai seroja yang dialami pada tahun 2021. Tahun 2023 capaian mengalami peningkatan menjadi 77,41 atau meningkat sebesar 6,21 poin dan kembali menurun menjadi 72,23 pada tahun 2024. Kondisi sangat

dipengaruhi oleh menurunnya capaian aspek jalan dalam kondisi mantap yang cukup signifikan dari 77,33 menjadi 42,32. Menurunnya aspek jalan dalam kondisi mantap pada tahun 2024 lebih dipengaruhi oleh perubahan penetapan ruas dan panjang jalan kabupaten (SK Bupati Flores Timur Nomor 131 Tahun 2024) dimana banyak ruas jalan kabupaten (dalam kondisi baik) sudah berubah status menjadi ruas jalan negara atau jalan strategis nasional. Sementara menurunnya capaian pada aspek Sanitasi pada tahun 2023 dikarenakan perubahan cara perhitungan dari layak menjadi aman. Kondisi layanan telpon yang stagnan dan tidak meningkat sebagaimana terlihat pada Tabel 2.76, disebabkan oleh penggunaan telpon seluler pada hampir semua kalangan masyarakat. Peningkatan kondisi jaringan minimal semua wilayah mengakses jaringan 4G menjadi perhatian Pemerintah kedepannya.

2. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak

Rumah tangga dengan akses hunian layak berarti rumah tangga yang tinggal di rumah yang memenuhi standar kesehatan, keamanan, dan kenyamanan bagi penghuninya. Hunian layak juga harus menyediakan ruang yang cukup, melindungi dari cuaca buruk, dan memenuhi kebutuhan dasar seperti air bersih, sanitasi, dan penerangan. Kelayakan rumah hunian harus memenuhi kriteria sebagai berikut;

- Kecukupan Luas Tempat Tinggal; Rumah harus memiliki luas lantai per kapita yang cukup, minimal 7,2 m². Ini berarti setiap anggota keluarga memiliki ruang yang cukup untuk hidup dan beraktivitas.
- Akses Air Minum Layak; Rumah harus memiliki akses ke sumber air minum yang aman dan bersih, seperti leding, sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, atau air hujan.
- Akses Sanitasi Layak; Rumah harus memiliki fasilitas sanitasi yang layak, seperti WC yang terhubung dengan saluran pembuangan yang aman dan bersih.
- Ketahanan Konstruksi; Rumah harus dibangun dengan bahan yang kuat dan tahan terhadap cuaca, sehingga aman dan nyaman untuk dihuni.
- Kesehatan Penghuni; Rumah harus bersih, bebas dari hama, dan memiliki ventilasi yang baik untuk menjaga kesehatan penghuninya.

Gambaran rumah tangga dengan akses hunian layak di Kabupaten Flores Timur tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.78 berikut;

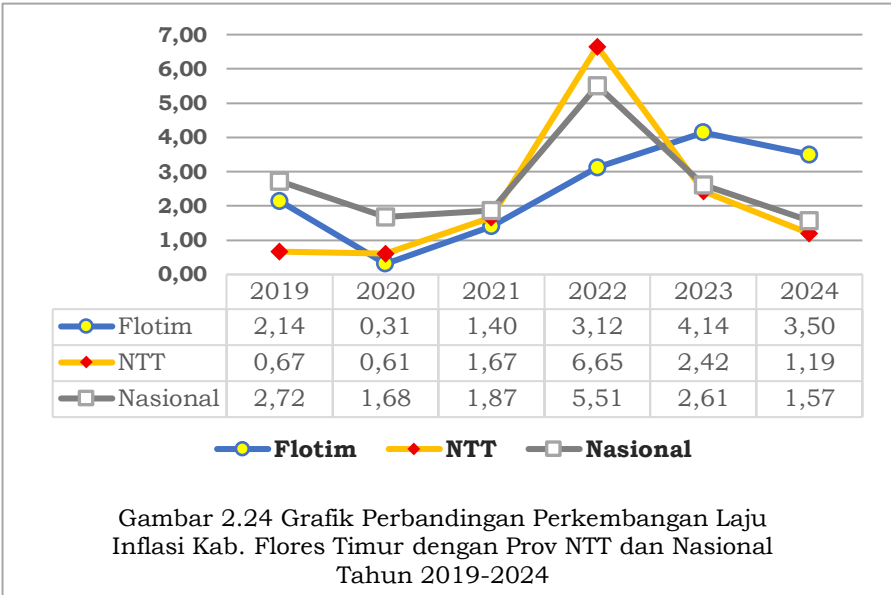
Tabel 2.78 Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak
Kabupaten Flores Timur, Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Rumah	53.846	53.846	53.846	74.992	80.983
2.	Rumah dengan Hunian Akses Tidak Layak	27.826	27.980	28.910	29.067	32.681
3.	Rumah dengan Hunian Akses Layak	26.020	25.866	24.936	45.925	48.302
4	Persentase Rumah dengan Hunian Akses Layak	48,32	48,04	46,31	61,24	59,64

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Flores Timur,
Tahun 2025 (Data Olahan)

harga lainnya, sesuai sistem yang diberlakukan dalam menilai setiap produksi.

Perkembangan Laju inflasi di Kabupaten Flores Timur selama 6 (enam) tahun terakhir selalu berfluktuasi seperti terlihat pada Gambar 2.24. Faktor eksternal baik skala regional (NTT) maupun nasional sangat berpengaruh pada perkembangan inflasi tersebut. Pada tahun 2019 laju inflasi berada pada level 2,14% menurun menjadi 0,31% di tahun 2020 yang lebih diakibatkan *Pandemi Covid-19*. Pada tahun



2021 Inflasi mengalami peningkatan menjadi 1,40% dan terus meningkat menjadi 4,14% di tahun 2023. Hal ini dipengaruhi oleh faktor eksternal yakni kebijakan Pemerintah untuk menaikkan harga BBM. Tahun 2024 Pemerintah mampu mengendalikan harga barang sehingga inflasi menurun menjadi 3,50%. Hal ini merupakan hasil dari konsistensi kebijakan fiskal serta sinergi pengendalian inflasi, baik di tingkat pusat maupun daerah, melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID). Namun secara umum capaian inflasi Kabupaten Flores Timur selama 2 tahun terakhir selalu berada di atas capaian inflasi Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Nasional.

2.1.4 Aspek Pelayanan Umum

A. Regulasi Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

1. Indeks Reformasi Hukum

Reformasi Hukum adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan di bidang hukum dalam upaya penataan regulasi yang berkualitas bersih dan akuntabel pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Indeks Reformasi Hukum (IRH) adalah instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, re-regulasi dan de-regulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi nasional. Penghitungan IRH didasarkan pada 4 (empat) variabel sebagai berikut:

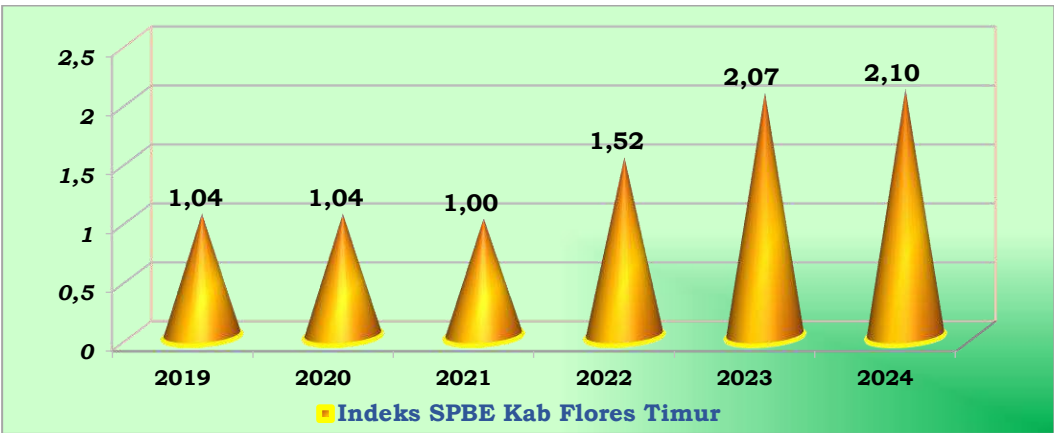
- 1) Tingkat koordinasi Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan harmonisasi regulasi/memperkuat koordinasi untuk melakukan harmonisasi regulasi, dengan bobot 25%;
- 2) Kompetensi perancang peraturan perundang-undangan (*legal drafter*) yang berkualitas, dengan bobot 25%;
- 3) Kualitas re-regulasi atau de-regulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reuiu, dengan bobot 30%; dan

4) Penataan *database* peraturan perundang-undangan, dengan bobot 20%.

IRH Kabupaten Flores Timur tahun 2024 sebesar 86,50 dengan kategori “A” (Sangat Baik). Berdasarkan penilaian dari Kemenkumham RI pada tahun 2024, dari 22 kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Flores Timur berada pada urutan kedua di bawah Kabupaten Sikka yang berada pada kategori istimewa dengan capaian nilai 96,46 “AA”. Nilai IRH Kabupaten Flores Timur tahun 2024 sudah optimal namun masih terdapat kekurangan terutama pada variabel kompetensi perancang peraturan perundang-undangan (*legal drafter*) yang berkualitas.

2. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE. Nilai indeks SPBE merupakan nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE secara keseluruhan. Nilai indeks SPBE dihitung berdasarkan penjumlahan dari penghitungan perkalian antara nilai indeks domain dan bobot domain. Pemerintah Kabupaten Flores Timur terus berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Upaya ini sejalan dengan capaian Indeks SPBE Kabupaten Flores Timur selama 6 (enam) tahun terakhir yang terus meningkat sebagaimana terlihat pada Gambar 2.25 berikut.



Sumber : Kementerian Pan RB RI, Tahun 2024

Gambar 2.25 Capaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Flores Timur tahun 2019-2024

3. Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi yang diukur melalui

Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada suatu unit kerja dalam jangka waktu tertentu.

Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Flores Timur tahun 2021 adalah 2,37 pada kategori C- (cukup dengan catatan) dan pada tahun 2022 meningkat 0,41 poin sehingga menjadi 2,78 dengan kategori C (Cukup). Pada tahun 2023 mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi 1,94 dengan kategori D (Kurang), dan kembali meningkat menjadi 2,39 (kategori C-) di tahun 2024.

Kondisi capaian pada indeks pelayanan publik yang belum mencapai kategori baik ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain belum semua unit layanan publik memiliki dokumen standar yang diharapkan pada aspek kebijakan, dukungan sarana/prasarana sesuai standar belum memadai serta tidak semua unit layanan publik memiliki inovasi dalam pelayanan publik. Untuk meningkatkan capaian ini, ke depannya seluruh instansi pemerintah harus dapat melaksanakan transformasi ekosistem pelayanan publik. Pelayanan publik dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi keberlanjutan dan dengan desain pelayanan yang dipusatkan pada kebutuhan masyarakat.

4. Indeks Integritas Daerah

Indeks Integritas Nasional adalah hasil dari Survei Penilaian Integritas (SPI), yang merupakan instrumen untuk memetakan risiko korupsi dan mengukur kemajuan upaya pencegahan korupsi di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD). Indeks ini mengukur tingkat risiko korupsi melalui persepsi dan pengalaman masyarakat, serta data objektif dari pihak internal lembaga, pengguna layanan, dan pemangku kepentingan.

Capaian nilai indeks integritas Kabupaten Flores Timur selama 3 (tiga) tahun terakhir mengalami perkembangan negatif. Pada tahun 2022 nilai indeks integritas daerah sebesar 66,71 atau turun 3,44 dari tahun sebelumnya (70,15). Kemudian pada tahun 2023 menurun menjadi 66,65 dan menurun lagi menjadi 61,22 di tahun 2024. Capaian SPI selama 4 (empat) tahun di atas menempatkan Kabupaten Flores Timur pada area "Rentan" dengan risiko korupsi yang tinggi dan perlu perhatian khusus. Kondisi ini perlu diperhatikan dengan upaya peningkatan transparansi dan pencegahan praktik korupsi di sektor layanan publik, peningkatan akuntabilitas dalam manajemen ASN, penguatan komitmen integritas ASN, dan peningkatan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa pemerintah.

5. Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) adalah suatu indeks yang digunakan untuk mengukur keberhasilan reformasi birokrasi pada suatu instansi pemerintah. Komponen penilaian terkait 4 hal antara lain: (1) Akuntabilitas kinerja dan Keuangan; (2) Kualitas Pelayanan Publik; (3) Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN; dan (4) Kinerja Organisasi, dengan kategori Penilaian: >85-100: AA (Memuaskan), >75-85: A (Sangat Baik), >65-75: B (Baik, perlu sedikit perbaikan), >50-65: CC (Cukup Baik/memadahi, perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar),

>30-50: C (Agak kurang, perlu banyak perbaikan termasuk perbaikan yang mendasar), 0-30: D (Kurang, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan secara mendasar). Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Flores Timur selama tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.81 berikut.

Tabel 2.81 Perkembangan Indeks Reformasi Birokrasi
Kabupaten Flores Timur, Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Reformasi Birokrasi	48,95	48,44	48,97	44,48	56,60

Sumber : Kementerian PanRB RI, Tahun 2025

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa capaian nilai IRB dari tahun 2020 sampai dengan 2024 berfluktuasi. Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 0,51 poin yakni dari 48,95 (kategori C) pada tahun 2020 menjadi 48,44 (kategori C) pada tahun 2021. Kondisi ini terjadi karena adanya penurunan pada aspek kualitas hasil antara yaitu indeks profesionalitas ASN. Faktor-faktor yang diidentifikasi belum optimal sehingga menyebabkan nilai IRB masih dalam kategori "C" adalah: implementasi reformasi birokrasi pada level pemerintah masih berfokus pada pemenuhan dokumen sehingga penerapan reformasi di level perangkat daerah belum berjalan optimal dan merata, rencana aksi pelaksanaan reformasi birokrasi belum sepenuhnya selaras dengan dokumen perencanaan dan penganggaran sehingga belum berdampak pada keberhasilan yang dikehendaki, rencana aksi juga belum memuat 8 area perubahan yang selaras dengan *road map* reformasi birokrasi.

Identifikasi, analisis dan pemetaan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat yang akan direvisi/dihapus belum sepenuhnya dilakukan secara optimal sehingga belum bisa diketahui gambaran akan dampak dari kebijakan yang sudah diimplementasikan. Pelaksanaan *e-goverment* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur juga belum optimal, pemanfaatan kinerja individu sebagai turunan dari kinerja organisasi di atasnya belum dijabarkan secara optimal. Selain itu peran aparat pengawas internal pemerintah yang belum maksimal serta belum terlihat pengelolaan pengaduan dan implementasi pelayanan publik terutama terkait pemanfaatan hasil survei kepuasan masyarakat dalam memperbaiki kualitas layanan, penerapan kebijakan dan evaluasi dampak dari inovasi yang diciptakan juga menjadi bagian dari faktor yang mempengaruhi indeks reformasi birokrasi. Berbagai permasalahan di atas menjadi perhatian dan terus dibenahi. Sejalan dengan itu capian nilai IRB di tahun 2024 semakin baik yakni mencapai 56,6 dengan kategori CC atau mengalami peningkatan sebesar 12,12 poin.

B. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh dan Demokrasi Substansial

1. Persentase Penegakan Perda

Persentase Penegakan Perda adalah ukuran atau indikator yang menunjukkan seberapa banyak peraturan daerah (Perda) yang ditegakkan atau

dipatuhi oleh masyarakat, baik secara sukarela maupun melalui penegakan hukum oleh petugas yang berwenang. Dengan kata lain, persentase ini mengukur tingkat kepatuhan masyarakat terhadap Perda yang berlaku di suatu daerah. Capaian Persentase Penegakan Perda di Kabupaten Flores Timur selama periode tahun 2021-2024 berfluktuasi. Pada tahun 2021 persentase penegakan Perda sebesar 59%, kemudian meningkat menjadi 80%. Tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 71% dengan jumlah penyelesaian pelanggaran Perda sebanyak 5 dari 7 pelanggaran Perda. Tahun 2024 capaian penegakan Perda sebesar 100% dengan jumlah penyelesaian pelanggaran Perda sebanyak 4 dari 4 pelanggaran Perda.

2. Persentase Capaian Aksi HAM

Persentase Capaian Aksi HAM (Hak Asasi Manusia) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aksi-aksi yang direncanakan dalam Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) telah diwujudkan atau mencapai target yang telah ditetapkan. Indikator ini biasanya dihitung berdasarkan jumlah aksi yang berhasil mencapai target dibandingkan dengan total jumlah aksi yang direncanakan, dihitung dalam persentase.

Kinerja Capaian Aksi HAM Kabupaten Flores Timur selama 4 (empat) tahun terakhir berfluktuasi yakni: Pada tahun 2021 capaian Aksi HAM sebesar 95,0, kemudian pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 90,0%. Di tahun 2023 kembali meningkat menjadi 96,0% dan di tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 94,2%. Secara umum capaian ini menggambarkan komitmen Pemerintah Kabupaten Flores Timur untuk Penegakan HAM pada seluruh lapisan masyarakat. Atas kepedulian dalam implementasi Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan, Penegakan dan Pemajuan HAM (P5H) selama periode di atas, Pemerintah Kabupaten Flores Timur mendapatkan penghargaan sebanyak 3 (tiga) kali dari Kementerian Hukum HAM Republik Indonesia sebagai satu-satunya Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang Peduli HAM.

3. Indeks Demokrasi Daerah

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan indeks komposit yang mengukur kualitas demokrasi di Indonesia IDI diukur melalui 3 aspek dan 22 indikator, yaitu: 1). Aspek Kebebasan (7 indikator); 2). Aspek Kesenjangan (7 indikator); dan 3). Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi (8 indikator). Capaian Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Tahun 2015-2023 dapat dilihat pada Tabel 2.82 berikut;

Tabel 2.82 Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015-2023

Uraian	Tahun								
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Demokrasi	78,47	82,49	75,51	82,32	81,02	77,29	73,42	77,83	77,39

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi NTT, Tahun 2024 (Data Olahan)

Tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Nilai IDI Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2015-2023 menunjukkan angka yang fluktuatif. Pertumbuhan tahunan indeks demokrasi cenderung berada pada pertumbuhan negatif dengan rata-rata pertumbuhan -0,14. Capaian indeks demokrasi di Nusa Tenggara Timur dari tahun ke tahun rata-rata berada dalam kategori sedang. Fluktuasi dari indeks demokrasi dipengaruhi oleh tiga aspek yakni: Kebebasan Politik, Hak-Hak Politik, Lembaga Politik. Pada tahun 2020 indeks demokrasi mengalami penurunan sebesar 3,73 poin jika dibandingkan dengan tahun 2019, dan terjadi penurunan juga pada tahun 2021 sebesar 3,87 poin jika dibandingkan dengan capaian di tahun 2020. Penurunan terjadi pada aspek kebebasan sipil sebesar 2,6 poin. Pada aspek ini, variabel yang perlu perbaikan adalah: kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, pemilu yang bebas dan adil, serta peran partai politik. Pada aspek hak politik juga terjadi penurunan sebesar 1,45 poin. Sementara pada aspek lembaga demokrasi, mengalami peningkatan sebesar 10,19 poin. Pada tahun 2022-2023 indeks demokrasi terus mengalami penurunan yakni sebesar 4,41 poin di tahun 2022 dan 0,44 poin di tahun 2023. Kondisi penurunan pada tahun 2023 lebih disebabkan oleh capaian aspek kapasitas lembaga demokrasi yang mengalami penurunan sebesar 3,86 poin, sedangkan aspek kebebasan meningkat sebesar 0,99 poin dan aspek kesetaraan juga meningkat sebesar 1,23 poin.

Pada tahun 2024, untuk mengukur IDI Kabupaten Flores Timur, Pemerintah Daerah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah bekerja sama dengan Lembaga Pendidikan Institut Keguruan dan Teknologi Larantuka melakukan survei. Hasil yang diperoleh, Nilai Indeks Demokrasi di Kabupaten Flores Timur pada tahun 2024 sebesar 78,018. Kontribusi paling besar dari aspek kebebasan yakni sebesar 89,79 masuk dalam kategori tinggi. Selanjutnya nilai indeks pada aspek kapasitas kesetaraan dan aspek lembaga demokrasi mempunyai nilai yang sama yaitu 72,73 dan masuk pada kategori sedang.

Secara umum, gambaran penurunan capaian ini mengindikasikan bahwa terkait tiga aspek pembentuk indeks demokrasi perlu dilakukan perbaikan atau pembenahan untuk mencapai kategori tinggi. Langkah dan upaya yang perlu dilakukan adalah 1). Pendidikan politik bagi masyarakat perlu difokuskan pada persoalan ekspresi perbedaan pendapat, khususnya dalam hal politik dan ekonomi; 2). Mendorong DPRD untuk meneruskan aspirasi masyarakat dalam bentuk rekomendasi formal kepada Pemerintah Daerah (Pemda), meningkatkan inisiatif pembuatan Peraturan Daerah (Perda), meningkatkan kapasitas teknis maupun akademis anggota DPRD; 3). Kaderisasi partai politik perlu ditingkatkan, antara lain melalui pendidikan politik yang direncanakan dengan baik, yakni integrasi antara aktivitas kaderisasi dengan dana bantuan partai politik; dan 4). Pemerintah daerah perlu meningkatkan komunikasi dengan masyarakat untuk menambah pemahaman dan komitmen terhadap transparansi anggaran dalam rangka penguatan demokrasi lokal.

4. Indeks Rasa Aman

Indeks rasa aman adalah alat yang digunakan untuk mengukur tingkat rasa aman yang dialami oleh orang-orang di sebuah wilayah atau komunitas. Ada empat dimensi dalam menentukan indeks rasa aman yaitu: Dimensi Keamanan dari Bencana, Dimensi Pemenuhan Kesejahteraan Sosial, Dimensi Perlindungan dan Pemanfaatan atas Kebhinnekaan, Dimensi Keamanan dari Kekerasan. Terkait dengan indeks ini sampai dengan tahun 2024 belum ada lembaga survei yang mempublikasi dalam menggambarkan capaian indeks ini.

Pada tahun 2024, untuk mengukur indeks rasa aman, Pemerintah Kabupaten Flores Timur melalui Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah bekerja sama dengan Lembaga Pendidikan Institut Keguruan dan Teknologi Larantuka melakukan survei dengan indikator proxy Proporsi Penduduk yang Merasa Aman. Hasil yang diperoleh, Penduduk yang merasa aman pada siang hari sebesar 96,34% dan Penduduk yang merasa aman pada malam hari 55,24%. Secara keseluruhan, penduduk yang merasa aman sebesar 75,79%. Berdasarkan kondisi tersebut, aspek pemenuhan kesejahteraan sosial, keamanan dan perlindungan terhadap diskriminasi perlu ditingkatkan dalam rangka mewujudkan keamanan dan kenyamanan masyarakat.

5. Indeks Ketenteraman dan Ketertiban

Indeks Ketenteraman dan Ketertiban merupakan suatu metode untuk mengukur Ketertiban Umum suatu daerah dimana tercipta keadaan yang aman, tenang dan bebas dari gangguan atau kekacauan yang menimbulkan kesibukan dalam bekerja untuk mencapai kesejahteraan masyarakat seluruhnya yang berjalan secara teratur sesuai hukum dan norma-norma yang ada. Untuk mengukur Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU) terdiri dari 3 dimensi yaitu Strategi, Sumber Daya manusia dan Sistem.

Data Indeks Ketenteraman dan Ketertiban tahun 2022 di Kabupaten Flores Timur capaiannya adalah 62,64 (berada dalam kategori baik). Dari tiga dimensi pembentuk indeks ini menunjukkan bahwa pada dimensi strategi terdapat gambaran kondisi dari beberapa indikator yakni: sudah ada pemetaan wilayah rawan pelanggaran Perda dan Perkada namun masih terbatas pada beberapa wilayah tertentu, tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) penegakkan Perda dan Perkada untuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), sudah dilakukan sosialisasi Perda dan Perkada kepada masyarakat di wilayah rawan pelanggaran namun belum dilakukan secara menyeluruh pada semua wilayah, sudah dilakukan “kegiatan penindakan terhadap pelanggaran Perda dan Perkada” yang dilakukan oleh Satpol PP, sudah dilaksanakan “kegiatan penyidikan terhadap pelanggaran Perda dan Perkada” yang dilakukan oleh Satpol PP, sudah ada “kegiatan penindakan terhadap pelanggaran Perda dan Perkada” yang dilakukan oleh Satpol PP namun masih terbatas, adanya proses pemetaan wilayah rawan pelanggaran tibumtranmas, adanya SOP penyelenggaraan tibumtranmas untuk Satpol PP, sosialisasi

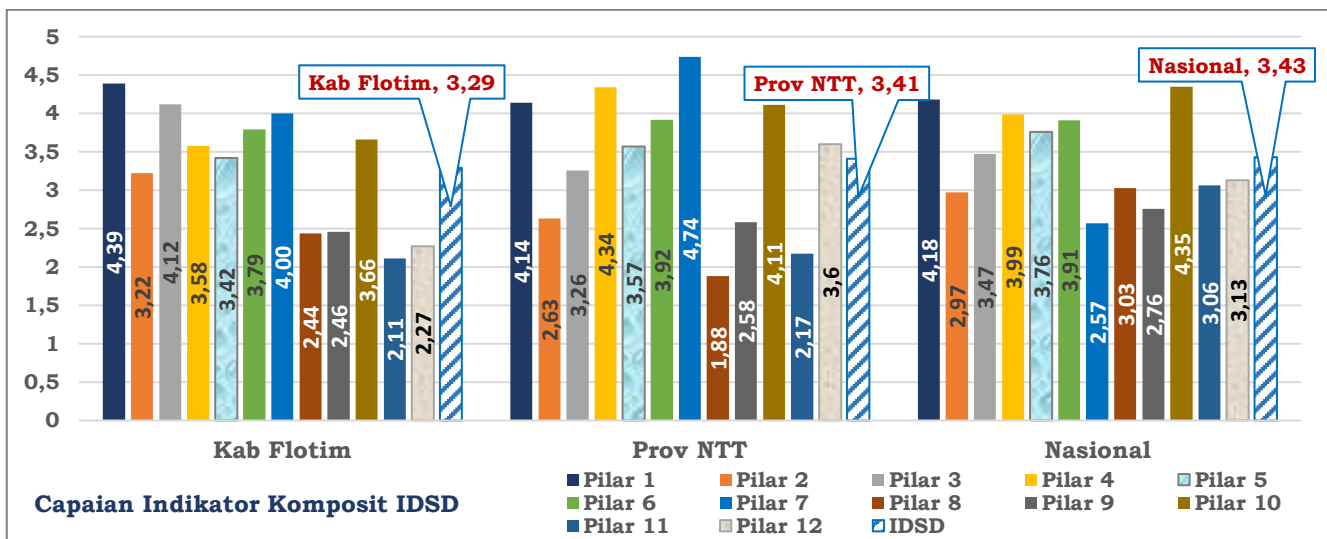
tibumtranmas kepada masyarakat di wilayah rawan pelanggaran, adanya program/kegiatan Satpol PP dalam deteksi dini dan cegah dini gangguan tibumtranmas di daerah, adanya program/kegiatan Satpol PP dalam penyuluhan dan pembinaan masyarakat terkait tibumtranmas di daerah, adanya program/kegiatan Satpol PP dalam patroli dalam mencegah terjadinya gangguan tibumtranmas di daerah, adanya program/kegiatan Satpol PP dalam pengamanan masyarakat terkait tibumtranmas di daerah, adanya program/kegiatan Satpol PP dalam penertiban dalam mencegah terjadinya gangguan tibumtranmas di daerah, adanya program/kegiatan Satpol PP dalam penanganan unjuk rasa/kerusuhan dalam mencegah terjadinya gangguan tibumtranmas di daerah.

Pada dimensi sumber daya manusia menunjukkan bahwa dari sisi kuantitas maupun kualitas yang memenuhi syarat masih sangat kurang. Ketersediaan Tenaga Pendidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang bersertifikat hanya 1 orang, selain itu personil Pol PP yang ada juga masih sangat minim dalam mengikuti diklat atau bimtek khusus sesuai tugas pokok dan fungsi lembaga ini. Sementara itu pada dimensi sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi juga masih sangat terbatas. Data sarana prasarana yang tersedia saat ini terdiri dari Mobil Dalmas: 1 unit, Motor Patroli: 3 Unit, Mobil Patroli: 1 unit dan Mobil Tangki: 1 unit.

C. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

1. Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen yang dirancang untuk mengukur produktivitas suatu daerah yang pada akhirnya merefleksikan kemampuan daerah tersebut dalam bersaing, baik di kancah nasional maupun global. IDSD memiliki empat komponen utama yaitu komponen lingkungan pendukung (*enabling environment*), komponen sumber daya manusia (*human capital*), komponen pasar (*market*), dan komponen ekosistem inovasi (*innovation ecosystem*) yang diukur melalui 12 (dua belas) pilar antara lain; 1) Pilar Institusi; 2) Pilar Infrastruktur; 3) Pilar Adopsi TIK; 4) Pilar Stabilitas Ekonomi Makro; 5) Pilar Kesehatan; 6) Pilar Keterampilan; 7) Pilar Pasar Produksi; 8) Pilar Pasar Tenaga Kerja; 9) Pilar Sistem Keuangan; 10) Pilar Ukuran Pasar; 11) Pilar Dinamisme Bisnis; dan 12) Pilar Kapabilitas Inovasi. Indeks daya saing daerah dinyatakan dalam nilai mulai dari 1 sampai 5. Capaian 12 (dua belas) pilar Indikator Komposit IDSD Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 dapat dilihat pada Gambar 2.26 berikut;



Sumber : Badan Riset dan Inovasi Nasional, Tahun 2025

Gambar 2.26 Perbandingan Capaian 12 Indikator Komposit IDSD Kab. Flores Timur dengan Prov. Nusa Tenggara Timur dan Nasional Tahun 2024

Gambar di atas menunjukkan capaian IDSD Kabupaten Flores Timur pada tahun 2024 sebesar 3,29 atau naik 0,27 poin dari tahun sebelumnya. Namun capaian tersebut masih berada di bawah capaian Provinsi Nusa Tenggara Timur yakni sebesar 3,41 poin dan capaian Nasional sebesar 3,43 poin. Capaian tersebut terbentuk dari pencapaian masing-masing pilar sebagai indikator komposit dari IDSD. Gambaran perkembangan capaian dari masing-masing komponen dan pilar IDSD Kabupaten Flores Timur sebagaimana terlihat pada Tabel 2.83 berikut;

Tabel 2.83 Perkembangan Capaian 12 Pilar Indikator Komposit Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Flores Timur, Tahun 2022-2024

Indikator Komposit IDSD		Capaian Tahun		
Komponen	Pilar	2022	2023	2024
Komponen lingkungan pendukung	Pilar 1 : Institusi	3,72	3,91	4,39
	Pilar 2 : Infrastruktur	3,11	1,91	3,22
	Pilar 3 : Adopsi TIK	2,60	3,97	4,12
	Pilar 4 : Stabilitas ekonomi makro	1,83	3,33	3,58
Komponen Sumber Daya Manusia	Pilar 5 : Kesehatan	3,46	3,51	3,42
	Pilar 6 : Keterampilan	2,73	3,12	3,79
Komponen Pasar	Pilar 7 : Pasar produk	4,22	4,41	4,00
	Pilar 8 : Pasar tenaga kerja	3,00	3,12	2,44
	Pilar 9 : Sistem keuangan	2,01	1,56	2,46
	Pilar 10 : Ukuran pasar	0,23	3,65	3,66
Komponen Ekosistem Inovasi	Pilar 11 : Dinamisme bisnis	5,00	2,13	2,11
	Pilar 12 : Kapabilitas inovasi	0,96	1,62	2,27
Skor IDSD		2,74	3,02	3,29

Sumber : Badan Riset dan Inovasi Nasional, Tahun 2025 (data olahan)

Tabel di atas menggambarkan bahwa IDSD Kabupaten Flores Timur selama 3 (tiga) tahun terakhir mengalami peningkatan dari kondisi tahun 2022. Kondisi ini menunjukkan tingkat produktivitas daerah Kabupaten Flores Timur semakin membaik. Pada tahun 2024, dari 12 pilar yang membentuk IDSD sebagian besar mengalami peningkatan. Hanya ada beberapa pilar yang mengalami penurunan yakni Pilar 5, Pilar 7, Pilar 8 dan Pilar 11. Pilar 4 stabilitas ekonomi makro menunjukkan perkembangan yang cukup baik, hal ini menggambarkan kinerja perekonomian Kabupaten Flores Timur, tingkat konsumsi, penciptaan nilai tambah

dan tingkat biaya hidup yang semakin meningkat. Sementara itu, capaian Pilar 3 di tahun 2024 yakni 4,12 poin bahkan melebihi capaian Nasional (3,47 poin) dan Provinsi Nusa Tenggara Timur (3,26 poin). Hal ini menggambarkan kemajuan penerapan teknologi dalam berbagai aspek kehidupan dan kemajuan industri Flores Timur.

Secara umum capaian tersebut harus terus menjadi perhatian dalam pelaksanaan pembangunan. Capaian pilar 3 Adopsi TIK perlu ditingkatkan melalui membangun keunggulan kompetitif daerah pada aplikasi teknologi secara efisien dan inovatif. Selain itu peningkatan konektivitas internet dalam proses digitalisasi bisnis dan komunikasi dalam perekonomian. Pada pilar 4 stabilitas ekonomi makro perlu ditingkatkan melalui penguatan kapasitas fiskal dan pertumbuhan ekonomi, penurunan tingkat pengangguran terbuka, penciptaan nilai tambah dan peningkatan akumulasi kapital, tingkat konsumsi dan tingkat biaya hidup serta peningkatan kinerja sektoral perekonomian yang masih rendah. Pada pilar 6 keterampilan pada komponen sumber daya manusia perlu dilaksanakan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja yang berbasis kompetensi. Peningkatan jumlah tenaga kerja harus diikuti dengan peningkatan kualitas tenaga kerja yang memiliki kemampuan dan keterampilan dalam berbagai bidang usaha.

Capaian Pilar 10 yakni ukuran pasar perlu mendapat perhatian serius. Kondisi saat ini nilai PDRB harga konstan belum meningkat signifikan, serta belum optimalnya transfer pengetahuan dan teknologi melalui muatan yang terkandung pada produk import. Sementara itu untuk pilar kedua belas yakni kapabilitas inovasi yang masih rendah ditandai dengan investasi pada penelitian dasar dan aktivitas yang inovatif yang menciptakan pengetahuan baru masih sangat terbatas. Selain itu juga pemanfaatan komoditas unggulan di daerah yang berdaya saing yang dilakukan hingga produk-produk turunannya (hilirisasi) belum dilaksanakan secara optimal.

D. HASIL EVALUASI CAPAIAN INDIKATOR SPM PEMERINTAH DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN 2024

1. Capaian SPM Bidang Urusan Pendidikan

Bidang urusan pendidikan merupakan salah satu penyelenggaraan urusan dasar dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan bagi masyarakat di daerah. Penyelenggaraan bidang urusan di daerah Kabupaten/Kota meliputi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Capaian indikator pada pelayanan dasar bidang pendidikan pada tahun 2024 belum mencapai target, baik persentase pencapaian layanan dasar maupun persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar. Realisasi SPM Bidang Pendidikan secara keseluruhan pada tahun 2024 sebesar 72,07, yang secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.84 berikut:

Tabel 2.84 Capaian Indikator SPM Bidang Urusan Pendidikan, Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian Kinerja		
			Sasaran	Realisasi	Capaian
1.	Pendidikan pada Kesetaraan	Persentase anak usia 7-18 tahun yang sedang atau sudah belajar pada kesetaraan	450 Orang	216 Orang	38,40
		Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar			5,62
2.	Pendidikan Dasar	Persentase anak usia 7-15 tahun yang sudah atau sedang belajar pada Pendidikan Dasar (SD)	31.680	29.985	75,72
		Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar			16,41
3.	Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase anak usia dini yang sudah tamat atau sedang belajar PAUS	8.847	7.859	71,07
		Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar			9,00

Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Flores Timur, Tahun 2025

2. Capaian SPM Bidang Urusan Kesehatan

Capaian SPM bidang urusan kesehatan pada tahun 2024 seluruhnya mencapai 100%. Capaian pada semua indikator dapat dilihat pada Tabel 2.85 berikut:

Tabel 2.85 Capaian Indikator SPM Bidang Urusan Kesehatan, Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian Kinerja		
			Sasaran	Realisasi	Capaian (%)
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	3.836	3.836	100,00
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	4.772	4.772	100,00
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Cakupan jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	4.507	4.507	100,00
4	Pelayanan kesehatan balita	Cakupan balita berumur 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	23.776	23.776	100,00
5	Pelayanan kesehatan pada usia Pendidikan Dasar	Cakupan anak usia Pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	13.457	13.457	100,00
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Cakupan orang berusia 15-59 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	64.876	64.876	100,00
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Cakupan orang berusia lebih dari 60 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	17.832	17.832	100,00
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Cakupan orang yang berusia 15 tahun ke atas yang menderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	49.921	49.921	100,00
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabet Melitus	Cakupan orang yang berusia 15 tahun ke atas yang menderita Diabet Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1.215	1.215	100,00
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Cakupan orang dengan gangguan jiwa (ODG) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	427	427	100,00
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Cakupan orang terduga Tuberkulosis (TBC) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	4.865	4.865	100,00
12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	Cakupan orang yang beresiko terinfeksi virus HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	5.565	5.565	100,00

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Flores Timur, Tahun 2025

3. Capaian SPM Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Kinerja urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Flores Timur juga dapat dilihat dari indikator kinerja standar pelayanan minimum (SPM). Dimana nilai capaian kinerja yang diukur berdasarkan Permendagri Nomor 100 Tahun 2018. Target Capaian Kinerja SPM Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.86 berikut.

Tabel 2.86 Capaian Kinerja SPM Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian kinerja		
			Sasaran	Realisasi	Capaian (%)
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	35	35	100,00
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	28.937	28.937	100,00
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	14.943	14.943	100 %
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	6.580	6.580	100,00
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban Kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	15	15	100,00

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan BPBD Kab Flores Timur, Tahun 2025

4. Capaian SPM Bidang Urusan Sosial Tahun 2024

Selanjutnya untuk capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Sosial disajikan dalam Tabel 2.87 berikut:

Tabel 2.87 Capaian Kinerja SPM Bidang Urusan Sosial Tahun 2024

No	Indikator SPM	Indikator Pencapaian	Target Thn 2024	Realisasi Thn 2024	Capaian (%)
1	Rehabilitasi Sosial dasar penyandang Disabilitas terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	905	905	100
2	Rehabilitasi Sosial Dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	1.687	1.455	86,25
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar ang memperoleh rehabilitasi sosial dasar di luar panti	2.840	1.726	60,77
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	25	25	100
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	13.529	13.529	100

Sumber: Dinas Sosial Kab. Flores Timur, Tahun 2025

5. Capaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dalam pemenuhan pelayanan dasar di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimum pada Tahun 2024 digambarkan pada Tabel 2.88 berikut.

Tabel 2.88 Capaian Kinerja SPM
Bidang Urusan Pekerjaan Umum, Tahun 2024

No	Indikator SPM	Target 2024	Realisasi 2024
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari : <u>Jumlah RT yang mengakses air minum</u> Jumlah Rumah Tangga X 100 %	11.875	10.760
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik : <u>Jumlah RT yang mengakses air limbah domestik</u> Jumlah Rumah Tangga X 100 %	2.965	2.965

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Flores Timur, Tahun 2025

E. Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah

Kinerja urusan pemerintahan daerah adalah hasil kerja yang dapat diukur dari penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah, sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya dalam waktu tertentu. Kinerja ini mencakup berbagai aspek, mulai dari masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak dari kegiatan pemerintahan yang tergambar dari Indikator Kinerja Daerah (IKD). Gambaran IKD Kabupaten Flores Timur tahun 2023-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.89 berikut;

Tabel. 2.89 Indikator Kinerja Daerah
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2024

NO	Bidang Urusan/ Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target	Realisasi	Target	Realisasi
			2021	2023	2023	2024	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
1	Pertumbuhan PDRB	%	0.69	4.59	3,15	4.61	2,69
2	Laju Inflasi	%	6.88	0.45	4.14	0.45	3.50
3	PDRB perkapita	Rp (juta)	19,146,800	21,225,950	21,026,222	21,500	22,030,000
4	Indeks Gini Rasio	Point	0.317	0.316	0,287	0.312	
5	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	%	89.81	90	88,23	90.15	88,75
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Point	64.22	65	65,75	65.4	69,79
7	Angka Melek Huruf	%	99.52	99.54	98,79	99.56	95,45
8	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7.72	8.04	8,04	8.36	8,06
9	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	65.7	65.9	65,96	66.1	66,21
10	Persentase Balita Gizi Buruk	%	0.4	0.3	0.67	0.2	0,7
11	Prevalensi Balita Gizi Kurang	%	9.1	8	18,1	7	9,4
12	Cakupan Desa Siaga Aktif	%	82.8	83	92.80	84	100
13	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	71.79	72	72,50	72.2	74,26
14	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3.81	3.56	3,79	3.31	3,58

NO	Bidang Urusan/ Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target	Realisasi	Target	Realisasi
			2021	2023	2023	2024	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
15	Indeks Kepuasan Masyarakat	Point	81.6	83.2	82.86	84.8	84,12
16	Persentase PAD terhadap Pendapatan	%	4.33	4.49	4.38	4.50	4.32
17	Opini BPK	Opini	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
18	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	89.30	100.00	74.60	100	
19	Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB	%	28.07	27.31	29,49	27.46	29,45
20	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	8.15	8.28	8,81	8.27	9,35
21	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	%	0.82	0.36	0,95	0.36	1,09
22	Produksi Sektor Pertanian	Ton	94,521	24.65	92,204.03	28.15	307,855.60
23	Produksi sektor perkebunan	Ton	29,696.34	30.65	29,157.14	31.85	28.964,32
24	Produktivitas Perkebunan per ha per tahun	Kg /ha	2,54	2,73	805	2,78	783
25	Pertumbuhan Industri	%	0.03	1.11	11.51	1.09	13.58
ASPEK DAYA SAING DAERAH							
1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	point	62,31	62,50	21,09	62,90	22,03
2	Nilai Tukar Petani	point	96.14	103.11	98.46	103.5	97.43
3	Angka kriminalitas yang tertangani	%	11.38	11.4	0.007	11.5	0.003
ASPEK PELAYANAN UMUM							
A	Layanan Urusan Wajib Dasar						
1	Pendidikan						
1.1	APM Anak Usia Dini (PAUD)	%	55	57	72,22	58	59.49
1.2	Angka Partisipasi Kasar PAUD	%	55.81	56.61	98,84	57.74	98.84
1.3	Angka Partisipasi Murni (APM):						
1.3.1	APM SD/MI/ Paket A	%	88	89	98.47	90	85,8
1.3.2	APM SMP/ MTs/Paket B	%	95	96	67,86	97	81,54
1.4	Angka Partisipasi Kasar (APK):						
1.4.1	APK SD/MI/ Paket A	%	96,47	97,35	99,09	98,24	95,72
1.4.2	APK SMP/MTs/ Paket B	%	94,64	95,98	88,91	97.,32	107,42
1.5	Angka Putus Sekolah:						
1.5.1	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	1.39	1.2	1.33	1.17	0.16
1.5.2	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	1.31	1.2	0.54	1.17	0.17
1.6	Angka Kelulusan:						
1.6.1	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100	100	100	100	100
1.6.2	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	100	100	100	100	100

NO	Bidang Urusan/ Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target	Realisasi	Target	Realisasi
			2021	2023	2023	2024	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7	Angka Melanjutkan (AM):						
1.7.1	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/Mi, SMP/MTs	%	110.3	100	100	100	100
1.7.2	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	103.12	100	100	100	100
1.8	Fasilitas Pendidikan	%	23,87	26,11	35,22	29,83	36,97
2	Kesehatan						
2.1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Point/	11.93	9.9	15.9	15.6	14.8
2.2	Angka kelangsungan hidup bayi	Point/ 1000	988.81	1-20	984.62	1-19	987.44
2.3	Angka Kematian Balita per1000 kelahiran hidup	Point/	11.93	17.4	15.9	15.6	14.8
2.4	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	Point/	6.96	10	11.6	9.5	9.87
2.5	Angka Kematian Ibu per100,000 kelahiran hidup	point	149	124	162	99	179.4
2.6	Rasio posyandu per satuan balita	rasio	29.56	28.3	31,37	33.4	33.2
2.7	Persentase Posyandu Purnama+Mandiri	%	80.5	81	94.3	82	100
2.8	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	rasio	0.00043	0.00043	0.003456	0.0004 2	0.00691
2.9	Rasio dokter per satuan penduduk	Point/	3	9	0.15	12	0.18
2.10	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	Point/	79	87	508,84	97	
2.11	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	100	100	100	100	100
2.12	Cakupan Desa/ kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	76.4	80	81,2	85	69.2
2.13	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100	100	100	100	100
2.14	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	17.8	100	43.5	100	37.4
2.15	Prevalensi Tuberkulosis	%	86.85	85	81.5	80	80.6
2.16	Penderita diare yang ditangani	Rasio	7.9	7.5	13	7	15.3
2.17	Angka kejadian Malaria	Rasio	0.6	0.5	0.6	0.4	0.2
2.18	Tingkat kematian akibat malaria	Rasio	0.6	0.5	0	0.4	0
2.19	Prevalensi HIV/ AIDS (persen) dari total populasi	%	0.057	0.053	0.077	0.049	0.085
2.20	Cakupan pelayanan Kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	18.33	17.75	100	17.17	100
2.21	Cakupan kunjungan bayi	%	87.5	90	89.1	92	100

NO	Bidang Urusan/ Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target	Realisasi	Target	Realisasi
			2021	2023	2023	2024	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
2.32	Cakupan puskesmas	%	110.5	110.5	110.5	110.5	110.5
2.23	Cakupan puskesmas pembantu	%	20.96	21.83	16	22.7	21.2
2.24	Cakupan pelayanan nifas	%	95.6	96	94.6	97	82.5
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
3.1	Pekerjaan Umum:						
3.1.1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	73.07	74.33	77.33	75.58	42.32
3.1.2	Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	72.11	72.18	93.03	72.21	96.98
3.1.3	Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik	%	21.08	21.58	50	22.08	65
3.1.4	Rasio Jaringan Irigasi	%	7.24	7.24		14.47	24
3.1.5	Persentase penduduk berakses air minum	%	81.58	86.87	78,15	87.44	97,62
3.1.6	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelan-jutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	%	70.99	76.14	60,4	81.66	68,31
3.1.7	Persentase areal kawasan kumuh	%	18,23	17,23	0,08	16,23	2,79
	Kawasan Kumuh yang sudah diintervensi	%					22,82
3.1.8	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah diperkotaan	%	25	50	29	50	17
3.2	Penataan Ruang						
3.2.1	Ketaatan terhadap RTRW	%	100	100	-	100	-
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman						
4.1	Rasio rumah layak huni	%	48,04	43.2	61.24	42.33	59,64
	Jumlah Rumah Tidak layak huni				28.258		28.440
4.2	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	%	43.86	43.2	6,00	42.33	0
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat						
5.1	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	%	50	50	93	50	87
5.2	Cakupan pelayanan Bencana kebakaran kabupaten/kota	%	36	36	99	36	89
5.3	Persentase Penegakan PERDA	%	50.07	60	66,66	70	100
6	Sosial						
6.1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	11.58	10.42	16,49	9.38	52.68
6.2	Persentase PMKS yang tertangani	%	10.84	10.71	15,35	10.58	75.33

NO	Bidang Urusan/ Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target	Realisasi	Target	Realisasi
			2021	2023	2023	2024	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
6.3	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100	100	100	100	100
6.4	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan Sarana prasarana tanggap darurat lengkap	%	100	100	100	100	100
6.5	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	27	100	88,75	100	91.14
B.	Layanan urusan Wajib Bukan Pelayanan dasar						
1	Tenaga Kerja						
1.1	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	4.64	4.94	5,53	5.24	6,08
1.2	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	%	0	100	-	100	-
1.3	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	%	0	100	-	100	-
1.4	Rasio lulusan S1/ S2/S3	Rasio/ 10.000jiwa	459.3	500	659,24	501	
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
2.1	Indeks Pembangunan Gender	point	91.49	92.24	91.97	93.16	92.15
2.2	Persentase partisipasi perempuan di sektor publik	%	45.72	46	53,60	47	54,90
2.3	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	%	3.3	3.3	0,03	6.6	0
2.4	Rasio KDRT	rasio	0	0	0,02	0	0,01
2.5	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	47.17	47.5	66,5	48.2	62,78
3	Pangan						
3.1	Persentase PPH (Ketersediaan Pangan) dan PPH Konsumsi	%	69.1	100	84.1	70.93	70.93
3.2	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	%	100	100	100	100	100
4.	Pertanahan						
4.1	Persentase luas lahan bersertifikat	%	75	100		100	
5	Lingkungan Hidup						
5.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten:	point	-	69.71	69.29	69.81	72.58
	- Indeks Kualitas Air (IKA)		-	62.28	50	62.38	55
	- Indeks Kualitas Udara (IKU)		-	80	89.74	81	93.11

NO	Bidang Urusan/ Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target	Realisasi	Target	Realisasi
			2021	2023	2023	2024	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKL)		-	66.5	64.58	67.25	64.79
5.2	Persentase Ketaatan fasilitas Kesehatan, Usaha/Kegiatan Terhadap Pengelolaan limbah B3 (%)	%	24	37.31	41.33	50.66	65.33
5.3	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung-jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	%	100	100	100	100	100
5.4	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatan-nya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	%	19.87	32.77	23.87	45.67	42.25
5.5	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	%	-	0.27	-	0.28	1.17
6	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil						
6.1	Rasio penduduk ber-KTP persatuan penduduk	Rasio	90	100	96,83	100	96,33
6.2	Rasio bayi berakte kelahiran	Rasio	54	42.89	87,28	63.38	87.62
6.3	Rasio pasangan berakte nikah	Rasio	22	22.79	54,92	24.97	57.07
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
7.1	Cakupan Desa Tertib Administrai Desa	%	16.59	20.96	29.69	25.33	35,80
7.2	Persentase PKK aktif	%	100	100	100	100	100
7.3	Persentase Posyandu aktif	%	100	100	94,31	100	85.1
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						
8.1	Rata-rata jumlah anak per keluarga	jumlah	3	3	3	3	3
8.2	Total Fertility Rate (TFR)	jumlah	3.2	3	2,58	2.9	2,56
8.3	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) peserta KB Aktif (mCPR)	%	52.51	53.63	42,81	54.75	49,12
8.4	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (<i>unmetneed</i>)	%	27.95	22	35,43	20	23,73

NO	Bidang Urusan/ Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target	Realisasi	Target	Realisasi
			2021	2023	2023	2024	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
8.5	Ratio Akseptor KB	Ratio	51.24	69	62	62	79,03
8.6	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling remaja/ mahasiswa	%	15.78	16	0	16	0
9 Perhubungan							
9.1	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang tipe C	%	41	68	100	82	100
9.2	Rasio ijin trayek	0.02	0.02	0.02	0,02	0.02	0,02
9.3	Jumlah uji kir angkutan umum	Jumlah	79	100	4,58	100	24,93
9.4	Persentase pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa LaluLintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten	%	6.67	26.34	87,03	48.13	50,34
10 Komunikasi dan Informasi							
10.1	Persentase Lembaga yang terhubung dengan akses Internet yang disediakan oleh Pemda	%	18	20	45	20	54
10.2	Cakupan Layanan Telekomunikasi	%	68.24	76.22	67.44	84.41	95.6
11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah							
11.1	Persentase Koperasi Aktif	%	44.02	85	33.33	88	34.41
11.2	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	31.88	2.06	0.12	2.22	3.22
12 Penanaman Modal							
12.1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	%	15	33	83	37	87
12.2	Nilai Investasi Kabupaten	%	13,201,283,588	100	25,510,412,279	100	79,994,651,629
12.3	Rasio Daya Serap tenaga Kerja	rasio	32.47	26	63.36	28	20,97
13 Kepemudaan Dan Olahraga							
13.1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	-	0.25	-	0.50	99.05
13.2	Persentase wirausaha muda	%	-	0.25	-	0.50	-
13.3	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	-	25	-	50	-
13.4	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	-	25	-	50	-
16 Kebudayaan							
16.1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Kali	4	4	3	4	3
16.2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan		72	72	72	72	72

NO	Bidang Urusan/ Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target	Realisasi	Target	Realisasi
			2021	2023	2023	2024	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
16.3	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu		72	72	72	72	72
17 Perpustakaan							
17.1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun		0.49	0.51	5,393	0.53	2,951
17.2	Koleksi buku yang tersedia diperpustakaan daerah	%	45.2	47.01	14,767	48.89	14,767
17.3	Rasio perpustakaan-persatuan penduduk	Rasio	0.14	0.15	0.001	0.15	0.21
17.4	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	%	4.35	4.52	19	4.7	36
18 Kearsipan							
18.1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	10.64	11.07	30	11.51	30
18.2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	Orang/ Desa	18	20	21	20	22
C Layanan Urusan Pilihan							
1 Pariwisata							
1.1	Tingkat Pertumbuhan Kunjungan wisata	%	-18.86	85.31	113.59	89.57	-24.23
1.2	Persentase Hunian kamar	%	19.75	21.72	16.28	23.89	22.64
1.3	PAD sektor pariwisata	%	61	71	24.58	76	16.89
2 Pertanian							
2.1	Kontribusi sektor pertanian/ perkebunan terhadap PDRB	%	12.06	27.31	14.74	27.46	13.12
2.2	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya perhektar	Ton/ha	4.5	4.5	4.50	4.5	4.50
2.3	Produktivitas sektor perkebunan	Ton/ha	2.45	0.924	2.22	0.94	2.12
2.4	Rasio Penyuluh perdesa	Rasio	0.52	19.85	0.52	20.58	0.43
5 Perdagangan							
5.1	Cakupan bina kelompok pedagang/ usaha informal	%	13.95	18.17	34.42	22.71	54.55
5.2	Presentase alat-alat ukur timang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda terasah yang berlaku	%	29.90	49	17,46	49	11,72
6 Perindustrian							
6.1	Cakupan bina kelompok pengrajin	%	67.8	23	95.52	22	111.94
6.2	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini		80	80	80	Tersedia	80
7 Transmigrasi							
7.1	Persentase Transmigran swakarsa	%	0.3	0.38	-	0.4	-

NO	Bidang Urusan/ Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target	Realisasi	Target	Realisasi
			2021	2023	2023	2024	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
8 Perikanan							
8.1	Produksi perikanan	ton	15,681	100	17,786	100	15,000
8.2	Konsumsi ikan	kg/kapita	28.91	62	29.14	63	29.32
8.3	Rasio Kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial	%	0.8	58.39	0.8	62.04	0.8
8.4	Nilai tukar nelayan	Nilai					89,59
D. Penunjang Urusan							
1 Perencanaan							
1.1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
1.2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
1.3	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
1.4	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	%	94.15	100	96,13	100	99,19
1.5	Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD	%	80.11		100	100	95,93
2 Keuangan							
2.1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Opini	WTP	WDP	WTP	WDP	WTP
2.2	Persentase SILPA	%	5	5	8,47	5	5,53
2.3	Persentase SILPA terhadap APBD	%	5	5	7,51	5	5,53
2.4	Persentase program/ kegiatan yang tidak terlaksana	%	0	0	10,37	0	24,77
2.5	Persentase belanja 106 kesehatan 106 (20%)	%	20	20	31	20	30,54
2.6	Persentase belanja 106 kesehatan (10%)	%	10	10	28,24	10	15,02
2.7	Penetapan APBD	%	30 Nov	30Nov	29 Des	30 Nov	30 Des
3 Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan							
3.1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	bulan	3	3	3	3	3
3.2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	57.89	63.16	2,37	68.42	0,76
3.3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	6.26	14.68	0	18.45	0,47

NO	Bidang Urusan/ Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target	Realisasi	Target	Realisasi
			2021	2023	2023	2024	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
3.4	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	jabatan	35	36	26	36	33
3.6	Jumlah pemangku Jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	orang	2,975	3,233	801	3,318	1,038
4 Penelitian dan Pengembangan							
4.1	Persentase implementasi rencana kelitbangan	%	40	80	100	80	100
4.2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan Penerapan SIDA:	%	50	50	50	100	100
4.3	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	%	-	9.3	14,28	12.5	16,12
5 Pengawasan							
5.1	Persentase Penurunan Penyimpangan Pengelolaan Keuangan	%	35.71	40.82		45.92	
5.2	Persentase tindak lanjut temuan	%	65.2	75		77	78.19
6 Sekretariat Dewan							
6.1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/ Kab/Kota		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6.2	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawa-san, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Pembangunan		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6.3	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawa-san, pembentukan Perda dan Anggaran kedalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Evaluasi RKPD Tahun 2023 dan Tahun 2024 (data olahan)

2.2 Gambaran Keuangan Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan merupakan implementasi dari pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian maka untuk dapat mengetahui gambaran pengelolaan keuangan daerah selama lima tahun terakhir dapat dilakukan melalui analisis terhadap pelaksanaan APBD dan laporan keuangan pemerintah daerah sekurang-kurangnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebelumnya. Dari hasil tersebut dapat diperoleh gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah selama periode dimaksud. Capaian kinerja keuangan pada periode tersebut menjadi data dasar atau baseline data yang dibutuhkan untuk memprediksi kemampuan keuangan daerah dalam mendanai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur periode Tahun 2025-2029. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan melahirkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah ke depannya.

2.2.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Flores Timur menunjukkan dinamika yang mencerminkan respon terhadap tantangan dan kebutuhan pembangunan daerah. Pelaksanaan APBD Kabupaten Flores Timur selama tahun 2020 sampai tahun 2024 menunjukkan upaya konsistensi dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Flores Timur meliputi pencapaian kinerja pendapatan daerah, perkembangan belanja daerah dan pembiayaan daerah.

A. Pendapatan

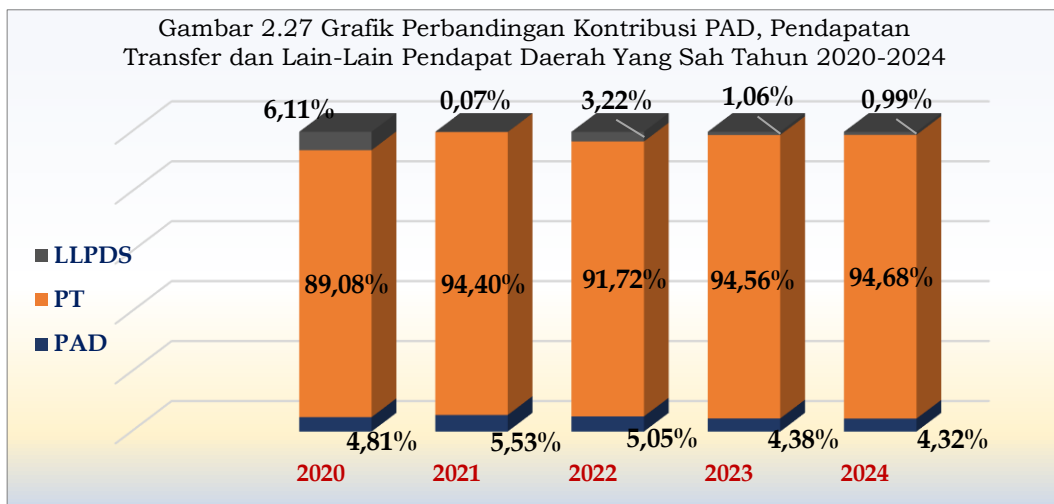
Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah. Untuk memahami kinerja keuangan daerah sebagai hasil dari pelaksanaan APBD maka diperlukan adanya analisis terhadap kinerja pendapatan daerah. Analisis tersebut meliputi jenis pendapatan daerah yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan kemampuan keuangan daerah sebagai sumber pendanaan di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan peluang dan hambatan yang dihadapi. Secara garis besar pertumbuhan realisasi pendapatan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur dalam periode 2020-2024 sebagaimana terlihat pada Tabel 2.90 berikut.

Tabel 2.90 Realisasi Pendapatan Daerah
Kabupaten Flores Timur, Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	REALISASI TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4	PENDAPATAN	1.091.833.806.147,80	1.063.984.334.094,09	1.091.832.207.789,38	1.149.177.335.557,12	1.290.264.472.751,10
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	52.535.561.927,39	58.881.018.693,82	55.180.838.703,38	50.340.879.438,12	55.797.763.921,51
4.1.1	Pajak Daerah	10.665.680.022,80	11.802.364.492,12	13.645.899.893,75	15.068.129.862,00	16.314.902.964,41
4.1.2	Retribusi Daerah	21.553.731.004,00	29.630.143.069,00	33.962.696.724,00	24.458.316.606,00	3.629.820.420,00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.788.206.825,21	4.677.955.033,00	2.777.813.291,00	3.845.122.715,00	2.013.815.603,00
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	15.527.944.075,38	12.770.556.099,70	4.794.428.794,63	6.969.310.255,12	33.839.224.934,10
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	972.636.096.067,41	1.004.356.952.669,00	1.001.474.745.620,00	1.086.697.907.803,00	1.221.629.776.567,00
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	951.743.352.989,00	986.518.368.562,00	977.216.223.486,00	1.057.459.736.734,00	1.186.584.941.658,00
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	20.892.743.078,41	17.838.584.107,00	24.258.522.134,00	29.238.171.069,00	35.044.834.909,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	66.662.148.153,00	746.362.731,27	35.176.623.466,00	12.138.548.316,00	12.836.932.262,59
4.3.2	Pendapatan Hibah	66.662.148.153,00	746.362.731,27	-	50.000.000,00	10.862.851,59
4.3.3	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-		35.176.623.466,00	12.088.548.316,00	12.826.069.411,00

Sumber: BKAD Kab. Flores Timur, Tahun 2025 (data olahan)

Perkembangan realisasi pendapatan sebagaimana terlihat pada Tabel 2.80 di atas menunjukkan bahwa tren perkembangan realisasi Pendapatan selama kurun waktu tahun 2020-2024 berfluktuasi dengan rata-rata sebesar 4,40 persen. Walaupun demikian, kapasitas fiskal daerah masih sangat rendah. Hal ini ditunjukkan oleh rata-rata kontribusi pendapatan transfer selama lima tahun sebesar 92,89 persen dari total pendapatan daerah. Pada tahun 2020, kontribusi Pendapatan Transfer sebesar 89,08 persen. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah hanya 4,81 persen dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 6,11 persen. Pada tahun 2021, kontribusi Pendapatan Transfer mencapai 94,40 persen, sedangkan Pendapatan Asli Daerah sebesar 5,53 persen dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 0,07 persen. Kondisi tersebut berlanjut sampai dengan tahun 2024. Kontribusi Pendapatan Transfer pada tahun 2024 masih mendominasi pendapatan daerah yakni sebesar 94,68 persen, disusul Pendapatan Asli Daerah sebesar 4,32 persen dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 0,99 persen. Hal ini menandakan tingkat ketergantungan fiskal daerah terhadap dana transfer sangat tinggi.



Sumber: BKAD Kab. Flores Timur, Tahun 2025 (hasil analisis)

Diagram pada Gambar 2.27 di atas menunjukkan bahwa sumber pendapatan daerah Flores Timur terbesar bersumber dari Pendapatan Transfer (khususnya Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat) yang selama periode tahun 2020-2024 cenderung meningkat. Dana ini bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pendapatan transfer Dana perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) yang bersumber dari penerimaan pajak dan sumber daya alam (SDA), dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK). Setiap jenis dana perimbangan ini memiliki fungsinya masing-masing. DBH berperan sebagai penyeimbang fiskal antara pusat dan daerah, DAU berperan sebagai pemerataan fiskal antardaerah (*fiscal equalization*), dan DAK berperan sebagai dana khusus yang membiayai pelaksanaan program prioritas nasional di daerah. Dengan demikian dibutuhkan kebijakan yang inovatif untuk mengurangi ketergantungan fiskal daerah terhadap dana transfer melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

B. Belanja

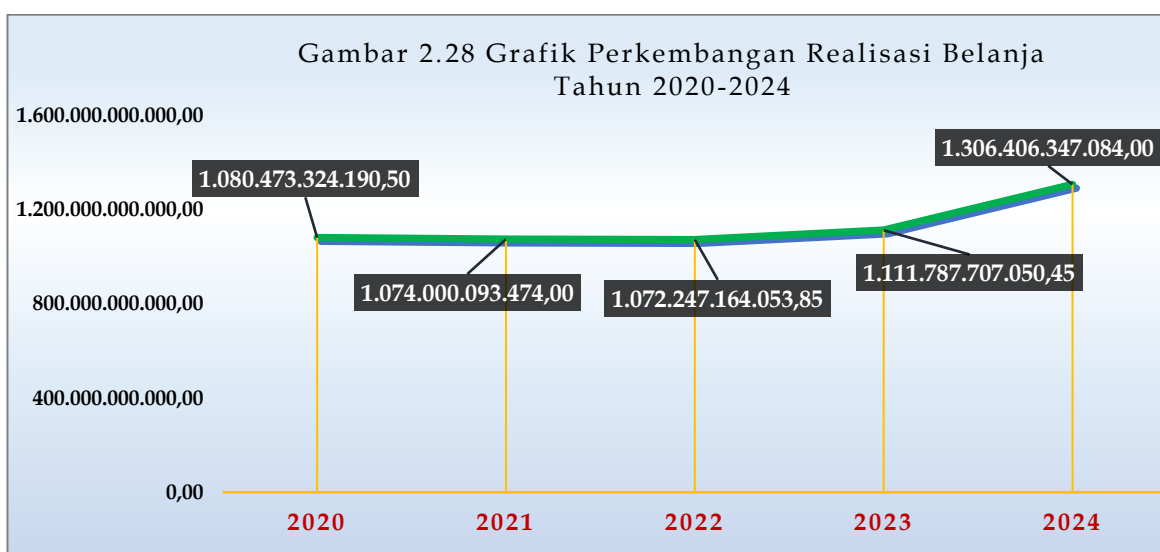
Belanja Daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Klasifikasi belanja daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri atas (1) belanja operasi; (2) belanja modal; (3) belanja tidak terduga; dan (4) belanja transfer. Klasifikasi kelompok belanja dimaksud selanjutnya dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek yang dirinci atas jenis :
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;

- d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah;
 - f. Belanja bantuan sosial.
2. Belanja Modal; merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
 3. Belanja Tidak Terduga; merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
 4. Belanja Transfer; merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

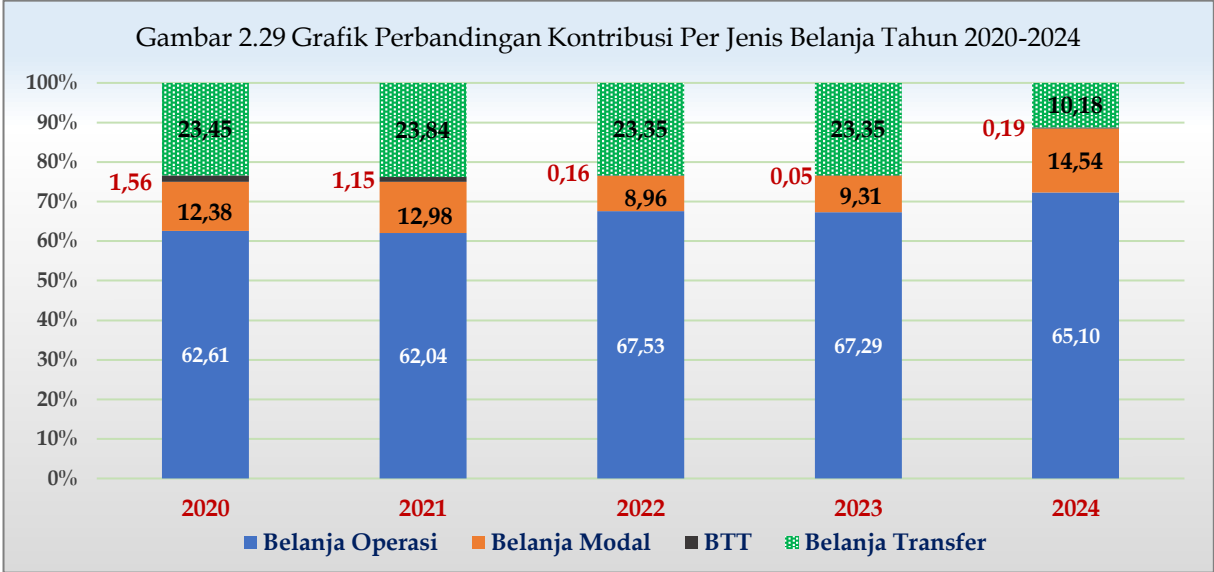
Pengelolaan belanja daerah mengacu kepada prinsip transparansi dan akuntabilitas, partisipatif, disiplin anggaran, berkeadilan, efisien dan efektif. Pengelolaan belanja daerah dilaksanakan berlandaskan pada anggaran kinerja (*Performance Budget*) yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, yang berarti belanja harus berorientasi pada kepentingan publik.

Kinerja belanja daerah selama periode tertentu menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengalokasikan dan mendistribusikan sumber daya keuangan daerah yang diterima setiap tahun untuk merealisasikan program dan kegiatan apa yang telah direncanakan dan ditetapkan. Secara keseluruhan, kinerja belanja daerah Kabupaten Flores Timur menunjukkan tren yang fluktuatif setiap tahunnya sejak tahun 2020-2024. Pada tahun 2020, realisasi belanja sebesar Rp. 1,080 triliun, menurun menjadi Rp. 1,074 triliun pada tahun 2021, kemudian menurun lagi menjadi Rp. 1,072 triliun pada tahun 2022. Pada tahun 2023, realisasi belanja meningkat menjadi Rp. 1,111 triliun dan terus meningkat menjadi Rp. 1,306 triliun atau bertambah Rp. 194,62 miliar pada tahun 2024. Hal ini dapat dilihat lebih jelas pada Gambar 2.28 berikut:



Sumber: BKAD Kab. Flores Timur, Tahun 2025 (data Olahan)

Sebagaimana uraian sebelumnya bahwa belanja daerah terdiri atas Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer. Pengalokasian Belanja Kabupaten Flores Timur selama periode Tahun 2020-2024 didominasi oleh Belanja Operasi (65 persen), kemudian diikuti Belanja Transfer, kemudian Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga. Belanja Operasi terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Belanja Pegawai merupakan belanja dengan alokasi terbesar yakni lebih dari 50 persen dari total Belanja Operasi selama kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.



Sumber: BKAD Kab. Flores Timur, Tahun 2025 (data olahan)

Grafik perbandingan pada Gambar 2.29 di atas, menunjukkan bahwa struktur belanja dalam APBD Kabupaten Flores Timur dalam lima tahun terakhir masih didominasi oleh Belanja Operasi khususnya Belanja Pegawai. Sementara Belanja Modal, yang secara definisi merupakan komponen belanja langsung yang menghasilkan aset tetap, secara proporsi justru mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Tren realisasi Belanja Daerah selama periode tahun 2020-2024 secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.91 berikut;

Tabel 2.91 Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur, Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	REALISASI TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5	BELANJA	1.080.473.324.190,50	1.074.000.093.374,22	1.072.247.164.053,85	1.111.787.707.050,45	1.306.406.347.084,00
5.1	BELANJA OPERASI	676.455.786.405,00	666.269.500.092,95	724.038.720.472,85	748.157.554.470,45	850.427.628.970,00
5.1.1	Belanja Pegawai	403.507.456.882,00	408.340.505.042,00	423.830.844.970,00	446.582.102.987,00	511.746.215.171,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	249.591.510.492,00	224.399.909.394,95	283.558.941.273,85	258.213.655.046,45	279.301.125.411,00
5.1.4	Belanja Subsidi	-	500.420.000,00	95.550.000,00	-	-
5.1.5	Belanja Hibah	23.233.319.031,00	32.418.846.656,00	11.154.922.529,00	43.137.517.667,00	59.165.926.097,00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	123.500.000,00	609.819.000,00	5.398.461.700,00	224.278.770,00	214.362.291,00
5.2	BELANJA MODAL	133.793.476.679,50	139.351.796.225,27	96.101.526.458,00	103.555.938.920,00	189.895.700.799,00
5.2.1	Belanja Modal Tanah	64.432.500,00	9.753.805.032,00	2.821.836.083,00	-	90.000.000,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34.159.358.098,00	50.352.872.909,00	24.332.839.422,00	2.929.343.131,00	48.525.952.256,00

NO	URAIAN	REALISASI TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan bangunan	36.309.919.423,00	31.360.680.876,81	27.536.070.226,00	38.537.628.682,00	102.571.655.870,00
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	60.531.485.240,50	45.789.975.020,00	107.551.275,00	33.172.488.493,00	36.585.207.223,00
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap lainnya	2.728.281.418,00	2.094.462.387,46	1.303.229.452,00	2.552.390.444,00	2.122.885.450,00
5.2.6	Belanja Modal Tanaman	-	-	-	-	-
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	16.856.638.558,00	12.355.347.010,00	1.724.661.532,00	518.234.437,00	2.423.055.403,00
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	16.856.638.558,00	12.355.347.010,00	1.724.661.532,00	518.234.437,00	2.423.055.403,00
5.4	BELANJA TRANSFER	253.367.422.548,00	256.023.450.046,00	250.382.255.591,00	259.555.979.223,00	263.659.961.912,00
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	1.402.556.947,00	1.309.357.347,00	1.387.404.431,00	1.478.781.514,00	1.397.184.152,00
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	251.964.865.601,00	254.714.092.699,00	248.994.851.160,00	258.077.197.709,00	262.262.777.760,00
	Total Surplus/ (Defisit)	11.360.481.957,30	(10.015.759.280,13)	19.585.043.735,53	37.389.628.506,67	(16.141.874.332,90)

Sumber: BKAD Kab. Flores Timur, Tahun 2025 (data olahan)

Tabel di atas menggambarkan tren belanja daerah Kabupaten Flores Timur selama periode tahun 2020-2024 berfluktuasi. Selama tahun 2020-2022 belanja daerah mengalami penurunan, sedangkan pada tahun 2024-2025 mengalami peningkatan. Pada Belanja Operasi khususnya Belanja Pegawai menunjukkan tren meningkat setiap tahun, sementara Belanja Modal berfluktuatif setiap tahunnya. Pada tahun 2020 Belanja Modal sebesar Rp.133,793 miliar berkurang menjadi Rp. 103,555 miliar pada tahun 2023, namun pada tahun 2024 meningkat menjadi Rp. 189,895 miliar.

C. Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Flores Timur selama periode tahun 2020-2024 meliputi Penyertaan Modal (Investasi) pada PT. Bank Nusa Tenggara Timur, PT. BPR Bina Usaha Dana Larantuka dan PDAM Ina Gelekat Larantuka serta Pembentukan Dana Bergulir. Untuk mengetahui realisasi pengeluaran pembiayaan tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.92 berikut:

Tabel 2.92 Realisasi Pembiayaan Kabupaten Flores Timur, Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	REALISASI TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6	PEMBIAYAAN					
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	43.786.038.695,92	51.160.282.878,22	40.230.495.963,39	55.832.641.756,92	91.230.117.486,59
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	43.683.488.695,92	51.060.115.378,22	40.172.900.963,39	55.818.571.756,92	91.222.120.486,59
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	102.550.000,00	100.167.500,00	57.595.000,00	14.070.000,00	7.997.000,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	3.000.000.000,00	1.000.000.000,00	4.000.000.000,00	2.000.000.000,00	1.500.000.000,00

NO	URAIAN	REALISASI TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	3.000.000.000,00	1.000.000.000,00	4.000.000.000,00	2.000.000.000,00	1.500.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	40.786.038.695,92	50.160.282.878,22	36.230.495.963,39	53.832.641.756,92	89.730.117.486,59
	SISA LEBIH/ KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAN	52.146.520.653,22	40.144.523.598,09	55.815.539.698,92	91.222.270.263,59	73.588.243.153,69

Sumber: BKAD. Kab. Flores Timur, Tahun 2025 (data olahan)

D. Neraca Daerah

Neraca daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada periode waktu tertentu. Neraca daerah membantu pemerintah daerah mengevaluasi kinerja keuangan, termasuk posisi aset, kewajiban, dan ekuitas, serta dapat digunakan untuk membandingkan kondisi keuangan antara periode yang berbeda. Informasi dalam neraca daerah dapat digunakan untuk pengambilan keputusan terkait pengelolaan keuangan daerah, seperti investasi, pembiayaan, dan pengelolaan hutang. Pada aspek pengawasan, neraca daerah dapat digunakan oleh pihak luar untuk mengawasi kinerja keuangan pemerintah daerah dan memastikan penggunaan anggaran yang tepat.

Neraca Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun pada periode tahun 2020-2024 secara umum mengalami peningkatan, meskipun pada tahun 2022 mengalami penurunan. Selama periode lima tahun ini, struktur keuangan Kabupaten Flores Timur menunjukkan kondisi yang relatif stabil dengan tren pertumbuhan yang positif, khususnya pada sisi aset dan ekuitas. Total aset pada tahun 2020 sebesar Rp 1,17 triliun, kemudian meningkat menjadi Rp 1,36 pada tahun 2024, hal ini mencerminkan pengelolaan keuangan daerah yang cukup baik, meskipun sempat fluktuasi pada tahun 2022.

Tabel 2.93 Neraca Daerah Kabupaten Flores Timur, Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	ASET	1.172.556.591.538,60	1.300.549.653.875,70	1.280.213.889.409,00	1.298.592.547.201,40	1.365.341.921.638,43
A	Aset Lancar	69.795.007.306,20	75.937.747.085,14	91.104.177.353,91	152.394.687.814,09	132.161.165.212,58
B	Investasi Jangka Panjang	57.618.909.348,00	61.368.482.669,00	65.587.764.143,32	68.867.011.474,64	72.626.589.622,54
C	Aset tetap	1.003.110.573.519,12	1.077.911.112.449,41	970.401.747.902,87	981.551.753.691,25	1.061.214.739.585,81
D	Properti Investasi	-	-	-	1.111.151.479,84	1.095.157.479,85
E	Aset Lainnya	42.032.101.365,28	85.332.311.672,15	153.120.200.008,90	94.667.942.741,58	98.244.269.737,65
2	KEWAJIBAN	11.879.377.734,69	16.844.038.528,89	3.069.055.727,31	4.554.837.624,45	9.362.481.535,02
A	Kewajiban Jangka Pendek	11.879.377.734,69	16.844.038.528,89	3.069.055.727,31	4.554.837.624,45	9.362.481.535,02
B	Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-	-
3	EKUITAS	1.160.677.213.803,91	1.283.705.615.349,81	1.277.144.833.681,69	1.294.037.709.576,95	1.355.979.440.103,40
	Ekuitas	1.160.677.213.803,91	1.283.705.615.349,81	1.277.144.833.681,69	1.294.037.709.576,95	1.355.979.440.103,40
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	1.172.556.591.538,60	1.300.549.653.878,70	1.280.213.889.409,00	1.298.592.547.201,40	1.365.341.921.638,42

Sumber: BKAD Kab. Flores Timur, Tahun 2025 (data olahan)

Tabel Neraca di atas menunjukkan pertumbuhan komponen aset Pemerintah Kabupaten Flores Timur selama periode tahun 2020-2024 rata-rata mengalami peningkatan sebesar 3,98 persen. Komponen aset didominasi oleh aset tetap, yang konsisten berkontribusi sekitar 75 sampai 85 persen dari total aset. Sementara itu pada tahun 2024 kewajiban tercatat sebesar Rp 9,36 miliar, atau hanya sekitar 0,69 persen dari total aset. Ekuitas mengalami peningkatan konsisten dari Rp. 1,16 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp. 1,36 triliun pada tahun 2024.

2.2.2 Proyeksi Keuangan Daerah Lima Tahun ke Depan

Perencanaan yang baik untuk mencapai tujuan pembangunan membutuhkan analisis terhadap seluruh potensi sumber daya dan peluang yang dimiliki, menentukan urutan pilihan dan proyeksi yang cermat terhadap pendanaan pembangunan (Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan).

A. Proyeksi Pendapatan Daerah

Proyeksi pendapatan daerah merupakan estimasi pendapatan yang akan diterima oleh pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu, yang akan digunakan sebagai dasar perencanaan anggaran daerah dan pengambilan keputusan kebijakan pembangunan dan keuangan daerah, mengevaluasi kinerja dan meningkatkan pendapatan. Proyeksi pendapatan daerah untuk lima tahun ke depan dilakukan berdasarkan analisis yang mendalam atas data realisasi pendapatan daerah 2020-2024, kondisi dinamis daerah, sejumlah peluang dan regulasi terbaru dari Pemerintah Pusat terkait kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Gambaran proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Flores Timur periode tahun 2026-2030 dapat dilihat pada Tabel 2.94 berikut.

Tabel 2.94 Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur, Tahun 2026-2030

KO-DE	URAIAN	BASELINE TAHUN 2024 (Audited)	PROYEKSI TAHUN				
			2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4	PENDAPATAN DAERAH	1.290.264.472.751,10	1.333.771.203.700,00	1.409.912.151.100,00	1.464.277.294.500,00	1.519.513.749.300,00	1.574.605.687.400,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	55.797.763.921,51	65.495.731.973,00	68.699.882.000,00	70.944.046.000,00	73.274.000.000,00	75.420.672.000,00
4.1.01	Pajak Daerah	16.314.902.964,41	31.190.498.973,00	33.794.309.000,00	33.411.000.000,00	35.100.000.000,00	35.600.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	3.629.820.420,00	4.570.788.000,00	4.650.776.000,00	5.732.166.000,00	6.815.000.000,00	7.899.240.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.013.815.603,00	3.845.122.715,00	3.912.412.000,00	3.980.880.000,00	4.060.000.000,00	4.131.050.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	33.839.224.934,10	25.889.322.285,00	26.342.385.000,00	26.820.000.000,00	27.299.000.000,00	27.790.382.000,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.221.629.776.567,00	1.253.703.410.278,00	1.325.474.269.100,00	1.375.234.548.500,00	1.425.425.749.300,00	1.475.248.915.400,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.186.584.941.658,00	1.226.956.477.000,00	1.300.809.056.050,00	1.349.829.379.050,00	1.439.258.424.750,00	1.454.296.570.950,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	35.044.834.909,00	26.746.933.278,00	24.665.213.050,00	25.405.169.450,00	26.167.324.550,00	26.952.344.450,00

KO-DE	URAIAN	BASELINE TAHUN 2024 (Audited)	PROYEKSI TAHUN				
			2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	12.836.932.262,59	14.572.061.449,00	15.738.000.000,00	18.098.700.000,00	20.814.000.000,00	23.936.100.000,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12.836.932.262,59	14.572.061.449,00	15.738.000.000,00	18.098.700.000,00	20.814.000.000,00	23.936.100.000,00

Sumber: BKAD Kab. Flores Timur, Tahun 2025 (hasil analisis)

Tabel di atas menggambarkan selama periode lima tahun ke depan (tahun 2026-2030), pendapatan daerah Kabupaten Flores Timur diperkirakan akan terus meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 4,65 persen, yang didukung dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,50 persen. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah melalui kebijakan untuk mendorong peningkatan PAD Kabupaten Flores Timur melalui peningkatan produktivitas daerah. Namun perlu dipahami bahwa proyeksi pendapatan di atas merupakan perkiraan yang dapat berubah atau bersifat indikatif sepanjang asumsi-asumsi tidak mengalami perubahan. Proyeksi dimaksud telah mempertimbangkan aspek-aspek yang berpengaruh sehingga diharapkan proyeksi ini memiliki tingkat bias yang rendah dan dapat dijadikan acuan yang baik dalam penyusunan rencana kerangka pendanaan pembangunan tahun 2026-2030.

Guna pencapaian target pendapatan daerah akan dilakukan upaya peningkatan melalui kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah termasuk optimalisasi penarikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang sudah menjadi kewenangan Kabupaten, serta pendayagunaan asset daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan agar dapat menghasilkan penerimaan PAD dan memobilisir potensi sumber daya dan dana masyarakat secara berkelanjutan, adil dan merata, yang dilaksanakan melalui:

1. Intensifikasi sumber pendapatan daerah:
 - Memantapkan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan pendapatan daerah termasuk kinerja kualitas sistem pemungutan pendapatan daerah terutama pelayanan pajak dan retribusi daerah;
 - Membangun sistem database pendapatan daerah dan menggunakan teknologi informasi untuk mengurangi kebocoran pungutan;
 - Meningkatkan kinerja dan menjaga tingkat kesehatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk dapat meningkatkan pendapatan asli daerah;
 - Optimalisasi dan pemberdayaan aset potensial daerah;
 - Pengembangan keterampilan, pengetahuan dan profesionalisme aparatur.

2. Ekstensifikasi sumber pendapatan daerah

- Peningkatan kualitas dan jenis pelayanan umum kepada masyarakat wajib pajak;
- Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan dana bagi hasil pajak dan bukan pajak;
- Penguatan kelembagaan dan sinergitas antar BUMD dan OPD serta mengembangkan potensi usaha;
- Kemitraan BUMD dengan dunia usaha, masyarakat, dan perguruan tinggi;
- Penetapan tarif pajak dan penyesuaian dasar dan pengenaan pajak daerah; dan
- Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk meningkatkan penerimaan dari Dana Bagi Hasil dan Dana Perimbangan.

B. Belanja

Proyeksi belanja daerah merupakan perkiraan atau rencana pemerintah daerah tentang berapa banyak pengeluaran (belanja) yang akan dilakukan dalam satu tahun anggaran. Dalam menentukan proyeksi belanja daerah, tentunya analisa terhadap proyeksi pendapatan daerah di atas, pertimbangan ruang fiskal yang dimiliki, kebijakan pemerintah pusat dan perkembangan kondisi daerah akan menentukan prioritas belanja dalam mewujudkan visi pembangunan daerah melalui pelaksanaan misi, strategi dan kebijakan pembangunan daerah. Gambaran proyeksi belanja daerah dalam rangka pendanaan pembangunan daerah Tahun 2026-2030 dapat dilihat pada Tabel 2.95 berikut.

Tabel 2.95 Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur, Tahun 2026-2030

KO-DE	URAIAN	BASELINE TAHUN 2024 (Audited)	PROYEKSI TAHUN				
			2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5	BELANJA DAERAH	1.306.406.347.084,00	1.327.371.203.700	1.402.512.151.100	1.456.377.294.500	1.511.113.749.300	1.565.705.687.400
5.1	BELANJA OPERASI	850.427.628.970,00	952.535.902.450	1.014.318.955.100	1.038.903.396.500	1.080.259.384.300	1.112.495.084.400
5.1.01	Belanja Pegawai	511.746.215.171,00	685.884.999.250	731.657.124.617	749.948.552.733	768.697.266.550	787.914.698.350
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	279.301.125.411,00	243.533.597.450	258.462.005.483	264.217.535.767	286.097.500.750	298.291.831.050
5.1.04	Belanja Subsidi	-	59.500.000	1.785.000	63.308.000	65.397.000	67.555.000
5.1.05	Belanja Hibah	59.165.926.097,00	23.007.805.750	23.698.040.000	24.174.000.000	24.899.220.000	25.721.000.000
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	214.362.291,00	50.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000
5.2	BELANJA MODAL	189.895.700.799,00	115.427.211.500	117.902.151.000	144.079.098.000	154.264.365.000	171.519.000.000
5.2.01	Belanja Modal Tanah	90.000.000,00	2.000.000.000		-	-	-
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	48.525.952.256,00	11.342.278.850	10.652.547.000	11.078.650.000	11.411.000.000	15.754.000.000

KO-DE	URAIAN	BASELINE TAHUN 2024 (Audited)	PROYEKSI TAHUN				
			2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	102.571.655.870,00	47.972.712.800	50.000.000.000	60.637.000.000	66.920.700.000	72.124.000.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	36.585.207.223,00	50.957.265.250	54.000.000.000	69.060.000.000	72.513.000.000	80.090.000.000
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.122.885.450,00	3.154.954.600	3.249.604.000	3.303.448.000	3.419.665.000	3.551.000.000
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.423.055.403,00	2.500.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	12.000.000.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.423.055.403,00	2.500.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	12.000.000.000
5.4	BELANJA TRANSFER	263.659.961.912,00	256.908.089.750	260.291.045.000	263.394.800.000	266.590.000.000	269.691.603.000
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.397.184.152,00	1.578.000.000	1.890.000.000	1.900.000.000	1.950.000.000	2.000.000.000
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	262.262.777.760,00	255.330.089.750	258.401.045.000	261.494.800.000	264.640.000.000	267.691.603.000
Total Surplus/ (Defisit)		(16.141.874.332,90)	6.400.000.000	7.400.000.000	7.900.000.000	8.400.000.000	8.900.000.000

Sumber: BKAD Kab. Flores Timur, Tahun 2025 (hasil analisis)

Tabel di atas menggambarkan proyeksi belanja daerah Kabupaten Flores Timur selama periode tahun 2026-2030 terus meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,28 persen. Belanja operasi menjadi kelompok belanja dengan alokasi terbesar dengan rata alokasi setiap tahun sebesar 71,59 persen dari total belanja daerah. Sementara belanja modal rata-rata alokasi setiap tahun dari total belanja daerah sebesar 9,63 persen.

Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan jangka menengah daerah, kebijakan belanja daerah ke depan selain untuk pemenuhan layanan dasar masyarakat, kebijakan diarahkan juga untuk mendorong produktivitas ekonomi melalui peningkatan kualitas SDM dan kapabilitas tenaga kerja, peningkatan produksi dan produktivitas potensi unggulan daerah, peningkatan hilirisasi berbasis teknologi dan inovatif, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan kewirausahaan, serta reformasi tata kelola dan kebijakan.

Kebijakan Belanja daerah Kabupaten Flores Timur disusun sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Belanja daerah sendiri diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pemenuhan layanan dasar masyarakat dan untuk mewujudkan tujuan pembangunan jangka menengah daerah. Gambaran kebijakan belanja tersebut sebagai berikut:

1. Memenuhi pelaksanaan program prioritas daerah yang dijarah melalui aspirasi masyarakat dalam Musrenbang sesuai dengan urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan;

2. Mengutamakan pemenuhan belanja untuk urusan wajib terkait pelayanan dasar sesuai standar pelayanan minimal;
3. Mengedepankan program-program yang menunjang penguatan daya saing ekonomi, penanggulangan kemiskinan, penanggulangan stunting, tata kelola pemerintahan, kesenjangan wilayah, kualitas hidup dan daya saing SDM, ketahanan pangan dan energi, serta pengelolaan sumber daya lingkungan dan penanggulangan bencana.
4. Memenuhi alokasi persentase belanja sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan diantaranya untuk fungsi Pendidikan dan infrastruktur.

C. Pembiayaan

Proyeksi pembiayaan daerah mengacu pada rencana keuangan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk menutup defisit anggaran atau memanfaatkan surplus anggaran, serta untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah. Proyeksi pembiayaan Kabupaten Flores Timur selama periode tahun 2026-2030 diarahkan khusus untuk penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah yang juga merupakan salah satu strategi untuk peningkatan produktivitas ekonomi daerah, sebagaimana terlihat pada tabel 2.96 berikut.

Tabel 2.96 Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Flores Timur, Tahun 2026-2030

KO- DE	URAIAN	BASELINE TAHUN 2024 (Audited)	PROYEKSI TAHUN				
			2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	5	6	7	8	9
6	PEMBIAYAAN DAERAH	89.730.117.486,59	(6.400.000.000)	(7.400.000.000)	(7.900.000.000)	(8.400.000.000)	(8.900.000.000)
6,1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	91.230.117.486,59	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	91.222.120.486,59	-	-	-	-	-
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	7.997.000,00	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.500.000.000,00	6.500.000.000	7.500.000.000	8.000.000.000	8.500.000.000	9.000.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1.500.000.000,00	6.500.000.000	7.500.000.000	8.000.000.000	8.500.000.000	9.000.000.000
	Pembiayaan Netto	89.730.117.486,59	(6.400.000.000)	(7.400.000.000)	(7.900.000.000)	(8.400.000.000)	(8.900.000.000)
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	73.588.243.153,69	-	-	-	-	-

Sumber: BKAD Kab. Flores Timur, Tahun 2025 (hasil analisis)

Pembiayaan daerah mencakup seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dan pada hakekatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Kebijakan yang disepakati dalam pos pembiayaan berfungsi sebagai penunjang

terhadap pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan yang ingin dicapai. Kebijakan pembiayaan terdiri dari penerimaan dan pengeluaran yang dirinci sebagai berikut:

1. Penerimaan pembiayaan tidak hanya fokus berasal dari Silpa dan pengembalian investasi non permanen namun diupayakan melalui sumber-sumber penerimaan seperti:
 - Revitalisasi dan restrukturisasi BUMD dan BLUD; dan
 - Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
2. Proyeksi pengeluaran pembiayaan daerah dikembangkan secara selektif, efektif dan berimbang antara kebutuhan pembiayaan pembangunan dan investasi daerah.

2.3 Permasalahan dan Isu Strategis

2.3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan yang menjadi fokus penyelesaian dalam kebijakan pembangunan RPJMD dirumuskan berdasarkan kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, kondisi faktual daerah, yang diklasifikasi dalam empat aspek sebagai berikut.

A. Aspek Geografi dan Demografi

Hasil kajian dari aspek geografi dan demografi, dirumuskan beberapa permasalahan pokok sebagai dampak dari posisi geografis dan karakteristik demografi Kabupaten Flores Timur yakni: Dari aspek geografi, Kabupaten Flores Timur rawan terhadap bencana alam dan perubahan iklim, minimnya ketersediaan air baku, menurunnya kualitas lingkungan hidup, serta meningkatnya emisi gas rumah kaca. Selain itu, sebagai daerah kepulauan, perubahan moda transportasi serta rendahnya konektivitas antar wilayah berdampak pada rendahnya tingkat mobilitas dan aksesibilitas masyarakat.

Dari aspek demografi, tingkat pertumbuhan penduduk dan penyebaran penduduk dengan tingkat kepadatan yang tidak merata berdampak pada belum meratanya penyediaan sarana dan prasarana sosial, minimnya kesempatan kerja, kesenjangan pembangunan antar wilayah, munculnya kawasan-kawasan kumuh dan rumah tidak layak huni dan meningkatnya potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

B. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Kajian terhadap aspek kesejahteraan masyarakat, khususnya kesejahteraan ekonomi dan sosial budaya, terdapat beberapa permasalahan pokok sebagai berikut:

☒ Kesejahteraan Ekonomi

Tingkat kesejahteraan ekonomi pada tingkat masyarakat relatif rendah dan cenderung merata pada setiap lapisan masyarakat. Hal ini diindikasikan dengan rasio gini yang rendah (ketimpangan yang rendah) tetapi terjadi dalam kondisi persentase penduduk miskin yang relatif tinggi, rendahnya pendapatan (PDRB) per kapita dan nilai tukar petani yang rendah.

☒ Kesejahteraan Sosial Budaya

Tingkat kesejahteraan masyarakat relatif rendah, diindikasikan dari tingkat kesehatan dan kualitas keluarga yang rendah, kesenjangan pembangunan gender, perlindungan anak dan pengembangan pemuda yang belum optimal, karena belum didukung dengan kualitas ketahanan sosial budaya yang kuat serta belum optimalnya pengembangan kebudayaan sebagai kerangka dasar pengembangan cara berpikir, sikap dan perilaku Masyarakat.

C. Aspek Daya Saing

Daya saing daerah yang merefleksikan kemampuan daerah dalam bersaing, baik di level nasional maupun global diukur dengan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD). IDSD daerah Kabupaten Flores Timur pada tahun 2023 sebesar 3,42 lebih tinggi 0,01 poin dari capaian Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 3,41 dan lebih rendah 0,01 poin dari capaian nasional sebesar 3,43. Beberapa permasalahan utama dari aspek daya saing tersebut disebabkan oleh rendahnya beberapa komponen sebagai berikut:

1) Stabilitas Ekonomi Makro

- ☒ Kapasitas fiskal dan pertumbuhan ekonomi yang rendah;
- ☒ Tingkat pengangguran terbuka yang masih tinggi;
- ☒ Penciptaan nilai tambah dan akumulasi capital yang masih rendah; dan
- ☒ Tingkat konsumsi dan biaya hidup yang tinggi, serta kinerja sektoral perekonomian yang masih rendah.

2) Ukuran Pasar

- ☒ Nilai PDRB harga konstan yang belum meningkat signifikan; dan
- ☒ belum optimalnya transfer pengetahuan dan teknologi melalui muatan yang terkandung pada produk import.

3) Kapasitas Sumber Daya Manusia

- ☒ Rendahnya kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil.

4) Adopsi Teknologi Informasi dan Komunikasi

- ☒ Keunggulan kompetitif belum dibangun melalui aplikasi teknologi secara efisien dan inovatif; dan
- ☒ Konektivitas internet yang belum optimal dalam proses digitalisasi bisnis dan komunikasi dalam perekonomian.

5) Sistem Keuangan

- ☒ Belum optimalnya fasilitasi aktivitas perekonomian daerah termasuk akses pendanaan berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan lembaga ventura lainnya.

6) Kapabilitas Inovasi

- ☒ Terbatasnya investasi pada penelitian dasar dan aktivitas yang inovatif yang menciptakan pengetahuan baru;
- ☒ Belum optimalnya pemanfaatan komoditas unggulan di daerah yang berdaya saing hingga produk-produk turunannya (hilirisasi).

D. Aspek Pelayanan Umum

Pada aspek pelayanan umum terdapat beberapa permasalahan pembangunan yakni sebagai berikut:

- 1) Rendahnya akses masyarakat terhadap layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas;
- 2) Masih rendahnya perlindungan sosial terhadap penyandang masalah sosial;
- 3) Rendahnya resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim;
- 4) Rendahnya layanan infrastruktur dasar masyarakat;
- 5) Masih terdapat ancaman konflik sosial yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum masyarakat;
- 6) Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintah daerah serta masih terbatasnya kapasitas keuangan daerah;
- 7) Belum optimalnya pengembang kreativitas dan inovasi daerah dalam pelayanan publik;
- 8) Masih rendahnya penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan;
- 9) Belum optimalnya aspek keberlanjutan dalam penyelenggaraan pembangunan; dan
- 10) Belum efektifnya lembaga penyelenggara negara, lembaga politik dan lembaga masyarakat dalam menjamin kepastian, penegakan dan perlindungan hukum serta keamanan dan ketertiban masyarakat.

E. Permasalahan Utama Daerah

Identifikasi permasalahan pembangunan didasarkan pada evaluasi capaian kinerja RPJMD/RPD sebelumnya yang meliputi evaluasi capaian aspek pembangunana sebagaimana diuraikan di atas, evaluasi terhadap capaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah dan evaluasi capaian kinerja bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain itu, identifikasi permasalahan daerah mempertimbangkan beberapa kriteria, yaitu: (1) cakupan masalah yang luas, sangat mendesak dan berpengaruh signifikan; (2) permasalahan cenderung meningkat atau membesar di masa yang akan datang dan berdampak negatif; dan (3) memerlukan upaya penanganan yang konsisten dari waktu ke waktu serta sinergitas berbagai pihak. Adapun hasil identifikasi permasalahan pembangunan daerah secara spesifik diuraikan sebagai berikut:

1. Masih Rendahnya Kontribusi Sektor-Sektor Ekonomi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Flores Timur mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi yang lamban sejak tahun 2019–2023 sebesar 2,1%.

Capaian laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Flores Timur tersebut memberikan hasil jauh lebih rendah dari target yang ditetapkan dalam indikator

kinerja pembangunan daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Flores Timur tahun 2019–2023. Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi ditargetkan 5,09%, namun, hasil akhir yang dicapai Kabupaten Flores Timur pada tahun 2020 mengalami kontraksi hingga 0,14% dan berlangsung sampai tahun 2023. Upaya dan komitmen perbaikan laju pertumbuhan ekonomi menjadi syarat wajib yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur untuk menjaga agar laju pertumbuhan ekonomi tidak terus mengalami defisit, meskipun saat ini kondisi perekonomian dunia masih belum stabil. Laju pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu aspek penting yang berkontribusi terhadap pilar 8 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yaitu Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua. Oleh sebab itu, selain komitmen kuat perlu dibarengi berbagai program-program inovasi di bidang perekonomian, paling tidak pada jangka pendek dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi agar perlahan mengalami peningkatan.

2. Daya saing Pendidikan dan Kesehatan masih rendah

Sektor Pendidikan dan Kesehatan yang ada saat ini akan sangat berpengaruh pada perkembangan Kabupaten Flores Timur di masa depan, karena berperan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dari waktu ke waktu senantiasa menjadi prioritas untuk dilakukan perbaikan. Guna mengetahui seperti apa kualitas Sumber Daya Manusia yang ada di Kabupaten Flores Timur indikator yang dapat digunakan yakni Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan salah satu pendekatan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan manusia untuk meningkatkan kualitas penduduk secara fisik, mental, dan spiritual.

Kondisi IPM Kabupaten Flores Timur menunjukkan nilai yang kurang baik dibandingkan dengan kondisi IPM Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Nasional, dan menduduki urutan ke 12 dari 22 kabupaten/kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kondisi yang demikian menjadikan permasalahan terkait masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia di Kabupaten Flores Timur harus segera diatasi. Berbagai upaya perbaikan dari Pemerintah Daerah untuk dapat meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia mutlak diperlukan.

3. Belum Optimalnya Aksesibilitas Infrastruktur, baik Infrastruktur Dasar maupun Infrastruktur Konektivitas.

Infrastruktur adalah bidang yang tidak dapat dilepaskan dari pembangunan berkelanjutan. Hal ini disebabkan karena penyediaan infrastruktur berkaitan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan kesembilan yang menyatakan, “Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan serta Mendorong Inovasi” dan berkaitan dengan

tujuan pembangunan berkelanjutan kesebelas yang menyatakan “Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh, dan Berkelanjutan”.

Pembangunan infrastruktur akan memberikan dampak pada kondisi sosial daerah. Beberapa komponen yang termasuk dalam infrastruktur meliputi infrastruktur listrik, infrastruktur telekomunikasi, infrastruktur jalan, infrastruktur air bersih, sanitasi, persampahan dan infrastruktur sistem drainase. Keberadaan infrastruktur-infrastruktur tersebut dapat membuka serta meningkatkan akses yang diperlukan masyarakat terhadap sumber daya yang tersedia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Pembangunan sumber daya air di Kabupaten Flores Timur mengalami peningkatan dalam upaya memenuhi kebutuhan air baku untuk minum, irigasi. Meskipun kinerja sudah baik, tetapi cakupan ketersediaan air baku masih sangat kurang sebagai prasarana penunjang pembangunan pertanian, dan konsumsi atau kebutuhan sehari-hari.

Permasalahan infrastruktur dasar lainnya adalah persampahan, hal ini perlu menjadi perhatian khusus. Hal ini didasarkan atas data yang mengungkapkan bahwa timbulan sampah di Kabupaten Flores Timur dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, penyumbang timbulan sampah terbesar berada di kawasan perkotaan. Berkaitan dengan jaringan jalan, terdapat 42 % jalan status kabupaten dalam kondisi rusak berat. Selain itu terbatasnya sarana prasarana transportasi perhubungan laut, khususnya kapal pengangkut barang antar pulau. Berbagai permasalahan ini harus menjadi prioritas bagi Pemerintah Kabupaten Flores Timur untuk segera ditangani.

4. Angka Kemiskinan yang masih Tinggi dan Cakupan Perlindungan Sosial bagi Kelompok Rentan Masih Rendah

Kondisi angka kemiskinan dari tahun 2019–2023 mengalami banyak perubahan penurunan, namun tidak signifikan. Secara lebih rinci, data kemiskinan dapat dibedakan menjadi dua jenis data, yakni data kemiskinan makro dan data kemiskinan mikro. Data makro dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) melalui perhitungan jumlah penduduk miskin. Sedangkan data mikro didapatkan melalui Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia yaitu data P3KE. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Flores Timur dapat dilihat menggunakan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Di samping kedua indeks yang digunakan, garis kemiskinan menjadi salah satu indikator dalam menilai tingkat kemiskinan suatu wilayah. Garis kemiskinan

adalah tingkat minimum pendapatan yang dianggap perlu dipenuhi untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi di suatu wilayah. BPS mendefinisikan garis kemiskinan sebagai representasi jumlah upah minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2.100 kkal/kapita/hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Kemudian penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan dalam penduduk miskin. Nilai garis kemiskinan Kabupaten Flores Timur adalah Rp 405.486/kapita/bulan.

Sementara di bidang ketenagakerjaan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) masih menjadi fokus yang perlu diperhatikan. Selain kemiskinan Perlindungan sosial juga perlu mendapat perhatian serius.

5. Belum Optimalnya Pengelolaan Kualitas Lingkungan Hidup, dan Ketahanan Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Indeks yang digunakan dalam pengukuran kualitas lingkungan hidup adalah tutupan lahan. Tutupan lahan merupakan kenampakan material fisik permukaan bumi. Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian mengenai tutupan lahan di Kabupaten Flores Timur antara lain lahan kritis akibat bencana alam dan belum optimalnya penambahan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Faktor lain yang berkaitan dengan Lingkungan hidup adalah ketahanan terhadap bencana alam. Kabupaten Flores Timur merupakan Kabupaten yang rentan terhadap bencana, baik bencana alam maupun perubahan iklim, sehingga perlu mendapat perhatian khusus.

6. Tata Kelola Pemerintahan yang belum berkualitas

Tata Kelola Pemerintahan memegang peranan penting dalam menentukan performa dari berjalannya pemerintahan daerah. Permasalahan dalam tata kelola pemerintahan dapat berdampak luas mengingat cakupan pemerintahan daerah yang juga luas. Demikian pentingnya hal ini sehingga mulai dari tingkat nasional sudah mengamanatkan untuk melakukan perbaikan atas tata kelola pemerintahan di daerah. Amanat Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi tahun 2010–2025 dijadikan pedoman dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat, serta peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi baik pusat dan daerah. Hal tersebut kemudian disusul dengan berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), maka peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah daerah diarahkan pada peningkatan kapasitas dan kapabilitas, profesionalisme, responsibilitas, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik.

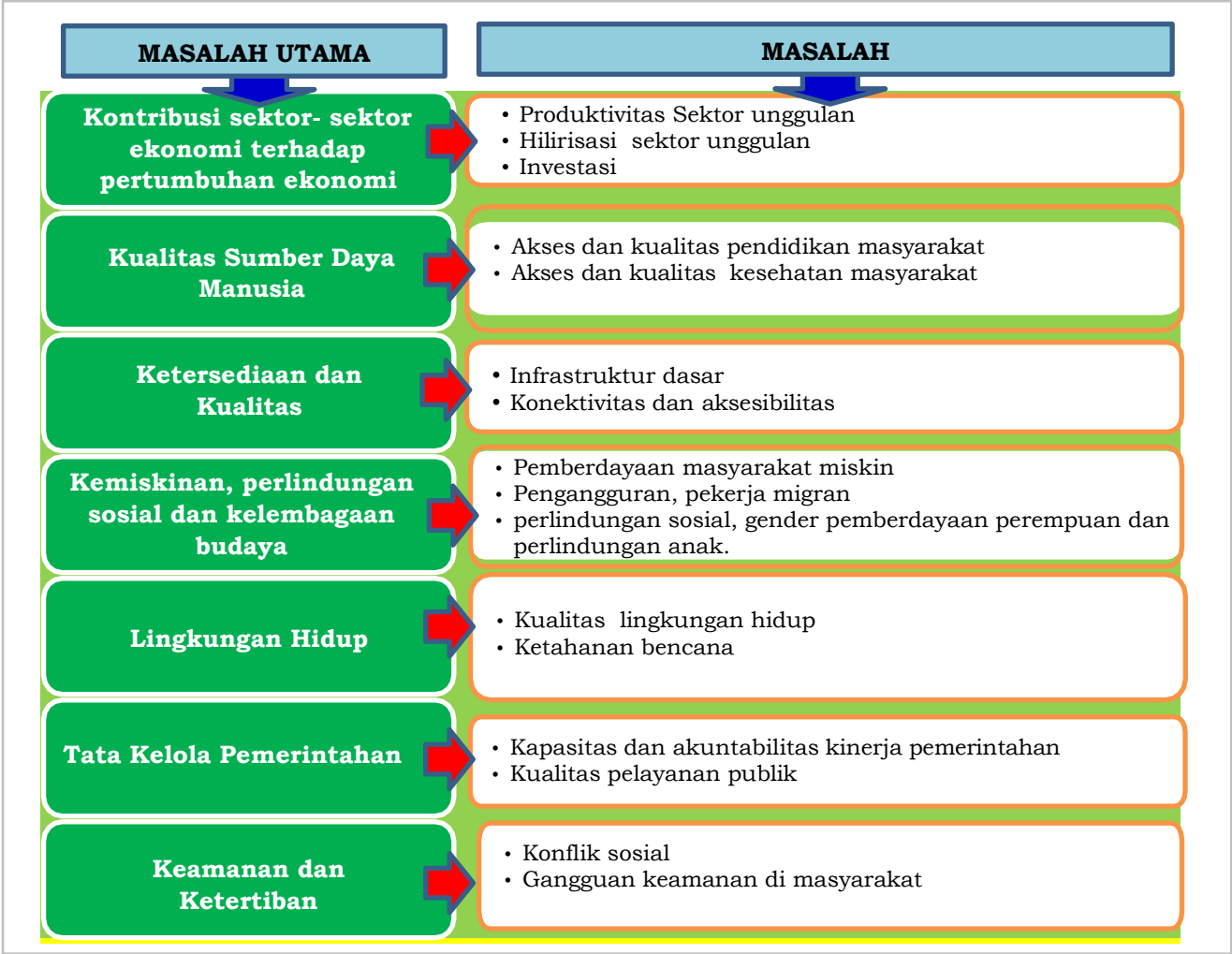
Reformasi birokrasi dimaknai sebagai usaha melakukan perbaikan kinerja birokrasi dengan meningkatkan kualitas regulasi, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas

pelayanan kepada masyarakat yang akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Indeks Reformasi Birokrasi menjadi tolak ukur dalam melaksanakan reformasi birokrasi.

7. Kerentanan Keamanan, ketertiban dan Perlindungan Masyarakat.

Masalah keamanan dan ketertiban masyarakat sangat penting, dan menjadi tugas bersama. Dalam situasi yang penuh tantangan seperti saat ini, masalah keamanan dan ketertiban bukanlah sesuatu yang bisa diabaikan. Mulai dari tindakan kriminalitas hingga gangguan ketertiban sosial, semuanya bisa mengancam kualitas hidup kita sehari-hari. Oleh karena itu, kita perlu menjadi bagian dari solusi dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

Berdasarkan uraian permasalahan pembangunan daerah di atas, secara ringkas dapat digambarkan rumusan permasalahan pembangunan Kabupaten Flores Timur yang menjadi perhatian dalam perumusan kebijakan pembangunan jangka menengah daerah ke depan.



Gambar 2.30 Rumusan Permasalahan Pembangunan Daerah Kab. Flores Timur

2.3.2 Isu Strategis

Dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, perlu memperhatikan berbagai isu strategis, baik di tingkat global, nasional, regional, maupun lokal. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau

dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Isu global dalam upaya meningkatkan kehidupan yang lebih baik dari masyarakat adalah *Sustainable Development Goals* (SDGs)/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Isu-isu strategis dari TPB tersebut adalah:

- 1) Kemiskinan;
- 2) Pangan dan Gizi;
- 3) Kesehatan;
- 4) Pendidikan;
- 5) Gender;
- 6) Air bersih dan sanitasi;
- 7) Energi;
- 8) Pekerjaan layak dan Pertumbuhan ekonomi;
- 9) Industri, inovasi dan infrastruktur;
- 10) Kesenjangan;
- 11) Kota dan permukiman;
- 12) Produksi dan konsumsi berkelanjutan;
- 13) Perubahan iklim;
- 14) Ekosistem lautan;
- 15) Ekosistem daratan;
- 16) Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh; dan
- 17) Kemitraan untuk mencapai tujuan.

Sejalan dengan isu global tersebut, di tingkat nasional telah dirumuskan beberapa isu strategis yang menjadi fokus perhatian dalam periode pembangunan jangka menengah nasional yakni:

- 1) Kemiskinan;
- 2) Kualitas SDM rendah;
- 3) Produktivitas rendah;
- 4) IPTEKIN dan riset lemah;
- 5) Deindustrialisasi dini dan produktivitas sektor pertanian yang masih rendah;
- 6) Pariwisata di bawah potensinya;
- 7) Kontribusi UKMK dan Koperasi kecil;
- 8) Infrastruktur dan literasi digital rendah;
- 9) Ekonomi laut belum optimal;
- 10) Pembangunan belum berkelanjutan; dan
- 11) *Hyper regulation* dan kualitas regulasi rendah.

Selain isu tersebut, untuk pembangunan wilayah Bali-Nusa Tenggara khususnya Kabupaten Flores Timur dirumuskan kebijakan jangka menengah yang dipandang sebagai isu strategis yang harus mendapat perhatian yakni:

- 1) Pengembangan kualitas dan daya saing sumber daya manusia lokal;
- 2) Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru;
- 3) Sentra-sentra produksi komoditas unggulan di kawasan perdesaan serta sentra pengolahan dan sentra pemasaran di kawasan perkotaan;
- 4) Optimalisasi kawasan eksisting dengan fokus pada peningkatan penyerapan tenaga kerja lokal;
- 5) Peningkatan infrastruktur dasar dan konektivitas intra dan antar wilayah Bali-Nusa Tenggara;
- 6) Peningkatan ketahanan sosial, budaya dan ekologi;
- 7) Pengembangan kawasan industri dan sentra rumput laut;
- 8) Pengembangan kawasan industri dan sentra perkebunan jambu mete;
- 9) Pembangunan ketenagalistrikan dengan mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan, terutama energi arus laut; dan
- 10) Pengembangan pelayanan fasilitas kesehatan yang terakreditasi, pengembangan akses internet berkecepatan tinggi dan peningkatan akses rumah layak huni.

Di tingkat regional, isu strategis yang menjadi perhatian dalam pembangunan jangka menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah:

- 1) Peningkatan mutu dan akses pendidikan;
- 2) Peningkatan mutu pelayanan kesehatan;
- 3) Peningkatan perlindungan sosial yang adaptif;
- 4) Peningkatan kemampuan daya saing daerah;
- 5) Peningkatan produksi dan produktivitas sektor primer untuk mendukung hilirisasi; dan
- 6) Peningkatan efektifitas, akuntabilitas, dan profesionalisme pengelolaan birokrasi melalui penguatan terhadap kemampuan fiskal daerah, kualitas ASN, regulasi yang efektif, pelayanan publik, manajemen talenta, dan berkelanjutan pembangunan.

Sejalan dengan isu global, nasional dan Provinsi NTT, serta memperhatikan permasalahan utama yang harus diselesaikan selama kurun waktu lima tahun maka dirumuskan isu strategis Kabupaten Flores Timur sebagai berikut:

- 1) Penguatan Inovasi dalam meningkatkan produktivitas sektor unggulan dan daya saing nilai tambah produksi pada sektor perekonomian;
- 2) Daya saing pendidikan baik dari aspek kualitas/mutu pendidikan, sistem pendidikan, tatakelola pendidikan, tatakelola sistem pendidikan, relevansi pendidikan dengan dunia kerja, dan aksesibilitas pendidikan;

Secara umum permasalahan dan isu tersebut teridentifikasi menjadi delapan kategori berdasarkan kedekatan karakteristik permasalahan dan dampak yang ditimbulkan. Kedelapan kategori tersebut adalah sosial, ekonomi, tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, ketentraman dan ketertiban, sosial budaya masyarakat, kesenjangan antarwilayah, infrastruktur dan lingkungan hidup, serta keberlanjutan pembangunan. Keterkaitan rumusan masalah dan isu strategis daerah dengan isu global, isu nasional dan isu Provinsi dapat dilihat pada Tabel 2.97 berikut

Tabel 2.97 Keterkaitan Masalah Daerah dengan SDGs, Isu Strategis Nasional, Isu Provinsi NTT, Isu Strategis KLHS dan Isu Strategis Kabupaten Flores Timur

Masalah Daerah	SDGs	Isu Strategis Nasional	Isu Provinsi Nusa Tenggara Timur	Isu Strategis KLHS	Isu Strategis Kabupaten Flores Timur
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Masih rendahnya kontribusi sektor- sektor ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua	Produktivitas rendah	Peningkatan daya saing daerah	Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi daerah	Penguatan Inovasi dalam meningkatkan produktivitas sektor unggulan dan daya saing nilai tambah produksi pada sektor perekonomian;
		Deindustrialisasi dini dan produktivitas sektor pertanian yang masih rendah	Peningkatan produksi dan produktivitas sektor primer untuk hilirisasi		
	Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi	Pariwisata di bawah potensinya			
	Melestarikan dan memanfaatkan secara	Kontribusi UKMK dan Koperasi kecil			

Masalah Daerah	SDGs	Isu Strategis Nasional	Isu Provinsi Nusa Tenggara Timur	Isu Strategis KLHS	Isu Strategis Kabupaten Flores Timur
	berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan				
	Menjamin pola produksi dan konsumsi yang Berkelanjutan				
Rendahnya daya saing Pendidikan	Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua	Kualitas SDM rendah	Peningkatan mutu dan akses pendidikan	Masih rendahnya Kualitas SDM	Daya saing pendidikan baik dari aspek kualitas/mutu pendidikan, sistem pendidikan, tatakelola pendidikan, tatakelola sistem pendidikan, relevansi pendidikan dengan dunia kerja, dan aksesibilitas pendidikan;
Rendahnya daya saing Kesehatan	Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia	Kualitas SDM rendah	Peningkatan mutu pelayanan kesehatan	Belum optimalnya tingkat layanan kesehatan	Daya saing kesehatan baik dari aspek mutu layanan, tata kelola faskes, tata kelola sistem kesehatan, aksesibilitas layanan, penanganan stunting, dan promosi preventif;
Belum optimalnya aksesibilitas Infrastruktur	Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua	Infrastruktur dan Literasi Digital rendah	Peningkatan kemampuan daya saing daerah	Masih belum mantabnya Infrastruktur Dasar	Penyediaan infrastruktur dasar yang merata dan berkeadilan serta konektivitas antar wilayah;
	Menjamin akses energi yang terjangkau, handal, berkelanjutan, dan modern untuk semua			Masih terdapatnya Kesenjangan Wilayah	
	Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi				

Masalah Daerah	SDGs	Isu Strategis Nasional	Isu Provinsi Nusa Tenggara Timur	Isu Strategis KLHS	Isu Strategis Kabupaten Flores Timur
	Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara				
	Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan				
Belum optimalnya penanganan kemiskinan dan perlindungan sosial	Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun	Kemiskinan	Peningkatan perlindungan sosial yang adaptif	Masih tingginya angka Kemiskinan	Angka Kemiskinan yang masih tinggi, kualitas layanan kesejahteraan sosial masyarakat, pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ;
Belum optimalnya pemenuhan sarana prasarana dan utilitas perumahan serta masih adanya kawasan permukiman kumuh	Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan			Masih terjadinya pengangguran	
Belum optimalnya penanganan pengangguran					
Belum optimalnya kualitas lingkungan hidup	Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan	Ekonomi Laut belum optimal	Peningkatan kemampuan daya saing daerah	Masih terjadinya risiko bencana	Kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana;
	Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya	Pembangunan belum berkelanjutan		Masih terjadinya Degradasi dan Pencemaran Lingkungan	
	Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati				

Masalah Daerah	SDGs	Isu Strategis Nasional	Isu Provinsi Nusa Tenggara Timur	Isu Strategis KLHS	Isu Strategis Kabupaten Flores Timur
	Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan				
Belum Optimalnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten	Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan	Hyper regulation dan kualitas regulasi rendah	Peningkatan efektifitas, akuntabilitas, dan profesionalisme pengelolaan birokrasi	Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik;	Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik;
Akuntabilitas Keuangan masih perlu ditingkatkan					
Belum optimalnya implementasi manajemen ASN					
Belum optimalnya Implementasi SPBE					
Belum optimalnya kualitas Pelayanan Publik	Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara				
Masih tingginya konflik sosial antar masyarakat dan gangguan keamanan di tengah masyarakat					Ancaman gangguan sosial yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum masyarakat dan kebebasan dalam berpendapat.

BAB III

VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH





VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

3.1.1 Visi dan Misi

Visi RPJMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2025-2029 merupakan gambaran keadaan/kondisi daerah Kabupaten Flores Timur yang diinginkan terwujud pada tahun 2029 sebagai hasil pembangunan selama 5 (lima) tahun. Visi ini merupakan penjabaran dari Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dengan masa jabatan Tahun 2025-2030, sebagai upaya perkuatan fondasi menuju cita-cita jangka panjang daerah. Kondisi daerah yang ingin diwujudkan pada tahun 2029 adalah:

**“Flores Timur Produktif dan Inovatif,
menuju Lewotana Flores Timur yang Maju, Berdaya dan Berkelanjutan”**

Rumusan Visi ini dilandaskan pada analisa terhadap kondisi faktual Daerah, proyeksi tantangan yang dihadapi Daerah, evaluasi kinerja pembangunan Flores Timur, serta perspektif keilmuan yang digunakan dalam melihat berbagai kondisi faktual potensi dan persoalan, kekuatan dan kelemahan (baik yang bersifat fisik maupun kelembagaan), serta peluang dan ancaman yang dihadapi Kabupaten Flores Timur yang mau bereksistensi secara meyakinkan dan bermartabat di masa depan.

Pertama, sebagai masyarakat agraris yang mempunyai ketergantungan pada alam dan iklim yang cukup lama, dengan keterisolasian dari gerak cepat perkembangan teknologi, produktivitas merupakan persoalan yang cepat dapat dilihat. Waktu kerja pertanian tanaman pangan yang hanya terjadi pada musim hujan yang singkat (3 bulan), yang selanjutnya diisi dengan urusan pertanian kebun yang tidak terlalu intensif, waktu-waktu kosong yang panjang sepanjang hari dan sepanjang musim di luar musim penghujan, dan urusan-urusan adat kematian dan perkawinan yang menyita waktu produktif sangat banyak, mengkonsolidasi budaya kurang produktif untuk waktu yang lama. Dengan dukungan terbatas dari pihak pemerintah untuk transformasi, baik pada aras gaya hidup maupun pada aras teknis kebijakan pembangunan, perubahan sikap dan pola hidup berlangsung sangat evolusioner. Rangkaian pola hidup non produktif dan lemahnya daya transformasi yang dimotori oleh pemerintah ini, yang terjadi di tengah perubahan sosial yang berlangsung cepat karena perkembangan teknologi informasi dan kehadiran generasi baru dengan karakteristik bentukan zaman yang berbeda, jika tidak ditangani serius akan membawa Daerah ini pada lingkaran produktivitas rendah, yang sejauh ini terkonfirmasi dari *time series* data pertumbuhan ekonomi, data pertumbuhan pendapatan per kapita, dan angka kemiskinan, dengan implikasi lebih lanjut pada capaian rendah di bidang pendidikan dan kesehatan.

Dengan angka pertumbuhan penduduk relatif tinggi, yang berimplikasi pada makin rendahnya angka penguasaan luas lahan (perbandingan jumlah penduduk dan luas lahan produktif), di tengah pertumbuhan sektor-sektor ekonomi modern yang relatif stagnan di daerah, rendahnya daya cipta lapangan kerja sektor-sektor ekonomi modern perkotaan secara nasional, tingkat pengangguran tinggi yang berlangsung lama secara nasional (termasuk pengangguran sarjana), maka sudah selayaknya Kabupaten Flores Timur menempatkan produktivitas sebagai tema pembangunan dan fokus kebijakan utama, yang diusung untuk lima tahun ke depan.

Persoalan produktivitas tidak hanya teridentifikasi sebagai persoalan di bidang ekonomi. Tingkat kemajuan rendah di bidang-bidang pembangunan lain juga dapat dicermati akarnya pada persoalan produktivitas. Capaian rendah di bidang pendidikan, yang terindikasi pada angka partisipasi sekolah, kualitas pendidikan, kualitas tata kelola sekolah, keluhan terkait pelayanan terhadap guru dan kualitas tata kelola kebijakan pendidikan pada umumnya, dan ketercukupan sarana-prasarana; capaian rendah di bidang kesehatan, yang terindikasi pada angka kematian ibu dan anak, angka stunting, keluhan pelayanan kesehatan, kualitas sarana dan prasarana kesehatan, kualitas tata kelola fasilitas kesehatan, dan kualitas tata kelola kebijakan kesehatan; capaian rendah di bidang infrastruktur dasar, yang terindikasi dari panjang jalan rusak dan rusak berat, kualitas jalan, ketercukupan jembatan dan kualitas jembatan, kualitas pelabuhan; capaian rendah di bidang sosial, yang terindikasi dari jumlah penduduk kategori disabilitas yang terlayani, dan keluhan pelayanan urusan bantuan sosial masyarakat miskin; capaian rendah bidang pendapatan daerah, yang terindikasi dari rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD); dan bidang-bidang lain, semua ini menunjukkan bahwa persoalan produktivitas relevan juga untuk bidang-bidang pembangunan lain dan karena itu patut menjadi fokus pembangunan lima tahun ke depan.

Jika dikaji lebih jauh, persoalan produktivitas ini berlangsung di setidaknya 3 aras: (1) etos produktivitas, yang menyangkut jiwa, orientasi, semangat, dan mindset berbagai pelaku dan pemangku kebijakan; (2) pilihan-pilihan teknologis dan metode dalam menjalankan suatu usaha, urusan, atau tugas dan fungsi; dan (3) ekosistem kebijakan dan infrastruktur yang berpengaruh pada total produktivitas sektor, bidang, dan daerah secara umum. Identifikasi persoalan ini relevan dengan pendekatan produktivitas yang umum diajukan oleh para ahli dan lembaga-lembaga produktivitas.

Sebagaimana *Asian Productivity Organization*, produktivitas adalah pertama-tama tentang sikap mental dan etos kerja di kalangan pekerja dan manajemen, untuk menghasilkan lebih banyak, memproduksi lebih banyak; sikap selalu berusaha melakukan perbaikan mutu, peningkatan efisiensi, efektivitas, untuk menciptakan nilai tambah secara berkelanjutan. Produktivitas, dengan demikian, harus dapat diukur dari peningkatan nilai hasil perbandingan antara keluaran (barang dan jasa) dan masukan (tenaga kerja, bahan, dan uang). Tidak ada klaim tentang peningkatan produktivitas tanpa bukti peningkatan *output*, baik barang maupun jasa.

Lebih lanjut, produktivitas adalah tentang *Total Factor Productivity* yaitu sejumlah faktor yang harus dikombinasikan secara cerdas untuk menghasilkan *output* yang lebih banyak dari sumber daya yang sama. Faktor-faktor itu mencakup lingkungan makro ekonomi, infrastruktur, kebijakan, inovasi teknologis, metodis, dan manajerial berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, budaya kerja, dan etos kerja itu sendiri.

Bagi Daerah seperti Kabupaten Flores Timur, mengingat faktor lingkungan makro ekonomi cenderung jauh dari kendali tingkat daerah (kecuali inflasi yang bisa dikendalikan pada tingkat tertentu), faktor-faktor produktivitas seperti kebijakan, ilmu pengetahuan dan teknologi, infrastruktur, budaya kerja, dan etos kerja menjadi faktor-faktor yang harus dapat dikelola untuk produktivitas Daerah.

Kedua, inovasi adalah prasyarat utama peningkatan dan lompatan produktivitas. Tanpa ada pembaruan teknologis, metodis, dan manajerial; tanpa ada perubahan dan pembaharuan ekosistem kebijakan; dan tanpa ada langkah-langkah cerdas dan terbarukan dalam promosi etos produktivitas, niscaya peningkatan produktivitas tidak dapat terjadi secara signifikan.

Inovasi semula berarti penemuan teknologi baru (sepenuhnya baru), tetapi perkembangan penggunaannya telah menggeser makna awal ini menjadi penggunaan atau penerapan hal baru untuk lingkungan kerja tertentu untuk tujuan tertentu, entah hal baru tersebut merupakan hal yang belum ada sebelumnya maupun hal baru tersebut merupakan hal yang sudah digunakan di tempat lain, entah hal baru tersebut merupakan teknologi fisik baru atau hal baru tersebut merupakan metode baru dalam menjalankan tugas dan fungsi tertentu agar menjadi lebih efisien dan efektif dalam mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan.

Michael E. Porter adalah ahli yang pertama kali mengajukan konsep *innovation-driven economic development*. Ia membagi tahapan pembangunan ekonomi ke dalam 4 tahap, yakni: (1) *resources-driven economic development*; (2) *investment-driven economic development*; (3) *innovation-driven economic development*; dan (4) *wealth-driven economic development*. *Innovation-driven economic development* adalah kunci pertumbuhan ekonomi cepat, sedangkan *wealth-driven* adalah jalan menuju resesi.

Di bidang ekonomi, kemajuan dapat diukur dari produktivitas dan kandungan teknologi dalam kegiatan produksi di tingkat hulu maupun laju hilirisasi dan kandungan teknologi dalam produksi produk-produk hilir, dengan memperhatikan pohon industri yang menyajikan gambaran mengenai alternatif produk yang dapat dihasilkan dari komoditi tertentu, sehingga nilai tambah dapat dimaksimalkan dari sumber daya alam yang terbatas. Dengan demikian, maka Flores Timur Produktif dan Inovatif yang divisikan 5 tahun ke depan, sebagai landasan dasar menuju Lewotana Flores Timur yang Maju, Berdaya dan Berkelanjutan 20 tahun ke depan, dapat dikonsolidasi pengertiannya sebagai berikut:

- ☒ **Flores Timur Produktif**, merupakan gambaran Flores Timur dengan etos produktivitas tinggi, yang aktif mengejar capaian tinggi berbagai sektor dan bidang (terutama bidang ekonomi), melalui ramuan berbagai faktor produktivitas agar tercipta ekosistem yang kondusif bagi lompatan produktivitas berbagai sektor, bidang, wilayah, dan urusan, di desa dan di kota, dengan topangan inovasi teknologis, metodis, dan manajerial berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi; kecerdasan inovasi di tingkat kebijakan; dan kearifan lokal yang senantiasa menghidupkan etos kemajuan dan etika hidup terbaik.
- ☒ **Flores Timur Inovatif**, merupakan gambaran Flores Timur yang hidup dengan kegairahan inovasi di berbagai sektor dan bidang kehidupan, baik pada aras nilai dan sikap hidup, maupun pada aras teknis metodis dan manajerial serta ekosistem kebijakan, agar terjadi pembaruan-pembaruan signifikan bagi peningkatan produktivitas skala lompatan untuk kehidupan ekonomi yang lebih baik, peningkatan signifikan kualitas pelayanan-pelayanan dasar, dan kemajuan bidang-bidang kehidupan lain.
- ☒ **Menuju Lewotana Flores Timur yang Maju, Berdaya dan Berkelanjutan**, yang merupakan visi jangka panjang daerah (RPJPD Tahun 2025-2045), adalah gambaran hasil niscaya jika selama masa 5 (lima) tahun RPJMD terwujud fondasi produktivitas dan inovasi yang kuat, yang dikonsolidasi secara konsisten melalui berbagai langkah strategis yang terorganisir dan terkelola dengan baik.

Sebagaimana uraian sebelumnya, sebagai penjabaran dari RPJPD Tahun 2025-2029, rumusan visi RPJMD dilakukan selaras dengan visi RPJPD dan mendukung pencapaian Asta Cita RPJMN Tahun 2025-2029, yang tergambar dari target capaian sasaran utama visi RPJMD sebagai berikut:

Tabel 3.1 Sasaran Utama Visi RPJMD
Kab. Flores Timur Tahun 2025 dan Tahun 2029

No	Sasaran Utama	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target	
			2023/2024	2025	2029
1	Meningkatnya pendapatan per kapita Flores Timur sebagai kontribusi terhadap pendapatan per kapita nasional	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	2,69	3,80	5,00
		PDRB per kapita (Rp)	21.026.222	25.366.015	51.236.800
		Indeks Ekonomi Biru	-	68,5	94,8
		Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	0,95	0,96	1,24
2	Menurunnya angka kemiskinan Flores Timur dan ketimpangan berkurang	Tingkat Kemiskinan (%)	11,25	10,70	8,76
		Rasio Gini	0,287	0,279	0,273
3	Meningkatnya keamanan, ketertiban dan ketentraman Flores Timur	Indeks Ketertiban dan Ketentraman Umum	50,20	50,20	60,15
4	Meningkatnya daya saing sumber daya manusia Flores Timur	Indeks Pembangunan Manusia	66,29	66,80	68,64
5	Meningkatnya pembangunan Flores Timur yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72,58	78,22	78,90

Untuk mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah dengan sasaran utama sebagaimana terlihat pada Tabel 3.1 di atas, diperlukan upaya-upaya besar yang akan dilaksanakan oleh daerah dalam rumusan misi. Misi RPJMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2025-2029 yakni:

Lompatan Produktivitas Semua Sektor Kehidupan dengan mengandalkan Ilmu dan Teknologi Terbaru, Kecerdasan Inovatif, Tata Kelola Transformatif dan Kearifan Lamaholot Paling Jernih.

Satu rumusan misi RPJMD tersebut menggambarkan satu tekad bersama untuk melakukan "lompatan" (peningkatan) produktivitas, bergerak lebih cepat, dan maju untuk jangkauan capaian yang lebih jauh di berbagai sektor kehidupan masyarakat (ekonomi, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial, lingkungan hidup, infrastruktur, ketertiban sosial, dan kehidupan sosial politik) serta menjawab tantangan masa depan, dengan mengandalkan:

- 🔧 Ilmu dan teknologi terbaru, dimaksudkan agar pembangunan Flores Timur lima tahun ke depan dilaksanakan berdasarkan kajian ilmiah dan desain pembangunan berbasis teknologi terbaru yang berkelanjutan.
- 💡 Kecerdasan inovatif, dimaksudkan agar pelaksanaan pembangunan Flores Timur lima tahun ke depan didorong oleh sumber daya manusia berkualitas yang menempatkan ide dan gagasan baru dalam berbagai aspek kehidupan.
- ⚙️ Tata kelola transformatif, dimaksudkan agar pembangunan Flores Timur lima tahun ke depan tidak dilakukan dengan cara yang biasa-biasa saja, namun dilakukan dengan cara berpikir, proses dan sistem baru agar menghasilkan tata kerja dan sistem yang adaptif, kolaboratif, partisipatif, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
- ✨ Kearifan Lamaholot paling jernih, dimaksudkan agar pembangunan Flores Timur lima tahun ke depan dilakukan dengan optimisme tinggi dengan mengandalkan nilai-nilai terbaik Lamaholot *Gelekat* (pengabdian tulus tanpa pamrih), *Gemohing* (gotong royong), dan *One Tou Kirin Ehan* (saling kepercayaan) untuk mencapai kesejahteraan bersama.

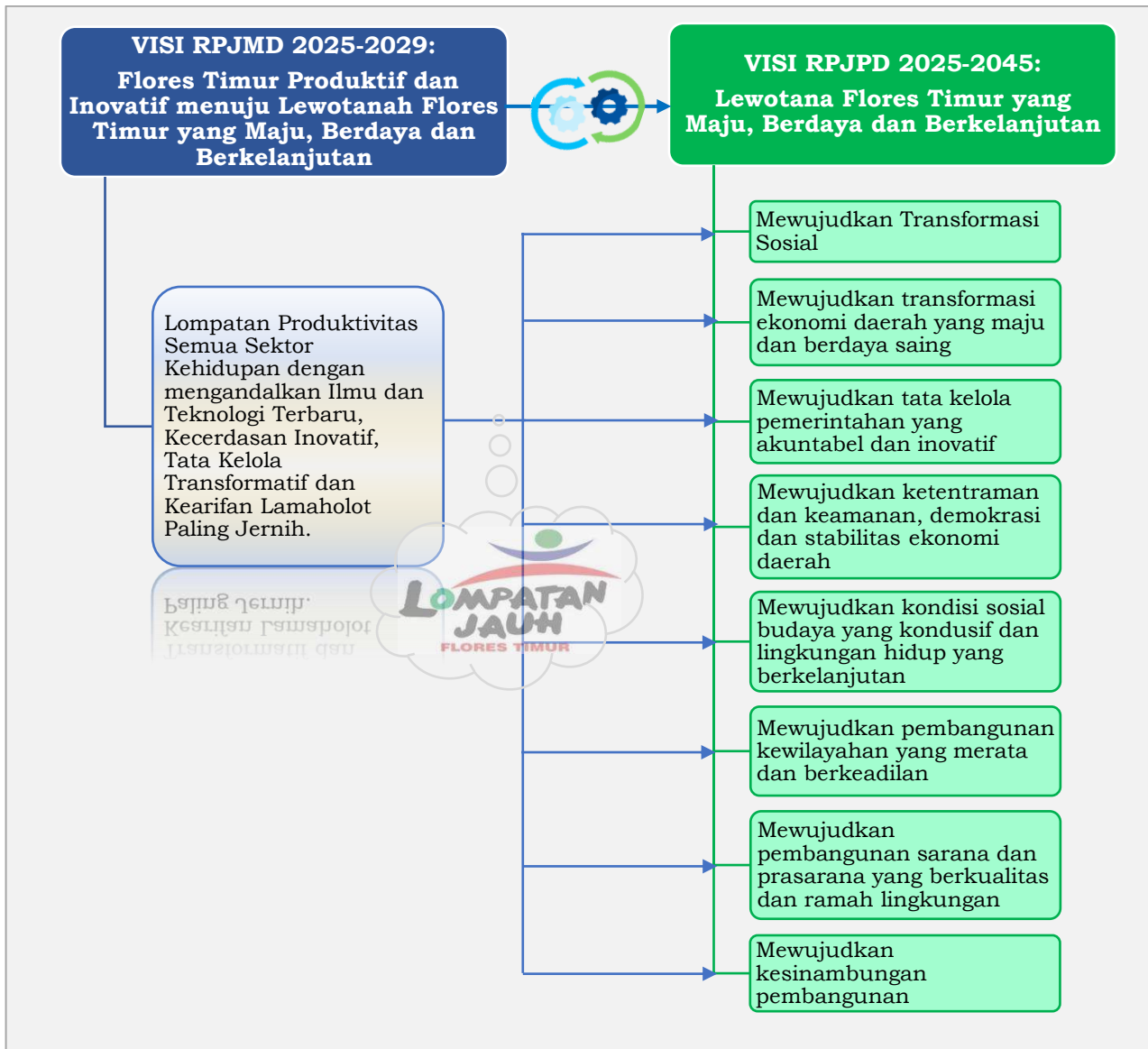
Misi RPJMD tersebut dapat diproyeksikan secara lebih konkret dalam spirit "Lompatan Jauh" untuk percepatan kemajuan daerah, yakni sebagai berikut:

- 1) Transformasi serius sektor-sektor ekonomi melalui penerapan ilmu dan teknologi terbaru, mobilisasi kecerdasan inovasi kolektif, manajemen dan tata kelola terbaik berbasis pemetaan persoalan secara jernih, dan pendayagunaan kearifan-kearifan produktif eksisting yang dipadukan dengan perspektif keilmuan mutakhir.
- 2) Transformasi sektor pendidikan, kepemudaan, dan ketenagakerjaan, melalui pembenahan institusional dan langkah-langkah terobosan yang berdaya, guna memastikan masa depan terbaik generasi muda Flores Timur.

- 3) Pemberdayaan sektor kesehatan, melalui tata kelola kebijakan kesehatan terbaik, tata kelola fasilitas kesehatan terbaik, dan berbagai pendekatan promotif dan preventif, untuk memastikan jaminan kesehatan bagi seluruh warga, dengan memberi perhatian khusus pada jenis-jenis pelayanan yang tercakup dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan perhatian pada potensi penyakit-penyakit yang terbanyak mengganggu produktivitas dan kenyamanan hidup warga.
- 4) Pemenuhan rasa keadilan sosial minimal, dengan memastikan terpenuhinya kebutuhan akan infrastruktur dasar konektivitas, air, listrik, dan infrastruktur komunikasi, melalui berbagai langkah terobosan kolaboratif dengan berbagai pihak.
- 5) Reformasi terukur sektor-sektor sosial dan politik, dalam kolaborasi dengan pemangku kepentingan eksisting di masyarakat, untuk menguatkan modal sosial; mencipta kerukunan; menggairahkan kehidupan kepemudaan, olahraga, dan seni; serta memastikan daya hidup komunitas dan budaya lokal.
- 6) Pemastian daya dukung ekologis jangka panjang, melalui langkah-langkah konservasi dan rehabilitasi yang lebih bertenaga serta terobosan dalam manajemen operasional.
- 7) Tata kelola pemerintahan terbaik, baik di tingkat manajemen kebijakan secara umum maupun manajemen kebijakan sektoral, yang didukung dengan penerapannya melalui perencanaan strategis dan perencanaan operasional yang SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound*), dan pengendalian kinerja yang ketat.
- 8) Kepastian terjaminnya keamanan dan ketertiban dalam masyarakat untuk kenyamanan hidup dan keberlanjutan pembangunan.

Keselarasan Visi dan Misi RPJMD Tahun 2025-2029 dengan Visi dan Misi RPJPD Tahun 2025-2045

Rumusan visi dan misi RPJMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2025-2029 diselaraskan dengan visi dan misi RPJPD Kabupaten Flores Timur tahun 2025-2045 sebagaimana terlihat pada Gambar 3.1 berikut



Gambar 3.1 Keselarasan Visi dan Misi RPJMD Kab. Flores Timur Tahun 2025-2029 dengan Visi dan Misi RPJPD Kab. Flores Timur Tahun 2025-2045

Dalam tataran implementasi kebijakan pembangunan, Misi RPJMD Kabupaten Flores Timur diarahkan juga untuk mendukung pelaksanaan Misi RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029 dan Misi RPJMN Tahun 2025-2029 sebagaimana terlihat pada Tabel 3.2 berikut.

Tabel 3.2 Keselarasan Misi RPJMD Kab. Flores Timur Tahun 2025-2029 dengan Misi RPJMD Prov. Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029 dan Misi RPJMN Tahun 2025-2029

Misi RPJMN	Misi RPJMD Provinsi NTT	Misi RPJMD Kabupaten Flores Timur
Visi: Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045	Visi: NTT Maju, Sehat, Cerdas, Sejahtera dan Berkelanjutan	Visi: Flores Timur Produktif dan Inovatif menuju Lewotana Flores Timur yang Maju, Berdaya dan Berkelanjutan
1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	1. Memastikan infrastruktur berkelanjutan demi terwujudnya ekonomi berbasis potensi daerah yang berdaya saing	Lompatan Produktivitas Semua Sektor Kehidupan dengan mengandalkan Ilmu dan Teknologi Terbaru, Kecerdasan Inovatif, Tata Kelola Transformatif dan Kearifan Lamaholot Paling Jernih

Misi RPJMN	Misi RPJMD Provinsi NTT	Misi RPJMD Kabupaten Flores Timur
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru 3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi 4. Memperkuat pembangunan SDM, sains teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas 5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah 6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemererataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan 7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan 8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	2. Memperluas pelayanan kesehatan dan jaminan sosial yang lebih inklusif, terjangkau, dan mudah diakses 3. Menghadirkan pendidikan berkualitas yang merata, partisipatif dan tepat sasaran 4. Mewujudkan kesejahteraan sosial, kesetaraan akses, serta kualitas hidup yang berkeadilan dan madani bagi seluruh lapisan masyarakat 5. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pengelolaan sumber daya alam dan manusia yang bijak serta pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) untuk menciptakan masa depan yang inklsif	

Tabel di atas menggambarkan keselarasan dan sinergitas serta kesatuan kebijakan dan gerak pembangunan dari daerah sampai ke nasional untuk mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Selain itu, dalam pelaksanaan misi RPJMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2025-2029 juga diarahkan untuk pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017), sebagaimana terlihat pada Tabel 3.3 berikut.

Tabel 3.3 Keselarasan Misi RPJMD
Kab. Flores Timur Tahun 2025-209 dengan SDGs Tahun 2015-2029

Misi RPJMD Tahun 2025-2029	Tujuan SDGs Tahun 2015-2029
Lompatan Produktivitas Semua Sektor Kehidupan dengan mengandalkan Ilmu dan Teknologi Terbaru, Kecerdasan Inovatif, Tata Kelola Transformatif dan Kearifan Lamaholot Paling Jernih	<i>Tanpa Kemiskinan:</i> Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun
	<i>Tanpa Kelaparan :</i> Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan
	<i>Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan :</i> Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia
	<i>Pendidikan Berkualitas :</i> Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua
	<i>Kesetaraan Gender :</i> Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan
	<i>Air Bersih dan Sanitasi :</i> Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua
	<i>Energi Bersih dan Terjangkau :</i> Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua
	<i>Pekerjaan yang Layak dan Pertumbuhan Ekonomi :</i> Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua
	<i>Industri, Inovasi, dan Infrastruktur :</i> Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi.
	<i>Mengurangi Ketimpangan :</i> Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara
	<i>Kota dan Komunitas yang Berkelanjutan :</i> Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan
	<i>Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab :</i> Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan
	<i>Penanganan Perubahan Iklim :</i> Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya
	<i>Ekosistem Lautan :</i> Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan
	<i>Ekosistem Daratan :</i> Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghenti-kan kehilangan keanekaragaman hayati
	<i>Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh :</i> Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan
	<i>Kemitraan untuk Mencapai Tujuan :</i> Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

3.1.2 Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029

Tujuan RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi selama 5 (lima) tahun. Sementara sasaran RPJMD diturunkan dari tujuan yang merupakan rangkaian kinerja berupa hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan RPJMD. Rumusan tujuan dan sasaran akan memberikan arah dalam berbagai pelaksanaan

pembangunan berupa strategi dan arah kebijakan untuk tercapainya tujuan dan sasaran tersebut serta mempermudah dalam melakukan pengendalian dan evaluasi.

Berdasarkan identifikasi potensi dan permasalahan daerah serta memperhatikan berbagai isu global dan nasional, terdapat delapan isu strategis daerah yang dijadikan perumusan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah beserta dengan indikatornya masing-masing selama lima tahun ke depan. Adapun ketujuh isu strategis itu sebagai berikut: 1) Penguatan Inovasi dalam meningkatkan produktivitas sektor unggulan dan daya saing nilai tambah produksi pada sektor perekonomian; 2) Daya saing pendidikan baik dari aspek kualitas/mutu pendidikan, sistem pendidikan, tata kelola pendidikan, tata kelola sistem pendidikan, relevansi pendidikan dengan dunia kerja, dan aksesibilitas pendidikan; 3) Daya saing kesehatan baik dari aspek mutu layanan, tata kelola fasilitas kesehatan, tata kelola sistem kesehatan, aksesibilitas layanan kesehatan, penanganan stunting, dan promosi preventif; 4) Penyediaan infrastruktur dasar yang merata dan berkeadilan serta konektivitas antar wilayah; 5) Angka Kemiskinan yang masih tinggi, kualitas layanan kesejahteraan sosial masyarakat, pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 6) Kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana; 7) Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik; dan 8) Ancaman gangguan sosial yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum masyarakat dan kebebasan dalam berpendapat.

Kedelapan isu strategis daerah tersebut kemudian menjadi masukan dalam perumusan tujuan dan sasaran yang menjadi gambaran tercapainya visi pembangunan jangka menengah daerah. Tujuan dan sasaran tersebut kemudian disertai dengan indikator kinerja, yang nantinya menjadi alat ukur keberhasilan pembangunan. Rumusan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2025-2029 diuraikan sebagai berikut:

1. Tujuan Pertama: Meningkatnya Produktivitas Ekonomi Daerah Berbasis Inovasi dan Ekonomi Hijau

Pembangunan dalam paradigma Lompatan Produktivitas sebagaimana yang diperjelas dalam rumusan Misi, tentu akan memiliki beberapa karakteristik dalam 5 tahun ke depan:

Pertama, pembangunan akan sangat kuat berorientasi pada pembangunan sektor ekonomi. Dan dalam konteks pembangunan Flores Timur, pembangunan sektor ekonomi akan berangkat dari sektor primer Kelautan dan Perikanan, dan Pertanian di darat. Peningkatan produktivitas di sektor pertanian (darat dan laut) akan menjadi fokus dan prioritas. Pembangunan serius di sektor ini diharapkan dapat menyumbang pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan asli daerah.

Di sektor Kelautan dan Perikanan, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) akan diandalkan dalam pengembangan potensi kelautan dan perikanan daerah, dan juga pengembangan kerja sama secara baik dengan nelayan dalam semangat saling

mendukung untuk pengembangan, agar kesejahteraan nelayan terangkat sekaligus dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sejalan dengan ini, ekspansi sektor perikanan melalui upaya memahami kondisi pasar yang tepat, pengembangan kapasitas bisnis, dan membangun mentalitas kerja dan rasa tanggung jawab, dapat menjadi salah satu dorongan besar (*big push*) perekonomian daerah. Jumlah nelayan yang teruji berada di sektor ekonomi ini, demikian pula beberapa pelaku industri perikanan eksisting, menjadi modal eksisting, dan Pemerintah Daerah dapat masuk secara cerdas dalam kerja sama di sektor ini, dengan mengandalkan *innovative financing* untuk kerja sama dengan lembaga-lembaga keuangan yang ada.

Di sektor pertanian darat ke depannya akan menjadi perhatian serius untuk dikembangkan melalui dorongan besar (*big push*). Sawah eksisting yang fungsional, walau tercatat hanya 400-an hektar harus dapat dikembangkan sebagai salah satu *big push*, ditopang dengan teknologi air dan paket lengkap intervensi teknologis. Demikian pula sawah eksisting potensial harus digarap dengan orientasi yang sama sebagai *big push* dengan pendekatan teknologi yang sama.

Kunci dari perkembangan dan lompatan produktivitas sektor pertanian darat tentu saja adalah teknologi air. Daerah lahan kering dengan hamparan yang luas, dalam kasus di mana bisa ditemukan potensi air, tentu akan dikembangkan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi pertanian. Upaya menemukan potensi-potensi baru tersebut yang diikuti dengan pengembangan pola pertanian modern dan kelembagaan korporasi, diharapkan dapat menampung tenaga kerja terdidik dan milenial, dan dapat memberikan sumbangsih bagi peningkatan PAD.

Untuk subsektor perkebunan, dengan potensi komoditi yang banyak yang sudah teruji secara ekologis dan ekonomis, akan dikembangkan dengan pendekatan hilirisasi dan ekosistem perdagangan. Beberapa langkah kecil hilirisasi dimulai dengan mengembangkan pusat-pusat industri hilirisasi skala terbatas seperti di Desa Ile Padung untuk Mente, Desa Dun Tana Lewoingu dan Desa Kawela (Dusun Molong) untuk Kemiri disertai dengan upaya pengembangannya bersama pengusaha swasta eksisting untuk komoditi kelapa seperti di Desa Wewit dan di beberapa tempat lain. Upaya-upaya ini diharapkan akan menemukan momentum untuk pengungkitannya, melalui pengembangan kapasitas bisnis industri-industri yang dikembangkan melalui kerja sama dengan investor sehingga dapat memberikan sumbangsih besar bagi pertumbuhan perekonomian daerah.

Ekosistem perdagangan diyakini sebagai pengungkit perkembangan sektor perkebunan. Infrastruktur jalan di wilayah komoditi serta transportasi antar pulau, baik dalam wilayah Flores Timur maupun konektivitasnya dengan pusat perdagangan di Jawa, tentu saja menjadi kunci perkembangan sektor perkebunan, oleh karena itu harus mendapat perhatian serius.

Subsektor strategis lainnya adalah subsektor peternakan dan hortikultura. Program Nasional Makan Bergizi Gratis menciptakan momentum untuk

perkembangan besar kedua subsektor ini. Karena itu, dalam kerja sama dengan Pemerintah Desa yang memiliki Dana Desa, akan dikembangkan pusat-pusat peternakan dan hortikultura, baik berbasis desa maupun wilayah, dengan pola dan teknologi terbaru, agar dapat berfungsi ganda sebagai sumber pertumbuhan ekonomi sekaligus sebagai penopang program Nasional Makan Bergizi Gratis.

Kedua, selain sektor primer yang akan menjadi perhatian serius sebagai sumber lompatan produktivitas yang *production-driven*, sektor pariwisata daerah yang pada dasarnya *consumption-driven* juga menjadi perhatian untuk dikembangkan. Keindahan alam dan budaya daerah, serta perilaku sosial ekonomi budaya yang sederhana, dapat dipoles sebagai sumber *fulfilment* diri pada wisatawan dengan segmen tertentu, sehingga menjadi sumber pertumbuhan kepariwisataan daerah.

Di tengah ruang fiskal daerah yang terbatas, pengembangan pariwisata tidak dimulai dari fisik destinasi, namun dimulai dari event, karena event juga dimaknai sebagai salah satu jenis pariwisata *Event Tourism*. Kabupaten Flores Timur sudah memiliki event sekaligus potensi pariwisata terbesar yakni SEMANA SANTA. Pengembangan pariwisata tidak cukup dengan satu event. Kunjungan dan pergerakan sosial, serta keramaian sosial yang berlangsung satu sampai dua hari saja dalam setahun, tidak cukup menggerakkan perkembangan pariwisata. Karena itu, dibutuhkan 3 sampai 4 event besar setahun sebagai sumber pertumbuhan ekonomi kepariwisataan Flores Timur. Festival Bale Nagi yang sudah ada, serta ditambah dengan Solor *Fun Run* dan Festival Budaya Lamaholot, setidaknya terdapat 4 event besar yang jika kapasitas dan kualitas penyelenggaraannya dapat dikembangkan dari waktu ke waktu, dapat menjadi sumber perkembangan kepariwisataan.

Seiring dengan pelaksanaan even pariwisata yang semakin baik, beberapa destinasi, baik yang baru ataupun lama dengan nilai strategis kepariwisataan, dapat dikembangkan pada tahap awal, bersamaan atau pasca pengembangan event-event, untuk menopang pergerakan manusia sekaligus menjadi sumber pergerakan dan keramaian sosial ekonomi. Jika modalitas awal berupa event dan destinasi unggulan ini berhasil dibangun, peluang untuk menarik minat investor berinvestasi di daerah akan semakin terbuka. Dengan demikian, upaya tersebut dapat menjadi salah satu sumber utama pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, dengan mempertimbangkan perkembangan pesat pariwisata di Labuan Bajo, perlu dirumuskan STP (*segmentation, targeting, positioning*) kepariwisataan Flores Timur secara cerdas. Perkawinan antara *event tourism* dan *slow-living tourism* dapat menjadi pilihan yang dapat dikembangkan. UMKM dan ekonomi kreatif adalah bagian penting pula dalam lompatan produktivitas perekonomian. Karena itu beberapa langkah pemberdayaan akan terus dilanjutkan, sambil ditopang dengan inovasi ekosistem pasar secara lebih meyakinkan, dan langkah-langkah fasilitasi penerobosan pasar yang lebih bertenaga.

Ketiga, PAD merupakan sasaran penting dalam keseluruhan program lompatan produktivitas perekonomian. Karena disadari bahwa keluasaan anggaran yang bersumber dari APBN tidak selalu aman dan memberikan ruang cukup bagi pengembangan ekonomi daerah ke depan. Karena itu berbagai langkah/kebijakan perlu dilakukan untuk itu, baik secara khusus maupun yang *inherent* atau *built-in* dalam program-program pengembangan ekonomi.

Keempat, langkah-langkah besar, tegas, dan terarah untuk lompatan produktivitas perekonomian, tentu membutuhkan dukungan finansial. Karena itu, *innovative financing*, kerja sama pembiayaan dengan Desa untuk penggunaan dana desa, serta kerja sama dengan investor akan menjadi pula aras kerja pembangunan untuk menopang program-program Lompatan Jauh Flores Timur. Modal kelembangan keuangan eksisting di daerah, perbankan, koperasi, dana desa, dana PNPM, semuanya dapat menjadi sumber kekuatan finansial daerah, jika ditopangnya dengan integritas, tanggung jawab, dan kapasitas dalam menyediakan rencana-rencana bisnis yang *feasible* dan *bankable*.

Tujuan “*Meningkatnya Produktivitas Ekonomi Daerah Berbasis Inovasi dan Ekonomi Hijau*” dirumuskan untuk menjawab isu strategis yaitu, penguatan inovasi dalam meningkatkan produktivitas sektor unggulan dan daya saing nilai tambah produksi pada sektor perekonomian, dengan indikator tujuannya adalah Laju Pertumbuhan Ekonomi, Pertumbuhan Lapangan Kerja Sektor Unggulan, Pertumbuhan Lapangan Kerja Berkualitas Sektor Unggulan, Indeks Ekonomi Hijau Sektor Unggulan, Indeks Inovasi Daerah Bidang Pertanian, dan Indeks Akses Keuangan Daerah.

Dari penetapan tujuan tersebut kemudian diturunkan menjadi empat sasaran beserta dengan indikatornya masing-masing. Sasaran pertama adalah “Meningkatnya Produktivitas dan Pengembangan Inovasi Berbasis Ekonomi Digital pada Sektor-Sektor Unggulan”, dengan satu indikator yaitu Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan. Selanjutnya, sasaran kedua adalah “Meningkatnya kecepatan Hilirisasi Sumber Daya Alam unggulan, produktivitas serta Kemudahan Investasi”, dengan tujuh indikator yaitu Nilai Investasi Hilirisasi, Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan, Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan, Pertumbuhan Lapangan Kerja Sektor Pengolahan, Pertumbuhan Lapangan Kerja Sektor Perdagangan, Rasio PDRB Industri Pengolahan, dan Rasio Kewirausahaan Daerah. Sasaran ketiga adalah “Meningkatnya Daya Saing Kelembagaan Ekonomi” dengan lima indikator yaitu Indeks Kemajuan Koperasi, Indeks Kemajuan UMKM, Indeks Kemajuan Lembaga Keuangan, Indeks Kemajuan Jasa Konstruksi, dan Indeks Kemajuan BUMD. Sasaran keempat adalah “Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Perekonomian” dengan dua Indikator yaitu Indeks Infrastruktur Aktivitas Perdagangan Lintas Pulau, dan Indeks Infrastruktur Sektor Primer.

2. Tujuan Kedua: Meningkatnya Daya Saing Pendidikan

Urusan wajib di bidang pendidikan untuk pengembangan sumber daya manusia, dan daya saing SDM Flores Timur di masa depan, dengan sumber anggaran yang relatif pasti, tentu akan tetap menjadi perhatian serius, terutama berfokus pada pembenahan tata kelola, agar dapat mengungkit standar kualitas pelayanan pada sektor tersebut. Manajemen strategis, berbasis manajemen data sehingga sektor ini dapat dikembangkan dengan baik untuk menjawab target-target daerah dan nasional.

Khusus sektor ini, walaupun kebutuhan sarana dan prasarana masih tersisa cukup banyak, kebijakan pembangunan akan diarahkan pada aspek kualitas dan relevansi selama masa 5 (lima) tahun ke depan. Program *Future School* sebagai sekolah unggulan Flores Timur, yang mengembangkan beberapa kompetensi masa depan: karakter, HOTS (*Higher Order Thinking Skills*), 4C (*critical thinking, creativity, communication, collaboration*), kompetensi digital, dan kompetensi kebahasaan, akan dikembangkan dengan serius, dengan rekayasa kurikulum secara cerdas, yang dimulai dengan beberapa sekolah, yang menjadi pijakan untuk lompatan kualitas sektor pendidikan. Program lompatan kualitas sektor pendidikan ini tentu perlu ditopang dengan kelembagaan dan tata kelola sekolah dan tata kelola Perangkat Daerah pelaksana urusan Pendidikan yang baik. Kondisi kreativitas dan inovasi yang sudah dikembangkan di lapangan dengan pengakuan-pengakuan yang ada baik dari provinsi dan nasional harus menjadi modal dasar yang perlu ditingkatkan. Selain itu, faktor kepemimpinan, tanggung jawab standar dan keberanian berinovasi menjadi kunci untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas.

Program nasional Sekolah Rakyat, yang ditujukan untuk anak-anak yang berasal dari keluarga yang kurang beruntung tentu perlu didukung karena merupakan afirmasi yang baik dalam kerangka keadilan sosial. Program nasional ini tentu sangat berguna dan dapat menciptakan ruang kolaborasi yang baik dalam mengungkit perkembangan pendidikan di daerah ini.

Tujuan “*Meningkatnya Daya Saing Pendidikan*” dirumuskan untuk menjawab isu strategis yaitu, Daya saing pendidikan baik dari aspek kualitas/mutu pendidikan, sistem pendidikan, tata kelola pendidikan, tata kelola sistem pendidikan, relevansi pendidikan dengan dunia kerja, dan aksesibilitas pendidikan. Tujuan ini memiliki beberapa indikator yakni adalah Indeks Pendidikan, Indeks Aksesibilitas, Indeks Mutu, Indeks Pelayanan Pendidikan, Indeks Tata Kelola Pendidikan, dan Indeks Literasi Masyarakat.

Dari penetapan tujuan tersebut kemudian diturunkan menjadi enam sasaran beserta dengan indikatornya masing-masing. Sasaran pertama adalah “Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan” dengan empat indikator yaitu Angka Partisipasi Sekolah, Indeks Keterjangkauan Fisik, Indeks Ketercukupan Infrastruktur Sekolah, dan Indeks Kelayakan Fisik Sekolah. Selanjutnya, sasaran

kedua adalah "Meningkatnya Kualitas/Mutu Pendidikan", dengan enam indikator yaitu Angka Kelulusan, Nilai PISA, HOTS (Tingkat Kualitas Berpikir), Indeks 4C (*Critical Thinking, Creativity, Communication, Collaboration*), Indeks Karakter dan Kearifan Lokal, dan Indeks Digitalisasi. Sasaran ketiga adalah "Meningkatnya Relevansi Pendidikan" dengan satu indikator yaitu Indeks Kesiapan (*Link and Match* dunia kerja). Sasaran keempat adalah "Meningkatnya Tata Kelola Satuan Pendidikan" dengan lima indikator yaitu Indeks Tata Kelola Sekolah, Indeks Tata Kelola Sistem Pendidikan, Indeks Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah, Indeks Manajemen Profesionalisme dan Kompetensi Guru, dan Indeks Administrasi dan Pertanggungjawaban Sekolah. Sasaran kelima adalah "Meningkatnya Tata Kelola Sistem Pendidikan" dengan tiga indikator yaitu Indeks Manajemen Data Guru dan Tenaga Kependidikan, Indeks Manajemen Data Sekolah, dan Indeks Manajemen Data Kepegawaian. Sasaran keenam adalah "Meningkatnya Literasi Masyarakat" dengan dua indikator yaitu Indeks Budaya Baca Masyarakat, dan Indeks Literasi Wajib Daerah.

3. Tujuan Ketiga: Meningkatkan Daya Saing Kesehatan

Perhatian pada bidang pendidikan sejalan dengan urusan wajib di bidang kesehatan, untuk pengembangan sumber daya manusia, dan daya saing SDM daerah di masa depan, dengan sumber anggaran yang relatif pasti, akan tetap mendapat perhatian serius, terutama berfokus pada pembenahan tata kelola, agar dapat mengungkit standar kualitas pelayanan di kedua sektor ini. Manajemen strategis, berbasis manajemen data ke depan akan dikembangkan dengan baik, baik untuk menjawab target-target nasional seperti penurunan angka *stunting*, angka kematian ibu dan anak, maupun untuk menjawab kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat dan kesehatan individu secara lebih bertenaga.

Kekurangan tenaga medis dan tenaga kesehatan yang berkualitas, di RSUD Hendrikus Fernandez Larantuka, RSUD Pratama Adonara, dan RSUD Pratama Solor, dan Puskesmas-Puskesmas yang secara jumlah sudah cukup memadai, harus bisa dijawab melalui langkah-langkah kebijakan jangka pendek dan jangka menengah yang lebih baik. Demikian pula aspek fisik sarana prasarana di RSUD Hendrikus Fernandez, dan SOP aspek pelayanan, menjadi perhatian untuk dibenahi dengan baik. Selain itu, pemenuhan fasilitas kesehatan lainnya seperti Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) yang berkualitas di beberapa desa/kecamatan juga menjadi perhatian.

Tujuan "*Meningkatnya Daya Saing Kesehatan*" dirumuskan untuk menjawab isu strategis yaitu, Daya saing kesehatan baik dari aspek mutu layanan, tata kelola fasilitas kesehatan (faskes), tata kelola sistem kesehatan, aksesibilitas layanan, penanganan *stunting*, dan promosi preventif. Dengan indikator tujuannya adalah Usia Harapan Hidup dan Prevalensi *Stunting*.

Tujuan daerah tersebut kemudian diturunkan menjadi enam sasaran beserta dengan indikatornya masing-masing. Sasaran pertama adalah "Meningkatnya

Aksesibilitas Layanan Kesehatan” dengan tiga indikator yaitu Indeks Ketercukupan Faskes, Indeks Keterjangkauan Faskes, dan Indeks Keterjangkauan Program Jaminan Kesehatan. Sasaran kedua adalah “Meningkatnya Mutu Layanan Kesehatan” dengan delapan indikator yaitu Indeks Kepuasan Layanan Kesehatan, Rasio Dokter Dengan Penduduk, Rasio Dokter dengan jumlah Pasien, Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi, Angka Kesakitan, Capaian SPM, dan Capaian Penyakit Menular dan Tidak Menular. Sasaran ketiga adalah “Meningkatnya Tata Kelola Faskes” dengan enam indikator yaitu Tingkat Kepatuhan SOP Pelayanan, Indeks Manajemen Obat, Indeks Manajemen BMHP, Indeks Manajemen Alkes, Indeks Manajemen Personalia Kesehatan, dan Indeks Manajemen Limbah. Sasaran keempat adalah “Meningkatnya Tata Kelola Sistem Kesehatan” dengan tiga indikator yaitu Indeks Manajemen Data Faskes, Indeks Manajemen Data SDM Kesehatan, dan Indeks Perencanaan/Manajemen Strategis Sektor Kesehatan. Sasaran kelima adalah “Meningkatnya PHBS dan Kesehatan Lingkungan” dengan satu indikator yaitu Cakupan Layanan CKG (Cek Kesehatan Gratis). Sasaran keenam adalah “Menurunnya Prevalensi Stunting” dengan tiga indikator yaitu Cakupan Pemenuhan Indikator *Stunting*, Cakupan Wasting, dan cakupan *Underweight*.

4. Tujuan Keempat: Terpenuhinya Kebutuhan Infrastruktur Dasar Dan Konektivitas

Perhatian pada lompatan produktivitas sektor-sektor perekonomian tidak meninggalkan perhatian pada infrastruktur, karena infrastruktur merupakan variabel penting produktivitas itu sendiri. Di tengah ruang fiskal yang terbatas, peningkatan infrastruktur akan dilakukan secara bertahap, dengan prioritas yang jelas dalam urusan jalan, yakni pada ruas-ruas jalan yang mengalami kerusakan berat. Sementara pemenuhan kebutuhan air, akan dilakukan dengan target agar kebutuhan akses air bersih untuk semua desa/kelurahan terjawab melalui penerapan teknologi alternatif terbaik dan terhemat, seperti pengembangan teknologi sumur bor dan teknologi pompa air tenaga surya.

Tujuan daerah “*Terpenuhinya Kebutuhan Infrastruktur Dasar Dan Konektivitas*” dirumuskan untuk menjawab isu strategis yaitu penyediaan infrastruktur dasar yang merata dan berkeadilan serta konektivitas antar wilayah, dengan indikator tujuannya adalah Indeks Infrastruktur Dasar dan Indeks Infrastruktur Konektivitas.

Tujuan daerah tersebut kemudian diturunkan menjadi dua sasaran beserta dengan indikatornya masing-masing. Sasaran pertama adalah “Meningkatnya Infrastruktur Dasar” dengan tiga indikator yaitu Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak Dan Aman, Indeks Drainase, dan Indeks Pengelolaan Persampahan. Sasaran kedua adalah “Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah” dengan empat indikator yaitu Indeks Kualitas Pelayanan Transportasi Darat, Indeks

Kualitas Pelayanan Transportasi Laut, Indeks Ketimpangan Infrastruktur Konektivitas, dan Indeks Kualitas Pelayanan Antar Moda Transportasi.

5. Tujuan Kelima: Meningkatnya Perlindungan Sosial Dan Penguatan Kelembagaan Sosial Budaya

Perhatian terhadap persoalan-persoalan sosial berupa kemiskinan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial akan terus dilakukan. Pengelolaan data kemiskinan yang makin baik dan terkelola dalam manajemen data yang lebih baik, sehingga dapat teridentifikasi dan ditemukan jalan pemberdayaan dalam rangka mengurangi angka kemiskinan. Harapannya, tentu saja, agar kemiskinan tidak dilanggengkan melalui pendekatan instan program-program bantuan sosial, melainkan dapat ditemukan *exit strategy* yang lebih meyakinkan.

Urusan ketenagakerjaan merupakan bagian penting dari keseluruhan program Lompatan Jauh. Penyiapan untuk pengiriman tenaga kerja yang berkualitas ke Jepang, menjadi perhatian serius yang akan dilaksanakan dengan skala yang lebih besar, dan diperluas ke negara-negara sasaran penerima lainnya. Kerja sama dengan SMA dan SMK untuk perekrutan dan penyiapan dini dalam rangka memastikan langkah transformasi di tengah tantangan lapangan kerja yang sangat serius di dalam negeri ini.

Dalam urusan perlindungan pekerja migran, ditempuh melalui kerja sama dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, membangun *Migrant Centre* untuk semua pelayanan keberangkatan, perlindungan masa penempatan, maupun penanganan kasus, yang ditopang dengan kelengkapan institusi pelayanan semisal Imigrasi; dan pelayanan serta perlindungan migrasi akan ditopang dengan Sistem Keamanan Migrasi Desa (SISKAMDES).

Tujuan “*Meningkatnya Perlindungan Sosial dan Penguatan Kelembagaan Sosial Budaya*” dirumuskan untuk menjawab isu strategis yaitu angka kemiskinan yang tinggi, kualitas layanan kesejahteraan sosial masyarakat, pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta kesadaran identitas kalamaholotan, dengan indikator tujuannya adalah Indeks Kesejahteraan Sosial dan Indeks Pembangunan Kebudayaan. Dari penetapan tujuan tersebut kemudian diturunkan menjadi lima sasaran beserta dengan indikatornya masing-masing. Sasaran pertama adalah “Meningkatnya Perlindungan Sosial” dengan empat indikator yaitu Cakupan PMKS yang mendapat Perlindungan Sosial, Cakupan PMKS yang mendapat Bantuan Sosial, Cakupan PMKS yang mendapat layanan jaminan Rehabilitasi Sosial, dan Cakupan PMKS yang mendapat Jaminan Sosial. Sasaran kedua adalah “Menurunnya Kemiskinan” dengan lima indikator yaitu Tingkat Kemiskinan, Pendapatan Perkapita Keluarga Miskin Ekstrem, Partisipasi Ekonomi Produktif Keluarga Miskin Ekstem, Indeks Desa, dan Indeks Afirmasi Kemiskinan Dana Desa dan APBD. Sasaran ketiga adalah “Meningkatnya Kualitas Keluarga, Pemuda dan Penyetaraan Gender” dengan empat indikator yaitu Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga, Indeks Ketimpangan Gender, Indeks

Pembangunan Pemuda, dan Indeks Kerukunan Keluarga. Sasaran keempat adalah “Terjaminnya Daya Hidup Komunitas dan Budaya Lokal” dengan lima indikator yaitu Indeks Pemajuan Kebudayaan, Indeks Pemberdayaan Dewan kebudayaan (Indeks Kohesivitas Sosial/Kerukunan Sosial), Indeks Daya Saing Produk Budaya Lokal, Indeks Kesadaran Identitas Kelamaholotan, dan Indeks kelestarian Pemajuan Obyek Kebudayaan. Sasaran kelima adalah “Terjaminnya Perlindungan Pekerja Migran di daerah” dengan tiga indikator yaitu Indeks Kesadaran/ Pengetahuan Migrasi Aman, Indeks Sistem Keamanan Migrasi Desa (SISKAMDES), dan Indeks Perangkat Perlindungan PMI di daerah.

6. Tujuan Keenam: Terjaminnya Daya Dukung Ekologis Jangka Panjang Serta Ketangguhan Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Perhatian pada bidang Lingkungan hidup dan ketahanan bencana menjadi bagian yang tidak kalah penting dengan sektor lain. Rendahnya kesadaran terhadap pelestarian lingkungan hidup dan kondisi daerah yang rawan terhadap bencana dan perubahan iklim maka kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana tetap menjadi perhatian serius di daerah.

Tujuan “*Terjaminnya Daya Dukung Ekologis Jangka Panjang Serta Ketangguhan Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim*” dirumuskan untuk menjawab isu strategis yaitu kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan dan mitigasi bencana, dengan indikator tujuannya adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Indeks Ketangguhan Bencana, dan Indeks Penyelenggaraan Tata Ruang.

Tujuan daerah tersebut kemudian diturunkan menjadi tiga sasaran beserta dengan indikatornya masing-masing. Sasaran pertama adalah “Meningkatnya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup untuk Peningkatan Kualitas Hidup Yang Berkelanjutan” dengan tiga indikator yaitu Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Air, dan Indeks Tutupan Lahan. Sasaran kedua adalah “Meningkatnya Mitigasi Bencana dan Kualitas Penanganan Bencana” dengan indikator yaitu Indeks Manajemen Mitigasi Bencana, Persentase Pengurangan Risiko Bencana, Indeks Kesiapsiagaan Tanggap Darurat, dan Indeks Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Sasaran ketiga adalah “Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penataan Kota yang Serasi, Selaras dan Seimbang” dengan lima indikator yaitu Indeks Kesesuaian Pemanfaatan Ruang, Indeks Kemajuan RDTR, Indeks Kemajuan RTBL, Indeks Kepatuhan Dokumen Lingkungan Hidup, dan Indeks Keindahan Tata Kota.

7. Tujuan Ketujuh: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Tata kelola merupakan kunci dari segala urusan transformasi dalam kerangka kebijakan Lompatan Jauh Flores Timur. Selain *good governance* di atas prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas publik, perhatian setara juga diberikan pada aspek integritas, efisiensi dan produktivitas, inovasi, digitalisasi, kolaborasi, dan manajemen strategis. Beberapa aspek masih memperlihatkan

defisiensi yang serius, dan karena itu kerja pengembangan kapasitas secara praktis yang *built-in* dalam kerja-kerja manajerial dan kebijakan internal pemerintahan perlu diseriusi.

Tujuan “*Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*” dirumuskan untuk menjawab isu strategis yaitu tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, dengan indikator tujuannya adalah Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks Kualitas Manajemen Kebijakan, Indeks Profesionalisme Birokrasi, dan Indeks Produktivitas Birokrasi.

Tujuan tersebut kemudian diturunkan menjadi sembilan sasaran beserta dengan indikatornya masing-masing. Sasaran pertama adalah “Meningkatnya Kualitas Transparansi” dengan indikatornya Indeks Keterbukaan Informasi Publik. Sasaran kedua adalah “Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas” dengan indikatornya Indeks Kualitas Pertanggungjawaban Publik. Sasaran ketiga adalah “Meningkatnya Kualitas Partisipasi” dengan dua indikator yaitu Indeks Kualitas Musrenbang dan Indeks Integrasi Sektoral. Sasaran keempat adalah “Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kebijakan Publik” dengan tiga indikator yaitu Indeks Perencanaan, Indeks Kualitas Kebijakan Publik, dan Indeks Inovasi daerah. Sasaran kelima adalah “Meningkatnya Kualitas Pengawasan” dengan dua indikator yaitu Indeks Integritas Daerah, dan Indeks Pencegahan Korupsi. Sasaran keenam adalah “Meningkatkan Profesionalisme ASN” dengan tiga indikator yaitu Persentase ASN yang berkinerja baik, Indeks Meritokrasi, dan Indeks Kepuasan Manajemen Kepegawaian. Sasaran ketujuh adalah “Meningkatnya Kualitas Layanan Publik” dengan empat indikator yaitu Indeks Kepuasan Pelayanan Publik, Indeks Kualitas Manajemen Pengaduan, Indeks Kualitas Pengelolaan Opini Publik, dan Indeks Persepsi Korupsi. Sasaran kedelapan adalah “Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah” dengan tiga indikator yaitu Opini BPK Terhadap LKPD, Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Indeks Kualitas Pengelolaan Aset Daerah. Sasaran kesembilan adalah “Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah” dengan satu indikator yaitu Capaian Kinerja PAD.

8. Tujuan Kedelapan: Meningkatkan Keamanan, Ketertiban dan Kebebasan Masyarakat

Aspek kehidupan lainnya yang tidak bisa diabaikan adalah aspek keamanan, ketertiban dan kebebasan dalam masyarakat, karena memberikan kenyamanan bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas. Koordinasi dan kolaborasi dengan aparat penegak hukum di daerah menjadi hal wajib untuk dilaksanakan serta melindungi hak masyarakat melalui penegakan hukum di daerah, sambil terus membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya keamanan dan ketentraman dalam kehidupan bersama.

Tujuan “*Meningkatnya Keamanan, Ketertiban dan Kebebasan Masyarakat*” dirumuskan untuk menjawab isu strategis yaitu ancaman gangguan sosial yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat dan kebebasan

dalam berpendapat, dengan indikator tujuannya adalah Indeks Keamanan dan Ketertiban, dan Indeks Demokrasi daerah.

Tujuan tersebut kemudian diturunkan dalam tiga sasaran beserta dengan indikatornya masing-masing. Sasaran pertama adalah “Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban” dengan tiga indikator yaitu Indeks Kualitas Deteksi Dini Gangguan Keamanan, Indeks Manajemen Keamanan dan Ketertiban, dan Indeks Penegakan Hukum. Sasaran kedua adalah “Meningkatnya Kerukunan Umat Beragama” dengan satu indikator yaitu Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama. Sasaran ketiga adalah Meningkatkan Kualitas Demokrasi Daerah dengan dua indikator yaitu Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Mengikuti Pesta Demokrasi, dan Tingkat keberdayaan Lembaga Partai Politik dalam melakukan Pendidikan Politik.

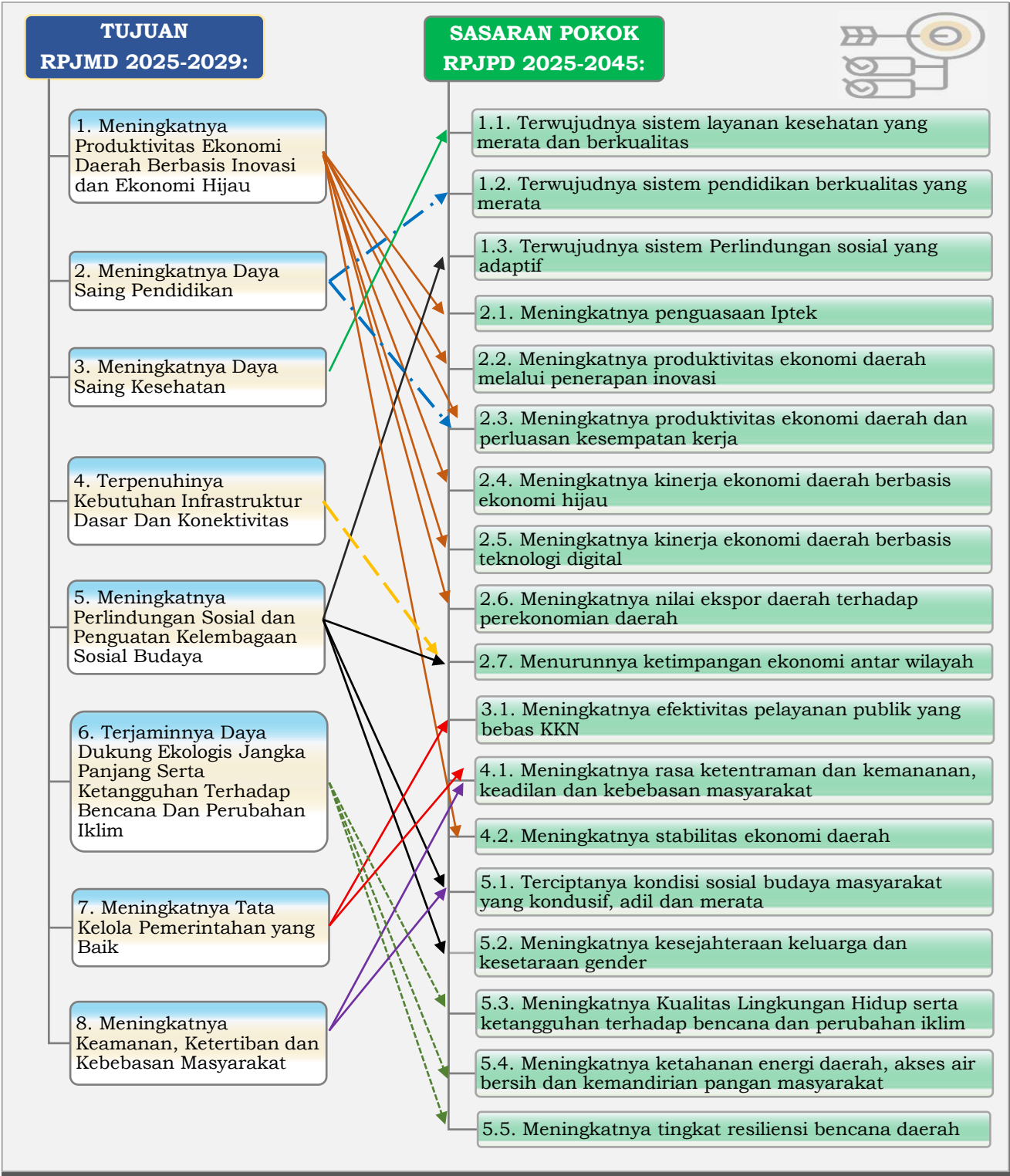
Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah dirumuskan dengan memperhatikan keselarasan terhadap misi RPJMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2025-2029. Gambaran keselarasan misi dengan tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada Tabel 3.4 berikut.

Tabel 3.4 Keselarasan Misi dengan Tujuan dan Sasaran
RPJMD Kab. Flores Timur Tahun 2025-2029

MISI (1)	TUJUAN DAERAH (2)	SASARAN DAERAH (3)
Lompatan Produktivitas Semua Sektor Kehidupan dengan mengandalkan Ilmu dan Teknologi Terbaru, Kecerdasan Inovatif, Tata Kelola Transformatif dan Kearifan Lamaholot Paling Jernih	1 Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Daerah Berbasis Inovasi dan Ekonomi Hijau	1.1 Meningkatkan produktivitas dan pengembangan Inovasi Berbasis Ekonomi Digital pada Sektor-Sektor Unggulan
		1.2 Meningkatkan kecepatan Hilirisasi Sumber Daya Alam unggulan, produktivitas serta Kemudahan Investasi
		1.3 Meningkatkan Daya Saing Kelembagaan Ekonomi
		1.4 Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Perekonomian
	2 Meningkatkan Daya Saing Pendidikan	2.1 Meningkatkan aksesibilitas Pendidikan
		2.2 Meningkatkan kualitas/Mutu Pendidikan
		2.3 Meningkatkan relevansi pendidikan
		2.4 Meningkatkan tata kelola Satuan Pendidikan
		2.5 Meningkatkan tata kelola Sistem pendidikan
		2.6 Meningkatkan Literasi masyarakat
	3 Meningkatkan Daya Saing Kesehatan	3.1 Meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan
		3.2 Meningkatkan Mutu Layanan Kesehatan
		3.3 Meningkatkan Tata Kelola Fasilitas Kesehatan
		3.4 Meningkatkan tata kelola Sistem kesehatan
		3.5 Meningkatkan PHBS dan Kesehatan Lingkungan
		3.6 Menurunnya Prevalensi Stunting
	4 Terpenuhinya Kebutuhan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas	4.1 Meningkatkan Infrastruktur Dasar
		4.2 Meningkatkan Konektivitas Antar Wilayah

MISI	TUJUAN DAERAH	SASARAN DAERAH	
(1)	(2)	(3)	
	5 Meningkatkan Perlindungan Sosial dan Penguatan Kelembagaan Sosial Budaya	5.1	Meningkatnya Perlindungan Sosial
		5.2	Menurunnya Kemiskinan
		5.3	Meningkatnya Kualitas Keluarga, Pemuda dan Penyetaraan Gender
		5.4	Terjaminnya Daya Hidup Komunitas dan Budaya Lokal
		5.5	Terjaminnya Perlindungan Pekerja Migran di daerah
	6 Terjaminnya Daya Dukung Ekologis Jangka Panjang Serta Ketangguhan terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	6.1	Meningkatnya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup untuk Peningkatan Kualitas Hidup Yang Berkelanjutan
		6.2	Meningkatnya Mitigasi Bencana dan Kualitas Penanganan Bencana
		6.3	Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penataan Kota yang Serasi, Selaras dan Seimbang
	7 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	7.1	Meningkatnya Kualitas Transparansi
		7.2	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas
		7.3	Meningkatnya Kualitas Partisipasi
		7.4	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kebijakan Publik
		7.5	Meningkatnya Kualitas Pengawasan
		7.6	Meningkatnya Profesionalisme ASN
		7.7	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik
		7.8	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah
		7.9	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah
	8 Meningkatkan Keamanan, Ketertiban dan Kebebasan Masyarakat	8.1	Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban
		8.2	Meningkatnya Kerukunan Umat Beragama
		8.3	Meningkatnya Kualitas Demokrasi Daerah

Rumusan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2025-2029 di atas selain menggambarkan terwujudnya Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 juga berdampak pada pencapaian visi dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2025-2045 pada periode lima tahunan pertama, sebagaimana terlihat pada Gambar 3.2 berikut.



Gambar 3.2 Keselarasan Tujuan RPJMD Kab. Flores Timur Tahun 2025-2029 dengan Sasaran Pokok RPJPD Kab. Flores Timur Tahun 2025-2045

Gambar di atas menunjukkan bahwa upaya untuk mencapai tujuan pembangunan jangka menengah daerah Tahun 2025-2029 juga memberikan kontribusi pada pencapaian sasaran pokok jangka panjang daerah Tahun 2025-2045. Deskripsi keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD di atas akan terlihat pada pencapaian indikator/alat ukur keberhasilan pada masing-masing tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana terlihat pada Tabel 3.5 berikut.

Tabel 3.5 Tujuan dan Sasaran RPJMD Kab. Flores Timur Tahun 2025-2029

TUJUAN DAN SASARAN DAERAH			INDIKATOR		BASE-LINE 2024	TARGET KINERJA					
			TUJUAN DAN SASARAN			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)			(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Misi: Lompatan Produktivitas Semua Sektor Kehidupan dengan mengandalkan Ilmu dan Teknologi Terbaru, Kecerdasan Inovatif, Tata Kelola Transformatif dan Kearifan Lamaholot Paling Jernih											
1	Meningkatnya Produktivitas Ekonomi Daerah Berbasis Inovasi dan Ekonomi Hijau		1.a	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	2,69	3,80	4,23	4,47	4,75	5,00	5,28
			1.b	Pertumbuhan Lapangan Kerja Sektor Unggulan (%)	1,70	1,72	1,51	1,48	1,46	1,44	1,42
			1.c	Pertumbuhan Lapangan Kerja yang berkualitas sektor unggulan (%)	22,91	20,00	22,00	24,00	26,00	28,00	30,00
			1.d	Indeks Ekonomi Hijau Sektor Unggulan (<i>Angka</i>)	56,45	59,84	63,23	66,62	70,01	73,41	76,80
			1.e	Indeks Inovasi Daerah Bidang Pertanian (<i>Angka</i>)	0,72	0,72	0,74	0,77	0,79	0,81	0,84
			1.f	Indeks Akses Keuangan Daerah (<i>Angka</i>)	4,43	4,45	4,47	4,48	4,49	4,50	4,51
	1.1.	Meningkatnya produktivitas dan pengembangan Inovasi Berbasis Ekonomi Digital pada Sektor-Sektor Unggulan	1.1.a	Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan (%)	3, 22	3,30	3,73	3,91	4,00	4,61	5,20
	1.2	Meningkatnya kecepatan Hilirisasi Sumber Daya Alam unggulan, produktivitas serta Kemudahan Investasi	1.2.a	Nilai Investasi Hilirisasi (<i>Miliar Rupiah</i>)	33,49	34,40	35,08	35,79	36,50	37,23	37,98
			1.2.b	Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan (%)	13,58	13,58	13,97	14,27	14,57	14,92	15,00
			1.2.c	Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan (%)	5,69	5,69	5,97	6,27	6,57	6,92	7,00
			1.2.d	Pertumbuhan Lapangan Kerja Sektor Pengolahan (%)	2,60	2,88	3,06	2,97	2,89	2,81	2,73
			1.2.e	Pertumbuhan Lapangan Kerja Sektor Perdagangan (%)	2,40	2,88	3,06	2,97	2,89	2,81	2,73
			1.2.f	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	1,08**	0,96	1,03	1,10	1,17	1,24	1,31
			1.2.g	Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	3,26	3,26	3,27	3,27	3,27	3,28	3,28
	1.3	Meningkatnya Daya Saing Kelembagaan Ekonomi	1.3.a	Indeks Kemajuan Koperasi (<i>Angka</i>)	50,39	61,96	63,37	64,76	66,14	67,51	68,86
			1.3.b	Indeks Kemajuan UMKM (<i>Angka</i>)	50,00	50,27	50,31	50,69	51,07	51,44	51,8
			1.3.c	Indeks Kemajuan Lembaga Keuangan (<i>Angka</i>)	2,12	130,57	2,25	3,30	4,47	4,68	4,86
			1.3.d	Indeks Kemajuan Jasa Konstruksi (<i>Angka</i>)	83,55	91,05	91,05	91,05	91,05	91,05	91,05

TUJUAN DAN SASARAN DAERAH			INDIKATOR		BASE-LINE	TARGET KINERJA					
TUJUAN DAN SASARAN			TUJUAN DAN SASARAN		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)			(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			1.3.e	Indeks Kemajuan BUMD (<i>Angka</i>)	3,87	3,88	8,59	4,79	4,82	5,19	5,81
	1.4	Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Perekonomian	1.4.a	Indeks Infrastruktur aktivitas perdagangan lintas pulau (<i>Angka</i>)	44,62	44,62	45,06	45,23	45,41	45,62	45,83
			1.4.b	Indeks Infrastruktur sektor primer (<i>Angka</i>)	49,73	52,23	54,98	57,98	61,32	64,40	68,07
2	Meningkatnya Daya Saing Pendidikan		2.a	Indeks Pendidikan (<i>Angka</i>)	0,768	0,777	0,787	0,797	0,807	0,817	0,827
			2.b	Indeks Aksesibilitas Pendidikan (<i>Angka</i>)	81,2	83,5	85,8	88,1	90,4	92,7	95
			2.c	Indeks Mutu Pendidikan (<i>Angka</i>)	52,83	55,02	57,22	59,41	61,61	63,80	66,00
			2.d	Indeks Pelayanan Pendidikan (<i>Angka</i>)	79,27	82,72	86,18	89,63	93,09	96,54	100
			2.e	Indeks Tata Kelola Pendidikan (<i>Angka</i>)	73,75	78,13	82,50	86,88	91,25	95,63	100
			2.f	Indeks Literasi Masyarakat (<i>Angka</i>)	33,83 (Rendah)	42,33	50,83	59,33	67,83	76,33	85,00
	2.1	Meningkatnya aksesibilitas Pendidikan	2.1.a	Angka Partisipasi Sekolah (<i>Angka</i>)	7-12 Thn: 90,59 & 13-15 Thn: 68,26	100	100	100	100	100	100
			2.1.b	Indeks Keterjangkauan Fisik (<i>Angka</i>)	100	100	100	100	100	100	100
			2.1.c	Indeks Ketercukupan Infrastruktur sekolah (<i>Angka</i>)	70,74	72,28	73,82	75,36	76,9	78,44	80,00
			2.1.d	Indeks kelayakan fisik sekolah (<i>Angka</i>)	36,97	42,48	44,48	46,48	48,48	50,48	70,00
	2.2	Meningkatnya kualitas/Mutu Pendidikan	2.2.a	Angka Kelulusan (<i>Angka</i>)	100	100	100	100	100	100	100
			2.2.b	Nilai PISA (<i>Angka</i>)							
				Literasi SD :	56,38	65,76	67,65	69,54	71,43	73,32	75,20
				Literasi SMP :	62,29	71,09	72,11	73,13	74,15	75,17	76,21
				Numerasi SD :	42,59	63,35	64,68	66,01	67,34	68,67	70,00
				Numerasi SMP :	53,67	65,45	66,76	68,07	69,38	70,69	72,00
			2.2.c	HOTS (Tingkat kualitas Berpikir) (<i>Angka</i>)	56	60	64	68	72	76	80
			2.2.d	Indeks 4C (<i>Critical Thinking, Creativity, Communication, Collaboration</i>) (<i>Angka</i>)	56	60	64	68	72	76	80
			2.2.e	Indeks karakter dan kearifan lokal (<i>Angka</i>)	60	70	75	80	85	90	95
			2.2.f	Indeks Digitalisasi (<i>Angka</i>)	58,29	61,63	64,97	68,31	71,66	75,00	78,34
	2.3	Meningkatnya relevansi pendidikan	2.3.a	Indeks Kesiapan (Indeks <i>Link and Match</i> dunia Kerja) (<i>Angka</i>)	50,00	53,33	56,67	60,00	63,33	66,67	70,00
	2.4	Meningkatnya tata kelola Satuan Pendidikan	2.4.a	Indeks Tata kelola Sekolah (<i>Angka</i>)	60	65	70	75	80	85	90
			2.4.b	Indeks tata kelola Sistem pendidikan (<i>Angka</i>)	60	65	70	75	80	85	90

TUJUAN DAN SASARAN DAERAH			INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN		BASE-LINE 2024	TARGET KINERJA					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)			(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			2.4.c	Indeks Manajemen dan kepemimpinan Kepala sekolah <i>(Angka)</i>	60	65	70	75	80	85	90
			2.4.d	Indeks manajemen profesionalisme dan kompetensi Guru <i>(Angka)</i>	45,33	50,28	55,22	60,17	65,11	70,05	75,00
			2.4.e	Indeks Administrasi dan Pertanggung jawaban Sekolah <i>(Angka)</i>	100	100	100	100	100	100	100
	2.5	Meningkatnya tata kelola Sistem pendidikan	2.5.a	Indeks Manajemen Data Guru dan tenaga kependidikan <i>(Angka)</i>	98	100	100	100	100	100	100
			2.5.b	Indeks Manajemen data sekolah <i>(Angka)</i>	95	100	100	100	100	100	100
			2.5.c	Indeks Manajemen Data kepegawaian <i>(Angka)</i>	98	100	100	100	100	100	100
	2.6	Meningkatnya Literasi masyarakat	2.6.a	Indeks Budaya Baca Masyarakat <i>(Angka)</i>	57,41	64,51	71,61	78,70	85,80	92,90	100
			2.6.b	Indeks literasi wajib daerah <i>(Angka)</i>	-	20	30	40	50	60	70
3	Meningkatnya Daya Saing Kesehatan		3.a	Usia Harapan Hidup <i>(Tahun)</i>	66,21	66,51	66,81	67,11	67,41	67,71	68,01
			3.b	Prevalensi Stunting (%)	31,3	29,3	28,3	27,2	26,2	25,3	24,3
	3.1	Meningkatnya aksesibilitas layanan kesehatan	3.1.a	Indeks Ketercukupan faskes <i>(Angka)</i>	99	99,5	100	100	100	100	100
			3.1.b	Indeks Keterjangkauan faskes <i>(Angka)</i>	98	100	100	100	100	100	100
			3.1.c	Indeks Ketercakupan Program Jaminan Kesehatan <i>(Angka)</i>	97,21	98,5	98,65	98,80	98,95	99,10	99,25
	3.2	Meningkatnya Mutu Layanan Kesehatan	3.2.a	Indeks kepuasan Layanan Kesehatan <i>(Angka)</i>	84,12	85,92	87,72	89,52	91,32	93,12	95
			3.2.b	Rasio Dokter dengan Penduduk <i>(Rasio)</i>	0,18/1.000	1/1.000	1/1.000	1/1.000	1/1.000	1/1.000	1/1.000
			3.2.c	Rasio Dokter dengan Jumlah Pasien <i>(Rasio /1.000 pasien)</i>	0,87	5,3	5,3	5,4	5,4	5,5	5,5
			3.2.d	Angka Kematian Ibu <i>(per 100.000 KLH)</i>	179,4	74	71	68	65	62	59
			3.2.e	Angka Kematian Bayi <i>(per 1.000 KLH)</i>	12,0	10,0	9,5	9,0	8,5	8,0	7,5
			3.2.f	Angka Kesakitan <i>(per 100 jiwa)</i>	30,59	29,59	28,59	27,59	26,59	25,59	24,59
			3.2.g	Capaian SPM (%)	88,86	100	100	100	100	100	100
			3.2.h	Capaian Penyakit menular dan Tidak menular (%)	47,05	60,00	64,00	69,67	75,33	79,33	81,67
	3.3	Meningkatnya Tata Kelola Faskes	3.3.a	Tingkat kepatuhan SOP Pelayanan (%)	67,22	100	100	100	100	100	100
			3.3.b	Indeks Manajemen Obat <i>(Angka)</i>	100	100	100	100	100	100	100
			3.3.c	Indeks Manajemen BMHP <i>(Angka)</i>	98,83	100	100	100	100	100	100
			3.3.d	Indeks Manajemen Alkes <i>(Angka)</i>	39,35	64	66	68	70	72	74

TUJUAN DAN SASARAN DAERAH			INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN		BASE-LINE 2024	TARGET KINERJA					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)			(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			3.3.e	Indeks Manajemen Personalia Kesehatan <i>(Angka)</i>	45,6	51,33	57,07	62,80	68,53	74,27	80,00
			3.3.f	Indeks Manajemen Limbah <i>(Angka)</i>	19	30	35	40	45	50	55
	3.4	Meningkatnya tata kelola Sistem kesehatan	3.4.a	Indeks manajemen data faskes <i>(Angka)</i>	66	60	65	70	75	80	85
			3.4.b	Indeks Manajemen Data SDM Kesehatan (Medis, Perawat, Bidan dan nakes lainnya) <i>(Angka)</i>	35,51	40,43	45,34	50,26	55,17	60,13	65,00
			3.4.c	Indeks perencanaan/ manajemen Strategis sektor kesehatan <i>(Angka)</i>	78,57	100	100	100	100	100	100
	3.5	Meningkatnya PHBS dan Kesehatan Lingkungan	3.5.a	Cakupan Layanan CKG (Cek Kesehatan Gratis) (%)	-	41,40	49,50	57,60	65,70	73,80	81,90
	3.6	Menurunnya Prevalensi Stunting	3.6.a	Cakupan pemenuhan indikator Stunting (%)	70	72	74	76	78	80	82
			3.6.b	Cakupan Wasting (%)	21,2	20,8	20,4	20	19,6	19,2	18,8
			3.6.c	Cakupan Underweight (%)	34,6	34,0	33,4	32,8	32,2	31,6	31,0
4	Terpenuhinya Kebutuhan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas		4.a	Indeks Infrastruktur Dasar <i>(Angka)</i>	57,94	57,94	57,97	58,01	58,06	58,13	58,15
			4.b	Indeks Infrastruktur Konektivitas <i>(Angka)</i>	67,24	67,24	67,48	67,64	67,80	67,88	67,96
	4.1	Meningkatnya Infrastruktur Dasar	4.1.a	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak dan Aman (%)	68,31	70,31	72,31	74,31	76,31	78,31	80,00
			4.1.b	Indeks Drainase <i>(Angka)</i>	0,043	0,046	0,050	0,054	0,057	0,061	0,065
			4.1.c	Indeks Pengelolaan Persampahan <i>(Angka)</i>	17,04	18,47	18,53	18,66	18,73	18,83	18,93
	4.2	Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah	4.2.a	Indeks Kualitas Pelayanan Transportasi Darat <i>(Angka)</i>	3,25	3,45	3,65	3,85	4,05	4,25	4,55
			4.2.b	Indeks Kualitas Pelayanan Transportasi Laut <i>(Angka)</i>	24,6	24,8	25,0	25,2	25,4	25,6	25,8
			4.2.c	Indeks Ketimpangan Infrastruktur Konektivitas <i>(Angka)</i>	81,03	81,23	81,63	82,03	82,42	82,82	83,22
			4.2.d	Indeks Kualitas Pelayanan antar moda transportasi <i>(Angka)</i>	16,88	16,95	17,03	17,10	17,18	17,25	17,33
5	Meningkatnya Perlindungan Sosial dan Penguatan Kelembagaan Sosial Budaya	5.a	Indeks Kesejahteraan Sosial <i>(Angka)</i>	86,10	86,75	87,40	88,05	88,70	89,35	90,00	
		5.b	Indeks Pembangunan Kebudayaan <i>(Angka)</i>	53,83	58,19	62,55	66,91	71,27	75,63	80,00	

TUJUAN DAN SASARAN DAERAH			INDIKATOR		BASE-LINE 2024	TARGET KINERJA					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)			(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5.1	Meningkatnya Perlindungan Sosial	5.1.a	Cakupan PMKS yang mendapat perlindungan sosial (%)	100	100	100	100	100	100	100	
		5.1.b	Cakupan PMKS yang mendapat bantuan sosial (%)	4,27	4,55	4,84	5,13	5,42	5,71	6,00	
		5.1.c	Cakupan PMKS yang mendapat layanan jaminan Rehabilitasi Sosial (%)	4,68	4,90	5,12	5,34	5,56	5,78	6,00	
		5.1.d	Cakupan PMKS yang mendapat jaminan sosial (%)	70,66	72,22	73,78	75,34	76,90	78,46	80,00	
5.2	Menurunnya Kemiskinan	5.2.a	Tingkat Kemiskinan (%)	11,25	10,70	10,22	9,73	9,25	8,76	8,28	
		5.2.b	Pendapatan Perkapita Keluarga Miskin Ekstrem (<i>Rp</i>)	-	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	
		5.2.c	Partsipasi ekonomi produktif keluarga ekonomi miskin ekstrem (%)	-	20	20	20	20	20	20	
		5.2.d	Indeks Desa (<i>Angka</i>)	75,48	76,23	76,98	77,73	78,48	79,23	80,00	
		5.2.e	Indeks Afirmasi kemiskinan Dana desa dan APBD (<i>Angka</i>)	9,9	10	10	10	10	10	10	
5.3	Meningkatnya Kualitas Keluarga, Pemuda dan Penyetaraan Gender	5.3.a	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (<i>Angka</i>)	59,4	60,0	61,0	63,0	64,0	66,0	67,0	
		5.3.b	Indeks Ketimpangan Gender (<i>Angka</i>)	0,68	0,66	0,60	0,59	0,59	0,58	0,58	
		5.3.c	Indeks Pembangunan Pemuda (<i>Angka</i>)	58,00	76,00	76,83	77,66	78,49	79,32	80,15	
		5.3.d	Indeks Kerukunan Keluarga (KDRT) (<i>Angka</i>)	99,85	100	100	100	100	100	100	
5.4	Terjaminnya Daya Hidup Komunitas dan Budaya Lokal	5.4.a	Indeks Pemajuan Kebudayaan (<i>Angka</i>)	32,73	35,63	38,92	42,21	45,50	48,79	52,08	
		5.4.b	Indeks Pemberdayaan Dewan Kebudayaan (Indeks Kohesivitas Sosial/ Kerukunan Sosial) (<i>Angka</i>)	-	50	60	70	80	90	100	
		5.4.c	Indeks Daya Saing Produk Budaya Lokal (<i>Angka</i>)	-	70	75	80	85	90	95	
		5.4.d	Indeks Kesadaran Identitas Kelamaholotan (<i>Angka</i>)	-	50	60	70	80	90	100	
		5.4.e	Indeks Kelestarian Pemajuan Obyek Kebudayaan (<i>Angka</i>)	32,73	50	65	80	95	100	100	
5.5	Terjaminnya Perlindungan Pekerja Migran di daerah	5.5.a	Indeks Kesadaran/ Pengetahuan Migrasi Aman (<i>Angka</i>)	0,15	5	20	35	50	65	80	
		5.5.b	Indeks Sistem Keamanan Migrasi Desa (SISKAMDES) (<i>Angka</i>)	-	8	26,4	44,8	63,2	81,6	100	

TUJUAN DAN SASARAN DAERAH			INDIKATOR		BASE-LINE 2024	TARGET KINERJA					
TUJUAN DAN SASARAN						2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)			(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			55.c	Indeks Perangkat Perlindungan PMI di daerah <i>(Angka)</i>	55,56	75	80	85	90	95	100
6	Terjaminnya Daya Dukung Ekologis Jangka Panjang Serta Ketangguhan terhadap Bencana dan Perubahan Iklim		6a	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup <i>(Angka)</i>	72,58	78,22	78,39	78,56	78,73	78,90	79,07
			6.b	Indeks Ketangguhan Bencana <i>(Angka)</i>	0,52	0,53	0,54	0,55	0,56	0,57	0,58
			6.c	Indeks Penyelenggaraan Tata Ruang <i>(Angka)</i>	12	21	32	55	70	70	73
	6.1	Meningkatnya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup untuk Peningkatan Kualitas Hidup Yang Berkelanjutan	6.1.a	Indeks Kualitas Udara <i>(Angka)</i>	93,11	88,26	88,46	88,66	88,86	89,06	89,26
			6.1.b	Indeks Kualitas Air <i>(Angka)</i>	50,00	69,88	70,08	70,28	70,48	70,68	70,88
			6.1.c	Indeks Tutupan Lahan <i>(Angka)</i>	64,79	73,95	74,02	74,09	74,16	74,23	74,30
	6.2	Meningkatnya Mitigasi Bencana dan Kualitas Penanganan Bencana	6.2.a	Indeks Manajemen Mitigasi Bencana <i>(Angka)</i>	75,00	75,00	78,93	79,86	85,66	86,39	92,19
			6.2.b	Persentase Pengurangan Resiko Bencana (%)	60	60	70	70	80	80	90
			6.2.c	Indeks Kesiapsiagaam Tanggap Darurat <i>(Angka)</i>	94,42	94,42	93,33	95,00	95,00	96,67	97,67
			6.2.d	Indeks Rehabilitasi dan Rekontruksi <i>(Angka)</i>	67,7	67,7	70,0	70,0	80,0	80,0	90,0
	6.3	Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penataan Kota yang Serasi, Selaras dan Seimbang	6.3.a	Indeks Kesesuaian Pemanfaatan Ruang <i>(Angka)</i>	78,43	78,43	78,43	78,43	78,43	78,43	78,43
			6.3.b	Indeks Kemajuan RDTR <i>(Angka)</i>	-	-	25	25	25	25	25
			6.3.c	Indeks Kemajuan RTBL <i>(Angka)</i>	-	-	-	100	100	100	100
			6.3.d	Indeks Kepatuhan Dokumen Lingkungan Hidup <i>(Angka)</i>	100	100	100	100	100	100	100
			6.3.e	Indeks Keindahan Tata Kota <i>(Angka)</i>	-	-	100	100	100	100	100
7	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik		7.a	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) <i>(Angka)</i>	56,6 (CC)	58,79 (CC)	60,98 (B)	63,17 (B)	65,36 (B)	67,55 (B)	70,02 (BB)
			7.b	Indeks Kualitas Manajemen Kebijakan <i>(Angka)</i>	60,10 B	61,20 B	62,30 B	64,40 B	65, 50 B	66,60 B	67,70 B
			7.c	Indeks Profesionalisme Birokrasi <i>(Angka)</i>	73,13	77,20	80,72	85,72	88,72	89,72	89,87
			7.d	Indeks Produktivitas Birokrasi <i>(Angka)</i>	2,39 (C-)	2,59 (C)	2,69 (C)	2,89 (C)	2,99 (C)	3,09 (B-)	3,19 (B-)
	7.1	Meningkatnya Kualitas Transparansi	7.1.a	Indeks Keterbukaan Informasi Publik <i>(Angka)</i>	63,12	65	70	72	75	78	80

TUJUAN DAN SASARAN DAERAH			INDIKATOR		BASE-LINE 2024	TARGET KINERJA					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)			(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	7.2	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas	7.2.a	Indeks Kualitas Pertanggungjawaban Publik <i>(Angka)</i>	60,10 (B)	61,20 (B)	62,30 (B)	64,40 (B)	65,50 (B)	66,60 (B)	67,70 (B)
	7.3	Meningkatnya Kualitas Partisipasi	7.3.a	Indeks Kualitas Musrenbang <i>(Angka)</i>	80,34 (Baik)	81,28	82,22	83,16	84,10	85,04	86,00
			7.3.b	Indeks Integrasi Sektoral <i>(Angka)</i>	56,83	58,72	60,60	62,49	64,37	66,26	68,14
	7.4	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kebijakan Publik	7.4.a	Indeks Perencanaan <i>(Angka)</i>	83,8 (Baik)	84	84,2	84,4	84,6	84,8	85
			7.4.b	Indeks Kualitas Kebijakan Publik <i>(Angka)</i>	0	62	64	65	70	75	80
			7.4.c	Indeks Inovasi Daerah <i>(Angka)</i>	42,33 (Inovatif)	45,50	46,66	47,91	49,76	50,54	54,04
	7.5	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	7.5.a	Indeks Integritas Daerah <i>(Angka)</i>	61,22 (Rentan)	65 (Rentan)	68 (Rentan)	72 (Rentan)	75 (Waspada)	78 (Waspada)	80 (Terjaga)
			7.5.b	Indeks Pencegahan Korupsi <i>(Angka)</i>	27,57	30	73	75	78	80	85
	7.6	Meningkatnya Profesionalisme ASN	7.6.a	Persentase ASN yang Berkinerja Baik (%)	85,36	87	90	93	95	98	100
			7.6.b	Indeks Meritokrasi <i>(Angka)</i>	293,75	305	310	315	320	325	330
			7.6.c	Indeks Kepuasan Manajemen Kepegawaian <i>(Angka)</i>	-	70	72	75	80	85	90
	7.7	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	7.7.a	Indeks Kepuasan Pelayanan Publik <i>(Angka)</i>	84,12 B	85,17 B	86,22 B	87,27 B	88,32 A	89,37 A	90,42 A
			7.7.b	Indeks Kualitas Manajemen Pengaduan <i>(Angka)</i>	45	45	51-60	51-60	51-60	51-60	51-60
			7.7.c	Indeks Kualitas Pengelolaan Opini Publik <i>(Angka)</i>	50	60	65	70	75	80	84
			7.7.d	Indeks Persepsi Korupsi <i>(Angka)</i>	3,78	3,79	3,80	3,82	3,85	3,88	3,90
7.8	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	7.8.a	Opini BPK terhadap LKPD <i>(Opini)</i>	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
		7.8.b	Indeks Kualitas pengelolaan Keuangan Daerah <i>(Angka)</i>	75,83	78,83	80,36	81,36	82,36	83,36	84,36	
		7.8.c	Indeks Kualitas Pengelolaan Aset Daerah <i>(Angka)</i>	2,04	2,6	2,9	3,2	3,4	3,6	3,8	
7.9	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	7.9.a	Capaian Kinerja PAD (%)	100,18	100	100	100	100	100	100	
8	Meningkatnya Keamanan, Ketertiban dan Kebebasan Masyarakat	8.a	Indeks Keamanan dan Ketertiban <i>(Angka)</i>	50,20	60,00	65,96	71,92	77,80	88,84	89,16	
		8.b	Indeks Demokrasi Daerah <i>(Angka)</i>	78,01	78,02	78,30	78,52	78,77	79,02	79,27	
	8.1	Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban	8.1.a	Indeks Kualitas Deteksi Dini Gangguan keamanan <i>(Angka)</i>	72,5	74,53	76,73	78,93	81,13	83,33	84,00
			8.1.b	Indeks Manajemen Keamanan dan Ketertiban <i>(Angka)</i>	3,75	3,90	4,05	4,20	4,35	4,50	4,60

TUJUAN DAN SASARAN DAERAH			INDIKATOR		BASE-LINE 2024	TARGET KINERJA					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)			(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			8.1.c	Indeks Penegakan Hukum (<i>Angka</i>)	0,90	1,50	2,00	2,25	3,00	3,25	3,50
	8.2	Meningkatnya Kerukunan Umat Beragama	8.2.a	Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama (<i>Angka</i>)	81,43	81,43	82,11	82,79	83,47	84,15	84,83
	8.3	Meningkatnya Kualitas Demokrasi Daerah	8.3.a	Persentase partisipasi masyarakat dalam mengikuti pesta demokrasi (<i>Angka</i>)	62,83	-	-	-	-	80	-
			8.3.b	Tingkat keberdayaan Lembaga Partai Politik dalam melakukan Pendidikan Politik (<i>Angka</i>)	100	100	100	100	100	100	100

3.2 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

3.2.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Pencapaian tujuan dan sasaran pembangun jangka menengah daerah sangat ditentukan oleh penentuan strategi dan arah kebijakan pembangunan. Strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, lokus dan penentuan program perioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD. Sedangkan arah kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran RPJMD.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Flores Timur periode RPJMD Tahun 2025-2029 dirumuskan berdasarkan analisa terhadap kondisi internal dan eksternal serta mengidentifikasi berbagai kekuatan, peluang dan tantangan. Rumusan strategi dan arah kebijakan tersebut selanjutnya menjadi panduan bagi pemerintah, masyarakat dan sektor swasta dalam melaksanakan pembangunan Kabupaten Flores Timur Tahun 2025-2029 untuk mewujudkan visi Flores Timur Produktif dan Inovatif, dengan spirit pembangunan ”Lompatan Jauh” serta prinsip pembangunan yang sinergis, efisien, efektif, responsif, transparan, akuntabel, kerja sama dan kolaboratif. Rumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan RPJMD Tahun 2025-2029 secara rinci dapat dilihat pada tabel 3.6 berikut.

Tabel 3.6 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan
RPJMD Kab. Flores Timur Tahun 2025-2029

TUJUAN DAN SASARAN DAERAH	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)
Misi: Lompatan Produktivitas Semua Sektor Kehidupan dengan mengandalkan Ilmu dan Teknologi Terbaru, Kecerdasan Inovatif, Tata Kelola Transformatif dan Kearifan Lamaholot Paling Jernih		

TUJUAN DAN SASARAN DAERAH		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
(1)		(2)		(3)
1	Meningkatnya Produktivitas Ekonomi Daerah Berbasis Inovasi dan Ekonomi Hijau			
	1.1	Meningkatnya produktivitas dan pengembangan inovasi berbasis ekonomi digital pada sektor-sektor unggulan	1.1.1	Menggerakkan produktivitas subsektor tanaman pangan dan hortikultura berskala lompatan
				Pengembangan usaha tani tanaman pangan lahan basah skala big push dengan memanfaatkan lahan basah potensial non fungsional dengan pola korporasi inti plasma
				Pengembangan usaha tani lahan basah skala rakyat dengan penyediaan prasarana dan alsintan yang memadai
				Pengembangan usaha tani tanaman pangan lahan kering skala big push dengan memanfaatkan lahan kering potensial non fungsional dengan pola korporasi inti plasma
				Pengembangan usaha tani lahan kering skala rakyat dengan penyediaan prasarana dan alsintan yang memadai
				Pengembangan terfokus jagung, padi, sorgum, dan kelor untuk mendukung hilirisasi produk tanaman pangan
				Pengembangan hortikultura berbasis usaha perorangan dan desa untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG)
			1.1.2	Menggerakkan produktivitas subsektor perkebunan berskala lompatan
				Merintis peremajaan Kelapa, Mete, Kemiri, dan mengembangkan sistem manajemen transisi dalam masa peremajaan
				Mendukung pengelolaan usaha tani komoditi perkebunan strategis bernilai ekonomi tinggi seperti cengkeh dan pala, dengan dukungan sistem informasi pasar, riset, dan pengembangan yang lebih berdaya
				Mengelola sistem informasi pasar untuk semua komoditi perkebunan strategis Flores Timur dan bersinergi dengan pelaku usaha perdagangan dan transportasi untuk kepastian nilai tambah dan kestabilan harga
			1.1.3	Menggerakkan subsektor peternakan berskala lompatan
				Mengembangkan usaha peternakan sapi skala big push di lokasi yang terkonsentrasi, dengan pola korporasi inti plasma, dengan inti BUMD atau perusahaan swasta
				Mengembangkan usaha peternakan babi skala big push di lokasi yang terkonsentrasi, dengan pola korporasi inti plasma, dengan inti BUMD atau perusahaan swasta
				Mengembangkan usaha peternakan ayam potong dan ayam petelur untuk mendukung program MBG, dengan pola korporasi, baik yang dilakukan BUMDes, BUMD, perusahaan swasta perorangan, maupun koperasi (termasuk koperasi merah putih)
				Mendukung perkembangan peternakan rakyat dengan dukungan obat (vaksin), pelatihan, anakan, maupun input usaha peternakan lain
			1.1.4	Menggerakkan subsektor perikanan berskala lompatan
				Pengembangan rumput laut berkualitas big push dengan pola korporasi inti plasma, dengan inti BUMD dan atau perusahaan swasta

TUJUAN DAN SASARAN DAERAH			STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
(1)			(2)		(3)
					Pengembangan usaha perikanan tangkap berkualitas big push dengan pola korporasi inti plasma, dengan inti BUMD dan atau perusahaan swasta
					Pengembangan perikanan rakyat dengan dukungan sarana prasarana
					Pembangunan pabrik es dan cold storage di beberapa titik strategis, berbasis usaha rakyat dan atau BUMD
					Pengembangan fokus pada beberapa komoditi perikanan strategis dengan pendekatan pengembangan terpadu
					Pengembangan sistem jejaring kerja sama subsektor perikanan
					Pengembangan kerja sama dengan Provinsi untuk kerja sama pendayagunaan PPI
					Pengembangan linkage dengan perusahaan pengelolaan ikan, baik swasta maupun BUMD
			1.1.5	Menggerakkan subsektor pariwisata berskala lompatan	Menggerakkan sektor kepariwisataan dengan event-event kepariwisataan berskala nasional dan internasional: ▪ Memaksimalkan event Semana Santa dalam kerja sama dengan pemangku kepentingan terkait, ▪ Menyelenggarakan dan memaksimalkan penyelenggaraan event Festival Bale Nagi, Solor Fun Run, Larantuka Fishing Festival, dan Festival Budaya Lamaholot, ▪ Bersinergi secara aktif dan kreatif dengan Pemerintah Provinsi NTT untuk memaksimalkan dampak event Tour de eNTeTe, ▪ Memberikan dukungan bagi penyelenggaraan event-event lokal eksisting
					Menggerakkan investasi terfokus ke obyek pariwisata unggulan terpilih dan terbatas untuk dampak 5 tahun: ▪ Menyiapkan rencana bisnis beberapa alternatif obyek atau destinasi untuk ditawarkan kepada investor ▪ Menyelenggarakan Business Meeting untuk penawaran rencana-rencana bisnis yang sudah disiapkan
					Mengkoordinasikan perencanaan dan membangun infrastruktur untuk mendukung pembangunan dan pengembangan obyek dan destinasi wisata unggulan
					Menyelenggarakan forum bisnis untuk menggairahkan pertumbuhan industri akomodasi
					Menyelenggarakan berbagai pelatihan untuk pelaku UMKM yang bernilai kepariwisataan
					Menggerakkan tumbuhnya ide-ide kreatif bidang lain dan memberikan dukungan untuk menghasilkan dampak ekonomi dan kepariwisataan
			1.1.6	Transformasi Kelembagaan Pendamping, Penyuluh, Manajemen, dan wirausahawan agrobisnis milenial	Optimalisasi peran penyuluh dan pengembangan kompetensi penyuluh
					Pengembangan sistem pendampingan dan penyuluhan
		Optimalisasi peran generasi baru dalam usaha pertanian modern, melalui pelatihan dan inkubasi, melalui usaha-usaha pertanian korporasi inti plasma yang dimotori BUMD			

TUJUAN DAN SASARAN DAERAH			STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
(1)			(2)		(3)
1.2	Meningkatnya kecepatan Hilirisasi Sumber Daya Alam unggulan, produktivitas serta Kemudahan Investasi	1.2.1	Menggerakkan hilirisasi produk-produk tanaman pangan		Membangun industri olahan jagung, sorgum, kelor, dan olahan produk tanaman pangan lain
		1.2.2	Menggerakkan hilirisasi produk-produk tanaman perkebunan		Membangun dan mengembangkan Unit Pengolahan Hasil Kelapa, Jambu Mete, Kemiri, Kopi, dan Kakao dalam kerja sama dengan Pelaku Usaha eksisting
		1.2.3	Menggerakkan hilirisasi produk-produk peternakan		Membangun dan mengembangkan Rumah Potong Hewan dan usaha pengolahan hasil peternakan
		1.2.4	Menggerakkan hilirisasi produk-produk perikanan		Membangun dan mengembangkan industri pengolahan hasil perikanan dalam kerja sama dengan pelaku usaha
		1.2.5	Peningkatan perizinan usaha dan investasi yang kondusif		Pengembangan sistem perizinan yang profesional selaras peraturan perundang-undangan, dengan topangan sumber daya manusia berintegritas tinggi dan teknologi mumpuni
		1.2.6	Peningkatan budaya pelayanan usaha dan investasi yang baik		Mengembangkan budaya pelayanan birokrasi yang handal, yang ditopang dengan sistem manajemen pengaduan yang efektif
		1.2.7	Pengembangan Tata Ruang Visioner		Mempercepat penyusunan RTRW yang visioner dan jelas sebagai bagian dari dukungan terhadap pertumbuhan investasi
		1.2.8	Tata Kota yang Nyaman dan Menggairahkan Produktivitas		Menata dan memperindah wajah kota sebagai bagian dari upaya menggairahkan kehidupan ekonomi dan investasi
		1.2.9	Pengembangan Branding Potensi Ekonomi Daerah		Membangun citra kota dan daerah yang baik, dengan potensi ekonomi dan investasi, yang berdampak pada kehidupan ekonomi dan investasi
		1.2.10	Perluasan dan penguatan posisi pasar produk-produk lokal		Memfasilitasi perdagangan produk-produk lokal dengan dukungan pengembangan jejaring kerja sama dan subsidi pemasaran Membangun Gerai Kreatif untuk memfasilitasi pemasaran produk-produk industri kreatif Flores Timur
		1.2.11	Pengendalian Inflasi		Mengendalikan inflasi untuk menjamin efisiensi ekonomis dan akses masyarakat terhadap harga barang dan jasa yang terjangkau
1.3	Meningkatnya Daya Saing Kelembagaan Ekonomi	1.3.1	Menumbuhkembangkan perkoperasian		Meningkatkan daya saing koperasi melalui pelatihan pengurus dan pengawas koperasi serta melakukan melakukan pengawasan/audit koperasi
		1.3.2	Dukungan, Pemberdayaan, dan Pelatihan Perkoperasian		Menggerakkan pertumbuhan koperasi melalui fasilitasi dan kerja sama dalam pengembangan usaha-usaha produktif
		1.3.3	Dukungan Aspek Legal		Pendataan dan pemberian dukungan teknis untuk penguatan aspek legal UMKM
		1.3.4	Praksis Pengembangan Kewirausahaan		Pelatihan dan penyediaan ruang usaha bagi perkembangan kewirausahaan dan wirausahawan baru
		1.3.5	Pendampingan Kewirausahaan dan UMKM		Pengembangan sistem pendampingan kewirausahaan dan UMKM yang ditopang Pendamping Kewirausahaan dan UMKM kompeten
		1.3.6	Menjamin eksistensi lembaga keuangan di daerah		Menciptakan lingkungan yang kondusif melalui kemudahan perizinan, dukungan infrastruktur serta keamanan dan stabilisasi politik daerah

TUJUAN DAN SASARAN DAERAH			STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
(1)			(2)		(3)
					Memberi dukungan regulasi seperti regulasi yang mempermudah akses untuk pembiayaan UKM
					Mendorong inovasi
					Meningkatkan literasi keuangan kerjasama dengan lembaga keuangan untuk memberi edukasi kepada masyarakat
					Memfasilitasi akses keuangan, seperti memfasilitasi pembangunan kantor cabang dan juga penyertaan modal
			1.3.7	Pengembangan sistem inkubasi bisnis	Pengembangan sistem inkubasi bisnis dalam kerja sama dengan usaha-usaha skala lebih besar
	1.3.8	Meningkatkan kualitas manajemen lembaga jasa konstruksi di daerah	Meningkatkan kegiatan pembinaan, pengawasan dan memfasilitasi lembaga jasa konstruksi, meliputi penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi, pengawasan tertib usaha, penerbitan izin usaha, dan penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi		
	1.4	Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Perekonomian	1.4.1	Peningkatan fisik Pasar ramah pelaku perdagangan lokal	Pembangunan dan penyediaan pasar dan atau renovasi pasar eksisting agar lebih layak dan ergonomis untuk memfasilitasi perdagangan lokal
			1.4.2	Fasilitasi Konektivitas untuk memudahkan perdagangan di dalam daerah dan keluar daerah	Mengupayakan dukungan untuk pengadaan Ferry penyeberangan lintas 3 pulau se-Kabupaten Flores Timur
					Mengupayakan dukungan PELNI untuk pelayaran perdagangan barang dan jasa ke titik-titik strategis perdagangan di luar daerah
					Membangun dan mengembangkan fasilitas pelabuhan dan atau jembatan tambatan untuk memudahkan perdagangan antar pulau
1.4.3			Penyediaan infrastruktur digital untuk memfasilitasi perdagangan online	Menyediakan marketplace online untuk memfasilitasi perdagangan lokal	
1.4.4	Pemastian kelancaran perdagangan bahan kebutuhan pokok	Operasi pasar dan pemantauan harga bahan kebutuhan pokok			
		Bekerja sama dengan BUMD dan atau pelaku usaha perdagangan untuk kelancaran perdagangan dan pengendalian harga bahan kebutuhan pokok			
1.4.5	Pemastian kelancaran perdagangan sumber daya energi strategis	Bekerja sama dengan BUMD dan atau pelaku usaha perdagangan untuk kelancaran perdagangan dan pengendalian harga minyak tanah dan bensin			
2	Meningkatnya Daya Saing Pendidikan				
	2.1	Meningkatnya aksesibilitas Pendidikan	2.1.1	Meningkatkan pemerataan dan akses layanan pendidikan berkualitas	Penyediaan sarana prasarana pendidikan yang memadai, aman (sesuai standar), dan mudah dijangkau oleh seluruh siswa/i termasuk kelompok rentan dan daerah tertinggal
					Mendorong integrasi teknologi dalam proses belajar-mengajar secara inklusi
					Meningkatkan layanan pendidikan yang responsif terhadap kebutuhan peserta didik
			2.1.2	Mendorong perluasan akses pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan bagi semua usia sekolah	Peningkatan keterjangkauan layanan pendidikan dan pengurangan hambatan sosial-ekonomi bagi peserta didik
					Meningkatkan ketersediaan dan konektivitas sarana transportasi serta fasilitas pendukung

TUJUAN DAN SASARAN DAERAH			STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
(1)			(2)		(3)
	2.2	Meningkatnya Kualitas/ Mutu Pendidikan			Membangun kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat
			2.2.1	Meningkatkan tingkat kelulusan siswa	peningkatan kualitas pendidikan, pemanfaatan teknologi, dan pengembangan keterampilan siswa
			2.2.2	Meningkatkan kompetensi literasi, numerasi, dan pemecahan masalah siswa agar mencapai standar internasional	Pengembangan kompetensi guru dalam literasi dan numerasi serta penyediaan materi ajar yang mendukung peningkatan kemampuan dasar peserta didik
			2.2.3	Meningkatkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, analitis, dan pemecahan masalah	Peningkatan kompetensi guru dalam menerapkan pendekatan pembelajaran yang mendorong berpikir tingkat tinggi serta pengembangan kurikulum dan asesmen berbasis HOTS
			2.2.4	Meningkatkan penguasaan kompetensi abad 21: <i>Critical Thinking</i> (Berpikir Kritis), <i>Creativity</i> (Kreativitas), <i>Communication</i> (Komunikasi), dan <i>Collaboration</i> (Kolaborasi) (4C)	Penguatan kapasitas pendidik dalam implementasi pembelajaran berorientasi 4C dan pengembangan lingkungan belajar yang mendorong kreativitas, kolaborasi, komunikasi efektif, dan berpikir kritis
			2.2.5	Meningkatkan penanaman nilai-nilai karakter dan kearifan lokal dalam proses pendidikan	Pengembangan kurikulum dan kegiatan pendidikan yang membentuk karakter siswa berlandaskan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal daerah
			2.2.6	Mendorong pemanfaatan teknologi digital dalam proses pembelajaran dan tata kelola pendidikan	Peningkatan infrastruktur digital, penyediaan platform pembelajaran daring, serta penguatan kapasitas SDM pendidikan dalam penggunaan teknologi
	2.3	Meningkatnya Relevansi Pendidikan	2.3.1	Meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja	Penyelarasan kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja dan pengembangan soft skills melalui kemitraan pendidikan dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja (DUDIKA)
	2.4	Meningkatnya Tata Kelola Satuan Pendidikan	2.4.1	Meningkatkan efektivitas tata kelola administrasi dan pertanggungjawaban sekolah untuk transparansi dan akuntabilitas	Pengembangan sistem administrasi digital, standarisasi prosedur pelaporan, dan penguatan mekanisme audit internal sekolah
			2.4.2	Meningkatkan efektivitas dan transparansi tata kelola sistem pendidikan	Mendorong penerapan standar tata kelola yang jelas, pelatihan SDM pengelola pendidikan, pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan (SIMDIK), dan mekanisme pelaporan serta evaluasi yang rutin dan transparan
			2.4.3	Meningkatkan kapasitas manajerial dan kepemimpinan kepala sekolah	Penguatan pelatihan kepemimpinan, sistem evaluasi kinerja kepala sekolah, dan penerapan praktik manajemen berbasis bukti dalam pengelolaan sekolah
			2.4.4	Meningkatkan profesionalisme dan kompetensi guru melalui pelatihan berkelanjutan dan pengembangan karier yang terstruktur	Penerapan program sertifikasi guru, penyediaan pelatihan berbasis kebutuhan, dan evaluasi kinerja guru secara rutin untuk meningkatkan kualitas pembelajaran
			2.4.5	Meningkatkan tata kelola administrasi dan akuntabilitas sekolah dengan penerapan sistem yang transparan dan efisien	Pengembangan dan implementasi sistem administrasi digital, peningkatan kapasitas SDM dalam manajemen administrasi, serta pengawasan berkala untuk memastikan pertanggungjawaban yang jelas dan tepat waktu

TUJUAN DAN SASARAN DAERAH			STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
(1)			(2)		(3)
	2.5	Meningkatnya tata kelola Sistem pendidikan	2.5.1	Meningkatkan manajemen data guru dan tenaga kependidikan dengan sistem digital yang akurat dan terintegrasi	Penguatan kapasitas SDM pengelola data, penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) manajemen data yang standar, serta pemanfaatan teknologi informasi
			2.5.2	Meningkatkan efisiensi dan akurasi pengelolaan data sekolah untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data	Peningkatan kapasitas pengelola data sekolah, penerapan sistem informasi terintegrasi, dan penerapan SOP manajemen data secara konsisten
			2.5.3	Meningkatkan pengelolaan data kepegawaian secara sistematis dan berbasis teknologi	Penguatan kompetensi petugas pengelola data kepegawaian
					Penerapan SOP yang jelas
					Pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi dan aman
	2.5.4	Meningkatkan profesionalisme dan kompetensi guru melalui pelatihan berkelanjutan dan pengembangan karier yang sistematis	Peningkatan akses dan kualitas program pelatihan, pembinaan kompetensi berbasis standar, serta monitoring dan evaluasi kinerja guru secara berkala untuk menjamin mutu pendidikan		
	2.6	Meningkatnya Literasi masyarakat	2.6.1	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan literasi masyarakat	Penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola perpustakaan
					Meningkatkan sarana literasi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat
					Mengembangkan kompetisi literasi usia sekolah dan masyarakat
			2.6.2	Meningkatkan akses dan minat baca masyarakat	Pengembangan perpustakaan umum, digital dan komunitas. Penguatan kemitraan dan kolaborasi
2.6.3			Meningkatkan kompetensi literasi wajib bagi ASN	Penerapan budaya literasi wajib daerah bagi ASN melalui penyediaan literasi yang sesuai dengan bidang pekerjaan dan integrasi literasi dalam penilaian kinerja Perangkat Daerah	
3	Meningkatnya Daya Saing Kesehatan		3.1.1	Meningkatkan akses layanan kesehatan dasar masyarakat dan memperluas layanan promotif dan preventif untuk menurunkan angka kematian	Penyediaan Fasilitas Kesehatan dan Sarana prasarana yang memenuhi standar (termasuk RSU)
	3.1	Meningkatnya Aksesibilitas Layanan Kesehatan			Pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular
					Pemetaan kebutuhan dan lokasi faskes berbasis wilayah
					Penguatan peran Puskesmas Pembantu dan Poskesdes
	3.1.2	Meningkatkan akses dan kepesertaan masyarakat dalam program jaminan kesehatan secara menyeluruh dan berkelanjutan	Penguatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan pendanaan kesehatan termasuk reaktivasi peserta non aktif		
			Penguatan kendali mutu dan biaya pelayanan kesehatan JKN, serta pengembangan skema pendanaan inovatif untuk kesehatan		
	3.2	Meningkatnya Mutu Layanan Kesehatan	3.2.1	Meningkatkan Mutu Layanan Kesehatan Usaha Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Usaha Kesehatan Perorangan (UKP)	Meningkatkan upaya tindak lanjut terhadap umpan balik kepuasan pasien
					Meningkatkan upaya promotif preventif kuratif dan rehabilitatif
			3.2.2	Meningkatkan ketersediaan dan pemerataan dokter melalui rekrutmen, distribusi, dan pengembangan kompetensi secara berkelanjutan	Pemetaan kebutuhan dokter berdasarkan jumlah penduduk dan beban pelayanan Pemenuhan tenaga dokter pada faskes, Penyusunan dan implementasi kebijakan insentif daerah

TUJUAN DAN SASARAN DAERAH			STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
(1)			(2)		(3)
			3.2.3	Meningkatkan efektivitas layanan kesehatan ibu dan anak untuk menekan angka kematian	Penatalaksanaan kasus secara Optimal
			3.2.4	Meningkatkan akses dan mutu layanan kesehatan ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir	Penatalaksanaan manajemen kesehatan Ibu dan Anak
					Meningkatkan pertolongan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar
			3.2.5	Meningkatkan upaya promotif dan preventif melalui edukasi masyarakat, pengendalian faktor risiko penyakit, serta penguatan layanan kesehatan dasar	Memperkuat deteksi dini faktor risiko dan kapasitas pelayanan kegawatdaruratan ibu dan anak
					Penguatan layanan kesehatan masyarakat berbasis pencegahan dan pengendalian penyakit, serta pemantauan dan pelaporan kasus secara terpadu.
	3.3.	Meningkatnya Tata Kelola Faskes	3.2.6	Meningkatkan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan secara merata dan berkualitas	Penyediaan pelayanan medis sesuai standar dan prosedur klinis
					Pencegahan dan pengendalian Penyakit Menular dan tidak Menular secara terpadu
			3.3.1	Penerapan Standardisasi Operasional Pelayanan	Review rutin, penyelarasan dan penyempurnaan SOP Pelayanan Faskes
					Peningkatan pemahaman dan kompetensi SDM terkait SOP pelayanan melalui pelatihan berkelanjutan
					Penerapan <i>reward and punishment</i> berdasarkan tingkat kepatuhan terhadap SOP
					Digitalisasi SOP untuk mempermudah akses, pengawasan, dan pelaporan
					Penguatan sistem manajemen pengaduan masyarakat terkait persoalan pelayanan kesehatan
					Pelibatan masyarakat atau pengguna layanan dalam pengawasan kepatuhan terhadap SOP
			3.3.2	Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, dan penggunaan obat yang rasional untuk mendukung pelayanan kesehatan yang berkualitas	Perencanaan Kebutuhan Obat secara Tepat berdasarkan Pola Penyakit dan Konsumsi
					Review rutin kondisi ketersediaan obat
					Pemastian pelaksanaan Peraturan Bupati tentang Reimbursement obat yang dibeli di luar Apotek Faskes
					Pengadaan Obat yang Efisien dan Transparan melalui <i>e-Catalog</i> dan <i>e-Purchasing</i>
			3.3.3	Meningkatkan efisiensi, ketersediaan, dan ketepatan penggunaan BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) dalam mendukung layanan kesehatan yang optimal	Distribusi Obat secara Tepat Waktu dan Tepat Jumlah ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan
					Melaksanakan perencanaan kebutuhan BMHP berbasis data pola konsumsi, pengadaan secara efisien dan transparan melalui sistem elektronik
					Pendistribusian BMHP yang tepat waktu dan tepat sasaran ke fasilitas kesehatan
					Memperkuat sistem informasi manajemen logistik BMHP untuk pemantauan stok secara <i>real-time</i>
					Melakukan evaluasi berkala guna mencegah kekurangan maupun kelebihan stok
					Menjamin mutu dan masa kedaluwarsa BMHP di seluruh fasilitas pelayanan

TUJUAN DAN SASARAN DAERAH			STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
(1)			(2)		(3)
			3.3.4	Meningkatkan pengelolaan alat kesehatan secara menyeluruh dengan dukungan SDM terampil dan pemanfaatan teknologi informasi	Penguatan kapasitas SDM dalam pengelolaan dan pemeliharaan alat kesehatan Peningkatan alokasi anggaran untuk kalibrasi Alkes
			3.3.5	Meningkatkan kualitas dan ketersediaan tenaga kesehatan melalui manajemen personalia yang efektif dan berkelanjutan	Melaksanakan perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan berbasis analisis beban kerja
					Pengembangan kompetensi melalui pelatihan dan sertifikasi, serta sistem rekrutmen dan penempatan yang tepat guna
					Memperkuat monitoring dan evaluasi kinerja personalia kesehatan secara berkala
					Meningkatkan kesejahteraan dan motivasi tenaga kesehatan untuk mendukung pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkelanjutan
			3.3.6	Meningkatkan pengelolaan limbah kesehatan yang aman, ramah lingkungan, dan sesuai standar untuk menjaga kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan	Melaksanakan pengelolaan limbah mulai dari pemilahan, pengumpulan, penyimpanan, hingga pemusnahan limbah secara terintegrasi dan sesuai standar teknis
					Memperkuat kapasitas SDM melalui pelatihan pengelolaan limbah dan pemantauan rutin untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan
					Mengembangkan sistem pelaporan dan pengawasan yang transparan
					Penyediaan Sarana Prasarana pengelolaan Limbah dan mendorong penggunaan teknologi ramah lingkungan dalam pengolahan limbah
	3.4	Meningkatnya Tata Kelola Sistem Kesehatan	3.4.1	Meningkatkan kualitas, akurasi, dan keterpakaian data fasilitas kesehatan untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat dan pelayanan yang efektif	Membangun sistem manajemen data yang terintegrasi dan berbasis teknologi informasi
					Memastikan pengumpulan data yang lengkap dan akurat dari seluruh faskes
					Melakukan pelatihan dan pembinaan sumber daya manusia agar mampu mengelola dan memanfaatkan data secara optimal
					Menjalankan monitoring dan evaluasi rutin untuk menjaga kualitas data dan pemanfaatannya dalam perencanaan serta evaluasi program kesehatan
			3.4.2	Meningkatkan pengelolaan data SDM kesehatan yang akurat, terintegrasi, dan mudah diakses untuk mendukung perencanaan, distribusi, dan pengembangan tenaga kesehatan secara efektif	Mengembangkan sistem informasi SDM kesehatan berbasis digital yang menyimpan data lengkap dan real-time mengenai tenaga medis, perawat, bidan, dan nakes lainnya
					Meningkatkan pembinaan dan pelatihan agar petugas mampu mengelola data dengan baik serta menerapkan standar keamanan data
					Pengembangan kompetensi, dan kebutuhan tenaga kesehatan di lapangan
			3.4.3	Meningkatkan efektivitas perencanaan dan manajemen strategis sektor kesehatan untuk mencapai pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata, dan berkelanjutan	Mengoptimalkan penyusunan rencana kebijakan strategis berbasis data dan analisis kebutuhan kesehatan masyarakat
					Meningkatkan koordinasi lintas sektor dan penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam perencanaan dan manajemen program kesehatan

TUJUAN DAN SASARAN DAERAH			STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
(1)			(2)		(3)
	3.5	Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Kesehatan Lingkungan	3.5.1	Meningkatkan akses dan partisipasi penduduk dalam pemeriksaan kesehatan gratis untuk deteksi dini dan pencegahan penyakit	Mengoptimalkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pemeriksaan kesehatan gratis
	3.6	Menurunnya Prevalensi Stunting	3.6.1	Meningkatkan Upaya Intervensi Spesifik dan sensitif Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting, Meningkatkan konevergensi peran Lintas sektoral	Memperluas jangkauan layanan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) ke wilayah terpencil dan kelompok rentan
					Memperkuat kolaborasi antar fasilitas kesehatan dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan PKG
					Pencegahan dan Penatalaksanaan enam kelompok Sasaran intervensi Stunting
			3.6.2	Meningkatkan deteksi dini dan penanganan kasus wasting melalui penguatan layanan gizi dan intervensi tepat waktu di tingkat komunitas	Konvergensi antar OPD dan Stakeholders lainnya
					Penciptaan dan pengembangan Inovasi dalam mendukung upaya pencegahan percepatan penurunan Stunting
					Penguatan sistem surveilans gizi, pelatihan tenaga kesehatan, dan peningkatan akses layanan gizi khusus untuk anak dengan risiko wasting
			3.6.3	Meningkatkan pemantauan dan penanganan balita underweight melalui intervensi gizi trpadu dan edukasi keluarga.	Penguatan sistem pemantauan gizi balita, pelatihan tenaga kesehatan, dan peningkatan akses layanan gizi untuk mengurangi prevalensi underweight
4	Terpenuhinya Kebutuhan Infrastruktur Dasar Dan Konektivitas				
4.1	Meningkatnya Infrastruktur Dasar	4.1.1	Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM)	Meningkatkan kualitas air yang aman untuk dikonsumsi melalui pembangunan, peningkatan, perluasan serta pembangunan sumur tanah dalam	
		4.1.2	Meningkatkan Manajemen Air minum tingkat desa	Pembentukan dan pengembangan kapasitas kelompok pengelola sistem pembangunan air minum di desa	
		4.1.3	Meningkatkan Pengelolaan Sistem Drainase	meningkatkan perencanaan sistem drainase melalui penyusunan masterplan drainase, pembangunan drainase di jalan dan pembangunan drainase di pemukiman	
		4.1.4	Meningkatkan Tata kelola Persampahan	Meningkatkan pengelolaan sampah jangka pendek dan jangka panjang melalui penyusunan dokumen pengelolaan sampah, pengangkutan sampah, pengolahan sampah, pengurangan sampah, kampanye peduli sampah, peningkatan sarana prasarana pengolahan sampah dan membangun kerjasama dengan berbagai pihak	
		4.1.5	Meningkatkan pengelolaan limbah B3	Meningkatkan penanganan bahan berbahaya dan beracun melalui penerbitan persetujuan teknis limbah B3, pembinaan dan pengawasan limbah B3	
		4.1.6	Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Meningkatkan akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah melalui penyusunan master plan dan kegiatan penyedotan tinja	
4.2	Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah	4.2.1	Meningkatkan Penyelenggaraan Jalan	Meningkatkan Aksesibilitas jalan melalui penyusunan rencana induk pembangunan jalan, leger jalan, rekontruksi, reserfasi, rehabilitasi dan pembangunan jalan dan jembatan	

TUJUAN DAN SASARAN DAERAH			STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
(1)			(2)		(3)
			4.2.2	Meningkatkan Penyelenggaraan Lalu lintas dan angkutan jalan	Meningkatkan sarana prasarana transportasi darat
			4.2.3	Meningkatkan kualitas layanan terminal	Penyusunan regulasi pengelolaan terminal, meningkatkan sarana prasarana terminal dan meningkatkan SDM pengelola terminal
			4.2.4	Meningkatkan pengelolaan pelayaran	Meningkatkan sarana prasarana transportasi laut
			4.2.5	Meningkatkan pengelolaan pelayanan antar moda transportasi	Penyusunan master plan moda transportasi, evaluasi layanan antar moda transportasi, koordinasi lintas sektor terkait untuk meningkatkan konektivitas antar moda transportasi
5	Meningkatnya Perlindungan Sosial dan Penguatan Kelembagaan Sosial Budaya				
	5.1	Meningkatnya Perlindungan Sosial	5.1.1	Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial secara menyeluruh	Perluasan jangkauan layanan kesejahteraan sosial yang adil dan inklusif, penguatan kapasitas kelembagaan sosial, serta integrasi data dan program antar sektor
			5.1.2	Meningkatkan jangkauan dan efektivitas program perlindungan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Perluasan akses bantuan dan layanan sosial yang berkelanjutan bagi PMKS, penguatan mekanisme rujukan dan rehabilitasi sosial.
			5.1.3	Meningkatkan distribusi bantuan sosial yang tepat sasaran dan efektif	Penguatan sistem pendataan dan verifikasi penerima bantuan sosial, peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyaluran bantuan, serta perluasan cakupan bantuan
			5.1.4	Meningkatkan akses dan kualitas layanan jaminan rehabilitasi bagi PMKS	Pengembangan layanan rehabilitasi yang inklusif dan terpadu, serta penyediaan sumber daya yang memadai
			5.1.5	Meningkatkan inklusi PMKS dalam program jaminan sosial melalui perluasan akses kepesertaan, edukasi, dan peningkatan koordinasi antar lembaga penyelenggara	Perluasan program jaminan sosial yang mudah diakses oleh PMKS, peningkatan kesadaran dan pemahaman PMKS tentang manfaat jaminan sosial.
	5.2	Menurunnya Kemiskinan	5.2.1	Meningkatkan efektivitas program pengentasan kemiskinan	Pengembangan kebijakan yang pro-poor, pelaksanaan program bantuan sosial yang tepat sasaran
			5.2.2	Meningkatkan pendapatan perkapita keluarga Miskin ekstreem	Menciptakan lapangan kerja untuk penanganan kemiskinan
			5.2.3	Mendorong keterlibatan keluarga miskin ekstrem dalam aktivitas ekonomi produktif	Penyediaan program pemberdayaan ekonomi yang inklusif, fasilitasi akses permodalan mikro, serta pengembangan jaringan pasar bagi keluarga miskin ekstrem
			5.2.4	Mengoptimalkan pemanfaatan dana desa dan APBD untuk program afirmasi kemiskinan	Penguatan tata kelola penggunaan dana desa dan APBD secara transparan dan akuntabel. Mensinergikan program ketahanan pangan desa dan program pengentasan kemiskinan Memberikan apresiasi pada desa-desa dengan prestasi pengentasan kemiskinan terbaik

TUJUAN DAN SASARAN DAERAH			STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
(1)			(2)		(3)
5.3	Meningkatnya Kualitas Keluarga, Pemuda dan Penyetaraan Gender	5.3.1	Mendorong peningkatan kualitas hidup keluarga melalui peningkatan akses pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial yang menyeluruh serta penguatan nilai-nilai keluarga harmonis	Penerapan program terpadu lintas sektor yang fokus pada penguatan kapasitas keluarga, penyediaan layanan dasar berkualitas, dan pemberdayaan peran keluarga	
		5.3.2	Mengurangi ketimpangan gender dengan memperkuat kebijakan inklusif yang memastikan kesetaraan akses pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi sosial bagi perempuan dan laki-laki	Penguatan regulasi dan program afirmatif untuk mendukung pemberdayaan perempuan, peningkatan kesadaran masyarakat tentang kesetaraan gender	
		5.3.3	Mendorong pengembangan potensi pemuda dalam pembangunan sosial dan ekonomi.	Menyusun kebijakan yang mendukung pemberdayaan pemuda, memperkuat program kepemudaan, serta menyediakan ruang dan fasilitas untuk pengembangan	
		5.3.4	Meningkatkan kesadaran dan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga	Penguatan perlindungan dan layanan bagi korban KDRT secara efektif	
	5.4	Terjaminnya Daya Hidup Komunitas dan Budaya Lokal	5.4.1	Meningkatkan pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan nilai-nilai budaya lokal secara berkelanjutan sebagai bagian dari pembangunan karakter dan identitas daerah yang berdaya saing	Penguatan ekosistem kebudayaan melalui fasilitasi kegiatan seni budaya, perlindungan warisan budaya, serta pemberdayaan komunitas budaya dalam pembangunan daerah Penguatan dukungan dan fasilitasi program kebudayaan yang inklusif dan partisipatif
			5.4.2	Meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam pelestarian serta pengembangan kebudayaan lokal	Penguatan dukungan kebijakan dan sumber daya untuk pengembangan seni dan budaya yang berkelanjutan
			5.4.3	Meningkatkan peran dan kapasitas Dewan Kebudayaan dalam memperkuat kerukunan dan kohesi sosial di masyarakat	Pengembangan program pendampingan dan dukungan kelembagaan untuk Dewan Kebudayaan agar mampu mendorong sinergi sosial yang harmonis
			5.4.4	Meningkatkan kualitas dan inovasi produk budaya lokal untuk bersaing di pasar regional dan nasional	Penguatan fasilitasi pelatihan, promosi, dan akses pasar bagi pelaku produk budaya lokal
			5.4.5	Meningkatkan pemahaman dan penghargaan masyarakat terhadap nilai dan identitas budaya Kelamaholotan	Pengembangan program edukasi dan pelestarian budaya Kelamaholotan yang melibatkan partisipasi aktif komunitas
			5.4.6	Meningkatkan pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan obyek kebudayaan sebagai warisan budaya	Penguatan regulasi dan dukungan pendanaan untuk konservasi serta pengelolaan obyek kebudayaan
5.5.	Terjaminnya Perlindungan Pekerja Migran di daerah	5.5.1	Meningkatkan edukasi dan pemahaman masyarakat tentang praktik migrasi yang aman dan terlindungi	Pengembangan kampanye informasi dan pelatihan untuk mendorong migrasi yang terorganisir dan aman	
		5.5.2	Meningkatkan pengelolaan dan pengawasan sistem keamanan migrasi di tingkat desa untuk melindungi warga migran	Penguatan kapasitas desa melalui pelatihan dan pengembangan sistem informasi keamanan migrasi yang terintegrasi	

TUJUAN DAN SASARAN DAERAH			STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
(1)			(2)		(3)
			5.5.3	Meningkatkan kapasitas dan efektivitas perangkat perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia di tingkat daerah	Pengembangan dan pendanaan program pelatihan serta penyediaan layanan perlindungan terpadu bagi PMI
6	Terjaminnya Daya Dukung Ekologis Jangka Panjang Serta Ketangguhan terhadap Bencana dan Perubahan Iklim				
			6.1.1	Meningkatkan Perencanaan Lingkungan Hidup	Menyusun Regulasi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
			6.1.2	Meningkatkan Restorasi	Meningkatan Pemulihan Lahan Kritis melalui kegiatan rehabilitasi lahan kritis
			6.1.3	Meningkatkan Pencegahan dan Pemulihan daerah sekitar Mata Air	Meningkatkan Pengolahan Daerah Sekitar Mata Air melalui kegiatan konservasi mata air dan sosialisasi masyarakat sekitar mata air
			6.1.4	Meningkatkan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Meningkatkan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) melalui penanaman dan pemeliharaan
			6.1.5	Meningkatkan Kualitas Pengendalian Pencemaran Laut	Melakukan Pengawasan secara rutin dan sosialisasi kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah di laut Melakukan Pengawasan terhadap <i>Illegal Fishing</i>
			6.1.6	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan	Meningkatkan Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang harus memiliki izin lingkungan melalui pelaksanaan pengawasan rutin penerbitan persetujuan lingkungan, penyuluhan lingkungan hidup dan tindak lanjut pengaduan masyarakat
	6.2	Meningkatnya Mitigasi Bencana dan Kualitas Penanganan Bencana	6.2.1	Meningkatkan kualitas manajemen Mitigasi Bencana	Meningkatkan Pembangunan sarana prasarana mitigasi meliputi: Normalisasi kali, pembangunan tanggul penahan banjir, pembangunan talud pengaman kali serta pengawasan pembangunan diarea bantaran kali dan sempadan pantai
			6.2.2	Meningkatkan kualitas Manajemen tanggap darurat	Meningkatkan layanan tanggap darurat melalui Penyusunan SOP Layanan Tanggap Darurat, Pelatihan Tim Reaksi Cepat (TRC)
					Meningkatkan penyediaan makanan, sandang dan tempat penampungan
					Meningkatkan pelayanan bagi kelompok rentan, penyediaan layanan psikologi sosial Pengembangan sistem peringatan dini
			6.2.3	Pengembangan Rehabilitasi dan Rekontruksi	Memulihkan Infrastruktur Yang rusak/ hancur akibat bencana
	6.3	Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penataan Kota yang Serasi, Selaras dan Seimbang	6.3.1	Meningkatkan Penyelenggaraan Penataan Ruang	Penyusunan Dokumen Tata ruang, Melakukan Pengendalian Pemanfaatan ruang dan evaluasi terhadap pemanfaatan ruang, meningkatkan peran badan penyelenggaraan penataan ruang daerah, meningkatkan koordinasi lintas sektor
			6.3.2	Meningkatkan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Menyusun dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan,

TUJUAN DAN SASARAN DAERAH			STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
(1)			(2)		(3)
					Meningkatkan Sarana Prasana Pendukung Kota Pembangunan Icon Kota (Monumen,Gapura,), serta melakukan pengendalian dan pengawsasn ketaan terhadap RTBL
			6.3.3	Meningkatkan Infrastruktur yang mendukung Keindahan Kota	Penataan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi (taman kota, pusat kuliner lainnya)
7	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik				
	7.1	Meningkatnya Kualitas Transparansi	7.1.1	Website Umum Pemerintah Daerah	Pengadaan dan pengembangan Website Umum Pemerintah Daerah untuk pelaporan kinerja publik dan disclosure semua kebijakan publik
			7.1.2	Peningkatan kualitas Keterbukaan Informasi Publik	Penyusunan Peraturan Bupati tentang Keterbukaan Informasi Publik
			7.1.3	Pengendalian Keterbukaan Informasi Publik	Monitoring dan Evaluasi Rutin Bulanan Keterbukaan Informasi Publik
					Penguatan kualitas komunikasi publik dalam kerangka Perbup Keterbukaan Informasi Publik
					Peningkatan Layanan Informasi Publik yang diselenggarakan secara Online dan terintegrasi
			7.1.4	Peningkatan Kualitas Sistem Manajemen Pengaduan	Penyusunan Peraturan Bupati tentang Sistem Manajemen Pengaduan
					Pelaksanaan dan Pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Sistem Manajemen Pengaduan
	7.2	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas	7.2.1	Meningkatkan Komitmen dan dukungan Kerjasama Lintas Sektor untuk peningatan pencapaian nilai Reformasi Birokrasi	Mempercepat pemenuhan kebutuhan berdasarkan rekomendasi dari penilaian Kemenpan tahun sebelumnya
			7.2.2	Peningkatan dan Perbaikan SAKIP	Peningkatan Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Kinerja yang Berkualitas
			7.2.3	Pertanggungjawaban Substantif	Penyandingan SAKIP dengan laporan capaian kinerja secara substantif kepada Bupati
					Penyampaian laporan capaian substantif triwulanan untuk setiap OPD kepada Bupati, dengan muatan laporan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati
					Penyampaian laporan tugas dan pelaksanaan tindak lanjut disposisi setiap akhir minggu dan akhir bulan kepada Bupati oleh OPD
					Penyampaian laporan rencana kerja dan rencana tindak lanjut disposisi setiap awal minggu dan awal bulan kepada Bupati oleh OPD
					Menguatkan manajemen pengendalian kinerja dengan kesekretariatan Bupati yang profesional oleh OPD
					Menguatkan pelaporan rencana kerja dan kinerja individual mingguan dan bulanan melalui sistem khusus pelaporan kerja individual
	7.3	Meningkatnya kualitas Partisipasi	7.3.1	Menguatkan aspirasi sektoral dalam proses perencanaan pembangunan	Menopang Musrembang eksisting dengan Forum-Forum Sektoral dan Kajian-Kajian Sektoral

TUJUAN DAN SASARAN DAERAH			STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
(1)			(2)		(3)
			7.3.2	Menguatkan aspirasi keluarga miskin, keluarga pekerja migran, dan penyandang disabilitas dalam proses perencanaan	Menggali aspirasi keluarga miskin, keluarga pekerja migran, dan penyandang disabilitas dengan metode penjangkaran aspirasi tertentu
			7.3.3	Mengelola keluhan publik dengan cara yang profesional	Membangun sistem manajemen pengaduan secara lebih profesional
			7.3.4	Mengelola wacana kebijakan di media sosial secara profesional	Membangun sistem manajemen opini publik secara profesional, jujur, dan efektif
	7.4	Meningkatnya kualitas Pengelolaan Kebijakan Publik	7.4.1	Meningkatkan kualitas manajemen kebijakan melalui penguatan tata kelola yang berbasis data, kolaboratif, transparan dan akuntabel	Mendorong perumusan kebijakan berbasis bukti melalui pemanfaatan data yang akurat dan analisis yang sistematis
					Meningkatkan kualitas kajian dan naskah akademik sebagai dasar penyusunan kebijakan yang lebih terarah dan berdampak
			7.4.2	Peningkatan tata kelola dan kapasitas manajemen kebijakan, penguatan dokumentasi proses kebijakan, pemanfaatan pendekatan <i>evidence-based policy</i> , dan peningkatan partisipasi masyarakat	Penguatan sinergitas melalaui perluasan partisipasi publik dan pemangku kepentingan dalam setiap tahapan proses kebijakan
					Penguatan Tata Kelola Kebijakan yang baik
	7.5	Meningkatnya kualitas Pengawasan	7.5.1	Peningkatan dan Pengendalian Pengawasan Internal	Pengembangan Sistem Pengawasan Internal yang Kuat
					Peningkatan monitoring, evaluasi dan pembinaan
					Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengawas
	7.6	Meningkatnya Profesionalisme ASN	7.6.1	Peningkatan Kualitas Manajemen Kinerja ASN	Integrasi Kinerja Individu dan Kinerja Organisasi
					Penguatan Sistem Evaluasi Kinerja Berbasis Digital
					Mengoptimalkan sistem manajemen kinerja pegawai berbasis digital
			7.6.2	Mendorong reformasi birokrasi secara menyeluruh melalui peningkatan kompetensi ASN berbasis meryt sistem, penegakan kode etik dan disiplin pegawai, serta penguatan sistem kinerja dan evaluasi berbasis <i>outcome</i>	Pemanfaatan Sistem Informasi Kepegawaian yang Akurat untuk proses pengadaan dan pemberhentian ASN yang Transparan
					Meningkatkan Kualitas Penempatan dan Pengembangan Karier ASN berdasarkan Sistem Merit
			7.6.3	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi, dan Realisasi kinerja Perangkat Daerah	Pelaksanaan Assesment/pemetaan kompetensi untuk seluruh pegawai secara bertahap
					Penyelenggaraan pelayanan administrasi kepegawaian sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan
	7.7	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	7.7.1	Peningkatan SDM yang Kompeten, Penerapan Sistem yang efisien dan pemantauan Kinerja Secara Berkala	Meningkatkan kapasitas, integritas, dan akuntabilitas aparatur sipil negara dalam memberikan pelayanan publik yang responsif, efektif dan berorientasi pada hasil
					Pelatihan dan pengembangan serta pemberian motivasi
					Penyusunan SOP Pada Setiap Jenis Layanan Publik
					Penerapan Pelayanan Berbasis Elektronik

TUJUAN DAN SASARAN DAERAH			STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		
(1)			(2)		(3)		
	7.8	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	7.8.1	Mendorong birokrasi yang adaptif, berbasis kinerja, dan berorientasi pada hasil	Meningkatkan efektivitas perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja		
					Meningkatkan integrasi Data, integrasi Perencanaan, Anggaran dan Kebijakan		
			7.8.2	Optimalisasi sistem pengendalian intern, pemanfaatan teknologi, kolaborasi dengan OPD	Peningkatan Kualitas Anggaran Keuangan Daerah		
					Peningkatan Kualitas Penatausahaan Keuangan Daerah		
					Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah		
	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Aset Daerah						
	7.9	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	7.9.1	Optimalisasi Pendataan dan Komunikasi dengan Wajib Pajak	Pendataan dan Pemutakhiran Obek Pajak dan Retribusi		
					Peningkatan Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak		
					Pengembangan Sarana prasarana dan teknologi informasi		
			7.9.2	Optimalisasi Capaian OPD Pemangku PAD	Penguatan dukungan, sistem insentif, dan monitoring rutin capaian target OPD pemangku PAD		
			7.9.3	Pendayagunaan BUMD sebagai mesin PAD	Memperluas cakupan usaha BUMD dan memperkuat dukungan pengembangan usaha dengan Business Development Services		
			7.9.4	Optimalisasi Restribusi Pelayanan Usaha khususnya Pelayanan <i>quality control</i> komoditi unggulan daerah	Penggalangan dukungan dan pengembangan sistem untuk efektivitas retribusi <i>quality control</i> komoditi unggulan daerah		
			7.9.5	Optimalisasi pendayagunaan Aset Daerah	Pengembangan berbagai skema kerja sama untuk pendayagunaan aset-aset daerah		
	8	Meningkatnya Keamanan, Ketertiban dan Kebebasan Masyarakat		8.1.1	Meningkatkan sinergitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta membangun system keamanan yang berkualitas	Penguatan upaya pencegahan melalui pemetaan wilayah rawan	
		8.1	Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban			Pendidikan dan Penyuluhan Masyarakat serta Revitalisasi Sistem Keamanan Lingkungan (SISKAMLING)	
						Membangun Kolaborasi dan Keterlibatan Publik melalui penguatan Kemitraan antara Polri, Satpol PP, dan Masyarakat serta Pelibatan Generasi Muda	
						Membangun Teknologi dan sistem informasi pengaduan / laporan gangguan kamtibmas berbasis digital	
Penguatan Kapasitas Aparatur dalam bidang keamanan, ketertiban dan ketenteraman							
8.1.2						Meningkatkan Rasa Kebersamaan dan Kesatuan Masyarakat Lamaholot	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Sosial dan Kemanusiaan
8.1.3						Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan dalam mendeteksi secara cepat dan akurat potensi gangguan keamanan	Penguatan Sistem dan Teknologi Deteksi Dini
		Optimalisasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)					
		Peningkatan Koordinasi Lintas Sektor dan Lintas Instansi					
		Memperkuat Identitas Budaya					
						Optimalisasi Peran Lembaga Kearifan Lokal Dalam Kehidupan Bermasyarakat	

TUJUAN DAN SASARAN DAERAH			STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
(1)			(2)		(3)
			8.1.4	Meningkatkan Kualitas Manajemen Kemananan dan Kebijakan	Penataan Regulasi dan Kebijakan
					Penguatan Kapasitas SDM
					Membangun Sistem Data Base
	8.2	Meningkatnya Kerukunan Umat Beragama	8.1.5	Meningkatkan sistem hukum yang berkeadilan, bersih, dan modern	Peningkatan akses terhadap keadilan
					Membangun Sinergi Antar-Instansi Penegak Hukum
			8.2.1	Meningkatkan Kolaborasi Sosial Lintas Agama =	Penguatan Literasi dan Edukasi Toleransi Beragama
	8.3	Meningkatnya Kualitas Demokrasi Daerah	8.3.1	Penguatan Kebebasan Sipil dan Peningkatan Kualitas Hak Politik	Pemberdayaan dan Sinergi Antar-Forum Keagamaan
					Penguatan forum dan dialog antarumat beragama
					Pelaksanaan Pendidikan Politik melauai Kampanye Pendidikan Politik, Debat Publik dan Forum Diskusi
			8.3.2	Pemberdayaan Organisasi Masyarakat dan Organisasi Partai Politik	Penyediaan ruang publik dan kanal digital yang bebas dan aman untuk menyampaikan aspirasi warga
					Meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam pilkada, musrenbang, dan forum-forum kebijakan publik
					Penguatan Kapasitas Kelembagaan Ormas
			8.3.3	Peningkatan Transparansi dan Akses Informasi Publik yang berkualitas	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Parpol
					Penguatan sinergi antara Ormas dan lembaga pemerintah
			8.3.4	Meningkatkan Pendidikan Politik dan Literasi Demokrasi	Peningkatan Profesionalisme dan Etika Pers
					Meningkatkan kapasitas komunikasi publik Pemerintah Daerah
					Meningkatkan Kolaborasi antara Pemerintah dan Media secara Setara
					Integrasi pendidikan demokrasi dalam kurikulum sekolah dan program pendidikan masyarakat
					Peningkatan Akses Informasi Pemilu yang Transparan dan Akurat

Strategi dan arah kebijakan di atas menjadi instrumen dalam pelaksanaan pembangunan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang selanjutnya akan menggambarkan terwujudnya visi RPJMD Tahun 2025-2029. Dalam rangka memberi arah dan fokus pembangunan tahunan dengan spirit “Lompatan Jauh”, dirumuskan prioritas pembangunan tahunan sebagai gambaran tahapan untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029. Pentahapan pembangunan Flores Timur selama 5 (lima) tahun ke depan digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3.3 Pentahapan Pembangunan RPJMD

Arah Pengembangan Wilayah Flores Timur

Pengembangan wilayah Flores Timur selama 5 (lima) tahun ke depan dilakukan berdasarkan arah pengembangan wilayah yang diatur dalam RTRW Kabupaten Flores Timur. Kebijakan Lompatan Produktivitas yang menitikberatkan pada pengembangan dan pengolahan pertanian, perkebunan dan perikanan serta pengembangan hilirisasi hasil produksi yang akan membutuhkan dukungan investasi dan aksesibilitas, tetap memperhatikan pemetaan dan arah pengembangan wilayah Flores Timur.

Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan wilayah dirumuskan atas dasar analisis terhadap kondisi eksisting Kabupaten Flores Timur, arah kebijakan kewilayahan RPJPN Tahun 2025-2045 terkait pengembangan wilayah Bali-Nusa Tenggara, Kebijakan pengembangan pusat pertumbuhan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan arah pengembangan wilayah dalam RTRW Kabupaten Flores Timur.

Tema pembangunan wilayah Bali-Nusa Tenggara Timur selama 20 tahun ke depan adalah ***Superhub Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nusantara Bertaraf Internasional*** yang akan mendorong pengembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif wilayah timur Indonesia. Sehubungan dengan tema tersebut, pembangunan ekosistem kepariwisataan di Wilayah Bali-Nusa Tenggara mencakup 5 (lima) prioritas antara lain:

Pertama : Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru yaitu kawasan pariwisata; Sentra-sentra produksi komoditas unggulan di kawasan perdesaan serta sentra pengolahan dan sentra pemasaran di kawasan perkotaan; Optimalisasi kawasan *eksisting* dengan fokus pada

peningkatan penyerapan tenaga kerja lokal, pemanfaatan potensi lokal (rantai pasok) dan nilai investasi melalui PMA dan PMDN dengan mempertimbangkan aspek kebencanaan, serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Kedua : Pengembangan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) lokal yang akan menjadi modal dasar pembangunan Wilayah Bali-Nusa Tenggara ke depan, khususnya disesuaikan dengan sektor potensial Wilayah Bali-Nusa Tenggara yaitu pertanian, peternakan, perikanan, dan pariwisata, serta didukung oleh infrastruktur pelayanan dasar yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Ketiga : Peningkatan infrastruktur dasar dan konektivitas intra dan antar Wilayah Bali-Nusa Tenggara yang menjadi *backbone* pembangunan pusat-pusat pertumbuhan wilayah.

Keempat: Penguatan tata kelola pembangunan wilayah dalam rangka mewujudkan kepemimpinan unggul dan masyarakat sipil yang partisipatif untuk menopang percepatan pembangunan wilayah, serta upaya penguatan pertahanan dan keamanan dalam mewujudkan stabilitas wilayah dan menjadikan NTT sebagai kawasan yang berdaya saing ekonomi tinggi.

Kelima : Peningkatan ketahanan sosial, budaya, dan ekologi untuk mewujudkan pembangunan wilayah yang adaptif dan berkelanjutan.

Sebagai implementasi dari kebijakan umum tersebut, wilayah Flores Timur diarahkan sebagai kawasan pengembangan industri dan sentra perkebunan mete dan kawasan pengembangan industri dan sentra rumput laut serta pengembangan pelayanan fasilitas kesehatan yang terakreditasi, pengembangan akses air minum dan sanitasi layak dan peningkatan akses internet berkecepatan tinggi.

Selanjutnya, di dalam 8 (delapan) misi (agenda) pembangunan Indonesia Emas terdapat poin-poin penting tentang arah pembangunan Indonesia Emas antara lain pada Transformasi Indonesia (Transformasi Sosial, Transformasi Ekonomi, Transformasi Tata Kelola), Landasan Transformasi (Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Ketangguhan Diplomasi Wilayah Nusa Tenggara dan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi), dan Kerangka Implementasi Transformasi (Pembangunan Kewilayahan yang merata dan berkeadilan, sarana dan prasana yang berkualitas dan ramah lingkungan serta Kesenambungan pembangunan).

Merujuk telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan dalam kerangka mewujudkan posisi Nusa Tenggara Timur di dalam kesatuan Koridor Ekonomi Bali-Nusa Tenggara, maka konsep pengembangan wilayah NTT diarahkan untuk memanfaatkan potensi-potensi unggulan daerah yang terkait dengan pengarusutamaan Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru yang berkontribusi menuju Indonesia Emas 2045. Dalam konteks tata ruang tersebut, maka rencana struktur pemanfaatan ruang wilayah dan pengembangan wilayah di Kabupaten Flores Timur

selama lima tahun ke depan berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah Flores Timur yang diarahkan untuk membentuk sistem pelayanan yang mempunyai hirarki di seluruh wilayah Kabupaten Flores Timur, sehingga terjadi pemerataan pelayanan, mendorong pertumbuhan wilayah di perdesaan dan perkotaan. Sistem pelayanan tersebut sebagai berikut:

A. Sistem Pusat Permukiman

Sistem perkotaan di Kabupaten Flores Timur mengatur Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Pelayanan Kawasan dan Pusat Pelayanan Lingkungan di Kabupaten Flores Timur. Sistem perkotaan di Kabupaten Flores Timur direncanakan membentuk berhirarki sesuai ukuran perkotaan dengan 3 (tiga) Pusat Kegiatan yaitu:

- 1) Pusat Kegiatan Lokal (PKL); yang merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan. PKL memiliki fungsi pengembangan yakni: sebagai pusat pemerintahan skala regional; pusat pengembangan perdagangan dan jasa skala regional; pusat pelayanan kesehatan skala regional (RSUD); pusat pelayanan pendidikan skala regional; pusat pelayanan transportasi skala regional; pengembangan kegiatan industri kecil, menengah dan sedang; pengembangan pariwisata (alam dan religi); pengembangan perikanan tangkap dan kelautan; pusat pelayanan olahraga skala regional. PKL tersebut meliputi: a) Perkotaan Larantuka di Kecamatan Larantuka; dan b) Perkotaan Waiwerang Kecamatan Adonara Timur.
- 2) Pusat Pelayanan Kawasan yang merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan. Pusat Pelayanan Kawasan memiliki fungsi pengembangan yakni sebagai pusat pemerintahan skala lokal; pusat pengembangan perdagangan dan jasa lokal; pusat pelayanan kesehatan skala lokal; pusat pelayanan pendidikan skala lokal; pengembangan kegiatan industri kecil dan menengah; pusat pelayanan transportasi skala lokal; pengembangan pariwisata alam; pengembangan pertanian dan pengembangan perikanan dan kelautan. Pusat Pelayanan Kawasan terdiri atas: a) Perkotaan Boru di Kecamatan Wulanggintang; b) Perkotaan Lewohala di Kecamatan Ile Mandiri; c) Perkotaan Menanga di Kecamatan Solor Timur; d) Perkotaan Waiwadan di Kecamatan Adonara Barat; e) Perkotaan Walang di Kecamatan Demon Pagong; dan f) Perkotaan Witihamia di Kecamatan Witihamia.
- 3) Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) yang merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antardesa. Kawasan perkotaan PPL memiliki fungsi pengembangan sebagai pendukung pengembangan dengan fungsi perkembangan yakni: kegiatan perdagangan lingkup lokal seperti pasar tradisional, wahana wisata, pertanian dan perikanan. PPL tersebut terdiri atas: a) PPL Baniona di Kecamatan Wotan

Ulumado; b) PPL Kalike di Kecamatan Solor Selatan; c) PPL Kelubagolit di Kecamatan Kelubagolit; d) PPL Lato di Kecamatan Titehena; e) PPL Lewotobi di Kecamatan Ile Bura; f) PPL Lite di Kecamatan Adonara Tengah; g) PPL Ritaebang di Kecamatan Solor Barat; h) PPL Sagu di Kecamatan Adonara; i) PPL Senadan di Kecamatan Ile Boleng; J) PPL Sinar Hading di Kecamatan Lewolema; dan k) PPL Waiklibang di Kecamatan Tanjung Bunga.

B. Sistem Jaringan Transportasi

Sistem jaringan transportasi dikembangkan secara sinergis untuk semaksimal mungkin dapat melayani seluruh wilayah Kabupaten Flores Timur. Sistem jaringan transportasi yang dikembangkan adalah (1) Sistem Jaringan Jalan; (2) Terminal Penumpang; (3) Jembatan Timbang; (4) Jembatan; (5) Sistem Jaringan Sungai, Danau dan Penyeberangan; (6) Sistem Jaringan Transportasi Laut; (7) Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus.

C. Sistem Jaringan Energi

Pengembangan sistem jaringan energi diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, mendukung pengembangan ekonomi, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengembangan dilakukan melalui perluasan jaringan dan peningkatan energi yang ramah lingkungan terutama dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang tersedia seperti arus laut.

D. Sistem Jaringan Telekomunikasi

Sistem jaringan telekomunikasi direncanakan sesuai dengan kebutuhan wilayah kabupaten. Rencana pengembangannya diarahkan peningkatan kualitas internet, perluasan jaringan dan jangkauan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi, sosial budaya, keamanan dan ketertiban dan pertahanan nasional.

E. Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Rencana pengembangan sistem jaringan sumber daya air di Kabupaten Flores Timur diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pertanian dan kebutuhan rumah tangga, serta pelestarian lingkungan hidup, yang terdiri atas (1) Sistem Jaringan Irigasi; (2) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM); (3) Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL); dan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3).

F. Sistem Jaringan Persampahan Wilayah

Pengembangan sistem jaringan persampahan wilayah diarahkan untuk menciptakan lingkungan permukiman yang sehat dan kondusif bagi masyarakat. Sistem jaringan dirancang secara sederhana tapi kaya fungsi dengan memanfaatkan potensi yang ada secara maksimal melalui pengelolaan Tempat Pembuangan Sementara (TPS), Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) secara berkelanjutan.

G. Sistem Jaringan Evakuasi Bencana

Mitigasi merupakan titik tolak utama dari manajemen penanggulangan bencana. Dengan mitigasi dilakukan usaha-usaha untuk menurunkan dan/atau meringankan dampak/korban yang disebabkan oleh suatu bencana pada jiwa manusia, harta benda, dan lingkungan. Pembangunan sistem jaringan evakuasi bencana merupakan upaya untuk menurunkan dan/atau meringankan dampak/korban yang disebabkan oleh suatu bencana tersebut. Pengembangan sistem jaringan evakuasi bencana diarahkan untuk menciptakan jaringan yang sederhana, efektif, efisien dan terpadu yang mampu mengatasi situasi darurat bencana.

Selain struktur pemanfaatan ruang tersebut, kawasan strategis wilayah sangat penting untuk dikaji dalam kebijakan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan wilayah. Kawasan strategis di Kabupaten Flores Timur terdiri atas Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten Flores Timur dan Kawasan Strategis Kabupaten.

1. Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten Flores Timur

Kawasan strategis Provinsi yang masuk dalam wilayah Kabupaten Flores Timur, meliputi:

- a. Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, meliputi:
 - ☑ Kawasan Nebe-Konga di Kecamatan Wulanggitang dan Titehena;
 - ☑ Kawasan Witihama Adonara di Kecamatan Witihama; dan
 - ☑ Kawasan Ile Boleng – Mekko di Kecamatan Ile Boleng dan Witihama.
- b. Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya, yaitu Kawasan Larantuka di Kecamatan Larantuka.

2. Kawasan Strategis Kabupaten

Kawasan strategis wilayah kabupaten merupakan bagian wilayah kabupaten yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup wilayah kabupaten di bidang ekonomi, sosial budaya, sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, dan/atau lingkungan hidup. Penentuan kawasan strategis kabupaten lebih bersifat indikatif.

Kawasan strategis kabupaten dirumuskan dengan dua pendekatan yakni:

a. Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Ekonomi

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yakni: memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh; memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi kabupaten; memiliki potensi ekspor; memiliki pusat kegiatan yang mempunyai pengaruh terhadap sektor dan pengembangan wilayah; didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi; ditetapkan untuk mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal; ditetapkan untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan

energi; memiliki pusat kegiatan pengelolaan, pengolahan, dan distribusi bahan baku menjadi bahan jadi; memiliki kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi; dan memiliki fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan. Selain itu, kawasan strategis yang ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B); kawasan yang dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal di dalam wilayah kabupaten; memiliki pusat pengembangan produk unggulan; dan/atau memiliki pusat kegiatan perdagangan dan jasa.

Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi tersebut terdiri atas:

- Kawasan Agropolitan komoditi andalan kopi, jambu mete dan pengembangan pariwisata terdapat di Kecamatan Ile Bura, Kecamatan Tanjung Bunga dan Kecamatan Wulanggitang.
- Kawasan Agropolitan komoditi jambu mete dan pengembangan pariwisata terdapat di Kecamatan Tanjung Bunga.
- Cadangan perkembangan perkotaan Larantuka di terdapat di Kecamatan Ile Mandiri; dan Kecamatan Larantuka.
- Kawasan Nebe-Konga terdapat di Kecamatan Titehena; dan Kecamatan Wulanggitang.
- Kawasan Pariwisata estate Ile Boleng-Mekko terdapat di Kecamatan Adonara Timur, Kecamatan Ile Boleng, Kecamatan Kelubagolit dan Kecamatan Witihamu.

b. Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya

Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya yakni merupakan tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau cagar budaya baik yang terletak di daratan dan/atau di perairan; memiliki pusat kegiatan warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa benda, bangunan, struktur dan situs cagar budaya; merupakan prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya; merupakan aset yang harus dilindungi dan dilestarikan; merupakan tempat perlindungan peninggalan budaya; dan/atau memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya.

3.2.2 Program Prioritas Pembangunan Daerah

Perumusan Program Prioritas Pembangunan Daerah untuk menggambarkan keterkaitan antara penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan daerah dengan pelaksanaan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah yang tergambar dalam indikator kinerja tujuan dan sasaran RPJMD berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam rangka pencapaian kinerja visi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah, dirumuskan beberapa program prioritas berdasarkan strategis dan arah kebijakan pembangunan RPJMD Tahun 2025-2029, sebagaimana terlihat pada Tabel 3.7 berikut.

Tabel 3.7 Program Prioritas Pembangunan Daerah RPJMD Tahun 2025-2029

TUJUAN / SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	PROGRAM PRIORITAS	PD PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Misi: Lompatan Produktivitas Semua Sektor Kehidupan dengan mengandalkan Ilmu dan Teknologi Terbaru, Kecerdasan Inovatif, Tata Kelola Transformatif dan Kearifan Lamaholot Paling Jernih				
Tujuan 1: Meningkatnya Produktivitas Ekonomi Daerah Berbasis Inovasi dan Ekonomi Hijau				
Sasaran 1.1: Meningkatnya produktivitas dan pengembangan Inovasi Berbasis Ekonomi Digital pada Sektor-Sektor Unggulan				
	Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Sarana Pertanian (Tanaman Pangan dan Hortikultura)	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (%)	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura (%)		
	Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Sarana Pertanian (Tanaman Perkebunan dan Peternakan)	Persentase Peningkatan Produksi Perkebunan (%)		Dinas Perkebunan dan Peternakan
		Persentase Peningkatan Produksi Peternakan (%)		
	Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Prasarana Pertanian (Tanaman Pangan dan Hortikultura)	Persentase Luas Lahan Pertanian yang di kembangkan (%)	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Prasarana Pertanian (Tanaman Perkebunan dan Peternakan)	Peningkatan penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian (%)		Dinas Perkebunan dan Peternakan
	Meningkatnya Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Tingkat Pengendalian Penyakit hewan Menular (%)	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Dinas Perkebunan dan Peternakan
		Tingkat kesehatan masyarakat veteriner (%)		
	Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Penyuluh Pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang ditingkatkan kapasitas (%)	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Persentase Ketersediaan Pangan Pokok terhadap Kebutuhan Konsumsi Pangan Pokok Kabupaten/Kota (%)	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap (%)	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Dinas Perikanan
	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya (%)	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Dinas Perikanan
	Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (%)	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Persentase Destinasi yang Dikembangkan (%)		
	Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir (%)	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas (%)		

TUJUAN / SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	PROGRAM PRIORITAS	PD PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sasaran 1.2: Meningkatnya Kecepatan Hilirisasi Sumber Daya Alam Unggulan, Produktivitas serta Kemudahan Investasi				
	Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Sarana Pertanian (Tanaman Pangan dan Hortikultura)	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (%) Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura (%)	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Sarana Pertanian (Tanaman Perkebunan dan Peternakan)	Persentase Peningkatan Produksi Perkebunan (%) Persentase Peningkatan Produksi Peternakan (%)		Dinas Perkebunan dan Peternakan
	Meningkatnya Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Peningkatan hasil Pemasaran Ikan (%) Persentase peningkatan Produksi Olahan Perikanan (%)	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Dinas Perikanan
	Meningkatnya Jangkauan Pemasaran Pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (%)	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	Meningkatnya Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Yang Aktif dan Tervalidasi (%)	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	Meningkatnya Realisasi Pembangunan Industri	Persentase peningkatan nilai produksi sektor pengolahan (%)	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi	Persentase PMA/PMDN yang bekerja sama dengan UMKM (%)	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Meningkatnya penggunaan dan penjualan produk dalam negeri	Persentase Promosi Produk IKM yang difasilitasi/dilaksanakan (%)	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	Meningkatnya Kualitas Sarana Perdagangan dan distribusi Barang yang efisien, Merata dan Terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (%)	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	Meningkatnya Kelancaran Distribusi dan Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting (%)	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	Meningkatnya Kapasitas UMKM yang Tangguh dan Mandiri	Cakupan Pemberdayaan Usaha Mengah, Kecil dan Usaha Mikro (%)	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Sasaran 1.3: Meningkatnya Daya Saing Kelembagaan Ekonomi				
	Meningkatnya Kualitas SDM Perkoperasian	Persentase Koperasi yang diberikan dukungan Fasilitas Pelatihan (%)	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	Meningkatnya Kapasitas UMKM yang Tangguh dan Mandiri	Cakupan Pemberdayaan Usaha Mengah, Kecil dan Usaha Mikro (%)	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat Dalam Pembangunan	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (%) Persentase Fasilitas Lembaga Ekonomi Desa (%)	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

TUJUAN / SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	PROGRAM PRIORITAS	PD PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Meningkatnya Pendapatan Asli Desa melalui BUMDes	Persentase BUMDes Yang Aktif Yang Mendapatkan Laba (%)	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengelolaan Perekonomian	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan (%)	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Sekretariat Daerah - Bagian Perekonomian
	Meningkatnya Perizinan Berusaha Terhadap Resiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (%)	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli (%)	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sasaran 1.4: Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Perekonomian				
	Meningkatnya Kualitas Sarana Perdagangan dan distribusi Barang yang efisien, Merata dan Terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (%)	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	Meningkatnya Kelancaran Distribusi dan Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting (%)	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan Jalan (%)	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Meningkatnya kualitas layanan transportasi laut	Persentase kualitas layanan transportasi laut (%)	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Dinas Perhubungan
Tujuan 2: Meningkatkan Daya Saing Pendidikan				
Sasaran 2.1: Meningkatkan Aksesibilitas Pendidikan				
	Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah	Persentase anak usia 5-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan usia dini dan dasar (APS) (%)	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	- Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
		Persentase Satuan Pendidikan yang mengembangkan PAUD Holistik Integratif (%)		
	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan	Persentase Sarana Prasarana dalam kondisi baik (%)		
	Meningkatnya Capaian Mutu Pendidikan	Capaian SPM Pendidikan (%)		
	Meningkatnya digitalisasi pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang menerapkan Digitalisasi (%)		
		Persentase Guru yang mengikuti pelatihan atau pengembangan kompetensi (%)		
		Persentase Satuan Pendidikan yang Melaksanakan Rencana Kerja Sekolah (RKS) Secara Konsisten (%)		
		Persentase Sekolah yang Mendapat Akreditasi Minimal B (%)		

TUJUAN / SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	PROGRAM PRIORITAS	PD PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Meningkatnya Capaian <i>Critical Thinking</i> (berpikir kritis), <i>Creativity</i> (kreativitas), <i>Communication</i> (komunikasi), dan <i>Collaboration</i> (kolaborasi)	Persentase kemampuan siswa dalam penerapan 4C (%)		
	Meningkatnya capaian Higher Order Thinking Skills (HOTS)	Persentase capaian <i>Higher Order Thinking Skills</i> (HOTS) pada satuan pendidikan (%)		
	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	PROGRAM PEMERINTAH DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Sekretariat Daerah - Bagian Kesejahteraan Rakyat
Sasaran 2.2: Meningkatkan Kualitas/Mutu Pendidikan				
	Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah	Persentase anak usia 5-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan usia dini dan dasar (APS) (%)	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	- Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
		Persentase Satuan Pendidikan yang mengembangkan PAUD Holistik Integratif (%)		
	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan	Persentase Sarana Prasarana dalam kondisi baik (%)		
	Meningkatnya Capaian Mutu Pendidikan	Capaian SPM Pendidikan (%)		
	Meningkatnya Digitalisasi pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang menerapkan Digitalisasi (%)		
	Meningkatnya tata kelola pendidikan yang berkualitas	Persentase Guru yang mengikuti pelatihan atau pengembangan kompetensi (%)		
		Persentase Satuan Pendidikan yang Melaksanakan Rencana Kerja Sekolah (RKS) Secara Konsisten (%)		
		Persentase Sekolah yang Mendapat Akreditasi Minimal B (%)		
	Meningkatnya Capaian <i>Critical Thinking</i> (berpikir kritis), <i>Creativity</i> (kreativitas), <i>Communication</i> (komunikasi), dan <i>Collaboration</i> (kolaborasi)	Persentase kemampuan siswa dalam penerapan 4C (%)		
	Meningkatnya capaian Higher Order Thinking Skills (HOTS)	Persentase capaian Higher Order Thinking Skills (HOTS) pada satuan pendidikan (%)		
	Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	Indeks Pemerataan/ Distribusi guru (Angka)	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
		Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik (%)		
Sasaran 2.3: Meningkatkan Relevansi Pendidikan				
	Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal (%)	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

TUJUAN / SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	PROGRAM PRIORITAS	PD PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Persentase sekolah yang menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan (KOSP) (%)		
		Persentase bahan ajar/materi pembelajaran yang sesuai dengan standar nasional pendidikan dan kebutuhan lokal (%)		
		Persentase penguatan nilai karakter melalui kurikulum (%)		
	Meningkatnya Organisasi Pemuda yang Aktif	Cakupan Organisasi Pemuda yang Aktif (%)	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	Meningkatnya daya saing Kepemudaan	Cakupan Wirausaha Muda (%)		
	Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi (%)	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Dinas Tenaga Kerja
		Persentase Pelatihan vs Penempatan (Dunia Kerja) (%)		
		Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (%)		
		Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)		
		Persentase peserta pelatihan yang mengalami peningkatan pendapatan pascapelatihan (%)		
Sasaran 2.4: Meningkatkan Tata Kelola Satuan Pendidikan				
	Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah	Persentase anak usia 5-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan usia dini dan dasar (APS) (%)	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
		Persentase Satuan Pendidikan yang mengembangkan PAUD Holistik Integratif (%)		
	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan	Persentase Sarana Prasarana dalam kondisi baik (%)		
	Meningkatnya Capaian Mutu Pendidikan	Capaian SPM Pendidikan (%)		
	Meningkatnya Digitalisasi pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang menerapkan Digitalisasi (%)		
	Meningkatnya tata kelola pendidikan yang berkualitas	Persentase Guru yang mengikuti pelatihan atau pengembangan kompetensi (%)		
		Persentase Satuan Pendidikan yang Melaksanakan Rencana Kerja Sekolah (RKS) Secara Konsisten (%)		

TUJUAN / SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	PROGRAM PRIORITAS	PD PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Persentase Sekolah yang Mendapat Akreditasi Minimal B (%)		
	Meningkatnya Capaian <i>Critical Thinking</i> (berpikir kritis), <i>Creativity</i> (kreativitas), <i>Communication</i> (komunikasi), dan <i>Collaboration</i> (kolaborasi)	Persentase kemampuan siswa dalam penerapan 4C (%)		
	Meningkatnya capaian Higher Order Thinking Skills (HOTS)	Persentase capaian Higher Order Thinking Skills (HOTS) pada satuan pendidikan (%)		
Saaran 2.5: Meningkatkan Tata Kelola Sistem Pendidikan				
	Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah	Persentase anak usia 5-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan usia dini dan dasar (APS) (%)	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	- Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
		Persentase Satuan Pendidikan yang mengembangkan PAUD Holistik Integratif (%)		
	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan	Persentase Sarana Prasarana dalam kondisi baik (%)		
	Meningkatnya Capaian Mutu Pendidikan	Capaian SPM Pendidikan (%)		
	Meningkatnya Digitalisasi pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang menerapkan Digitalisasi (%)		
	Meningkatnya tata kelola pendidikan yang berkualitas	Persentase Guru yang mengikuti pelatihan atau pengembangan kompetensi (%)		
		Persentase Satuan Pendidikan yang Melaksanakan Rencana Kerja Sekolah (RKS) Secara Konsisten (%)		
		Persentase Sekolah yang Mendapat Akreditasi Minimal B (%)		
	Meningkatnya Capaian <i>Critical Thinking</i> (berpikir kritis), <i>Creativity</i> (kreativitas), <i>Communication</i> (komunikasi), dan <i>Collaboration</i> (kolaborasi)	Persentase kemampuan siswa dalam penerapan 4C (%)		
	Meningkatnya capaian Higher Order Thinking Skills (HOTS)	Persentase capaian Higher Order Thinking Skills (HOTS) pada satuan pendidikan (%)		
	Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	Indeks Pemerataan/ Distribusi guru (Angka)	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
		Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik (%)		
Sasaran 2.6: Meningkatkan Literasi Masyarakat				
	Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah	Persentase anak usia 5-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan usia dini dan dasar (APS) (%)	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	- Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

TUJUAN / SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	PROGRAM PRIORITAS	PD PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Persentase Satuan Pendidikan yang mengembangkan PAUD Holistik Integratif (%)		
	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan	Persentase Sarana Prasarana dalam kondisi baik (%)		
	Meningkatnya Capaian Mutu Pendidikan	Capaian SPM Pendidikan (%)		
	Meningkatnya Digitalisasi pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang menerapkan Digitalisasi (%)		
	Meningkatnya tata kelola pendidikan yang berkualitas	Persentase Guru yang mengikuti pelatihan atau pengembangan kompetensi (%)		
		Persentase Satuan Pendidikan yang Melaksanakan Rencana Kerja Sekolah (RKS) Secara Konsisten (%)		
		Persentase Sekolah yang Mendapat Akreditasi Minimal B (%)		
	Meningkatnya Capaian <i>Critical Thinking</i> (berpikir kritis), <i>Creativity</i> (kreativitas), <i>Communication</i> (komunikasi), dan <i>Collaboration</i> (kolaborasi)	Persentase kemampuan siswa dalam penerapan 4C (%)		
	Meningkatnya capaian Higher Order Thinking Skills (HOTS)	Persentase capaian Higher Order Thinking Skills (HOTS) pada satuan pendidikan (%)		
	Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat (Angka)	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Tujuan 3: Meningkatnya Daya Saing Kesehatan				
Sasaran 3.1: Meningkatnya Aksesibilitas Layanan Kesehatan				
	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Cakupan Penerapan ILP (Integrasi Layanan Primer) (%)	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	- Dinas Kesehatan - Puskesmas
		Persentase pemenuhan sarana, prasarana, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan sesuai standar (%)		
		Persentase Puskesmas yang terakreditasi Paripurna (%)		
		Cakupan Deteksi dan Pengendalian Penyakit (Skrining Kesehatan) (%)		
		Angka Kematian Balita (AKABA)		
		Angka Gizi Buruk (Angka)		
		Cakupan INM (Indikator Nasional Mutu) (%)		

TUJUAN / SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	PROGRAM PRIORITAS	PD PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Cakupan MPDN (<i>Maternal Perinatal Death Notification</i>) (%)		
		Persentase Kecamatan yang melaksanakan kampanye/gerakan PHBS minimal 8 X per/tahun dengan melibatkan lintas sektor (%)		
	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan (%)		- RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka, - RSUD Adonara - RSP Solor
		Cakupan Penerapan Mutu pada semua unit pelayanan (%)		
		Cakupan Penerapan SOP pada semua unit pelayanan (%)		
		Tingkat Pemanfaatan Layanan (Cakupan BOR dan LOS sesuai Standar) (%)		
		Persentase sarana dan prasarana di Rumah Sakit dalam kondisi baik (%)		
		Tingkat Kepuasan Pelayanan (%)		
		Cakupan Ketersediaan Obat dan BMHP (%)		
		Cakupan Ketersediaan Alat Kesehatan (%)		
		Cakupan Pelaporan dan Evaluasi UKP (%)		
		Rata-rata Waktu Tunggu Pelayanan (Menit)		
		Tingkat Kepatuhan Clinical Pathway / SOP Medis (%)		
		Cakupan Pemenuhan KRIS (Kelas Rawat Inap Standar) (%)		
		Sasaran 3.2: Meningkatkan Mutu Layanan Kesehatan		
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Cakupan Penerapan ILP (Integrasi Layanan Primer) (%)	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	- Dinas Kesehatan - Puskesmas	
	Persentase pemenuhan sarana, prasarana, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan sesuai standar (%)			
	Persentase Puskesmas yang terakreditasi Paripurna (%)			
	Cakupan Deteksi dan Pengendalian Penyakit (Skrining Kesehatan) (%)			
	Angka Kematian Balita (AKABA)			
	Angka Gizi Buruk (Angka)			
	Cakupan INM (Indikator Nasional Mutu) (%)			

TUJUAN / SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	PROGRAM PRIORITAS	PD PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Cakupan MPDN (<i>Maternal Perinatal Death Notification</i>) (%)		
		Persentase Kecamatan yang melaksanakan kampanye/gerakan PHBS minimal 8 X per/tahun dengan melibatkan lintas sektor (%)		
	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan (%)		- RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka,
		Cakupan Penerapan Mutu pada semua unit pelayanan (%)		- RSUD Adonara
		Cakupan Penerapan SOP pada semua unit pelayanan (%)		- RSP Solor
		Tingkat Pemanfaatan Layanan (Cakupan BOR dan LOS sesuai Standar) (%)		
		Persentase sarana dan prasarana di Rumah Sakit dalam kondisi baik (%)		
		Tingkat Kepuasan Pelayanan (%)		
		Cakupan Ketersediaan Obat dan BMHP (%)		
		Cakupan Ketersediaan Alat Kesehatan (%)		
		Cakupan Pelaporan dan Evaluasi UKP (%)		
		Rata-rata Waktu Tunggu Pelayanan (Menit)		
		Tingkat Kepatuhan Clinical Pathway / SOP Medis (%)		
		Cakupan Pemenuhan KRIS (Kelas Rawat Inap Standar) (%)		
	Meningkatnya Mutu dan Distribusi Tenaga Kesehatan	Persentase tenaga kesehatan yang mendapat peningkatan kapasitas (%)		Dinas Kesehatan
		Persentase Fasilitas Kesehatan yang Memiliki SDMK Sesuai Ketentuan (%)		
		Cakupan Pelatihan/ Workshop SDMK (%)		
		Persentase Nakes yang Ditempatkan Sesuai dengan Analisis Kebutuhan (%)		
	Meningkatnya mutu tenaga kesehatan Rumah Sakit	Persentase peningkatan kompetensi SDM bidang kesehatan (%)		- RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka,
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan SDM Rumah Sakit (%)		- RSUD Adonara
		Persentase Rumah Sakit dengan Dokter Spesialis sesuai standar (%)		- RSP Solor

TUJUAN / SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	PROGRAM PRIORITAS	PD PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Meningkatnya pelayanan Keluarga Berencana	Cakupan Akseptor Baru (%)	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Cakupan PUS peserta KB Aktif (%)		
		Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern / <i>Modern Contraceptive</i> (mCPR) (%)		
		Cakupan Pelayanan KB Pasca Salin (%)		
		Presentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need) (%)		
		Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD) (%)		
		Proporsi Kebutuhan KB yang Terpenuhi Menurut Alat/Cara KB Modern (%)		
Sasaran 3.3: Meningkatnya Tata Kelola Fasilitas Kesehatan				
	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Cakupan Penerapan ILP (Integrasi Layanan Primer) (%)	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	- Dinas Kesehatan - Puskesmas
		Persentase pemenuhan sarana, prasarana, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan sesuai standar (%)		
		Persentase Puskesmas yang terakreditasi Paripurna (%)		
		Cakupan Deteksi dan Pengendalian Penyakit (Skrining Kesehatan) (%)		
		Angka Kematian Balita (AKABA)		
		Angka Gizi Buruk (Angka)		
		Cakupan INM (Indikator Nasional Mutu) (%)		
		Cakupan MPDN (<i>Maternal Perinatal Death Notification</i>) (%)		
		Persentase Kecamatan yang melaksanakan kampanye/gerakan PHBS minimal 8 X per/tahun dengan melibatkan lintas sektor (%)		
	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan (%)		- RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka, - RSUD Adonara - RSP Solor
		Cakupan Penerapan Mutu pada semua unit pelayanan (%)		
		Cakupan Penerapan SOP pada semua unit pelayanan (%)		
		Tingkat Pemanfaatan Layanan (Cakupan BOR dan LOS sesuai Standar) (%)		

TUJUAN / SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	PROGRAM PRIORITAS	PD PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Persentase sarana dan prasarana di Rumah Sakit dalam kondisi baik (%)		
		Tingkat Kepuasan Pelayanan (%)		
		Cakupan Ketersediaan Obat dan BMHP (%)		
		Cakupan Ketersediaan Alat Kesehatan (%)		
		Cakupan Pelaporan dan Evaluasi UKP (%)		
		Rata-rata Waktu Tunggu Pelayanan (Menit)		
		Tingkat Kepatuhan Clinical Pathway / SOP Medis (%)		
		Cakupan Pemenuhan KRIS (Kelas Rawat Inap Standar) (%)		
	Meningkatnya Kualitas dan Distribusi Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Cakupan Pengawasan sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman (%)	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Dinas Kesehatan
		Persentase Fasilitas Kesehatan yang Memiliki Ketersediaan Obat Esensial ≥ 80% (%)		
		Persentase Alat Kesehatan Prioritas yang Tersedia dan Berfungsi Baik di Fasyankes (%)		
		Cakupan IRTP (Industri Rumah Tangga Pangan) (%)		
Sasaran 3.4: Meningkatkan Tata Kelola Sistem Kesehatan				
	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Cakupan Penerapan ILP (Integrasi Layanan Primer) (%)	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan
		Persentase pemenuhan sarana, prasarana, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan sesuai standar (%)		
		Persentase Puskesmas yang terakreditasi Paripurna (%)		
		Cakupan Deteksi dan Pengendalian Penyakit (Skrining Kesehatan) (%)		
		Angka Kematian Balita (AKABA)		
		Angka Gizi Buruk (Angka)		
		Cakupan INM (Indikator Nasional Mutu) (%)		
		Cakupan MPDN (Maternal Perinatal Death Notification) (%)		
		Persentase Kecamatan yang melaksanakan kampanye/gerakan PHBS minimal 8 X per/tahun dengan melibatkan lintas sektor (%)		

TUJUAN / SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	PROGRAM PRIORITAS	PD PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Meningkatnya Mutu dan Distribusi Tenga Kesehatan	Persentase tenaga kesehatan yang mendapat peningkatan kapasitas (%) Persentase Fasilitas Kesehatan yang Memiliki SDMK Sesuai Ketentuan (%) Cakupan Pelatihan/ Workshop SDMK (%) Persentase Nakes yang Ditempatkan Sesuai dengan Analisis Kebutuhan (%)	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Dinas Kesehatan
Sasaran 3.5: Meningkatnya PHBS dan Kesehatan Lingkungan				
	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat bidang Kesehatan	Persentase Posyandu Purnama dan Mandiri (%) Cakupan Perdes KIBBLA (%)	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan
Sasaran 3.6: Menurunnya Prevalensi Stunting				
	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga sejahtera (KS)	Presentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga (%)	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Meningkatnya cakupan layanan pada kelompok Calon Pengantin	Cakupan calon Pengantin mendapatkan pemeriksaan kesehatan (%)		
		Cakupan Calon pengantin mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan stunting (%)		
		Persentase PIK-R (Pusat Informasi dan Konseling Remaja) yang aktif menjalankan program PKBR (%)		
		Indeks Pengasuhan Keluarga Remaja (%)		
	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Cakupan Penerapan ILP (Integrasi Layanan Primer) (%)	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	- Dinas Kesehatan - Puskesmas
		Persentase pemenuhan sarana, prasarana, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan sesuai standar (%)		
		Persentase Puskesmas yang terakreditasi Paripurna (%)		
		Cakupan Deteksi dan Pengendalian Penyakit (Skrining Kesehatan) (%)		
		Angka Kematian Balita (AKABA)		
		Angka Gizi Buruk (Angka)		
		Cakupan INM (Indikator Nasional Mutu) (%)		

TUJUAN / SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	PROGRAM PRIORITAS	PD PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Cakupan MPDN (<i>Maternal Perinatal Death Notification</i>) (%)		
		Persentase Kecamatan yang melaksanakan kampanye/gerakan PHBS minimal 8 X per/tahun dengan melibatkan lintas sektor (%)		
Tujuan 4: Terpenuhiya Kebutuhan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas				
Sasaran 4.1: Meningkatnya Infrastruktur Dasar				
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota (%)	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sanitasi Air Limbah Domestik Layak dan Aman (%)	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (%)	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Meningkatnya kualitas kawasan permukimamn	Cakupan rumah tidak layak huni (%)	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Meningkatnya penyediaan PSU Permukiman	Persentase Permukiman yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) (%)	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (Indeks)	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Dinas Lingkungan Hidup
Sasaran 4.2: Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah				
	Meningkatnya aksebilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan Jalan (%)	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal (%)	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Dinas Perhubungan
	Meningkatnya kualitas layanan transportasi laut	Persentase kualitas layanan transportasi laut (%)	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Dinas Perhubungan
Tujuan 5: Meningkatnya Perlindungan Sosial dan Penguatan Kelembagaan Sosial Budaya				
Sasaran 5.1: Meningkatnya Perlindungan Sosial				
	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar (%)	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Dinas Sosial
		Persentase penerima manfaat yang meningkat kemandirian Ekonomi (%)		

TUJUAN / SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	PROGRAM PRIORITAS	PD PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Persentase Desa/ Kelurahan yang melaksanakan pengelolaan dan pendataan data fakir miskin (%) Persentase peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar PMKS (%) Persentase Peningkatan keberdayaan ekonomi PMKS (%) Persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan (%)		
	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%) Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%) Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%) Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%) Persentase gelandang dan pengemis yang terpenuhi (%)	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial
	Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA (%) Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang melaksanakan penganganan korban bencana pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar (%) Persentase SDM kesejahteraan sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial (%) Persentase lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan sosial (%)	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Dinas Sosial
	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Cakupan Penerapan ILP (Integrasi Layanan Primer) (%)	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan

TUJUAN / SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	PROGRAM PRIORITAS	PD PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Persentase pemenuhan sarana, prasarana, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan sesuai standar (%) Persentase Puskesmas yang terakreditasi Paripurna (%) Cakupan Deteksi dan Pengendalian Penyakit (Skrining Kesehatan) (%) Angka Kematian Balita (AKABA) Angka Gizi Buruk (Angka) Cakupan INM (Indikator Nasional Mutu) (%) Cakupan MPDN (<i>Maternal Perinatal Death Notification</i>) (%) Persentase Kecamatan yang melaksanakan kampanye/gerakan PHBS minimal 8 X per/tahun dengan melibatkan lintas sektor (%)		
Sasaran 5.2: Menurunnya Kemiskinan				
	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar (%) Persentase penerima manfaat yang meningkat kemandirian Ekonomi (%) Persentase Desa/ Kelurahan yang melaksanakan pengelolaan dan pendataan data fakir miskin (%) Persentase peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar PMKS (%) Persentase Peningkatan keberdayaan ekonomi PMKS (%) Persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan (%)	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Dinas Sosial
	Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA (%)	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Dinas Sosial

TUJUAN / SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	PROGRAM PRIORITAS	PD PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang melaksanakan penganganan korban bencana pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar (%)		
		Persentase SDM kesejahteraan sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial (%)		
		Persentase lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan sosial (%)		
	Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan (%)	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (%)	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Dinas Tenaga Kerja
		Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota (%)		
		Cakupan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online (%)		
		Persentase lulusan pelatihan kerja yang ditempatkan bekerja (%)		
		Jumlah pelatihan vokasi dan sertifikasi kompetensi kerja yang diselenggarakan (%)		
		Persentase TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja) (%)		
	Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD Yang Ditingkatkan Kapasitasnya (%)	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa (%)		
Sasaran 5.3: Meningkatkan Kualitas Keluarga, Pemuda dan Penyetaraan Gender				
	Meningkatnya Partisipasi Perempuan di sektor Publik	Persentase perempuan yang duduk di Parlemen (%)	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Persentase perempuan yang bekerja di sektor Formal (%)		
		Persentase perempuan yang bekerja di sektor Non Formal (%)		

TUJUAN / SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	PROGRAM PRIORITAS	PD PENANGGUNG JAWAB		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
	Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak		
		Persentase ARG pada belanja langsung APBD (%)				
	Menurunnya kekerasan terhadap Perempuan	Persentase Kasus kekerasan terhadap Perempuan yang diselesaikan (%)			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)				
		Rasio KDRT (Rasio)				
	Meningkatnya Kualitas Keluarga dalam mendukung kesetaraan Gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Indeks Kualitas Keluarga (Angka)	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak		
		Tingkatan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) (Level)				
	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga sejahtera (KS)	Presentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga (%)	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak		
	Meningkatnya cakupan layanan pada kelompok Calon Pengantin	Cakupan calon Pengantin mendapatkan pemeriksaan kesehatan (%)				
		Cakupan Calon pengantin mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan stunting (%)				
		Persentase PIK-R (Pusat Informasi dan Konseling Remaja) yang aktif menjalankan program PKBR (%)				
		Indeks Pengasuhan Keluarga Remaja (%)				
Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif (%)	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga			
	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (%)					
Meningkatnya Organisasi Pemuda yang Aktif	Cakupan Organisasi Pemuda yang Aktif (%)					
Meningkatnya daya saing Kepemudaan	Cakupan Wirausaha Muda (%)					
Sasaran 5.4: Terjaminnya Daya Hidup Komunitas dan Budaya Lokal						
	Meningkatnya Pengembangan Produk Kebudayaan	Persentase Pengembangan Produk Kebudayaan (%)	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan		
	Meningkatnya Budaya yang dilestarikan	Persentase Budaya yang dilestarikan (%)		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan		

TUJUAN / SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	PROGRAM PRIORITAS	PD PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sasaran 5.5: Terjaminnya Perlindungan Pekerja Migran di Daerah				
	Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (%)	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Dinas Tenaga Kerja
		Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota (%)		
		Cakupan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online (%)		
		Persentase lulusan pelatihan kerja yang ditempatkan bekerja (%)		
		Jumlah pelatihan vokasi dan sertifikasi kompetensi kerja yang diselenggarakan (%)		
		Persentase TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja) (%)		
Tujuan 6: Terjaminnya Daya Dukung Ekologis Jangka Panjang Serta Ketangguhan terhadap Bencana dan Perubahan Iklim				
Sasaran 6.1: Meningkatnya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup untuk Peningkatan Kualitas Hidup Yang Berkelanjutan				
	Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase Laporan Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (%)	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase Daerah yang Direhabilitasi/Konservasi (%)		
	Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dikelola (%)	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Dinas Lingkungan Hidup
	Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (Indeks)	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Dinas Lingkungan Hidup
	Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Tingkat ketaatan Penanggungjawab dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH, dan PUULH (%)	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Dinas Lingkungan Hidup
	Meningkatnya Kelestarian laut dan Keanekaragamana hayati laut	Persentase Pengawasan Usaha Perikanan dalam mencegah kegiatan Ilegal Fiishing (%)	PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Dinas Perikanan
Meningkatnya pengawasan usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan	Persentase Pengawasan usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan (%)			

TUJUAN / SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	PROGRAM PRIORITAS	PD PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sasaran 6.2: Meningkatnya Mitigasi Bencana dan Kualitas Penanganan Bencana				
	Meningkatnya Kualitas Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (%)	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Meningkatnya Penanganan Bencana pada Saat Tanggap Darurat	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana (%)		
	Meningkatnya Penanganan Bencana Pada Saat Pasca Bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana (%)		
	Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase korban bencana alam, sosial dan/atau Non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana (%)	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Dinas Sosial
		Persentase masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kesiapsiagaannya (%)		
		Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan pemulihan sosial (%)		
Sasaran 6.3: Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penataan Kota yang Serasi, Selaras dan Seimbang				
	Meningkatnya Ketaatan terhadap tata ruang	Tingkat Ketaatan terhadap ruang (%)	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan (%)	PROGRAM PENATAAN BANGUN DAN LINGKUNGANNYA	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Tingkat ketaatan Penanggungjawab dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH, dan PUULH (%)	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Dinas Lingkungan Hidup
Tujuan 7: Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik				
Sasaran 7.1: Meningkatnya Kualitas Transparansi				
	Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (%)	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Dinas Komunikasi dan Informasi
	Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) (indeks)	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Dinas Komunikasi dan Informasi
Sasaran 7.2: Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas				
	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Pemerintah Daerah	Indeks Kematangan Organisasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Sekretariat Daerah - Bagian Organisasi

TUJUAN / SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	PROGRAM PRIORITAS	PD PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Tata Pemerintahan (%)	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Sekretariat Daerah - Bagian Pemerintahan
		Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (%)		
Sasaran 7.3: Meningkatnya Kualitas Partisipasi				
	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase keselarasan RPJMD dan RKPD (%)	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
		Persentase keselarasan RPJMD dan Renstra PD (%)		
	Meningkatnya perencanaan pembangunan yang partisipatif melalui peningkatan kualitas pelibatan masyarakat	Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam APBD (%)		
	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase keselarasan RKPD dan Renja PD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (%)	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah bidang Perekonomian dan SDA	Persentase keselarasan RKPD dan Renja PD Bidang Perekonomian dan SDA (%)		
	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase keselarasan RKPD dan Renja PD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (%)		
	Meningkatnya perencanaan pembangunan yang partisipatif dan terintegrasi melalui koordinasi antar sektor	Persentase program terintegrasi antar OPD (%)		
Sasaran 7.4: Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kebijakan Publik				
	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase keselarasan RPJMD dan RKPD (%)	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
		Persentase keselarasan RPJMD dan Renstra PD (%)		
	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Pemerintah Daerah	Indeks Kematangan Organisasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Sekretariat Daerah - Bagian Organisasi
	Meningkatnya Kualitas Produk Hukum Daerah	Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan (%)	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Sekretariat Daerah - Bagian Hukum
Sasaran 7.5: Meningkatnya Kualitas Pengawasan				
	Menurunnya Terjadinya Penyelewengan atau Penyimpangan, baik yang Bersifat Anggaran ataupun Proses dan Kewenangan	Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 (%)	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Inspektorat Daerah
	Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Asistensi	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Level)	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Inspektorat Daerah
		Persentase Rencana Aksi Reformasi Birokrasi (RB) yang dilaksanakan (%)		

TUJUAN / SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	PROGRAM PRIORITAS	PD PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Persentase Rencana Aksi <i>Monitorinf Center for Prevention</i> (MCP) yang dilaksanakan (%)		
		Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Level)		
Sasaran 7.6: Meningkatnya Profesionalisme ASN				
	Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas ASN	Persentase Profesionalitas ASN (%)	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
		Persentase Kualitas Pelayanan Bidang Kepegawaian (%)		
	Meningkatnya Pendidikan dan Pelatihan Bagi ASN	Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal (%)	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
Sasaran 7.7: Meningkatnya Kualitas Layanan Publik				
	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Pemerintah Daerah	Indeks Kematangan Organisasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Sekretariat Daerah - Bagian Organisasi
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (%)	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (%)		
		Persentase Layanan KTP Elektronik (%)		
	Meningkatnya Kualitas Layanan Pencatatan Sipil	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang melaporkan (%)	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan Bagi yang Melaporkan (%)		
		Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan Bagi yang Melaporkan (%)		
		Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan Bagi yang Melaporkan (%)		
Sasaran 7.8: Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah				
	Meningkatnya Tata Kelola Anggaran	Persentase Ketepatan Waktu Penetapan Perda APBD (%)	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Badan Keuangan dan Aset Daerah
		Tingkat kesesuaian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Antara KUA PPAS, RAPBD dan APBD (%)		
	Meningkatnya Tata Kelola Perbendaharaan	Persentase Realisasi Belanja Terhadap Target Belanja yang Telah Ditetapkan (%)		
	Meningkatnya Tata Kelola Akuntansi dan Pelaporan	Persentase Penyampaian LKPD Akuntabel (sesuai SAP) dan Tepat Waktu (%)		

TUJUAN / SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	PROGRAM PRIORITAS	PD PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Meningkatnya Tata Kelola Aset Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Pengelolaan BMD Baik/Tertib dan Akuntabel (%)	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Sasaran 7.9: Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah				
	Meningkatnya Upaya Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pendapatan	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah (%)	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Badan Pendapatan Daerah
	Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pelaporan	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan (%)		
	Meningkatnya penerapan elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah	Persentase Penerapan elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah (%)		
Tujuan 8: Meningkatnya Keamanan, Ketertiban dan Kebebasan Masyarakat				
Sasaran 8.1: Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban				
	Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat Terhadap PERDA dan PERKADA	Persentase PERDA dan PERKADA yang Ditegakkan (%)	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Satuan Polisi Pamong Praja
	Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (%)		
	Meningkatnya Perlindungan terhadap Masyarakat	Persentase Cakupan Perlindungan terhadap Masyarakat (%)		
	Meningkatnya Kapasitas SDM PPNS	Persentase PPNS yang ditingkatkan Kompetensinya (%)		
	Meningkatnya Kualitas Produk Hukum Daerah	Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan (%)	PROGRAM PEMERINTAH DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Sekretariat Daerah - Bagian Hukum
Sasaran 8.2: Meningkatnya Kerukunan Umat Beragama				
	Meningkatnya Penanganan Konflik Sosial yang Diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (%)	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Meningkatnya Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan (%)	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sasaran 8.3: Meningkatnya Kualitas Demokrasi Daerah				
	Meningkatnya Etika dan Budaya Politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (%)	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Program Prioritas Pembangunan di atas secara normatif tersebar dalam bidang urusan pemerintahan dan Perangkat Daerah, yang kemudian menjadi dasar dalam kebijakan anggaran dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029. Pelaksanaan program prioritas tersebut akan mencakup pembangunan di berbagai sektor kehidupan melalui Program Unggulan, yang secara keseluruhan diformulasikan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, menjawab permasalahan serta tantangan utama secara cepat, tepat dan terukur guna menciptakan struktur yang kokoh dalam menunjang pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan. Adapun 20 (dua puluh) Program Unggulan Daerah yang akan dilaksanakan selama Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:



Gambar 3.4 Program Unggulan Daerah Tahun 2025-2029

Rumusan program unggulan daerah di atas merupakan fokus pelaksanaan pembangunan yang mengarah pada percepatan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah, yakni “Lompatan Produktivitas” untuk peningkatan perekonomian dan kesejahteraan rakyat serta kemajuan daerah. Selanjutnya rumusan program unggulan daerah tersebut akan diimplementasikan melalui pelaksanaan program-program prioritas daerah oleh Perangkat Daerah dengan mengedepankan prinsip pembangunan yang sinergis dan kolaboratif. Penjabaran program unggulan daerah sebagaimana terlihat pada Tabel 3.8 berikut.

Tabel 3.8 Implementasi Program Unggulan Daerah Tahun 2025-2029
ke dalam Program Perangkat Daerah

PROGRAM UNGGULAN		PROGRAM PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	DUKUNGAN TUJUAN RPJMD
(1)		(2)		(3)	(4)
1.	Kawasan Ekonomi Strategis Pertanian Modern Skala Big Push	1.1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	- Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan; - Dinas Perkebunan dan Peternakan	Tujuan 1
		1.2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	- Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan; - Dinas Perkebunan dan Peternakan	
2.	Big Push Peternakan Modern Terintegrasi	2.1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Dinas Perkebunan dan Peternakan	Tujuan 1
		2.2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Dinas Perkebunan dan Peternakan	
3.	Big Push Perikanan Modern Terintegrasi	3.1	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Dinas Perikanan	Tujuan 1
		3.2	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Dinas Perikanan	
4.	Kampung Nelayan Lompatan Jauh	4.1	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Dinas Perikanan	Tujuan 1
5.	Pabrik Pengolahan Komoditi Strategis	5.1	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Tujuan 1
6.	BUMD Berdaya	6.1	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Sekretariat Daerah - Bagian Perekonomian	Tujuan 1
7.	Event Pariwisata Premium	7.1	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Tujuan 1
8.	Future School	8.1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Tujuan 2
		8.2	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	
9.	Lompatan Narasi dan Literasi	9.1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Tujuan 2
		9.2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
10.	Layanan Prima Kesehatan	10.1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	- Dinas Kesehatan; - RSUD dr. Hendrikus Fernandes; - RSUD Adonara; - RS Pratama Solor; - Puskesmas	Tujuan 3
		10.2	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	- Dinas Kesehatan; - RSUD dr. Hendrikus Fernandes; - RSUD Adonara; - RS Pratama Solor	
11.	Lanjutan GO CINTA 2H2	11.1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	- Dinas Kesehatan; - RSUD dr. Hendrikus Fernandes; - RSUD Adonara; - RS Pratama Solor; - Puskesmas	Tujuan 3

PROGRAM UNGGULAN		PROGRAM PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	DUKUNGAN TUJUAN RPJMD
(1)		(2)		(3)	(4)
12.	BLK dan Beyond Malaysia	12.1	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Dinas Tenaga Kerja	Tujuan 2 dan 5
		12.2	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Dinas Tenaga Kerja	
13.	SISKAMDES dan Total Migrasi Aman	13.1	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Dinas Tenaga Kerja	Tujuan 5
14.	FLOTIM SAMID	14.1	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Tujuan 7
		14.2	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
15.	By Name By Address By Picture Data Kemiskinan	15.1	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Dinas Sosial	Tujuan 5
		15.2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
16.	Konektivitas Berkeadilan Sosial	16.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tujuan 4
		16.2	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Dinas Perhubungan	
17.	Smart Tani Milenial	17.1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Tujuan 1
18.	Air dan Sustainabilitas Ekologis	18.1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tujuan 1 dan 6
		18.2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	- Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan; - Dinas Perkebunan dan Peternakan	
		18.3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup	
19.	Desa Afirmasi Pengentasan Kemiskinan dan Stunting	19.1	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tujuan 5
20.	Ekonomi Kecamatan, Desa dan Kelurahan tangkap peluang MBG	20.1	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tujuan 1
		20.2	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	

BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH



**LOMPATAN
JAUH**
FLORES TIMUR



PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1 Program Perangkat Daerah

Program Perangkat Daerah merupakan instrumen dari strategi dan arah kebijakan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Penentuan Program Perangkat Daerah dalam RPJMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2025-2029 dilaksanakan berdasarkan kajian terhadap *outcome* Program yang dapat berkontribusi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah, berhubungan langsung dengan kepentingan publik, memiliki nilai manfaat yang tinggi, dan mampu menjawab persoalan daerah. Program Perangkat Daerah RPJMD menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam merumuskan Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) beserta kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, target kinerja dan pagu indikatif. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah, rumusan rencana program pada RPJMD dan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada RENSTRA PD direncanakan dari Tahun 2026-2030. Tahun rencana 2030 menjadi acuan dalam penyusunan RKPD Tahun 2030 yang akan menjadi tanggung jawab kepala daerah periode berikutnya.

Penetapan Program Perangkat Daerah sebanyak 143 program (1 program penunjang dan 142 program urusan) juga menjadi bagian dari pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan secara utuh, yang meliputi penyelenggaraan urusan wajib (penerapan Standar Pelayanan Minimal), urusan pilihan, unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, dan unsur pemerintahan umum. Penetapan jumlah program Perangkat Daerah dan Pagu Indikatif Tahun 2026-2030 berdasarkan bidang urusan sebagaimana terlihat pada Tabel 4.1 dan 4.2 berikut.

Tabel 4.1 Jumlah Program dan Pagu Indikatif Per-Urusan/Bidang Urusan Kab. Flores Timur Tahun 2026-2030

KODE		URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	JMLH PROG	PROYEKSI PAGU INDIKATIF (Rp. -) TAHUN				
URUSAN	BIDANG URUSAN			2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1	690.214.266.700	720.354.200.600	741.105.643.700	743.710.314.450	736.652.387.400
		Program Urusan	142	637.156.937.000	682.157.950.500	715.271.650.800	767.403.434.850	829.053.300.000
		Total Program dan Pagu Indikatif	143	1.327.371.203.700	1.402.512.151.100	1.456.377.294.500	1.511.113.749.300	1.565.705.687.400

KODE		URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM	JMLH PROG	PROYEKSI PAGU INDIKATIF (Rp. -) TAHUN				
URUSAN	BIDANG URUSAN			2026	2027	2028	2029	2030
(1)		(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1		Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	31	291.365.637.000	314.915.127.100	332.064.984.700	342.902.200.810	387.465.574.800
1	01	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	4	98.670.949.000	114.236.320.900	121.072.021.400	128.492.990.600	140.275.606.300
1	02	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	4	135.708.688.000	138.307.181.200	143.027.622.300	144.787.149.950	151.584.015.250
1	03	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10	51.566.000.000	55.471.350.000	57.684.670.750	59.569.209.900	81.910.867.850
1	04	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	4	3.045.000.000	4.155.000.000	7.310.000.000	6.366.400.000	9.620.450.000
1	05	Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	3	1.080.000.000	1.288.400.000	1.381.752.000	2.073.874.560	1.580.604.800
1	06	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	6	1.295.000.000	1.456.875.000	1.588.918.250	1.612.575.800	2.494.030.600
2		Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	63	29.799.300.000	34.584.972.000	32.307.033.050	40.420.574.100	54.717.592.200
2	07	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	3	3.225.000.000	3.466.000.000	3.523.622.500	3.357.075.600	3.841.350.000
2	08	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6	293.500.000	369.190.000	440.471.000	334.508.000	655.807.700
2	09	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	4	340.300.000	451.200.000	529.280.000	552.466.750	733.713.700
2	10	Urusan Perintahan Bidang Pertanahan	5	83.500.000	97.000.000	124.600.000	133.450.000	168.550.000
2	11	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	8	5.747.000.000	6.436.375.000	5.924.353.000	6.035.822.400	6.391.433.500
2	12	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	4	500.700.000	559.180.000	571.500.000	569.100.000	632.110.000
2	13	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3	900.000.000	965.030.000	1.075.769.200	990.285.350	1.171.582.600
2	14	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3	7.219.500.000	7.618.190.000	7.839.352.000	7.685.758.600	8.628.784.800
2	15	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	2	2.865.800.000	2.305.650.000	2.506.100.000	2.036.005.000	2.276.920.000
2	16	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informasi	2	1.750.800.000	1.821.482.000	1.695.911.600	776.649.100	1.717.251.550
2	17	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	6	2.112.000.000	2.706.225.000	2.908.329.500	2.907.001.650	3.111.222.650
2	18	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	5	458.000.000	327.300.000	354.354.000	317.834.150	431.467.750
2	19	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga	3	3.270.200.000	6.205.200.000	3.465.200.000	13.425.200.000	23.485.200.000

KODE		URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM	JMLH PROG	PROYEKSI PAGU INDIKATIF (Rp. -) TAHUN				
URUSAN	BIDANG URUSAN			2026	2027	2028	2029	2030
(1)		(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	20	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	1	35.000.000	50.000.000	85.000.000	76.500.000	78.000.000
2	21	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	1	20.000.000	35.000.000	40.000.000	32.500.000	50.000.000
2	22	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	3	630.000.000	793.250.000	833.982.250	796.845.000	906.518.500
2	23	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	2	268.000.000	281.400.000	288.028.000	295.638.800	306.578.950
2	24	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	2	80.000.000	97.300.000	101.180.000	97.933.700	131.100.500
3		Urusan Pilihan	25	25.044.300.000	28.135.832.000	28.318.955.500	28.403.350.600	36.711.568.650
3	25	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan	4	7.625.600.000	10.100.450.000	10.210.280.000	8.568.739.500	11.231.632.700
3	26	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	4	1.610.000.000	1.808.500.000	1.961.232.000	2.036.279.300	2.159.755.250
3	27	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	6	12.370.700.000	13.789.582.000	13.371.153.500	13.281.936.800	13.951.900.700
3	30	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	5	3.010.000.000	1.833.800.000	1.778.990.000	851.895.000	1.449.700.000
3	31	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	3	365.000.000	530.000.000	556.800.000	549.500.000	763.580.000
3	32	Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi	3	63.000.000	73.500.000	440.500.000	3.115.000.000	7.155.000.000
4		Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	3	8.465.000.000	8.820.700.000	9.226.712.000	9.145.909.550	9.685.913.600
4	01	Sekretariat Daerah	2	2.805.000.000	2.884.300.000	3.073.720.000	2.975.086.850	3.353.285.400
4	02	Sekretariat DPRD	1	5.660.000.000	5.936.400.000	6.152.992.000	6.170.822.700	6.332.628.200
5		Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan	9	273.019.250.000	285.852.626.000	302.619.847.400	303.500.115.400	328.776.711.900
5	01	Perencanaan	2	1.186.250.000	1.421.451.000	1.494.487.200	1.541.743.800	2.252.777.000
5	02	Keuangan	3	269.426.000.000	282.918.500.000	299.376.755.000	300.501.817.600	324.216.321.100
5	03	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	1	575.000.000	585.675.000	613.125.200	615.948.300	880.416.700
5	04	Pendidikan dan Pelatihan	1	1.522.000.000	525.000.000	685.000.000	400.000.000	850.000.000
5	05	Penelitian dan Pengembangan	2	310.000.000	402.000.000	450.480.000	440.605.700	577.197.100
6		Urusan Pengawasan Urusan Pemerintahan	2	577.000.000	728.000.000	803.000.000	811.000.000	891.000.000
6	01	Inspektorat Daerah	2	577.000.000	728.000.000	803.000.000	811.000.000	891.000.000
7		Urusan Kewilayahan	4	7.066.450.000	7.150.893.400	7.876.190.150	7.832.507.440	8.501.133.950
7	01	Kecamatan	4	7.066.450.000	7.150.893.400	7.876.190.150	7.832.507.440	8.501.133.950
8		Unsur Pemerintahan Umum	5	1.820.000.000	1.969.800.000	2.054.928.000	34.387.776.950	2.303.804.900
8	01	Kesatuan Bangsa dan Politik	5	1.820.000.000	1.969.800.000	2.054.928.000	34.387.776.950	2.303.804.900

Tabel 4.2 Program Perangkat Daerah dan Pagu Indikatif Tahun 2026-2030

KODE			URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME (SATUAN)	BASE- LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				690.214.266.700		720.354.200.600		741.105.643.700		743.710.314.450		736.652.387.400	Semua PD / Unit PD
			Program Urusan				637.156.937.000		682.157.950.500		715.271.650.800		767.403.434.850		829.053.300.000	
			Total Pagu				1.327.371.203.700		1.402.512.151.100		1.456.377.294.500		1.511.113.749.300		1.565.705.687.400	
x	xx	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				690.214.266.700		720.354.200.600		741.105.643.700		743.710.314.450		736.652.387.400	Semua Perangkat Daerah
			Meningkatnya Kualitas Administrasi dan Fasilitas pelayanan perkantoran	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran OPD (%)												
				Persentase evaluasi dan pelaporan kinerja OPD (%)												
				Persentase peningkatan kapasitas ASN OPD (%)												
				Persentase fasilitas pendukung administrasi perkantoran yang tersedia (%)												
				Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana perkantoran (%)												
			Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Pemerintah Daerah	Indeks Kematangan Organisasi (Angka)	100	100		100		100		100		100		Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)
			Meningkatnya Ekstensifikasi dan Indentifikasi Pendapatan Retribus Daerah	Persentase jenis-jenis Retribusi yang dikelola (%)	100	100		100		100		100		100		Badan Pendapatan Daerah
				Presentase Kesadaran wajib Retribusi Daerah (%)	63,11	100		100		100		100		100		
			Meningkatnya Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase pelayanan kedinasan KDH dan WKDH (%)	100	100		100		100		100		100		Sekretariat Daerah (Bagian Umum, Bagian Protokol & Komunikasi Pimpinan, Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah)















KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME (SATUAN)	BASE- LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	2026				2027		2028		2029		2030				
			TARGET				PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET		PAGU (Rp)	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota (%)	67,33	75,77			79,99		84,21		88,43		92,65		
1	03	04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL				250.000.000		344.000.000		524.320.000		530.949.600		617.892.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
			Meningkanya layanan persampahan regional	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional (%)	75,06	82,78		86,92		91,28		95,84		100,00			
1	03	05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				5.000.000.000		5.200.000.000		5.356.000.000		5.476.680.000		5.690.180.400	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sanitasi Air Limbah Domestik Layak dan Aman (%)	5,77	6,12		6,53		7,00		7,53		8,12			
1	03	06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				300.000.000		400.000.000		850.000.000		475.500.000		905.365.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
			Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (%)	27,78	27,78		44,44		55,56		66,67		72,22			
1	03	08	PROGRAM PENATAAN BANGUN GEDUNG				100.000.000		115.000.000		118.450.000		122.003.500		125.663.600	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
			Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik (%)	60,00	60,27		60,54		60,81		61,08		61,35			
1	03	09	PROGRAM PENATAAN BAGUNANAN DAN LINGKUNGANNYA				1.500.000.000		150.000.000		154.500.000		157.899.000		162.793.850	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
			Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan (%)	45,00	45,36		45,73		46,09		46,45		46,82			
1	03	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				25.000.000.000		27.500.000.000		30.000.000.000		29.400.000.000		48.600.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
			Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan Jalan (%)	50,15	53,23		54,55		56,75		58,95		61,14			
1	03	11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				40.000.000		42.000.000		45.500.000		47.500.000		52.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
			Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli (%)	-	20		24		28		32		36			

KODE			URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME (SATUAN)	BASE- LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				2026		2027		2028		2029			2030	
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)		TARGET	PAGU (Rp)
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	03	12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				2.500.000.000		1.575.000.000		60.000.000		65.500.000		71.500.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Meningkatnya Ketaatan terhadap tata ruang	Tingkat Ketaatan terhadap ruang (%)	100	100		100		100		100		100		
1	04		Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman				3.045.000.000		4.155.000.000		7.310.000.000		6.366.400.000		9.620.450.000	
1	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				50.000.000		-		-		-		-	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
			Terpenuhinya rumah layak huni bagi masyarakat korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase Masyarakat Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni (%)	-	100,00		-		-		-		-		
1	04	03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				2.000.000.000		2.755.000.000		5.695.000.000		4.848.400.000		7.745.450.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
			Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Cakupan rumah tidak layak huni (%)	35,06	34,94		34,62		34,27		33,93		33,40		
1	04	04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN KUMUH				125.000.000		150.000.000		165.000.000		168.000.000		200.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
			Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman	Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani (%)	2,79	2,81		2,83		2,85		2,88		2,91		
1	04	05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				870.000.000		1.250.000.000		1.450.000.000		1.350.000.000		1.675.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
			Meningkatnya penyediaan PSU Permukiman	Persentase Permukiman yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) (%)	6,00	8,40		10,80		13,60		16,80		20,40		
1	05		Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat				1.080.000.000		1.288.400.000		1.381.752.000		2.073.874.560		1.580.604.800	
1	05	02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				600.000.000		636.000.000		675.080.000		1.325.352.400		714.837.000	Satuan Polisi Pamong Praja
			Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat Terhadap PERDA dan PERKADA	Persentase PERDA dan PERKADA yang Ditegakkan (%)	90	90		90		90		90		90		
			Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (%)	87	90		90		90		90		90		













LOMPATAN
JAUH
SILVER STAR

ian dan
angan

KODE			URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME (SATUAN)	BASE- LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				2026		2027		2028		2029			2030	
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)		TARGET	PAGU (Rp)
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	54,4	51,6		48,8		46,4		44,0		46,0		
2	09	05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN				40.000.000		45.000.000		60.260.000		54.825.550		76.340.300	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase sampel Pangan Segar Yang Memenuhi Persyaratan Dan Mutu Keamanan Pangan (%)	100	100		100		100		100		100		
2	10		Urusan Perintahan Bidang Pertanahan				83.500.000		97.000.000		124.600.000		133.450.000		168.550.000	
2	10	04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN				15.000.000		20.000.000		23.600.000		24.500.000		27.250.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
			Meningkatnya penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase terselesainya kasus tanah garapan yang belum bersertifikasi (%)	33,33	100		100		100		100		100		
2	10	05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN				13.000.000		15.000.000		16.500.000		18.750.000		22.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
			Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persentase Penyelesaian Ganti kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan (%)	100	100		100		100		100		100		
2	10	06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE				20.000.000		22.000.000		24.500.000		26.000.000		28.800.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
			Meningkatnya akses Masyarakat terhadap Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)	Persentase ketersediaan Tanah Objek Landfeform (TOL) yang siap diretribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan absentee (%)	30,61	31,74		32,87		33,99		35,12		36,25		
2	10	07	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT				18.500.000		20.000.000		33.000.000		33.700.000		46.500.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
			Meningkatnya tata kelola tanah ulayat	Persentase Tanah Ulayat yang ditetapkan (%)	-	20		40		60		80		100		

KODE			URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME (SATUAN)	BASE- LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				2026		2027		2028		2029			2030	
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)		TARGET	PAGU (Rp)
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2	10	10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH				17.000.000		20.000.000		27.000.000		30.500.000		44.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
			Meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas	Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah (%)	-	20		40		60		80		100		
2	11		Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup				5.747.000.000		6.436.375.000		5.924.353.000		6.035.822.400		6.391.433.500	
2	11	02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				510.000.000		-		-		500.000.000		-	Dinas Lingkungan Hidup
			Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan hidup	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti (%)	100	100		-		-		100				
2	11	03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				400.000.000		565.000.000		565.000.000		465.000.000		565.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
			Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase Laporan Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (%)	72,58	78,39		100		100		100		100		
				Persentase Daerah yang Direhabilitasi/ Konservasi (%)	12,11	13,30		14,50		15,72		16,95		18,20		
2	11	04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				75.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
			Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dikelola (%)	47,66	47,66		47,66		47,66		47,66		47,66		
2	11	05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)				10.000.000		20.500.000		28.500.000		30.000.000		35.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
			Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Limbah Beracun(B3)	Persentase Limbah B3 yang terkelola (%)	50,59	56,47		62,35		68,24		74,12		80,00		
2	11	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				30.000.000		47.000.000		47.000.000		48.650.000		65.200.000	Dinas Lingkungan Hidup











KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME (SATUAN)	BASE- LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	2026				2027		2028		2029		2030						
			TARGET				PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET		PAGU (Rp)			
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
2	18		Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal					458.000.000		327.300.000			354.354.000			317.834.150		431.467.750	
2	18	02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					235.000.000		32.250.000			40.775.000			35.578.250		68.405.500	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi	Persentase PMA/PMDN yang bekerja sama dengan UMKM (%)	-	3,39			6,78		10,17			13,56		19,95			
2	18	03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					50.000.000		53.800.000			61.876.000			56.355.700		63.871.100	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Meningkatnya Jangkauan Promosi Penanaman Modal	Persentase Investor yang berinvestasi terhadap target yang direncanakan (%)	79,73	83,78			87,84		91,89			95,95		100,00			
2	18	04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					55.000.000		86.750.000			90.085.000			80.127.550		98.231.300	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Meningkatnya Perizinan Berusaha Terhadap Resiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (%)	100	100			100		100			100		100			
2	18	05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					100.000.000		132.600.000			138.340.000			122.920.200		175.607.800	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Terkendalinya Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Penyelesaian Pemasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam membuka usaha (%)	100	100			100		100			100		100			
2	18	06	PROGAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					18.000.000		21.900.000			23.278.000			22.852.450		25.352.050	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Meningkatnya Pengelolaan dan Informasi Penanaman Modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (%)	100	100			100		100			100		100			
2	19		Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga					3.270.200.000		6.205.200.000			3.465.200.000			13.425.200.000		23.485.200.000	
2	19	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					1.255.200.000		1.325.200.000			1.315.200.000			1.395.200.000		1.405.200.000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
			Meningkatnya Organisasi Pemuda yang Aktif	Cakupan Organisasi Pemuda yang Aktif (%)	99,05	100			100		100			100		100			
			Meningkatnya daya saing Kepemudaan	Cakupan Wirausaha Muda (%)	0,81	2,47			3,29		4,12			4,95		5,00			

KODE			URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME (SATUAN)	BASE- LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				2026		2027		2028		2029			2030	
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)		TARGET	PAGU (Rp)
	(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2	19	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHKRAGAAN				1.635.000.000		4.630.000.000		1.900.000.000		11.780.000.000		21.830.000.000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
			Meningkatnya Prestasi Olahraga	Persentase Peningkatan Prestasi Olahraga (%)	15,79	26,32		31,58		36,84		42,11		47,37		
				Jumlah Atlet Berprestasi (Atlet)	0	2		3		4		5		6		
			Meningkatnya Pembinaan Olahraga	Cakupan Pembinaan Olahraga (%)	100	100		100		100		100		100		
2	19	04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN				380.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
			Meningkatnya Kapasitas Organisasi Kepramukaan	Persentase Organisasi Kepramukaan yang memenuhi standar (%)	65,99	72,79		79,59		86,39		93,19		100,00		
2	20		Urusan Pemerintahan Bidang Statistik				35.000.000		50.000.000		85.000.000		76.500.000		78.000.000	
2	20	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				35.000.000		50.000.000		85.000.000		76.500.000		78.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Meningkatnya Pengumpulan Data Statistik Sektoral	Persentase Pengumpulan Data Statistik Sektoral (%)	-	100		100		100		100		100		
2	21		Urusan Pemerintahan Bidang Persandian				20.000.000		35.000.000		40.000.000		32.500.000		50.000.000	
2	21	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				20.000.000		35.000.000		40.000.000		32.500.000		50.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Meningkatnya Pelayanan Persandian dan Keamanan Informasi	Persentase Jumlah Sistem Informasi berbasis elektronik milik pemerintah daerah yang diamankan (%)		90		90		90		90		90		
2	22		Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan				630.000.000		793.250.000		833.982.250		796.845.000		906.518.500	
2	22	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN				450.000.000		522.500.000		530.870.000		511.970.000		562.728.500	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
			Meningkatnya Pengembangan Produk Kebudayaan	Persentase Pengembangan Produk Kebudayaan (%)	19	39		49		59		69		79		
2	22	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL				80.000.000		120.750.000		135.429.250		144.875.000		158.790.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan



KODE			URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME (SATUAN)	BASE- LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				2026		2027		2028		2029			2030	
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)		TARGET	PAGU (Rp)
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3	25	04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				1.850.000.000		1.216.400.000		1.124.500.000		1.162.000.000		1.045.850.000	Dinas Perikanan
			Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya (%)	-83,33	44,32		15,38		13,33		11,76		26,32		
3	25	05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN				80.600.000		110.750.000		225.580.000		154.563.500		285.705.700	Dinas Perikanan
			Meningkatnya Kelestarian laut dan Keanekaragamana hayati laut	Persentase Pengawasan Usaha Perikanan dalam mencegah kegiatan Illegal Fiishing (%)	100	100		100		100		100		100		
			Meningkatnya pengawasan usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan	Persentase Pengawasan usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan (%)	100	100		100		100		100		100		
3	25	06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN				3.850.000.000		3.185.000.000		1.034.400.000		1.076.776.000		1.145.477.000	Dinas Perikanan
			Meningkatnya Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Peningkatan hasil Pemasaran Ikan (%)	20	38		41		48		52		57		
				Persentase peningkatan Produksi Olahan Perikanan (%)	33	42		56		64		73		80		
3	26		Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata				1.610.000.000		1.808.500.000		1.961.232.000		2.036.279.300		2.159.755.250	
3	26	02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				250.000.000		326.000.000		387.400.000		412.780.000		425.130.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
			Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (%)	-24,23	2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		
				Persentase Destinasi yang Dikembangkan (%)	9,09	10,49		11,89		13,29		14,69		16,08		
3	26	03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA				910.000.000		1.000.000.000		1.050.000.000		1.081.500.000		1.113.945.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
			Meningkatnya Jangkauan Pemasaran Pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (%)	33,49	48,23		57,87		69,44		88,33		100,00		
3	26	04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL				150.000.000		157.500.000		165.375.000		171.643.600		225.640.750	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

KODE			URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME (SATUAN)	BASE- LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				2026		2027		2028		2029			2030	
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)		TARGET	PAGU (Rp)
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			Meningkatnya Kualitas Ekosistem Kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang memiliki Kekayaan Intelektual (%)	66,67	73,33		80,00		86,67		93,33		100,00		
3	26	05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				300.000.000		325.000.000		358.457.000		370.355.700		395.039.500	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
			Meningkatnya Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Yang Aktif dan Tervalidasi (%)	40,5	60,5		70,5		80,5		90,5		100,0		
3	27		Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian				12.370.700.000		13.789.582.000		13.371.153.500		13.281.936.800		13.951.900.700	
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				3.171.700.000		1.920.000.000		2.359.500.000		2.420.000.000		3.610.252.700	Dinas Perkebunan dan Peternakan
			Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Sarana Pertanian (Tanaman Perkebunan dan Peternakan)	Persentase Peningkatan Produksi Perkebunan (%)	-0,66	0,17		0,28		0,31		0,42		0,49		
				Persentase Peningkatan Produksi Peternakan (%)	-61,8	0,33		26,67		31,57		40,00		42,85		
							1.120.000.000		1.326.000.000		1.417.304.500		1.208.450.500		1.314.655.150	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Sarana Pertanian (Tanaman Pangan dan Hortikultura)	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (%)	-11,33	10,00		10,00		10,00		10,00		10,00		
				Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura (%)	12,50	10,00		10,00		10,00		10,00		10,00		
3	27	03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				2.265.000.000		2.821.285.000		2.503.646.500		2.558.279.800		1.581.000.000	Dinas Perkebunan dan Peternakan
			Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Prasarana Pertanian (Tanaman Perkebunan dan Peternakan)	Peningkatan penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian (%)	8	29,17		50,00		66,67		87,50		100,00		
							3.644.000.000		3.808.187.000		3.945.312.500		3.987.814.950		4.187.205.650	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Prasarana Pertanian (Tanaman Pangan dan Hortikultura)	Persentase Luas Lahan Pertanian yang di kembangkan (%)	-	20		40		60		80		100		
3	27	04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				1.560.000.000		2.734.560.000		1.715.475.000		1.718.265.550		1.550.753.500	Dinas Perkebunan dan Peternakan

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME (SATUAN)	BASE- LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			Meningkatnya Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Tingkat Pengendalian Penyakit hewan Menular (%) Tingkat kesehatan masyarakat veteriner (%)	11,00 -	50,00 50,00		56,25 60,00		60,00 67,50		62,50 75,00		70,00 85,00		
3	27	05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN Meningkatnya Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian (Tanaman Perkebunan dan Peternakan)	Persentase penanganan bencana perkebunan dan peternakan (%)	-	20,00	125.000.000		275.800.000		455.340.000		450.400.000		625.000.000	Dinas Perkebunan dan Peternakan
							35.000.000		68.750.000		88.530.000		80.300.600		130.265.600	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			Meningkatnya Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian (Tanaman Pangan dan Hortikultura)	Persentase Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (%)	100	100		100		100		100		100		
3	27	06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN Meningkatnya kualitas dan Kemudahan Perijinan Usaha Perkebunan dan Peternakan	Persentase rekomendasi ijin usaha perkebunan dan peternakan yang diterbitkan (%)	-	50	50.000.000		50.000.000		60.000.000		62.500.000		75.000.000	Dinas Perkebunan dan Peternakan
							-		35.000.000		43.445.000		45.673.400		52.453.500	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			Meningkatnya Kualitas Dan Kemudahan Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Izin Usaha Pertanian Yang Di Terbitkan (%)	40	-		60		70		80		90		
3	27	07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Penyuluh Pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian Yang Di Tingkatkan (%)	3,62	7,25	400.000.000		750.000.000		782.600.000		750.252.000		825.314.600	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	30		Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan				3.010.000.000		1.833.800.000		1.778.990.000		851.895.000		1.449.700.000	
3	30	02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN Meningkatnya Kemudahan Proses Perizinan dan Pendaftaran Berusaha	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi (%)	44,95	55,96	35.000.000		50.000.000		60.000.000		58.000.000		85.000.000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
								66,97		77,98		88,99		100,00		
3	30	03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Meningkatnya Kualitas Sarana Perdagangan dan distribusi Barang yang efisien, Merata dan Terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (%)	0,78	21,71	2.000.000.000		1.275.400.000		1.137.400.000		250.000.000		680.000.000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
								41,86		42,63		62,01		81,39		



KODE			URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME (SATUAN)	BASE- LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				2026		2027		2028		2029			2030	
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)		TARGET	PAGU (Rp)
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Jumlah Rencana Satuan Kawasan Pengembangan (RSKP) yang disusun dan ditetapkan (%)		1		-		1		-		-		
3	32	03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI				18.000.000		20.000.000		20.000.000		3.000.000.000		7.000.000.000	Dinas Tenaga Kerja
			Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase Kawasan Transmigrasi yang dibangun (%)	0	0		-		-		50		50		
				Persentase kawasan transmigrasi dengan infrastruktur dasar yang layak (%)	100	0		-		-		50		50		
3	32	04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI				20.000.000		23.500.000		32.500.000		40.000.000		55.000.000	Dinas Tenaga Kerja
			Meningkatnya Pemberdayaan dan Kapasitas Transimgran dalam pengembangan kawasan Transmigrasi	Persentase Transmigran yang dibina dan diberdayakan (%)	34,58	34,58		47,85		74,68		79,80		100		
				Persentase Kawasan Transmigrasi yang dikembangkan (%)	50	50		50		75		75		80		
4			Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan				8.465.000.000		8.820.700.000		9.226.712.000		9.145.909.550		9.685.913.600	
4	01		Sekretariat Daerah				2.805.000.000		2.884.300.000		3.073.720.000		2.975.086.850		3.353.285.400	
4	01	02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				2.050.000.000		1.975.200.000		2.112.665.000		2.037.265.200		2.290.191.250	Sekretariat Daerah (Bagian Kesejahteraan Rakyat, Bagian Pemerintahan, Bagian Hukum)
			Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Tata Pemerintahan (%)	100	100		100		100		100		100		
				Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (%)	100	100		100		100		100		100		
			Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (%)	100	100		100		100		100		100		
			Meningkatnya Kualitas Produk Hukum Daerah	Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan (%)	100	100		100		100		100		100		





LOMPATAN
JAUH
PILEGIS TIMUR

KODE			URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME (SATUAN)	BASE- LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				2026		2027		2028		2029			2030	
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)		TARGET	PAGU (Rp)
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							230.000.000		250.000.000		262.000.000		264.000.000		280.000.000	Badan Pendapatan Daerah
			Meningkatnya kualitas manajemen pengelolaan digitalisasi sistem pemungutan PAD	Tingkat Pengelolaan Pelayanan Digitalisasi Sistem Pemungutan PAD (%)	100	100		100		100		100		100		
5	0.2	03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				520.000.000		556.000.000		610.380.000		600.251.400		645.215.950	Badan Keuangan dan Aset Daerah
			Meningkatnya Tata Kelola Aset Daerah	Persentase Penatausahaan Aset (%)	97	97		97		97		97		97		
				Persentase Perangkat Daerah yang Pengelolaan BMD Baik/Tertib dan Akuntabel (%)	97	97		97		97		97		97		
5	0.2	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				890.000.000		937.200.000		993.816.000		998.690.450		1.077.285.650	Badan Pendapatan Daerah
			Meningkatnya Upaya Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pendapatan	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah (%)	100	100		100		100		100		100		
			Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pelaporan	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan (%)	100	100		100		100		100		100		
			Meningkatnya penerapan elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah	Persentase Penerapan elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah (%)	100	100		100		100		100		100		
5	03		Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan				575.000.000		585.675.000		613.125.200		615.948.300		880.416.700	
5	03	02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				575.000.000		585.675.000		613.125.200		615.948.300		880.416.700	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
			Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas ASN	Persentase Profesionalitas ASN (%)	75,13	80,72		85,72		88,72		89,72		89,87		
				Persentase Kualitas Pelayanan Bidang Kepegawaian (%)	0	70		72		75		85		90		
5	04		Pendidikan dan Pelatihan				1.522.000.000		525.000.000		685.000.000		400.000.000		850.000.000	
5	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				1.522.000.000		525.000.000		685.000.000		400.000.000		850.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
			Meningkatnya Pendidikan dan Pelatihan Bagi ASN	Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal (%)	0,99	2,22		2,71		3,20		3,69		4,19		









4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah yang ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang menggambarkan target penyelenggaraan pemerintahan daerah. IKU dan IKD pada RPJMD Kabupaten Flores Timur berlaku dari tahun 2025 hingga tahun 2030, sebagaimana terlihat pada Tabel 4.3 dan 4.4 berikut.

Tabel 4.3 IKU Kab. Flores Timur Tahun 2025-2030

No	Indikator	Satuan	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	3,80	4,23	4,47	4,75	5,00	5,28
2	Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan	%	3,30	3,73	3,91	4,00	4,61	5,20
3	Laju pertumbuhan PDRB sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	3,32	3,48	3,54	3,63	3,77	4,12
4	Indeks Ekonomi Hijau Sektor Unggulan	Angka	59,84	63,23	66,62	70,01	73,41	76,80
5	Tingkat Kemiskinan	%	10,70	10,22	9,73	9,25	8,76	8,28
6	Tingkat pengangguran terbuka	%	3,36	3,34	3,32	3,30	3,28	3,26
7	Pendapatan Perkapita	Rp	25.366.015	31.833.711	38.301.408	44.769.104	51.236.800	57.704.496
8	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	66,42	66,87	67,25	67,66	68,57	69,44
9	Usia Harapan Hidup	Tahun	66,51	66,81	67,11	67,41	67,71	68,01
10	Indeks Kepuasan Pelayanan Publik	Angka	85,17 (B)	86,22 (B)	87,27 (B)	88,32 (A)	89,37 (A)	90,42 (A)
11	Ketimpangan Pendapatan (<i>Gini Ratio</i>)	Angka	0,279	0,278	0,276	0,274	0,273	0,271
12	Nilai Investasi Hilirisasi	Miliar Rp	34,40	35,08	35,79	36,50	37,23	37,98
13	Indeks Infrastruktur Dasar	Angka	57,94	57,97	58,01	58,06	58,13	58,15
14	Indeks Infrastruktur Konektivitas	Angka	67,24	67,48	67,64	67,80	67,88	67,96
15	Indeks Kesejahteraan Sosial	Angka	86,75	87,40	88,05	88,70	89,35	90,00
16	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	78,22	78,39	78,56	78,73	78,90	79,07
17	Indeks Ketangguhan Bencana	Angka	0,53	0,54	0,55	0,56	0,57	0,58
18	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	58,79 (CC)	60,98 (B)	63,17 (B)	65,36 (B)	67,55 (B)	70,02 (BB)
19	Indeks Integritas Daerah	Angka	65 (Rentan)	68 (Rentan)	72 (Rentan)	75 (Waspada)	78 (Waspada)	80 (Terjaga)
20	Indeks Keamanan dan Ketertiban	Angka	60,00	65,96	71,92	77,80	88,84	89,16

Tabel 4.4 IKD Kab Flores Timur Tahun 2025-2030

No	Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
I	Aspek Geografi dan Demografi							
1	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	69,15	69,69	70,23	70,77	71,31	71,85
2	Prevalansi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	%	14,23	13,73	13,23	12,73	12,23	11,73
3	Skor Pola Pangan Harapan	Poin	73,13	75,33	77,53	79,73	81,93	84,13
4	Konsumsi Listrik Per Kapita	kWh/kapita	213,0	241,6	270,2	298,8	327,4	356,0
5	Intensitas Energi Primer	(SBM/Rp milyar)	150	195	190	185	180	175
6	Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum	%	45,20	45,63	45,85	47,43	48,49	49,04
7	Kapasitas Air Baku	m3/detik	0,04	0,45	0,86	1,27	1,68	2,09
8	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	77,58	78,70	79,82	80,94	82,06	83,18
9	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	20,00	21,50	23,00	24,50	26,00	27,50
10	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Angka	78,22	78,39	78,56	78,73	78,90	79,07
11	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	Angka	0,30	0,31	0,32	0,33	0,34	0,35
12	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Kg/Orang	5,00	9,25	13,50	17,75	22,00	26,25
13	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	%	15,0	19,1	23,2	27,3	31,4	35,5
14	Indeks Risiko Bencana	Angka	111,58	98,69	85,8	72,91	60,02	47,13
15	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,53	0,54	0,55	0,56	0,57	0,58
16	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1	1	1	1	1	1
17	Kepadatan Penduduk	Orang/Km²	158,87	160,46	162,07	163,69	165,32	166,98
II	Aspek Kesejahteraan Masyarakat							
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	3,80	4,23	4,47	4,75	5,00	5,28
2	Tingkat Kemiskinan	%	10,70	10,22	9,73	9,25	8,76	8,28
3	PDRB Per Kapita	Rp Juta	25.366.015	31.833.711	38.301.408	44.769.104	51.236.800	57.704.496
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,36	3,34	3,32	3,30	3,28	3,26
5	Indeks Gini	Angka	0,279	0,278	0,276	0,274	0,273	0,271
6	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	66,42	66,87	67,25	67,66	68,57	69,44
7	Usia Harapan Hidup	Tahun	66,51	66,81	67,11	67,41	67,71	68,01
8	Prevalensi Stunting	%	29,3	28,3	27,2	26,2	25,3	24,3
9	Angka Kematian Ibu	/100.000 KLH	74	71	68	65	62	59
10	Angka Kematian Bayi	/1.000 KLH	10,0	9,5	9,0	8,5	8,0	7,5
11	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus TBC	%	40	44	48	52	56	60
12	Angka keberhasilan pengobatan TBC	%	90	90	90	90	90	90
13	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,07	8,08	8,09	8,10	8,11	8,11
14	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,23	13,5	13,78	14,08	14,38	14,68

No	Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
15	Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi	%	9,85	9,90	9,95	10,01	10,06	10,11
16	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi	%	20,00	20,75	21,5	22,25	23	23,75
17	Angka Literasi/Numerasi	Angka	65,76	67,65	69,54	71,43	73,32	75,20
	- Literasi SD							
	- Literasi SMP							
	- Numerasi SD							
	- Numerasi SMP							
18	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Angka	42,33	50,83	59,33	67,83	76,33	85,00
19	Indeks Literasi Digital	Angka	3,00	3,20	3,45	3,65	3,80	4,00
20	Indeks Masyarakat Digital	Angka	45,00	47,50	52,25	60,00	64,25	70,00
21	Cakupan perpustakaan yang berstandar SNP	%	42,70	47,70	52,70	57,70	62,70	67,70
22	Cakupan Perangkat Daerah yang menerapkan wajib baca	%	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00
23	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	%	37,70	39,43	41,16	42,89	44,62	46,35
24	Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	%	98,50	98,65	98,80	98,95	99,10	99,25
25	Cakupan PHBS	%	86,17	86,93	87,70	88,47	89,24	90,00
26	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal	%	0,94	1,08	1,22	1,37	1,51	1,65
27	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Angka	81,43	82,11	82,79	83,47	84,15	84,83
28	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Angka	58,19	62,55	66,91	71,27	75,63	80,00
29	Indeks Perlindungan Anak	Angka	59,90	60,91	61,92	62,93	63,94	65,00
30	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Angka	60,0	61,0	63,0	64,0	66,0	67,0
31	Indeks Ketimpangan Gender	Angka	0,66	0,60	0,59	0,59	0,58	0,58
32	Indeks Pembangunan Gender	Angka	94,38	96,14	97,15	98,12	99,4	100
33	Indeks Pembangunan Pemuda	Angka	76,00	76,83	77,66	78,49	79,32	80,15
34	Cakupan Organisasi Pemuda yang Aktif	%	100	100	100	100	100	100
35	Cakupan Wirausaha Muda	%	1,59	2,47	3,29	4,12	4,95	5,00
III	Aspek Daya Saing Daerah							
1	Angka Ketergantungan	%	0,549	0,549	0,548	0,548	0,547	0,547
2	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	0,96	1,03	1,10	1,17	1,24	1,31
3	Nilai Tukar Petani	Nilai	98,63	99,31	99,98	100,65	101,32	101,99
4	Nilai Tukar Nelayan	Nilai	90,49	91,39	92,29	93,19	94,09	94,99
5	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	%	0,10	0,17	0,24	0,31	0,38	0,45
6	Konsumsi ikan	Ton/Tahun	29,77	30,27	30,76	31,24	31,72	32,19
7	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	Orang	478	490	502	514	526	538
8	Tingkat pertumbuhan kunjungan wisata	%	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

No	Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
9	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Kabupaten	%	79,91	81,01	81,98	82,62	84,31	84,51
10	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten	%	0,99	1,00	1,00	1,00	1,01	1,01
11	Rasio Kewirausahaan	%	0,22	0,26	0,3	0,34	0,38	0,42
12	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	0,08	0,10	0,12	0,14	0,16	0,18
13	Return on Aset (ROA) BUMD	%	2,94	2,96	2,97	2,99	3,00	3,02
14	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	75,35	76,44	77,53	78,62	79,71	80,8
15	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	65,18	68,43	68,93	69,43	69,93	70,00
16	Indeks Inovasi Daerah	Angka	45,50	46,66	47,91	49,76	50,54	54,04
17	Peringkat Inovasi Daerah	Peringkat	200	195	190	185	180	175
18	Indeks Ekonomi Hijau	Angka	59,84	63,23	66,62	70,01	73,41	76,8
19	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	%	0,0016	2,26	4,52	6,78	9,04	11,30
20	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Angka	7,20	7,44	7,68	7,92	8,16	8,40
21	Pembentukan Modal Tetap Bruto	(% PDRB)	42,91	43,09	43,27	43,45	43,63	43,81
22	Ekspor Barang dan Jasa	(% PDRB)	0,40	0,49	0,58	0,67	0,76	0,85
23	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Kabupaten	Nilai	14,39	14,39	14,30	13,55	13,15	12,45
24	Indeks Infrastruktur/Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Angka	78,51	79,58	80,66	81,73	82,81	83,88
25	Indeks Konektivitas	Angka	1,89	1,97	2,04	2,12	2,19	2,27
26	Indeks Ketimpangan Wilayah	Angka	3,41	3,35	3,29	3,23	3,17	3,11
27	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	65,02	65,20	65,38	65,73	66,07	66,60
28	Indeks Desa	Angka	76,23	76,98	77,73	78,48	79,23	80,00
29	Persentase Desa Mandiri	%	24,85	34,85	44,85	54,85	64,85	74,85
30	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,05	0,17	0,29	0,41	0,53	0,65
31	Tingkat Inflasi	%	3,13	3,11	3,09	3,07	3,05	3,03
32	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB	%	24,41	25,83	27,25	28,67	30,09	31,51
33	Total Kredit/PDRB	%	34,07	34,87	35,67	36,47	37,27	38,07
IV	Aspek Pelayanan Umum							
1	Indeks Reformasi Hukum	Angka	87,5	88,5	88,7	88,8	89	90
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Angka	2,16	2,20	2,50	2,70	2,80	3,00
3	Indeks Pelayanan Publik	Angka	2,59 ©	2,69 ©	2,89 ©	2,99 (C)	3,09 (B -)	3,19 (B-)
4	Indeks Integritas Daerah	Angka	65 (Rentan)	68 (Rentan)	72 (Rentan)	75 (Waspada)	78 (Waspada)	80 (Terjaga)
5	Indeks Persepsi Korupsi	Angka	3,79	3,80	3,82	3,85	3,88	3,90
6	Persentase Penegakan Perda	%	80	90	90	90	90	90
7	Tingkat kesesuaian produk hukum daerah dengan produk hukum nasional	%	25	27,5	30	32,5	35	37,5
8	Persentase Capaian Aksi HAM	%	95	98	100	100	100	100

No	Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
9	Indeks Demokrasi Daerah	Angka	78,02	78,30	78,52	78,77	79,02	79,27
10	Indeks Rasa Aman	Angka	75,79	76,07	76,35	76,63	76,91	77,20
11	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	%	78	80	82	83	85	90
12	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban	Angka	50,20	52,19	54,18	56,17	60,15	61,50
13	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat	%	0,6	0,65	0,67	0,69	0,70	0,70
14	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3	%	80	90	90	90	90	90
15	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	%	90	90	90	90	90	90
16	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3,08	3,15	3,24	3,38	3,46	3,55
INDIKATOR KINERJA KUNCI								
I	Urusan Wajib Pelayanan Dasar							
A	Pendidikan							
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	94,01	95,21	96,41	97,61	98,81	100
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	98,71	98,96	99,21	99,46	99,71	100
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	95,83	96,66	97,49	98,32	99,15	100
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	30	30	30	30	30	30
5	Angka Partispasi Murni (APM) Anak Usia Dini (PAUD)	%	65,75	70,6	75,45	80,3	85,15	90
6	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	%	95,70	96,56	97,42	98,28	99,14	100
7	APM SD/MI/Paket A	%	88,16	90,52	92,88	95,24	97,6	100
8	APM SMP/MTs/Paket B	%	84,62	87,7	90,78	93,86	96,94	100
9	APK SD/MI/Paket A	%	100	100	100	100	100	100
10	APK SMP/MTs/Paket B	%	100	100	100	100	100	100
11	Indeks Pendidikan	Angka	0,777	0,787	0,797	0,807	0,817	0,827
B	Kesehatan							
1	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	Rasio	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4
2	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang Terakreditasi	%	100	100	100	100	100	100
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100	100	100	100	100	100
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	100	100	100	100	100	100

No	Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100	100	100	100	100	100
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100
8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100
11	Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100
15	Angka kelangsungan hidup bayi	Angka/1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
16	Angka Kematian Balita per1000 kelahiran hidup	Angka/1000	13,80	12,65	11,50	10,35	9,20	8,00
17	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	Angka/1000	9,07	8,27	7,47	6,67	5,87	5,00
18	Rasio posyandu per satuan balita	Rasio	36,07	38,85	41,63	44,41	47,19	50,00
19	Persentase Posyandu Purnama+Mandiri	%	90	90	90	90	90	90
20	Prevalensi Tuberkulosis	%	110	105	100	95	90	85
21	Cakupan kunjungan bayi	%	100	100	100	100	100	100
22	Cakupan puskesmas	%	115,7	115,7	115,7	115,7	115,7	115,7
23	Cakupan puskesmas pembantu	%	23,5	28,5	33,5	38,5	43,5	48,5
24	Cakupan Pemberian Tablet tambah darah pada remaja putri	%	100	100	100	100	100	100
C	Pekerjaan dan Penataan Ruang							
1	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di wilayah sungai kewenangan Kabupaten/ Kota	%	0,0034	0,0028	0,0038	0,0038	0,0050	0,0056

No	Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten/Kota	%	0,0210	0,0105	0,0140	0,0210	0,0245	0,0245
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/ Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	14,852	25,353	26,658	27,852	28,761	29,552
4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	-	37,83	39	40,17	41,34	42,52
5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	20,0	21,5	23,0	24,5	26,0	27,5
6	Mengukur rasio kepatuhan IMB kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	100
7	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	%	50,15	50,15	54,55	56,75	58,95	61,14
8	Rasio tenaga operator/ teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	7,69	7,69	15,38	23,08	30,77	38,46
9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	100	100	100	100	100	100
D	Perumahan Rakyat dan Permukiman							
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	%	97,74	100	-	-	-	-
2	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	%	0,13	3,37	5,63	21,73	16,46	49,99
3	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	0,08	0,04	0,32	0,35	0,34	0,53
4	Persentase Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	2,15	2,58	2,58	3,00	3,43	3,86
5	Rasio rumah layak huni	Rasio	65,02	65,20	65,38	65,73	66,07	66,60
6	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	%	2,15	2,58	2,58	3,00	3,43	3,86
E	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat							
1	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	80	90	90	90	90	90
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	80	90	90	90	90	90

No	Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	79,71	80,06	80,45	80,79	81,14	81,48
4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	77,68	77,73	77,78	77,83	77,88	77,93
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	100	100	100	100
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100	100	100	100
7	Waktu tanggap (<i>response time</i>) penanganan kebakaran	Menit	< 15 menit	< 15 menit	< 15 menit	< 15 menit	< 15 menit	< 15 menit
F	Sosial							
1	Tingkat Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	5,68	5,86	6,04	6,23	6,41	6,59
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	100
3	Cakupan PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	4,55	4,84	5,13	5,42	5,71	6,00
4	Cakupan PMKS yang tertangani	%	10,44	10,31	10,21	10,11	10,00	9,00
5	Cakupan korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100	100	100	100	100	100
6	Cakupan korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan Sarana prasarana tanggap darurat lengkap	%	100	100	100	100	100	100
7	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100	100	100	100	100	100
8	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100	100	100	100	100	100
9	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100	100	100	100	100	100
II	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar							
A	Tenaga Kerja							
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	9,33	11,18	13,22	15,14	16,96	18,67

No	Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Juta Rp/Orang	2,32	2,45	2,57	2,70	2,83	2,97
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	27,53	32,60	36,23	43,47	57,97	72,46
5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	%	21,00	23,30	32,70	42,05	46,07	56,10
6	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	7,47	7,55	7,70	7,90	8,00	8,20
7	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	%	20	25	30	35	40	45
8	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	%	25	30	35	40	45	50
9	Rasio lulusan S1/S2/S3 (per 10.000 jiwa)	Rasio	695,9	716,6	737,3	758	778,7	800
B Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	0,013	0,014	0,015	0,016	0,017	0,018
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	%	100	100	100	100	100	100
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	/ 100.000 perempuan	61,26	57,10	53,46	49,26	45,15	41,84
4	Persentase partisipasi perempuan disektor publik	%	74,04	75,23	76,42	77,61	78,90	80,00
5	Rasio KDRT	Rasio	0,015	0,015	0,014	0,013	0,012	0,011
C Pangan								
1	Persentase Cadangan Pangan	%	10,77	30,21	47,62	65,03	82,44	100,00
2	Persentase PPH (Ketersediaan Pangan) dan PPH Konsumsi	%	73,13	75,33	77,53	79,73	81,93	84,13
D Pertanian								
1	Tersedianya tanah untuk masyarakat	%	10,00	13,33	16,67	23,33	30,00	36,67
2	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	16,67	27,78	33,33	44,44	55,56	83,33
E Lingkungan Hidup								
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	Indeks	78,22	78,39	78,56	78,73	78,90	79,07
2	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota	%	0,49	0,49	0,50	0,49	0,49	0,49
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	%	11,57	13,08	15,06	17,73	21,55	27,47

No	Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
F	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
1	Tingkat perekaman KTP Elektronik	%	99,4	100	100	100	100	100
2	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	25	50	60	70	80	90
3	Anak Usia 0-59 Bulan Mendapatkan Akte Kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA)	%	25	100	100	100	100	100
4	Kepemilikan akta kelahiran	%	88	90	100	100	100	100
5	Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	%	25	30	35	40	45	50
G	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
1	Cakupan desa tertib administrasi desa	%	44,54	53,28	62,01	70,74	79,48	88,21
2	Persentase PKK aktif	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Persentase pengentasan desa tertinggal	%	0	0	0	0	0	0
4	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	%	81,82	77,78	71,43	60,00	33,33	100,00
H	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							
1	TFR (Angka Kelahiran Total)	Rasio	2,49	2,48	2,47	2,46	2,45	2,44
2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (<i>Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR</i>)	%	50,92	52,72	54,52	56,32	58,12	60
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi	%	23,73	22,49	21,87	21,25	20,63	20,00
4	Rata-rata jumlah anak per keluarga		2,99	2,98	2,97	2,96	2,95	2,94
5	Calon pengantin mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan stunting	%	100	100	100	100	100	100
6	Ratio Akseptor KB	Rasio	52,6	56,08	59,56	63,04	66,52	70
I	Perhubungan							
1	Indeks konektivitas	Indeks	67,241	67,480	67,639	67,798	67,877	67,957
J	Komunikasi dan Informatika							
1	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	%	70	76	84	90	96	100
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	100	100	100	100	100	100
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran Informasi Publik, mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%	68	70	75	80	90	100
4	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	%	3	5	7	9	11	13

No	Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5	Cakupan Layanan Telekomunikasi	%	95,6	96,4	97,6	98,4	99,2	100
K	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah							
1	Jumlah Koperasi yang berkualitas	Koperasi	284	287	290	293	296	299
2	Presentase koperasi aktif	%	30,00	69,72	70,41	71,10	71,79	72,48
3	Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	%	14	16	18	20	22	24
4	Presentase usaha mikro dan kecil	%	31,69	31,6	31,67	31,73	31,79	31,85
L	Penanaman Modal							
1	Jumlah investor brskala nasional	Investor	89	91	93	95	97	99
2	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/ Kota	%	0,01	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
3	Nilai investasi kabupaten	Miliar Rp	80,00	81,60	83,23	84,89	86,59	86,33
4	Rasio daya serap tenaga kerja	Rasio	22,27	23,69	25,24	26,93	28,76	30,76
M	Kepemudaan dan Olahraga							
1	Peningkatan Prestasi Olahraga	%	21,05	26,32	31,58	36,84	42,11	47,37
2	Cakupan Pelatih Bersertifikasi	%	74,13	75,30	76,47	77,64	78,81	80,00
3	Cakupan Pembinaan Atlet Muda	%	10,53	15,79	21,05	26,32	31,57	36,84
4	Jumlah Atlet Berprestasi	Orang	1	2	3	4	5	6
N	Statistik							
1	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	-	100	100	100	100	100
2	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	-	100	100	100	100	100
O	Persandian							
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	90	90	90	90	90	90
P	Kebudayaan							
1	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	%	72	72	72	72	72	72
2	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Unit	82	92	102	112	122	132
Q	Perpustakaan							
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Angka	57,41	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	42,33	50,83	59,33	67,83	76,33	85,00
3	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Orang	29.676	59.352	89.028	118.704	148.380	178.056
4	Koleksi buku yang tersedia diperpustakaan daerah	Jumlah	22.052	29.337	36.622	43.907	51.192	58.477
5	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	Rasio /100.000	0,0016	0,0019	0,0022	0,0025	0,0028	0,0031

No	Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
R	Kearsipan							
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional Pasal 40 dan Pasal 59 UU No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	%	6,94	8,94	10,94	12,94	14,94	16,94
2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	6,94	8,94	10,94	12,94	14,94	16,94
3	Cakupan Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	6,94	8,94	10,94	12,94	14,94	16,94
III	Urusan Pilihan							
A	Kelautan dan Perikanan							
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota	Ton	15.001,2	15.001,4	15.251,6	15.301,8	15.352,0	15.402,0
2	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	Ton	15.000	15.000	15.250	15.300	15.350	15.400
3	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial	Rasio	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
B	Pariwisata							
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per Kebangsaan	%	0,16	0,24	0,31	0,38	0,45	0,52
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	%	90,14	91,58	93,02	94,45	95,68	97,33
3	Tingkat hunian akomodasi	%	30,31	33,02	35,73	38,44	41,15	43,86
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB-ADHB	%	0,1	0,17	0,24	0,31	0,38	0,45
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	0,09	0,09	0,10	0,10	0,11	0,11
C	Pertanian							
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Rata-rata Ton Per Hektar Per Tahun	4,38	4,82	5,3	5,83	6,41	7,05
2	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya perhektar	Ton/hektar	4,5	5,2	5,5	5,8	6,2	6,5
3	Rasio penyuluh perdesa	Rasio	0,48	0,5	0,52	0,54	0,56	0,58
4	Produktivitas sektor perkebunan	%	2,01	2,15	2,2	2,3	2,4	2,5
5	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	%	158.700	0	0	0	0	0

No	Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
D	Perdagangan							
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan IUPP/ SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/ IUTS/SIUP Toko Swalayan	%	16,63	33,27	49,90	66,53	83,16	99,39
2	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	3,53	4,53	5,53	6,53	7,53	8,53
E	Perindustrian							
1	Pertambahan Jumlah Industri kecil dan menengah di Kabupaten/kota	%	2,92	3,31	3,66	3,97	4,24	4,48
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	%	10	20	30	40	50	60
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	10,89	19,02	27,15	35,28	43,41	51,54
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	16,26	24,39	32,52	40,65	48,78	56,91
5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota	%	16,26	24,39	32,52	40,65	48,78	56,91
6	Indeks informasi industri secara lengkap dan terkini	Angka	0,73	20,58	40,44	60,29	80,15	100
IV	Unsur Penunjang							
A	Perencanaan dan Keuangan							
1	Persentase keterlibatan masyarakat dalam musrembang kabupaten	%	100	100	100	100	100	100
2	Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam RKPD	%	36,17	37,53	38,89	40,25	41,61	42,97
3	Persentase usulan program/ kegiatan yang saling mendukung antar sektor yang terakomodir dalam dokumen RKPD	%	35,35	36,71	38,07	39,43	40,79	42,15
4	Persentase anggaran untuk kegiatan yang mendukung output lintas sektor	%	22,47	26,47	30,47	34,47	38,47	42,47
5	Persentase program terintegrasi antar OPD	%	35,77	39,84	43,90	47,97	52,03	56,10

No	Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6	Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD	%	100	100	100	100	100	100
7	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	%	15,6	18,7	20	22	24	25
8	Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	%	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
9	Rasio PAD	%	5,06	4,84	4,66	4,57	4,49	4,41
10	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (Dikurangi Transfer Expenditures)	%	81,39	81,39	81,39	81,39	81,39	81,39
11	Opini Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
12	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	-5,53	-5,53	-5,53	-5,53	-3,53	-2,53
13	Revenue mobilization: Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD	%	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89
14	Assets Management	%	96,19	96,24	96,29	96,34	96,38	96,42
15	Cash Management: Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya	%	5,51	4,51	4,01	3,01	2,80	2,50
16	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	%	100	100	100	100	100	100
17	Persentase SILPA	%	5,02	4,02	3,50	3,00	2,50	2,00
18	Persentase SILPA terhadap APBD	%	4,50	3,50	3,00	2,50	2,00	1,50
19	Persentase belanja pendidikan (20%)	%	25	25	25	25	25	25
20	Indeks Akses Keuangan Daerah	Angka	4,45	4,47	4,48	4,49	4,50	4,51
B	Pengawasan							
1	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Angka	2	3	3	3	4	4
2	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah	Angka	3	3	3	3	4	4
3	Persentase Penurunan Penyimpangan Pengelolaan Keuangan	%	51,02	56,12	73,65	77,5	80,25	85,5
4	Persentase tindak lanjut temuan	%	80,19	82,19	84,19	86,19	88,19	90,19
C	Pengadaan - Sekretariat Daerah							
1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	%	4-5	3-4	2-3	1-2	1-2	0-1
2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	27,78	28,00	26,98	26,67	26,92	26,37
3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	14,43	23,06	23,77	22,76	23,77	23,77

No	Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	%	100	100	100	100	100	100
D	Kepegawaian							
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	76	77	78	79	80	85
2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	23	24	25	26	27	28
3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	40	45	50	55	60	65
4	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	0	2,22	2,71	3,20	3,69	4,19

BAB V

PENUTUP



Conclusion





PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah daerah periode lima tahunan pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2025-2045 yang menekankan pada “Perkuatan Fondasi Transformasi”. RPJMD ini berisi penjabaran visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode Tahun 2025-2030 yang penyusunan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2025-2045, Rancangan Akhir RTRW Kabupaten Flores Timur Tahun 2025-2045, RPJMN Tahun 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029. Dengan demikian RPJMD harus menjadi acuan bersama dalam menyatukan langkah, memperkuat sinergitas dan kolaborasi serta komitmen untuk “Lompatan Produktivitas” kemajuan Flores Timur lima tahun ke depan.

Tahapan dan mekanisme penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2025-2029 memperhatikan berbagai kebijakan pembangunan nasional dan kaidah perencanaan yang diantaranya diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Hal ini sebagai upaya untuk menciptakan sinergitas dan keselarasan perencanaan pembangunan daerah, regional dan nasional untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

RPJMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2025-2029 merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) setiap tahun dalam kurun waktu lima tahun ke depan, serta pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) setiap tahun. Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perlu adanya kaidah pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, serta pedoman transisi.

5.1 Kaidah Pelaksanaan

RPJMD harus menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan baik pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pelaksanaan strategi *Lompatan Jauh* Pembangunan Flores Timur selama periode Tahun 2025-2029 sesuai peran dan fungsi masing-masing melalui kaidah pelaksanaan.

Penetapan kaidah pelaksanaan akan memberikan pedoman sekaligus arahan yang jelas bagi seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Flores Timur dalam pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2025-2029 kepada masyarakat dan dunia usaha.
- 2) RPJMD menjadi dasar dan acuan dalam perumusan dan pengambilan kebijakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik.
- 3) Perangkat Daerah bersama masyarakat dan dunia usaha berkewajiban melaksanakan strategi, arah kebijakan dan program-program dalam RPJMD secara kolaborasi dengan memanfaatkan semua potensi dan kekuatan daerah dalam rangka mewujudkan visi pembangunan daerah yang telah ditetapkan.
- 4) Perangkat Daerah berkewajiban menyusun RENSTRA PD dengan berpedoman pada RPJMD yang memuat tujuan dan sasaran, serta strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.
- 5) Perangkat Daerah berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMD dan RENSTRA PD.
- 6) Penyusunan RKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2026 sampai dengan Tahun 2030 berpedoman pada RPJMD kabupaten Flores Timur Tahun 2025-2029 dengan menjaga konsistensi antara RPJMD dan RKPD.

5.2 Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan

Dalam rangka mengawal implementasi RPJMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2025-2029 dilaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan RPJMD. Pada tahapan perencanaan, pengendalian dan evaluasi *ex-ante* dilakukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan memastikan kecukupan desain kebijakan. Pengendalian dan evaluasi perencanaan mencakup penelaahan konsistensi dokumen perencanaan, pemenuhan kerangka logis, kesiapan pelaksanaan kebijakan, dan identifikasi risiko, dengan memperhatikan kedudukan RPJMD sebagai (1) instrumen operasionalisasi dari RPJPD; (2) pedoman bagi penyusunan RENSTRA PD dan RKPD; dan (3) pedoman perumusan rencana pembangunan sektoral daerah seperti rencana induk/ *masterplan/grand design* atau sebutan lainnya.

Sementara pada tahap pelaksanaan, pengendalian dilakukan untuk memastikan pelaksanaan intervensi dan ketercapaian target pembangunan yang telah ditetapkan. Pengendalian dilakukan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi. Pemantauan dapat dilakukan sepanjang periode pelaksanaan, sedangkan evaluasi dilakukan pada saat periode pelaksanaan rencana (secara berkala) dan tahun terakhir periode pelaksanaan rencana pembangunan. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan

RPJMD menjadi penekanan dalam mengawal pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029 secara intensif, sehingga diperlukan beberapa penegasan, sebagai berikut:

- 1) Pengendalian pada tahap pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029 dilakukan untuk mengawal ketercapaian sasaran pembangunan daerah dengan memastikan pelaksanaan sesuai dengan rencana, termasuk rekomendasi penyesuaian kebijakan.
- 2) Pengendalian tahap pelaksanaan dilakukan secara menyeluruh baik sektoral dan daerah dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja pembangunan daerah.
- 3) Pengendalian pelaksanaan RPJMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2025-2029 dikoordinasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA), yang meliputi pengendalian terhadap pelaksanaan program prioritas daerah dan pencapaian target tujuan dan sasaran RPJMD, sehingga dapat menghasilkan tindakan konstruktif (penyesuaian operasional tahunan) dan tindak korektif (penyesuaian kebijakan untuk memastikan target sasaran pembangunan pada akhir periode RPJMD) dapat tercapai.
- 4) Perangkat Daerah berkewajiban melakukan pengendalian dan evaluasi secara rutin dan berkala terhadap pelaksanaan RENSTRA PD melalui pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RENJA PD.
- 5) BAPPERIDA melakukan evaluasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2025-2029 mencakup dua hal, yaitu (a) evaluasi tahunan melalui evaluasi pelaksanaan RPKD dan evaluasi kinerja PD serta evaluasi pelaksanaan program prioritas dalam kerangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah; dan (b) evaluasi paruh waktu yang akan memberikan *feedback* bagi penyesuaian kebijakan dalam periode RPJMD.
- 6) Pemerintah Daerah melalui BAPPERIDA melakukan evaluasi akhir RPJMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2025-2029 untuk menilai pencapaian sasaran pembangunan daerah serta bertujuan untuk mengidentifikasi kendala dan hambatan dalam pelaksanaan prioritas pembangunan daerah selama periode lima tahun.
- 7) Seluruh kegiatan pengendalian dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2025-2029 dilakukan dengan mengedepankan koordinasi terpadu yang melibatkan seluruh *stakeholders*.

5.3 Pedoman Transisi

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa kedudukan RPJMD Tahun 2025-2029 sangat strategis sebagai tahun pertama pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2045, maka dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dengan periode RPJMD berikutnya, perlu ditetapkan pedoman transisi, yakni sebagai berikut:

- 1) Tahapan terakhir RPJMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2025-2029 (yakni Tahun 2030) menjadi pedoman dalam penyusunan RKPd Kabupaten Flores Timur Tahun 2030 sebagai tahun pertama di bawah kepemimpinan Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih periode berikutnya, dengan tetap memperhatikan kebijakan peraturan perundang-undangan.

- 2) Penyusunan RPJMD Kabupaten Flores Timur periode berikutnya dan RKPD 2031 dilakukan secara simultan dan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2025-2045, hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029 dan memperhatikan kebijakan pembangunan nasional serta tetap memperhatikan prinsip pembangunan yang berkelanjutan.
- 3) RPJMD menjadi dasar dan acuan untuk penyusunan perencanaan pembangunan yang menjamin terwujudnya sinergis, keterpaduan dan sinkronisasi antara arah pembangunan nasional, regional dan daerah.

5.4 Perubahan RPJMD

RPJMD Tahun 2025-2029 dapat dilakukan perubahan apabila:

- 1) Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksisting.
- 2) Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara terget dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan.
- 3) Terjadinya perubahan mendasar.
- 4) Perubahan RPJMD Tahun 2025-2029 dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi, dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BUPATI FLORES TIMUR

TTD

ANTONIUS DONI DIHEN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



YORDANUS HOGA DATON

PEMBINA TK. I

NIP. 19780426 200212 1 007



FLORES TIMUR PRODUKTIF DAN INOVATIF



**#bangga
melayani
bangsa**

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH